

MEMPERKUAT LANDASAN KEBERLANJUTAN UNTUK MEMPERCEPAT PERTUMBUHAN

STRENGTHENING SUSTAINABILITY FOUNDATION TO ACCELERATE GROWTH

LAPORAN KEBERLANJUTAN **2020**
SUSTAINABILITY REPORT



PENJELASAN TEMA

Theme Explanation

Memperkuat Landasan Keberlanjutan untuk Mempercepat Pertumbuhan

Strengthening Sustainability Foundation to Accelerate Growth



Sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit yang telah memiliki pengalaman lebih dari 50 tahun, PT Jamkrindo telah membangun fondasi yang kuat untuk memastikan perusahaan dikelola dengan mengikuti prinsip-prinsip tata kelola yang baik. Perusahaan juga selalu berupaya memperkuat fondasi dan menjalankan prinsip-prinsip keberlanjutan dalam mengakselerasi pertumbuhan kinerja. Perusahaan menyadari bahwa komitmen untuk memperkuat fondasi keberlanjutan dapat memaksimalkan kontribusi perusahaan dalam pencapaian Target Pembangunan Berkelanjutan.

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan tantangan yang sangat besar bagi Perusahaan. Pada periode ini isu keberlanjutan menjadi semakin penting untuk strategi bisnis yang baik. Pertimbangan terkait dengan isu menjadi semakin kritis karena meluasnya gangguan ekonomi dan sosial yang disebabkan oleh pandemi COVID-19.

Di tengah kondisi yang penuh ketidakpastian ini, pada tahun 2020, Jamkrindo berusaha meningkatkan strategi keberlanjutan untuk dapat memperkuat landasan keberlanjutan untuk mempercepat pertumbuhan. Kami bertekad untuk dapat memenuhi kebutuhan mitra, karyawan, pemegang saham, dan komunitas tempat kami beroperasi. Kami yakin, dengan tekad dan upaya-upaya yang kami lakukan dapat memperkuat fondasi keberlanjutan perusahaan yang pada akhirnya akan mengakselerasi kinerja dan pertumbuhan perusahaan di masa mendatang.

As a Credit Guarantee Company with more than 50 years of experience, PT Jamkrindo has built a strong foundation to ensure the company is managed by following the principles of good governance. The company also always strives to strengthen the foundation and implement the principles of sustainability in accelerating performance growth. The company realizes that a commitment to strengthen the foundation of sustainability can maximize the company's contribution to achieving the Sustainable Development Targets.

The COVID-19 pandemic that occurred in 2020 presents a very big challenge for the Company. During this period the issue of sustainability became increasingly important for a sound business strategy. Considerations related to the issue have become increasingly critical due to the widespread economic and social disruption caused by the COVID-19 pandemic.

In the midst of these uncertain conditions, in 2020, Jamkrindo is trying to improve its sustainability strategy to strengthen the foundation of sustainability to accelerate growth. We are committed to meeting the needs of our clients, employees, shareholders and the communities in which we operate. We believe that with the determination and efforts that we make, we can strengthen the foundation of the company's sustainability, which in turn will accelerate the company's performance and growth in the future.



KESINAMBUNGAN TEMA

Theme Continuity

2019



TRIPLE BOTTOM LINE (PROFIT, PEOPLE, PLANET)

Triple Bottom Line (Profit, People, Planet)

Seiring dengan meningkatnya intensitas persaingan dan ekspektasi seluruh pemangku kepentingan, maka perusahaan yang tergolong hebat harus memiliki tiga pilar transformasi yaitu *Adaptability*, *Systemic Resilience*, dan *Sustainability*. Kesuksesan perusahaan tidak hanya kemampuan untuk memenuhi kebutuhan pengguna jasa dan masyarakat, namun juga tidak menyisakan persoalan bagi lingkungan dimana perusahaan beroperasi termasuk masyarakat sekitar. Pemilihan judul SR mencerminkan kesadaran, komitmen, serta keyakinan manajemen dan seluruh insan Perum Jamkrindo bahwa keunggulan daya saing ke depan sangat ditentukan sejauh mana perusahaan yang memiliki keseimbangan investasi baik terhadap aspek keuangan (*Profit*), SDM dan lingkungan sosial (*People*) serta kelestarian alam sekitar (*Planet*). Pemilihan tema juga mencerminkan kecermatan manajemen perusahaan untuk menemukan ekspektasi dan kebutuhan sosial dan masyarakat sebagai peluang bagi perusahaan untuk tumbuh dan berkembang sesuai ekspektasi *shareholders* dan *stakeholders*.

Along with the increased competition and stakeholders' expectations, great companies must have three pillars of transformation, namely Adaptability, Systemic Resilience, and Sustainability. The Company's success is the ability to meet the needs of service users and the society, while not leaving problems for the environment in which the Company operates, including the surrounding community. The selection of the SR title reflects the awareness, commitment, and belief of management and all Perum Jamkrindo personnel that the competitive advantage in the future will be determined by the extent to which the Company has a balance of investment both in the financial aspects (Profit), HR and the social environment (People), as well as the preservation of the surrounding nature (Planet). The theme selection also reflects the Company's careful management to identify social and community expectations and needs as an opportunity for the Company to grow and develop according to the expectations of shareholders and stakeholders.

2018



BERSINERGI MENGUATKAN EKONOMI NEGERI

Synergy to Empower the Nation's Economy

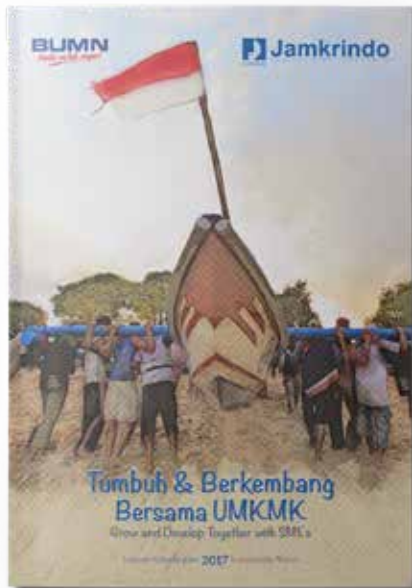
Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) memiliki peran penting dan strategis dalam pembangunan ekonomi Indonesia. Saat Indonesia dihantam badai krisis moneter, mereka tetap mampu bertahan. Walau terbukti tangguh, namun apabila dilihat dari sisi permodalan, kondisi UMKMK masih cukup memprihatinkan. Sebab itu, upaya untuk mempermudah pelaku UMKMK mendapatkan akses keuangan dan modal melalui kredit perbankan perlu mendapat dukungan dari semua pihak.

Perum Jamkrindo sebagai Badan Usaha Milik Negara berkomitmen untuk memberikan penjaminan kredit bagi pelaku UMKMK. Tak hanya memberikan penjaminan kredit, Perusahaan juga memberikan pendampingan sehingga UMKMK bisa naik kelas dan terus bertumbuh dengan skala yang lebih besar. Melalui sinergi ini, Perum Jamkrindo turut aktif dalam upaya menggerakkan dan menguatkan perekonomian negeri.

Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs & C) have an important and strategic role in Indonesia's economic development. When Indonesia was hit by a monetary crisis, they were still able to survive. Although proven to be strong, but when viewed in terms of capital, the condition of MSMEs is still quite alarming. Therefore, efforts to facilitate MSMEs & C to gain financial and capital access through bank loans need to be supported by all parties.

Perum Jamkrindo as a State-Owned Enterprise is committed to providing credit guarantees for MSMEs entrepreneurs. Not only providing credit guarantees, but the Company also provides assistance so that MSMEs can level up and continue to grow on a larger scale. Through this synergy, Perum Jamkrindo is active in efforts to mobilize and strengthen the domestic economy.

2017



TUMBUH & BERKEMBANG BERSAMA UMKMK *Grow and Develop Together with SMEs*

Perum Jamkrindo mengemban misi untuk mendukung kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dengan adanya penjaminan, maka UMKM dan Koperasi tetap dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan.

Perum Jamkrindo terus berupaya untuk meningkatkan kualitas layanan dan produk penjaminan bagi UMKM dan Koperasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan. Perum Jamkrindo ingin terus tumbuh dan berkembang bersama UMKM dan berkontribusi dalam pembangunan nasional.

Perum Jamkrindo has a mission to support Government policies and programs in the field of economy and national development, especially on Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (UMKM and Koperasi). With the existence of guarantee, MSMEs and Cooperatives can still enjoy banking credit, even though some of the requirements set by banks cannot be met.

Perum Jamkrindo continuously strives to improve the quality of service and product guarantee for MSMEs and Cooperatives to encourage the growth of people based economy. Perum Jamkrindo wants to grow and develop together with UMKM and contribute to national development.

2016



KERJA NYATA BERSAMA UMKMK, MEMAJUKAN EKONOMI KERAKYATAN *Concrete Work Together with MSMEs & Cooperatives, to Driving the People Based Economy Forward*

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) hadir dan terfokus pada kegiatan penjaminan kredit untuk mendukung pengembangan kegiatan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK), yang berperan sangat penting dalam menggerakkan ekonomi kerakyatan. Penjaminan perlu diberikan karena banyak UMKMK yang mengalami kesulitan mendapatkan tambahan modal. Walau mempunyai prospek usaha yang bagus, namun banyak di antara mereka yang tidak dapat memenuhi persyaratan yang ditetapkan bank.

Dengan adanya penjaminan, maka UMKMK tetap dapat menikmati kredit perbankan, walaupun tidak dapat memenuhi sebagian dari persyaratan yang ditetapkan perbankan. Kerja nyata itu berbuah manis. Sejalan dengan UMKMK yang terus berkembang dan menggerakkan ekonomi kerakyatan, kinerja Perum Jamkrindo pun mencatatkan kinerja positif dari tahun ke tahun.

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Perum Jamkrindo) is present and focus on credit guarantee activities to support the development of Micro, Small, Medium and Cooperative Enterprise (MSMEs & Cooperatives) activities, which play an important role in driving the people's economy. Guarantee is a necessity to be given because many MSMEs & Cooperatives are having difficulty getting additional capital. Despite having good business prospects, many of them are unable to meet the requirements set by the bank.

With the guarantee, MSMEs & Cooperatives can still utilize banking credit, even though it cannot meet some of the requirements set by banks. Concrete work generates satisfaction outcome. In line with MSMEs & Cooperatives continuous growth and driving the people based economy, Perum Jamkrindo performance also recorded positive performance from year to year.



DAFTAR ISI

Table of Content

Penjelasan Tema <i>Explanation of Themes</i>	3	Daftar Topik Material dan Batasan <i>List of Material Topics and Boundaries</i>	58
Daftar Isi <i>Table of contents</i>	6	Eksternal Assurance <i>External Assurance</i>	60
 Kinerja Keberlanjutan 2020 2020 Sustainability Performance		 Tentang Jamkrindo About Jamkrindo	
Highlights 2020 <i>Highlights 2020</i>	10	Informasi Umum dan Identitas Perusahaan <i>General Information and Company Identity</i>	64
Ikhtisar Kinerja Keberlanjutan <i>Sustainability Performance Highlights</i>	13	Kilas Sejarah Jamkrindo <i>History of Jamkrindo</i>	66
Peristiwa Penting <i>Significant Events</i>	15	Visi, Misi, Nilai dan Budaya Perusahaan <i>Vision, Mission, Values and Culture</i>	70
Penghargaan dan Sertifikasi <i>Awards And Certifications</i>	20	Aktivitas Bisnis dan Segmen Usaha <i>Business Activities and Business Segment</i>	72
 Sambutan Direktur Utama Greetings from President Director		Produk dan Jasa <i>Product and Services</i>	77
Strategi Keberlanjutan Jamkrindo <i>Jamkrindo Sustainability Strategy</i>	36	Pasar yang Dilayani dan Wilayah Operasional <i>Market Served and Operational Areas</i>	84
 Pelibatan Pemangku Kepentingan Stakeholders Engagement		Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>	90
Metode Identifikasi Kelompok Pemangku Kepentingan <i>Stakeholder Group Identification Method</i>	42	Skala Organisasi <i>Organization Scale</i>	92
Pemangku Kepentingan, Metode Pelibatan, Frekuensi, Topik yang Diajukan dan Harapan Pemangku Kepentingan <i>Stakeholders, Method of Engagement, Frequency, Topics Proposed and Stakeholder Expectations</i>	43	Pemegang Saham <i>Shareholders</i>	93
 Tentang Laporan ini About This Report		Struktur Grup dan Informasi Entitas Anak Perusahaan <i>Group Structure and Information on Subsidiaries</i>	94
Acuan dalam Pembuatan Laporan <i>Reference in Report Making</i>	52	Tenaga Kerja <i>Employee</i>	96
Periode dan Siklus Laporan <i>Reporting Period and Cycle</i>	53	Rantai Pasokan <i>Supply Chain</i>	105
Prinsip-Prinsip Penentuan Kualitas Laporan <i>Principles for Determining Report Quality</i>	54	Perubahan Signifikan selama Periode Pelaporan <i>Significant Changes during the Reporting Period</i>	107
Mendefinisikan Isi Laporan dan Batasan Topik <i>Defining Report Content and Topic Boundaries</i>	56	Sertifikasi <i>Certification</i>	108
 Tata Kelola Keberlanjutan Sustainable Governance		Keanggotaan Asosiasi <i>Membership of Association</i>	109
		Prinsip dan Tujuan Penerapan Tata Kelola <i>Corporate Governance Principles and the objectives of the Implementation</i>	113
		Roadmap Tata Kelola <i>Corporate Governance Roadmap</i>	117

Struktur Tata Kelola Keberlanjutan <i>Sustainability Governance Structure</i>	120
Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) <i>Annual General Meeting</i>	123
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	125
Direksi <i>Board of Directors</i>	140
Pengembangan Kompetensi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Competency Development for the Board of Commissioners and Directors</i>	148
Manajemen Risiko dan Prinsip Pencegahan <i>Risk Management and Prevention Principles</i>	150
Sistem Pelaporan Pelanggaran (SPP) <i>Whistleblowing System (WBS)</i>	157
Kode Etik <i>Code of Conduct</i>	159
Konflik Kepentingan <i>Conflicts of Interest</i>	166



Kinerja Ekonomi Keberlanjutan *Sustainability Economic Performance*

Kondisi Perekonomian Nasional dan Regional Akibat Pandemi COVID-19 <i>National and Regional Economic Conditions Due to the COVID-19 Pandemic</i>	170
Perkembangan Industri Penjaminan Kredit di Tengah Pandemi COVID-19 <i>Development of the Credit Guarantee Industry Amid the COVID-19 Pandemic</i>	173
Kinerja Ekonomi Jamkrindo <i>Economic Performance of Jamkrindo</i>	175
Distribusi Nilai Ekonomi <i>Economic Value Distribution</i>	177
Kewajiban Perseroan Atas Program Imbalan Pasti <i>The Company's Obligations for a Defined Benefit Program</i>	180
Rasio Upah Karyawan Pemula Menurut Gender terhadap Upah Minimum Regional/Provinsi <i>Ratio of Entry Level Employee Wages by Gender Against Regional / Provincial Minimum Wages</i>	182
Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>Indirect Economic Impact</i>	183
Praktik Pengadaan <i>Indirect Economic Impact</i>	185
Anti Korupsi <i>Anti Corruption</i>	189
Persaingan Sehat <i>Fair Competition</i>	191



Kinerja Lingkungan *Environmental Performance*

Kebijakan dan Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Jamkrindo <i>Environmental Management Policies and Approaches at Jamkrindo</i>	194
Penggunaan Kertas <i>The Usage of Paper</i>	196
Efisiensi Energi <i>Energy Efficiency</i>	198
Pengurangan Emisi <i>Emission Reduction</i>	202
Air dan Limbah Air <i>Water and Effluents</i>	204
Pengelolaan Limbah <i>Waste Management</i>	206
Kepatuhan Lingkungan <i>Environmental Compliance</i>	207



Kinerja Sosial *Social Performance*

Pemenuhan Kebutuhan Pemangku Kepentingan dalam meningkatkan Kinerja Sosial Jamkrindo <i>Fulfilling the Needs of Stakeholders in improving Jamkrindo's Social Performance</i>	210
Manajemen Kepegawaian <i>Personnel Management</i>	211
Hubungan Ketenagakerjaan <i>Employment Relations</i>	216
Pengembangan Kompetensi Pegawai <i>Employee Competency Development</i>	217
Lingkungan yang Layak dalam Bekerja dan Kepuasan Pegawai <i>Decent Work Environment and Employee Satisfaction</i>	232
Kesehatan dan Keselamatan Kerja <i>Occupational Health and Safety</i>	233
Masyarakat Lokal <i>Local Communities</i>	235
Tanggung Jawab Produk <i>Product Responsibility</i>	240
Kepatuhan Sosial Ekonomi <i>Socio-Economic Compliance</i>	241



Index Referensi Silang *Cross Reference Index*



Lembar Umpan Balik *Feedback Sheet*



KINERJA KEBERLANJUTAN 2020

2020 Sustainability Performance





HIGHLIGHTS 2020

Highlights 2020

Ekonomi/Economy

Pendapatan

Income



2.633.393

Juta Rupiah/Million Rupiah

Meningkat 22,37% dibandingkan periode sebelumnya
Increased 22.37% compared to the previous period

Laba Bersih

Net Profit



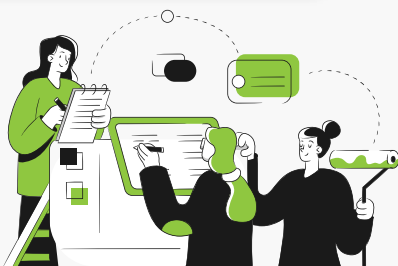
456.133

Juta Rupiah/Million Rupiah

Meningkat 130,30% dibandingkan periode sebelumnya
Increased by 130.30% compared to the previous period

Distribusi Nilai Ekonomi

Economic Value Distribution



1.597.201

Juta Rupiah/Million Rupiah

Meningkat 50,34% dibandingkan periode sebelumnya
increased 50.34% compared to the previous period

Dana PKBL

PKBL Fund



16.261.627.391

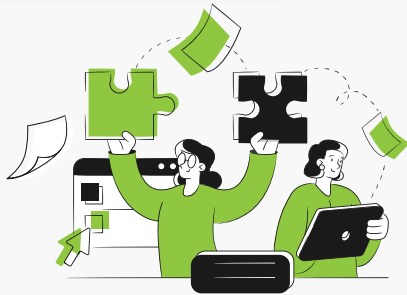
Juta Rupiah/Million Rupiah

Meningkat 55,85% dibandingkan periode sebelumnya
Increased by 55.85% compared to the previous period

Lingkungan/Environment

Penggunaan Kertas

Paper Usage



1185

Rim/Ream

Meningkat 3% dibandingkan periode sebelumnya
Increased by 3% compared to the previous period

Penggunaan Energi

Energy Usage



8.987

Gigajoule

Menurun 36,12% dibandingkan periode sebelumnya
Decreased 36.12% compared to the previous period

Penggunaan Air

Water Usage



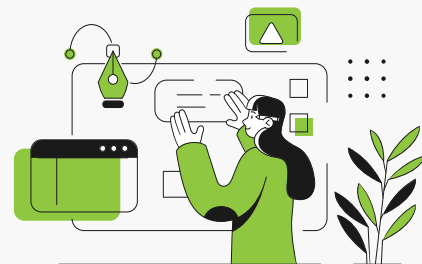
10.448

Meter Kubik/Cubic Meter

Menurun 25% dibandingkan periode sebelumnya
Decreased by 25% compared to the previous period

Emisi yang Dihasilkan

Emission Generated



222.890.841

TonCO2eq

Menurun 17,39% dibandingkan periode sebelumnya
Decreased by 17.39% compared to the previous period



Sosial/Social



Jumlah Karyawan Number of Employees

965
Orang/People

Tidak ada perubahan dibandingkan periode sebelumnya
No change compared to the previous period



Jumlah Karyawan Wanita Number of Female Employees

374
Orang/People

Meningkat 0,80% dibandingkan periode sebelumnya
Increased by 0.80% compared to the previous period



Kecelakaan Kerja Work Accident

Nihil/Zero

Tidak berubah dibandingkan periode sebelumnya
No change compared to the previous period



Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Competency Development Costs

Rp18.405
Juta Rupiah/Million Rupiah

Menurun 31,30% dibandingkan periode sebelumnya
Decreased by 31.30% compared to the previous period



Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction

85,02
Persen/Percent

Meningkat 1,10 % dibandingkan periode sebelumnya
Increased by 1.10 % compared to the previous period

IKHTISAR KINERJA KEBERLANJUTAN

Sustainability Performance Highlights

Deskripsi Description	Satuan Unit	2020	2019	2018
Kinerja Ekonomi/Economics Performance [2.a.1] [2.a.2] [2.a.3] [2.a.4][2.a.5]				
Produk dan Jasa Product and Service	Kategori Produk Product Category	Jasa Penjaminan Kredit Credit Guarantee Services	Jasa Penjaminan Kredit Credit Guarantee Services	Jasa Penjaminan Kredit Credit Guarantee Services
Pendapatan Penjaminan Guarantee Revenue	Juta Rupiah Million IDR	2.633.393	2.152.072	1.248.710
Laba (Rugi) Bersih Net Profit (Loss)	Juta Rupiah Million IDR	456.133	196.911	397.544
Pelibatan Pemasok Lokal Involvement of Local Supplier	Perusahaan/Badan Usaha Company/Business Entity	242	192	141
Distribusi Nilai Ekonomi Economic Value Distribution	Juta Rupiah Million IDR	1.597.201	1.062.378	884.160
Dana PKBL PKBL Fund	Juta Rupiah Million IDR	16.261	10.434	18.885
Kinerja Lingkungan/Environmental Performance [2.b] [2.b.1] [2.b.2] [2.b.3] [2.b.4]				
Penggunaan Kertas Paper Usage	Rim Ream	1185	1150	1445
Penggunaan Energi Energy Usage	Gigajoule Gigajoule	8.987	14.069	10.772
Penggunaan Air Water Usage	Meter Kubik Cubic Meter	10.448	14.059	13.880
Jumlah Emisi yang Dihasilkan Emission Generated	TonCO2eq TonCO2eq	222.890.841	269.820.355	
Pengurangan (Penambahan) Limbah Non-B3 Reduction (Increase) Of Non-B3 Waste	Ton Ton			



Deskripsi Description	Satuan Unit	2020	2019	2018
Kinerja Sosial/Social Performance [2.c]				
Jumlah Total Pegawai Total Employee	Orang People	965	965	1002
Jumlah Pegawai Wanita Number of Female Employees	Orang People	374	371	387
Perputaran Pegawai Employee Turnover	Persen Percent	3,94	5,28	4,59
Jumlah Kecelakaan Kerja Work Accident	Kasus Case	Nihil Zero	Nihil Zero	Nihil Zero
Total Waktu Pelatihan Total Training and Education Hour	Jam Hour	237.290	96.423	85.678
Biaya Pengembangan Kompetensi Karyawan Employee Competency Development Costs	Jutaan Rupiah Million IDR	18,405	26,791	15,350
Kepuasan Pelanggan Customer Satisfaction	Persen Percent	85,02	83,80	83,10

PERISTIWA PENTING

Significant Events



Penutupan Perdagangan BEI Tahun 2019 dan Pembukaan BEI Tahun 2020 (IDX)

IDX Trading Closing in 2019 and IDX opening in 2020 (IDX)



Jakarta, Januari 2020

Jakarta, January 2020



Rapat Umum Pemegang Saham PT Jamkrindo

General Meeting of Shareholders of PT Jamkrindo



Jakarta, Juni 2020

Jakarta, June 2020



Live Berita Satu TV (Kesiapan Perusahaan Menghadapi COVID-19)

Live on Berita Satu TV (Company's Readiness to Deal with COVID-19)



Jakarta, Juni 2020

Jakarta, June 2020



Sosialisasi Value BUMN AKHLAK

Socialization of Value of BUMN AKHLAK



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama antara PT Jamkrindo dan PT Askrindo dengan Penjamin terkait Penjaminan KMK PEN

Signing of Cooperation Agreement between PT Jamkrindo and PT Askrindo with Guarantors related to KMK PEN Guarantee



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Peluncuran Logo BUMN dan Slogan BUMN

Launch of SOEs Logo and Slogan



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Seremoni HUT ke-50 Tahun PT Jamkrindo

50th Anniversary Ceremony of PT Jamkrindo



Jakarta, Juli 2020

Jakarta, July 2020



Webinar Jamkrindo Talk

Webinar Jamkrindo Talk



Jakarta, Agustus 2020

Jakarta, August 2020



Penandatanganan Kesepakatan Bersama dengan Kemenkop dan KBUMN

Signing of Joint Agreement with the Ministry of Cooperatives and the Ministry of SOEs



Jakarta, Agustus 2020
Jakarta, August 2020



Ceremonial Penandatanganan PKS Penjaminan Program PEN dengan BPD Kalsel

Ceremonial Signing of Cooperation Agreement for PEN Program Guarantee with Local Development Bank in South Kalimantan



Jakarta, September 2020
Jakarta, September 2020



Soft Launching Corporate Brand Indonesia Financial Group (IFG)

Soft Launching Corporate Brand Indonesia Financial Group (IFG)



Jakarta, September 2020
Jakarta, September 2020



Webinar Penjaminan KMK PEN untuk Pemulihan Ekonomi Terdampak COVID-19

Webinar on KMK PEN Guarantee for Economic Recovery Impacted by COVID-19



Jakarta, Oktober 2020
Jakarta, October 2020



Ngopi Bareng Indonesia Financial Group (IFG)

Ngopi Bareng with Indonesia Financial Group (IFG)



Jakarta, Oktober 2020

Jakarta, October 2020



Penandatanganan Komitmen AKHLAK bersama PT BPUI

Signing of AKHLAK Commitment with PT BPUI



Jakarta, November 2020

Jakarta, November 2020



Live Streaming Peluncuran IFG

Live Streaming of IFG Launch



Jakarta, November 2020

Jakarta, November 2020



Program Pengenalan Direksi

Orientation Program for Directors



Jakarta, November 2020
Jakarta, November 2020



Webinar Jamkrindo UMKM Appreciation Awards 2020

Webinar Jamkrindo MSMEs Appreciation Awards 2020



Jakarta, Desember 2020
Jakarta, December 2020



Kunjungan Kerja komisi VI DPR RI

Working Visit of Commission VI DPR RI



Banjarmasin, Desember 2020
Banjarmasin, December 2020



PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI

Awards And Certifications



31 Mei / May

European Award for Best Practices 2020 European Award for Best Practices 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Gold Category Best Practices
Gold Category Best Practices

Acara/Event

BUMN Marketers Awards 2019
BUMN Marketers Awards 2019

oleh/by

European Society Quality Research
European Society Quality Research

01 Juli / July

Rekor MURI Muri Record

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Perusahaan dengan Proses Perubahan Badan Hukum Tercepat
Companies with the Fastest Legal Entity Change Process

Acara/Event

Rekor Dunia Muri
Muri World Record

oleh/by

MURI
MURI



01 Juli / July

Rekor MURI Muri Record

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Perusahaan dengan Pergantian Badan Hukum Terbanyak
Companies with the Most Legal Entity Changing

Acara/Event

Rekor Dunia Muri
Muri World Record

oleh/by

MURI
MURI



09 Juli / July

Emerging Stated Owned Enterprise Emerging Stated Owned Enterprise

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Terbaik II
Best II

Acara/Event

9th Anugerah BUMN 2022
9th SOE Award 2022

oleh/by

BUMNTrack
SOE'sTrack





29 Juli / July

The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020
The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description

The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020
The Best GRC for Compliance & Risk Management 2020

Acara/Event

GRC & Performance Excellence Award 2020
GRC & Performance Excellence Award 2020

oleh/by

Businessnews
Businessnews

16 September / September

The Most Promising Company in Strategic Marketing
The Most Promising Company in Strategic Marketing

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Bronze Winner
Bronze Winner

Acara/Event

BUMN Marketeers Award 2020
BUMN Marketeers Award 2020

oleh/by

BUMN Marketers Club
BUMN Marketers Club



23 September / September

Excellent in Brand Among Indonesia Millenials in 2020
Excellent in Brand Among Indonesia Millenials in 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Gold Winner
Gold Winner

Acara/Event

BUMN Brand Award 2020
BUMN Brand Award 2020

oleh/by

RRI dan Economics
RRI dan Economics



07 Oktober / October

Top GRC Awards 2020 #Star4
Top GRC Awards 2020 #Star4

Deskripsi Penghargaan/Award Description

#Star4
#Star4

Acara/Event

Top Governance, Risk & Compliance 2020
Top Governance, Risk & Compliance 2020

oleh/by

Top Business
Top Business





03 November / November

The Best SEO 2020 Indonesian State-Owned Enterprise
The Best SEO 2020 Indonesian State-Owned Enterprise

Deskripsi Penghargaan / Award Description
 Excellent The Best SEO 2020 for Finance Performance 2019
 Excellent The Best SEO 2020 for Finance Performance 2019

Acara / Event **oleh / by**
 11th Infobank The Best State-Owned Enterprise Awards 2020" Infobank
 11th Infobank The Best State-Owned Enterprise Awards 2020" Infobank

05 November / November

Corporate Communication Terbaik
Best Corporate Communication

Deskripsi Penghargaan / Award Description
 Corporate Communication Terbaik
 Best Corporate Communication

Acara / Event **oleh / by**
 BUMN Branding & Marketing Award 2020 BUMNTrack
 BUMN Branding & Marketing Award 2020 BUMNTrack



25 November / November

The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Deskripsi Penghargaan / Award Description
 The Best Human Capital People Development & Technology Services 2020
 The Best Human Capital People Development & Technology Services 2020

Acara / Event **oleh / by**
 2020 Digital Marketing & Human Capital Awards Businessnews
 2020 Digital Marketing & Human Capital Awards Businessnews





25 November / November

The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Deskripsi Penghargaan/Award Description

The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020
The Best Business Strategy & Digital Marketing Team 2020

Acara/Event

2020 Digital Marketing & Human Capital Awards
2020 Digital Marketing & Human Capital Awards

oleh/by

Businessnews
Businessnews

08 Desember / December

The Most Appreciation Corporate Social Responsibility
The Most Appreciation Corporate Social Responsibility

Deskripsi Penghargaan/Award Description

The Most Appreciation Corporate Social Responsibility
The Most Appreciation Corporate Social Responsibility

Acara/Event

Pusat Data dan Analisis Tempo (PDAT) PT Tempo Inti Media Tbk, dan
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)
*Data Center and Tempo Analysis (PDAT) PT Tempo Inti Media Tbk, and
Center for Indonesia Taxation Analysis (CITA)*

oleh/by

Tempo Country Contributor
Award 2020
*Tempo Country Contributor
Award 2020*



2020

**Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving
Entrepreneurship & SME in Indonesia**

*Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving
Entrepreneurship & SME in Indonesia*

Deskripsi Penghargaan/Award Description

Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving
Entrepreneurship & SME in Indonesia
*Special Achievement for the Corporate Contribution to Improving
Entrepreneurship & SME in Indonesia*

Acara/Event

TOP CSR PKBL of The Year 2020
TOP CSR PKBL of The Year 2020

oleh/by

Trans Co Indonesia dan Info Brand
Trans Co Indonesia dan Info Brand





SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

Greetings from President Director





SAMBUTAN DIREKTUR UTAMA

Greetings from President Director **[102-14]**



Putrama Wahyu Setyawan

Direktur Utama

President Director

“Pandemic COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 memberikan tantangan yang cukup berat bagi Jamkrindo. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi baik secara global, nasional, maupun lokal yang berdampak pada menurunnya permintaan sehingga juga memberikan efek terhadap kinerja perusahaan. Dalam menghadapi tantangan yang terjadi pada tahun 2020, Perusahaan telah menetapkan strategi-strategi bisnis dan mengintegrasikan strategi keberlanjutan dalam strategi Perusahaan dengan tujuan untuk memperkuat landasan keberlanjutan Jamkrindo dan mempercepat pertumbuhan Perusahaan. ”

“The COVID-19 pandemic that occurred in 2020 provided a fairly formidable challenge for Jamkrindo. Economic growth that occurs globally, nationally, and locally which has an impact on decreasing demand so that it also has an effect on company performance. In facing the challenges that occurred in 2020, the Company has determined business strategies and integrated sustainability strategies into the Company’s strategy with the aim of strengthening the foundation of Jamkrindo sustainability and accelerating the Company’s growth.”

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Dear Shareholders and Stakeholders,

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga PT Jamkrindo dapat melalui tahun 2020 yang penuh tantangan ini dengan baik. Hal ini tidak lepas dari strategi-strategi keberlanjutan yang dilakukan Perusahaan untuk menciptakan fondasi kuat yang dibangun melalui bisnis berkelanjutan serta memiliki tujuan mulia yaitu memberi nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dalam jangka panjang. **[4.a.5]**

*Praise and gratitude to God Almighty who has bestowed His favors and gifts on all of us so that PT Jamkrindo can go through this challenging 2020 well. This is inseparable from the Company’s sustainability strategies to create a strong foundation that is built through sustainable business and has a noble goal of providing value to all stakeholders in the long term. **[4.a.5]***

Perekonomian global dan nasional tahun 2020 menghadapi tantangan yang sangat berat. Merebaknya pandemi COVID-19 telah membuat kinerja perekonomian dunia mengalami kontraksi. Terlebih pada semester pertama tahun 2020, ekonomi global mengalami kontraksi yang sangat dalam. Kendati kinerja perekonomian global mulai menunjukkan perbaikan pada semester kedua, namun secara umum pertumbuhan ekonomi tahun 2020 masih mengalami pertumbuhan negatif. Ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar 2,07% atau jauh menurun dibandingkan kinerja ekonomi tahun sebelumnya yang sebesar 5,02%. Terlepas dari penurunan pertumbuhan ekonomi, Pemerintah berhasil menjaga tingkat inflasi pada level yang rendah, yaitu sebesar 1,68% dengan nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS yang relatif stabil sejak pertengahan hingga akhir tahun 2020. **[4..c.3]**

*The global and national economy in 2020 faces very formidable challenges. The outbreak of the COVID-19 pandemic has made the performance of the world economy contract. Especially in the first half of 2020, the global economy experienced a very deep contraction. Although the performance of the global economy began to show improvement in the second semester, in general, economic growth in 2020 still experienced negative growth. The Indonesian economy contracted by 2.07% or significantly decreased compared to the previous year’s economic performance of 5.02%. Despite the decline in economic growth, the Government managed to keep the inflation rate at a low level of 1.68% with the Rupiah exchange rate against the US Dollar relatively stable from mid to late 2020. **[4..c.3]***



Pandemi COVID-19 juga menjadi tantangan utama yang dihadapi Jamkrindo di tahun 2020. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kinerja keuangan Perusahaan, tapi juga berdampak pada kinerja lingkungan dan sosial Perusahaan. Dalam menghadapi penyebaran virus COVID-19, manajemen Jamkrindo memastikan bahwa kesehatan dan keselamatan karyawan dan pelayanan pelanggan tetap menjadi prioritas utama bagi kami.

Visi, Misi, dan Strategi Keberlanjutan Jamkrindo

Di tengah kondisi yang menantang ini, pelayanan kepada pelanggan harus tetap dijalankan dengan baik. Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No:S-286/MBU/05/2019 tentang Persetujuan dan Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), maka Visi dan Misi Jamkrindo adalah "Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional." Untuk mencapai visi tersebut, Jamkrindo memiliki misi yaitu meningkatkan aksesibilitas finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang inovatif, kompetitif dengan pelayanan profesional, efektif dan efisien secara berkelanjutan.

Visi dan misi Jamkrindo tersebut dicapai dan dilaksanakan melalui berbagai strategi bisnis yang terintegrasi dengan strategi keberlanjutan. Kami meyakini bahwa bisnis dan keberlanjutan merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dipisahkan. Untuk menuju keberlanjutan Perusahaan, Jamkrindo mengedepankan aspek *People*, *Planet*, dan *Profit* yang kemudian diperluas dengan aspek *Prudence* dan *Partnership*. Perusahaan selalu menekankan pada pemberian pelayanan yang unggul kepada pelanggan dan menjalankan bisnis dengan menerapkan prinsip kehati-hatian. Selain itu Jamkrindo selalu berupaya memperhatikan karyawan, masyarakat sekitar serta lingkungan dalam menjalankan roda bisnisnya. **[4.c.2]**

The COVID-19 pandemic is also the main challenge faced by Jamkrindo in 2020. The COVID-19 pandemic not only has an impact on the Company's financial performance, but also has an impact on the Company's environmental and social performance. In dealing with the spread of the COVID-19 virus, the management of Jamkrindo ensures that the health and safety of employees and customer service remains a top priority for us.

Jamkrindo Vision, Mission and Sustainability Strategy

In the midst of these challenging conditions, service to customers must continue to be carried out properly. In order to ensure the implementation of professional business activities based on the Endorsement Letter from the Ministry of SOE No:S-286/MBU/05/2019 concerning Approval and Ratification of the Company's Long-Term Plan (RJPP), Jamkrindo Vision and Mission is "To become a Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development." To achieve this vision, Jamkrindo has a mission to improve the financial accessibility of UMKMK (Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives) through the provision of innovative, competitive guarantees with professional, effective and efficient services in a sustainable manner.

*Jamkrindo vision and mission are achieved and implemented through various business strategies that are integrated with sustainability strategies. We believe that business and sustainability are one and cannot be separated. To achieve the Company's sustainability, Jamkrindo prioritizes the People, Planet, and Profit aspects which are then expanded to Prudence and Partnership aspects. The company always emphasizes on providing superior service to customers and conducting business by applying the precautionary principle. In addition, Jamkrindo always strives to pay attention to employees, the surrounding community and the environment in running its business. **[4.c.2]***

Strategi keberlanjutan Jamkrindo terintegrasikan dalam Strategi Bisnis Perusahaan atau Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP). Tema Strategis dan Fokus Pengembangan Tahunan Jamkrindo 2019-2023 telah tertuang dalam RJPP tahun 2019 -2023. Untuk tahun 2020 Perusahaan berfokus pada peningkatan efisiensi dan efektivitas melalui teknologi informasi/otomasi dan lingkungan kerja yang kondusif dan pemanfaatan data & knowledge dalam mendukung keputusan bisnis.

Untuk mendukung pertumbuhan berkelanjutan Perusahaan, Jamkrindo berfokus pada beberapa sasaran strategis yaitu sasaran keuangan, efektivitas produk dan proses, kepemimpinan dan tata kelola dan tanggung jawab kemasayarakatan, focus pada pelanggan dan pasar, tenaga kerja serta peran Jamkrindo sebagai *agent of change*. [102-18, 4.a.1, 4.a.2, 4.a.3 4.b.2, 6.a]

Strategi keberlanjutan kami tidak lepas dari prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG). Dalam mendukung strategi keberlanjutan Jamkrindo juga telah menciptakan struktur tata kelola keberlanjutan yang baik. Perusahaan telah menerapkan tata kelola yang baik, mengkoordinir seluruh tenaga kerja untuk menandatangani Pakta Integritas dalam menerapkan *Code of Conduct* (CoC) seluruh Karyawan serta penyusunan *Board Manual* Dewan Komisaris dan Direksi. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas penerapan GCG, tahun 2020 Perusahaan menindaklanjuti *Area of Improvement* atas *Assessment* laporan GCG Jamkrindo tahun 2020. Jamkrindo mendapatkan skor 96,81 yang mencapai kriteria "Sangat Baik" untuk penilaian Tata Kelola Perusahaan. Skor ini meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 95,80. Hal ini menunjukkan adanya perbaikan dalam implementasi tata kelola perusahaan.

Jamkrindo sustainability strategy is integrated into the Long-Term Business Strategy contained in the RJPP. The Strategic Theme and Focus of Jamkrindo Annual Development 2019-2023 have been stated in the 2019-2023 RJPP. For 2020 the Company focuses on increasing efficiency and effectiveness through information/ automation technology and a conducive work environment and the use of data & knowledge to support business decisions.

To support the Company's sustainable growth, Jamkrindo focuses on several strategic targets, namely financial goals, product and process effectiveness, leadership and governance and community responsibility, focus on customers and markets, workforce and Jamkrindo role as an agent of change. [102-18, 4.a.1, 4.a.2, 4.a.3 4.b.2, 6.a]

Our sustainability strategy cannot be separated from the principles of Good Corporate Governance (GCG). In supporting the sustainability strategy, Jamkrindo has also created a good sustainability governance structure. The company has implemented good governance, coordinated all employees to sign an Integrity Pact in implementing the Code of Conduct (CoC) for all employees and the preparation of the Board Manual for the Board of Commissioners and the Board of Directors. As part of efforts to improve the quality of GCG implementation, in 2020 the Company followed up the Area of Improvement on Jamkrindo 2020 GCG assessment report. Jamkrindo received a score of 96.81 which achieved the "Very Good" criteria for the assessment of Corporate Governance. This score increased from the previous year which was 95.80. This indicates an improvement in the implementation of corporate governance.



Pencapaian Kinerja Keberlanjutan

Pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan bagi Perusahaan. Di tengah berbagai tantangan sepanjang tahun 2020, Jamkrindo masih dapat membukukan kinerja yang positif. Jamkrindo berhasil mencatatkan peningkatan Pendapatan dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp2.826 miliar, meningkat 18,14% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.313 miliar. Pencapaian tersebut mencapai 121,70% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Selain itu, tahun 2020 Jamkrindo juga berhasil membukukan pendapatan investasi sebesar Rp799 miliar. Pendapatan investasi mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya, yaitu Rp782 miliar dan melampaui target RKAP dengan pencapaian 138,95% dari target RKAP. Jamkrindo berhasil mencetak laba bersih yang positif pada tahun 2020 yaitu mencapai Rp456 miliar. Jamkrindo juga berhasil mencatat pertumbuhan aset yang cukup baik, yaitu meningkat 14,02% menjadi Rp19.122 miliar dari Rp16.770 miliar di tahun 2019. Demikian juga dengan ekuitas Perusahaan yang meningkat menjadi Rp8.855 miliar dari Rp8.678 miliar di tahun 2019.

Selama tahun 2020 Perusahaan menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp1,65 triliun, meningkat 35% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp1,22 triliun. Dari nilai ekonomi yang dihasilkan tersebut, sebesar Rp27,19 miliar digunakan untuk biaya komisi, Rp346,89 miliar digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan (diluar biaya kepada pegawai, CSR, dan pembayaran kepada pemasok barang dan jasa), sebesar Rp452,89 miliar didistribusikan kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan, dan biaya pelatihan, sebesar Rp16,26 miliar didistribusikan kepada masyarakat untuk program CSR melalui PKBL, dan sebesar Rp87,62 miliar didistribusikan kepada pemasok barang dan jasa. Selain itu Perusahaan juga mendistribusikan nilai ekonominya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sebesar Rp400 miliar dan kepada pemerintah dalam bentuk pajak sebesar Rp266,33 miliar baik berupa pembayaran pajak final maupun pajak penghasilan non final. Total nilai ekonomi yang didistribusikan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp1,59 triliun, meningkat 50,34% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp1,06 triliun.

Sustainability Performance Achievements

The COVID-19 pandemic has had a significant impact on the Company. In the midst of various challenges throughout 2020, Jamkrindo was still able to record a positive performance. Jamkrindo managed to record an increase in Income from Guarantee Fees (IJP) of IDR2,826 billion, an increase of 18.14% from the previous year of IDR2,313 billion. This achievement reached 121.70% of the target of the Company's Work Plan and Budget (RKAP). In addition, in 2020 Jamkrindo also managed to record an investment income of IDR799 billion. Investment income increased compared to the previous year, which was IDR782 billion and exceeded the RKAP target by achieving 138.95% of the RKAP target. Jamkrindo managed to score a positive net profit in 2020, reaching IDR456 billion. Jamkrindo also managed to record quite good asset growth, which increased by 14.02% to IDR19,122 billion from IDR16,770 billion in 2019. Likewise, the Company's equity increased to IDR8,855 billion from IDR8,678 billion in 2019.

During 2020 the Company generated an economic value of IDR1.65 trillion, an increase of 35% compared to 2019, which was IDR1.22 trillion. Of the resulting economic value, IDR27.19 billion was used for commission fees, IDR346.89 billion was used for the Company's business activities (excluding costs to employees, CSR, and payments to suppliers of goods and services), IDR452.89 billion was distributed to employees in the form of salaries, allowances, and training costs, IDR16.26 billion was distributed to the public for CSR programs through PKBL, and IDR87.62 billion was distributed to suppliers of goods and services. In addition, the Company also distributes its economic value to shareholders in the form of dividends of IDR400 billion and to the government in the form of taxes of IDR266.33 billion, both in the form of payment of final tax and non-final income tax. The total economic value distributed during 2020 was IDR1.59 trillion, an increase of 50.34% compared to 2019 which was IDR1.06 trillion.

Sehingga, pada tahun 2020 jumlah ekonomi yang ditahan adalah sebesar Rp56,13 miliar, menurun sebesar 64,73% dibandingkan dengan tahun 2019. Berdasarkan Laporan Keuangan 2019 yang telah dinyatakan ulang, terdapat manfaat pajak yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp152,33 miliar pada tahun 2019. Kami memastikan bahwa distribusi nilai ekonomi Perusahaan dilakukan secara tepat sasaran kepada pemangku kepentingan. Selain itu dari sisi ekonomi, perusahaan juga melakukan inisiatif-inisiatif seperti pemberian dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan melalui program-program perekrutan tenaga kerja lokal, pembangunan infrastruktur untuk masyarakat, dan pelibatan pemasok lokal. **[103-3, 201-1, 201-2, 201-3, 201-4, 4.a.4, 4.b.1].**

Dari sisi lingkungan Jamkrindo berfokus pada efisiensi dan penghematan baik dari penggunaan kertas, penggunaan listrik dan air. Pada tahun 2020, telah dilakukan penghematan penggunaan kertas melalui inisiasi-inisiasi *paperless*. Penggunaan kertas pada tahun 2020 adalah sebesar 1.185 Rim. Intensitas penggunaan listrik dan air pada tahun 2020 juga mengalami penurunan. Tahun 2020 penggunaan energi sebesar 8.920 GJ dan penggunaan air adalah sebesar 10.488 meter kubik. **[4.a.4, 4.b.1]**

Lebih lanjut, pandemic COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020 ini menjadikan Perusahaan untuk lebih berfokus pada karyawan dan masyarakat sekitar. Selain memprioritaskan kesehatan dan keselamatan para karyawan Jamkrindo Kami juga tidak melepas perhatian dan kepedulian terhadap masyarakat sekitar.

Kami secara berkelanjutan memberdayakan dan mengembangkan potensi yang dimiliki masyarakat demi meningkatkan perekonomian komunitas lokal sekaligus membantu Pemerintah dan masyarakat dalam upaya menanggulangi dampak pandemi COVID-19 di sekitar wilayah operasional. **[4.a.4, 4.b.1]**

*Thus, in 2020 the number of retained economies was IDR56.13 billion, a decrease of 64.73% compared to 2019. Based on the restated 2019 Financial Statements, there was a significant tax benefit of IDR152.33 billion in 2019. We ensure that the distribution of the Company's economic value is carried out in a targeted manner to stakeholders. Apart from that, from an economic perspective, the company also carries out initiatives such as providing a significant indirect economic impact through local labor recruitment programs, infrastructure development for the community, and the involvement of local suppliers. **[103-3, 201-1, 201-2, 201-3, 201-4, 4.a.4, 4.b.1].***

*From an environmental perspective, Jamkrindo focuses on efficiency and savings in terms of paper use, electricity and water usage. In 2020, savings in paper use have been made through paperless initiatives. Paper usage in 2020 is 1,185 Rim. The intensity of electricity and water use in 2020 also decreased. In 2020 energy use is 8,920 GJ and water use is 10,488 cubic meters. **[4.a.4, 4.b.1]***

Furthermore, the COVID-19 pandemic that occurred in 2020 made the Company focus more on employees and the surrounding community. In addition to prioritizing the health and safety of our Jamkrindo employees, we also do not neglect our attention and concern for the surrounding community.

*We continuously empower and develop the potential of the community in order to improve the economy of the local community as well as assist the Government and the community in efforts to overcome the impact of the COVID-19 pandemic around our operational areas. **[4.a.4, 4.b.1]***



Melalui program *Corporate Social Responsibility (CSR)* yang tertuang secara lebih *structural* dalam Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) Jamkrindo mendukung Pemerintah dalam upaya pencegahan dan penanganan COVID-19, Kami bersinergi dengan Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan terkait di sekitar wilayah operasi. Bantuan diberikan khususnya di sekitar wilayah operasional Perusahaan di antaranya alat *rapid test*, PCR, *portable handwash*, APD untuk tenaga medis, mobil *ambulans*, masker, bantuan bahan makanan pokok, hingga membantu para siswa melalui pemberian bantuan sarana dan prasarana pendidikan. Selain itu, Perusahaan juga menjalankan program *community development* dengan melakukan pembinaan UMKM. Pelaksanaan penyaluran PKBL tahun 2020 dapat menyalurkan Program Kemitraan sebesar Rp4.372.000.000 kepada 152 mitra binaan yang tersebar di seluruh wilayah kerja Jamkrindo, sedangkan untuk Program Bina Lingkungan yang telah disalurkan sebesar Rp11.787.877.391. **[4.a.4, 4.b.1]**

Jamkrindo juga meraih beberapa penghargaan terkait Tanggung Jawab Sosial Perusahaan yaitu Jamkrindo mendapatkan *Top Corporate Social Responsibility PKBL of The Year 2020* sebagai perusahaan yang dinilai telah berkontribusi dan melibatkan diri secara aktif menciptakan dan menumbuh kembangkan UMKM di Indonesia. Penghargaan ini diberikan kepada 25 perusahaan BUMN terpilih berdasarkan survei, yang dinilai berhasil menggulirkan program PKBL Kewirausahaan dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) serta *Tempo Country Contributor Award 2020 The Most Appreciation Corporate Social Responsibility*.

Komitmen Jamkrindo dalam Tujuan Pembangunan Berkelanjutan

Seluruh agenda keberlanjutan dan pencapaian kami, telah sejalan dan mendorong keberhasilan program pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia No.59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB). Beberapa contohnya seperti bantuan yang kami berikan kepada masyarakat kecil dalam menghadapi pandemi COVID-19 telah sejalan dengan TPB No.1 Tanpa Kemiskinan dan TPB 3 Kehidupan Sehat dan Sejahtera.

*Through the Corporate Social Responsibility (CSR) program which is contained in a more structural manner in the Partnership and Community Development Program (PKBL) Jamkrindo supports the Government in efforts to prevent and handle COVID-19, We are synergizing with the Regional Government and related stakeholders around the operational area. Assistance was given especially around the Company's operational areas, including rapid test equipment, PCR, portable handwash, PPE (Personal Protection Equipment) for medical personnel, ambulances, masks, assistance with basic foodstuffs, to helping students through the provision of educational facilities and infrastructure. In addition, the Company also runs a community development program by fostering MSMEs. The implementation of the PKBL distribution in 2020 can channel the Partnership Program in the amount of IDR4,372,000,000 to 152 fostered partners spread across Jamkrindo work areas, while for the Community Development Program, IDR11,787,877,391 has been distributed. **[4.a.4, 4.b.1]***

Jamkrindo also won several awards related to Corporate Social Responsibility, namely Jamkrindo getting Top Corporate Social Responsibility PKBL of The Year 2020 as a company that is considered to have contributed and actively involved in creating and developing MSMEs in Indonesia. This award was given to 25 selected state-owned companies based on a survey, which were considered successful in rolling out the Entrepreneurship and MSME PKBL program as well as the Tempo Country Contributor Award 2020 The Most Appreciation Corporate Social Responsibility.

Jamkrindo Commitment to the Sustainable Development Goals

All of our sustainability agendas and achievements are in line with and encourage the success of government programs as stated in the Presidential Regulation of the Republic of Indonesia No. 59 of 2017 concerning the Implementation of the Achievement of the Sustainable Development Goals (SDG). Some examples, such as the assistance we provide to small communities in dealing with the COVID-19 pandemic, are in line with SDG No.1 Without Poverty and SDG 3 Healthy and Prosperous Life.

Peningkatan gizi dan dukungan terhadap pendidikan masyarakat telah sejalan dengan TPB No.2 Tanpa Kelaparan dan TPB 4 Pendidikan Berkualitas. Komposisi kesetaraan *gender* di tempat kerja (TPB No.5), efisiensi material dan pemakaian material daur ulang (TPB No.12).

Improvement of nutrition and support for public education has been in line with SDG No.2 Without Hunger and SDG 4 Quality Education. The composition of gender equality in the workplace (SDG No.5), material efficiency and the use of recycled materials (SDG No.12).

Pengelolaan sampah dan pengurangan plastik agar tidak mencemari sungai atau laut (TPB No.14), anti deforestasi (TPB No.15) Kolaborasi kami dengan pemerintah serta pihak ketiga lainnya dalam mendorong keberlanjutan telah sejalan dengan (TPB No.17). **[4.a.2]**

*Waste management and plastic reduction so as not to pollute rivers or seas (SDG No.14), anti-deforestation (SDG No.15) Our collaboration with the government and other third parties in promoting sustainability is in line with (SDG No.17). **[4.a.2]***

Tantangan dan Peluang bagi Jamkrindo [102-15, 5.e]

Challenges and Opportunities for Jamkrindo [102-15, 5.e]

Tantangan yang dihadapi selama tahun 2020 dan tahun-tahun mendatang merupakan tantangan yang sangat berat bagi perusahaan. Perusahaan tidak hanya dituntut untuk menghasilkan EBT sesuai dengan target, namun juga dituntut untuk melakukan inovasi-inovasi perluasan dan diversifikasi bisnis yang sesuai dengan *core business* perusahaan.

The challenges faced during 2020 and the years to come are very tough challenges for the company. Companies are not only required to generate revenue in accordance with the target, but are also required to carry out business expansion and verification innovations that are in accordance with the company's core business.

Ditengah kondisi ketidakpastian, sektor UMKM diyakini akan memberikan kontribusi yang besar terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di tahun 2021. Untuk mendukung pertumbuhan sektor UMKM, Pemerintah telah memberikan berbagai stimulus. Selain itu, Pemerintah juga memutuskan untuk menambah plafon KUR 2021 dari Rp253 triliun menjadi Rp285 triliun. Peningkatan plafon ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor UMKM ini dan menjadikan UMKM sebagai salah satu penyangga pertumbuhan ekonomi nasional.

Amid conditions of uncertainty, the MSME sector is believed to make a major contribution to Indonesia's economic growth in 2021. To support the growth of the MSME sector, the Government has provided various stimuli. In addition, the Government has also decided to increase the 2021 People's Business Credit (KUR) ceiling from IDR253 trillion to IDR285 trillion. This ceiling increase is expected to encourage the growth of the MSME sector and make MSMEs one of the buffers for national economic growth.

Berlandaskan pada data tersebut, prospek usaha Jamkrindo ke depan masih cukup besar. Menilik data dari pemerintah, terdapat 74% dari UMKM yang belum mengakses fasilitas kredit dari perbankan. Sehingga bila dibandingkan dengan data BPS dimana jumlah UMKM mencapai 64 juta, maka *market share* penjaminan masih sangat besar. Dari data-data tersebut dapat disimpulkan bahwa prospek usaha bisnis penjaminan kedepannya masih sangat menjanjikan.

Based on this data, Jamkrindo's future business prospects are still quite large. Based on data from the government, there are 74% of MSMEs that have not accessed credit facilities from banks. So when compared to BPS data where the number of MSMEs reaches 64 million, the guarantee market share is still very large. From these data, it can be concluded that the prospect of the insurance business in the future is still very promising.



Untuk RKAP 2021 Jamkrindo menetapkan tema *“Tuning & Consolidating Business to Maintain Sustainable Performance”*. Agar perusahaan dapat menjaga *sustainability* Perusahaan, fokus pada penguatan fondasi operasional dan portofolio bisnis, seperti integrasi proses dengan induk, kolaborasi dan penyelarasan bisnis dengan *holding* lainnya, serta memperkuat konsolidasi internal. Disamping itu, fokus pada pengelolaan portofolio secara *prudent* untuk mempertahankan profitabilitas dan menjaga kesehatan finansial dan operasional.

Tantangan lain dari aspek sosial adalah bagaimana Jamkrindo meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat sekitar. Terutama dalam menghadapi era normal baru ini yang masih diliputi ketidakpastian. Jamkrindo akan berfokus pada peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM. Disamping itu, kami juga berusaha semakin relevan dengan situasi yang ada dengan membuat program dan kemitraan lebih banyak pihak yang mempunyai visi yang sama. **[4.b.2]**

Apresiasi Kami

Atas pencapaian kinerja selama tahun 2020, kami menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada segenap jajaran Dewan Komisaris yang senantiasa memberikan arahan, melakukan pengawasan, dan memberikan kepercayaan penuh kepada Direksi untuk melaksanakan tugasnya. Kami juga menyampaikan terima kasih kepada pemegang saham yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk melanjutkan pengelolaan Jamkrindo. Kepada seluruh pelanggan, mitra, dan masyarakat sekitar wilayah operasi Jamkrindo, kami mengucapkan terima kasih pula atas kepercayaannya selama ini.

Apresiasi secara khusus dan setinggi-tingginya kami sampaikan kepada seluruh insan Jamkrindo yang telah bekerja keras dan optimal dalam pencapaian kinerja ini, menunjukkan dedikasi dan loyalitas yang tinggi dalam pencapaian target dan implementasi strategi yang telah dicanangkan. Kami berharap pencapaian ini dapat menjadi pendorong untuk terus dilakukannya perbaikan-perbaikan dan pembenahan untuk mencapai keberlanjutan Perusahaan. Kami berharap, dukungan dan kerja sama dari seluruh pemangku kepentingan tetap berlanjut pada tahun-tahun mendatang karena hal itu merupakan modal penting bagi Perusahaan agar terus maju dan berkembang.

For the 2021 RKAP Jamkrindo set the theme “Tuning & Consolidating Business to Maintain Sustainable Performance”. In order for the company to maintain the Company’s sustainability, focus on strengthening the operational foundation and business portfolio, such as process integration with the parent, collaboration and business alignment with other holdings, as well as strengthening internal consolidation. In addition, focus on prudent portfolio management to maintain profitability and maintain financial and operational health.

*Another challenge from the social aspect is how Jamkrindo improves the welfare of its employees and the surrounding community. Especially in the face of this new normal era which is still filled with uncertainty. Jamkrindo will focus on improving the quality and welfare of human resources. In addition, we are also trying to be more relevant to the existing situation by creating programs and partnerships with more parties who have the same vision. **[4.b.2]***

Our Appreciation

For the achievement of performance during 2020, we express our respect and gratitude to all levels of the Board of Commissioners who always provide direction, supervise, and give full trust to the Board of Directors to carry out their duties. We also thank the shareholders who have trusted us to continue the management of Jamkrindo. To all customers, partners, and communities around Jamkrindo operational areas, we would also like to thank them for their trust so far.

We convey our special and highest appreciation to all Jamkrindo personnel who have worked hard and optimally in achieving this performance, showing high dedication and loyalty in achieving the targets and implementing the strategies that have been planned. We hope that this achievement can be a driving force for continuous improvements and improvements to achieve the Company’s sustainability. We hope that the support and cooperation of all stakeholders will continue in the years to come because it is an important capital for the Company to continue to advance and develop.

Lebih dari itu semua, keberhasilan Jamkrindo tak lepas dari pertolongan dan perkenanan Tuhan yang Maha Kuasa. Sebab itu, sudah semestinya kita mengungkapkan puji syukur kepada-Nya, seraya berharap agar kinerja Perusahaan terus meningkat pada tahun-tahun mendatang.

More than that, Jamkrindo success cannot be separated from the help and favor of God Almighty. Therefore, we should express our gratitude to Him, while hoping that the Company's performance will continue to improve in the coming years.

Jakarta, 26 November 2021 / Jakarta, November 26, 2021
Atas nama Direksi / On behalf of the Board of Directors



Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Utama
President Director



STRATEGI KEBERLANJUTAN JAMKRINDO

Jamkrindo Sustainability Strategy [1, 4.c.1, 4.c.2, 102-14, 102-15]

Seiring perkembangan bisnis dan rencana pemerintah untuk membentuk *Holding* Perasuransian dan Penjaminan maka awal tahun 2020 PT Jamkrindo melakukan perubahan bentuk badan hukum. Pada tanggal 14 Februari 2020, PT Jamkrindo telah berubah bentuk badan hukum dari Perum menjadi Persero sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO).

Selanjutnya pada tanggal 16 Maret 2020 PT Jamkrindo bergabung dalam *Holding* Perasuransian dan Penjaminan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2020 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). Dengan Peraturan Pemerintah ini susunan pemegang saham PT Jamkrindo tidak hanya dimiliki oleh Pemerintah RI namun juga PT Bahana PUI yang menjadi pemegang saham mayoritas di PT Jamkrindo.

Perubahan komposisi pemegang saham PT Jamkrindo ini mendorong perusahaan melakukan perubahan anggaran dasar atas perubahan ini dicakup dalam salinan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan Perseroan PT Jamkrindo tentang Perubahan Anggaran Dasar Nomor 2 tanggal 9 April 2020.

Secara strategis posisi Perusahaan berada pada siklus strategi bertumbuh. Pada posisi ini perusahaan dituntut untuk mencapai efisiensi dan efektivitas operasional perusahaan dalam mendukung kekuatan perusahaan yang saat ini telah dimiliki melalui peningkatan kualitas layanan, sistem manajemen operasional perusahaan yang optimal dengan didukung oleh struktur organisasi yang adaptif dan gesit menyesuaikan dengan keinginan pasar, sumber daya manusia yang berkualitas dan teknologi informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien. Pertumbuhan pendapatan penjaminan tetap terjaga untuk menjamin kelangsungan hidup perusahaan dengan melakukan diversifikasi usaha.

Dalam rangka penguatan fokus bisnis Penjaminan Syariah, baik secara operasional maupun *image building* dalam menjaga kemurnian syariah dan akselerasi pertumbuhan bisnis penjaminan syariah melalui ekspansi *market share* bisnis penjaminan syariah di Indonesia maka PT Jamkrindo mendirikan anak perusahaan PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Diversifikasi produk, penyesuaian tarif penjaminan, ketepatan dan kecepatan memutuskan penjaminan dan pembayaran klaim yang memenuhi syarat merupakan strategi meningkatkan kerja sama dan meningkatkan pendapatan operasional.

Along with business development and the government's plan to form an Insurance and Guarantee Holding, in early 2020 PT Jamkrindo will change its legal entity form. On February 14, 2020, PT Jamkrindo has changed its legal form from Perum to Persero as stipulated in Government Regulation No.11 of 2020 concerning the Change in the Form of a Public Company Legal Entity (PERUM), Jaminan Kredit Indonesia to become a Limited Liability Company (PERSERO).

Furthermore, on March 16, 2020, PT Jamkrindo joined the Insurance and Guarantee Holding as stipulated in the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 20 of 2020 concerning Addition of Capital Participation of the Republic of Indonesia to the Share Capital of the Limited Liability Company (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). With this Government Regulation, the shareholder composition of PT Jamkrindo is not only owned by the Government of the Republic of Indonesia but also PT Bahana PUI which is the majority shareholder in PT Jamkrindo.

This change in the shareholder composition of PT Jamkrindo encourages the company to make changes to the articles of association of this change which is included in the copy of the Deed of Decision Statement of the Shareholders of the Company PT Jamkrindo concerning Amendments to the Articles of Association Number 2 dated April 9, 2020.

Strategically, the Company's position is in the growth strategy cycle. In this position the company is required to achieve efficiency and effectiveness of company operations in supporting the strengths of the company that it currently has through improving service quality, an optimal company operational management system supported by an adaptive and agile organizational structure that adapts to market desires, human resources quality and effective and efficient information and communication technology. The growth of guarantee income is maintained to ensure the survival of the company by diversifying its business.

In order to strengthen the focus of the Sharia Guarantee business, both operationally and in image building in maintaining the purity of sharia and accelerating the growth of the sharia guarantee business through the expansion of the market share of the sharia guarantee business in Indonesia, PT Jamkrindo established a subsidiary, PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Product diversification, adjustment of guarantee rates, accuracy and speed of deciding guarantees and payment of claims that meet the requirements are strategies to increase cooperation and increase operating income.

Untuk mencapai kinerja Perusahaan yang telah ditetapkan dalam RKAP Tahun Buku 2020 Perusahaan melakukan berbagai strategi dalam rangka meningkatkan pendapatan operasional yaitu, melakukan kerja sama dengan mitra bisnis yang baru, perluasan kerja sama dengan mitra bisnis yang telah ada, menandatangani *Memorandum of Understanding* (MoU) dengan mitra bisnis, review perjanjian kerja sama penjaminan kredit (P2K), review SOP dan peraturan internal tentang penjaminan kredit, penyempurnaan pada Sistem Informasi Manajemen operasional perusahaan melalui program aplikasi operasional yang terintegrasi, penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM).

Dalam rangka meningkatkan pendapatan, Perusahaan telah melakukan berbagai upaya diantaranya dengan mengoptimalkan pendapatan subrogasi, yaitu dengan bekerja sama dengan pihak ketiga. Guna optimalisasi pendapatan investasi dan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2/POJK.05/2017 tentang Penyelenggaraan Usaha Lembaga Penjaminan tanggal 11 Januari 2017, perusahaan telah melakukan penempatan investasi pada instrumen saham, reksadana, obligasi dan deposito. Penempatan pada instrumen investasi tersebut dilaksanakan dengan mengutamakan prinsip kehati-hatian (*prudent*) dan dalam rangka mendorong bisnis penjaminan kredit. **[102-18, 4.a.1, 4.a.3 4.b.2, 6.a]**

Selain strategi yang dilakukan diatas, dari sisi lingkungan strategi Jamkrindo berfokus pada efisiensi dan penghematan baik dari penggunaan kertas, penggunaan listrik dan air. Upaya-upaya penghematan dilakukan melalui penggunaan fasilitas hemat energi dan sosialisasi penghematan. **[102-18, 4.a.1, 4.a.3 4.b.2, 6.a]**

Berkaitan dengan isu sosial, strategi keberlanjutan Jamkrindo berfokus pada pengembangan SDM dan pelayanan nasabah. Dari aspek SDM dan organisasi perusahaan telah melakukan konsolidasi organisasi dan akselerasi kompetensi SDM untuk menyongsong masa depan perusahaan dimana persaingan bisnis yang ada menjadi semakin ketat. Konsolidasi organisasi dan akselerasi kompetensi SDM dimaksud diperlukan guna menghasilkan dan membentuk sumber daya manusia yang merupakan *Human Capital* perusahaan menjadi lebih berkualitas dan profesional.

Strategi pengembangan SDM ini mencakup pengembangan kompetensi insan Jamkrindo, pemastian pemberian hak yang sesuai untuk para pekerja, dan *system* pengembangan karir yang tepat. Sedangkan strategi pelayanan nasabah berfokus pada memberikan *service excellence* kepada nasabah yang terukur melalui kepuasan dari nasabah. **[102-18, 4.a.1, 4.a.3 4.b.2, 6.a]**

Kami yakin strategi keberlanjutan yang kami jalankan tersebut memberikan kontribusi yang positif bagi kinerja ekonomi Perseroan, serta bagi lingkungan dan sosial yang pada akhirnya akan membentuk masa depan yang lebih baik bagi generasi mendatang.

In order to achieve the Company's performance as stipulated in the RKAP for the 2020 Financial Year, the Company implemented various strategies in order to increase operating income, namely; collaborating with new business partners, expanding cooperation with existing business partners, signing a Memorandum of Understanding (MoU) with business partners, reviewing credit guarantee cooperation agreements (P2K), reviewing SOPs and internal regulations regarding credit guarantees, improving the Information System Company operational management through an integrated operational application program, the implementation of Enterprise Risk Management (ERM).

*In order to increase revenue, the Company has made various efforts including optimizing subrogation revenue, namely by working with third parties. In order to optimize investment income and in accordance with the Financial Services Authority Regulation Number 2/POJK.05/2017 concerning Business Conduct of Guarantee Institutions dated January 11, 2017, the company has made investment placements in stocks, mutual funds, bonds and deposits. Placements in these investment instruments are carried out by prioritizing the principle of prudence (*prudent*) and in order to encourage the credit guarantee business.* **[102-18, 4.a.1, 4.a.3 4.b.2, 6.a]**

In addition to the strategies carried out above, from an environmental perspective, Jamkrindo's strategy focuses on efficiency and savings from paper use, electricity, and water use. Savings efforts are made through the use of energy-efficient facilities and socialization of savings. **[102-18, 4.a.1, 4.a.3 4.b.2, 6.a]**

With regard to social issues, Jamkrindo sustainability strategy focuses on developing human resources and customer service. From the aspect of human resources and the company organization, it has carried out organizational consolidation and accelerated HR competencies to meet the future of the company where business competition is becoming increasingly fierce. Organizational consolidation and acceleration of HR competencies are needed in order to produce and shape human resources that constitute the company's Human Capital to become more qualified and professional.

This HR development strategy includes developing the competence of Jamkrindo people, ensuring the right granting of rights to employees, and the right career development system. Meanwhile, the customer service strategy focuses on providing service excellence to customers that can be measured through customer satisfaction. **[102-18, 4.a.1, 4.a.3 4.b.2, 6.a]**

We believe that the sustainability strategy we have implemented will make a positive contribution to the Company's economic performance, as well as for the environment and society, which in turn will shape a better future for future generations.



PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Stakeholders Engagement





PELIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Stakeholders Engagement [102-40, 102-42, 102-43, 5.d]

Keterlibatan pemangku kepentingan merupakan salah satu mekanisme akuntabilitas mendasar bagi Perusahaan karena mewajibkan organisasi untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam mengidentifikasi, memahami, dan menanggapi masalah dan perhatian keberlanjutan, dan untuk melaporkan, menjelaskan, dan menjawab kepada pemangku kepentingan atas keputusan, tindakan, dan kinerja. Keterlibatan pemangku kepentingan adalah proses yang digunakan oleh organisasi untuk melibatkan pemangku kepentingan yang relevan untuk tujuan yang jelas untuk mencapai hasil yang disepakati.

Pemangku kepentingan itu sendiri bukan hanya anggota masyarakat atau organisasi non-pemerintah. Mereka adalah individu, kelompok individu, atau organisasi yang memengaruhi dan/atau dapat dipengaruhi oleh aktivitas, produk atau layanan organisasi, dan/atau kinerja terkait dengan masalah yang akan ditangani oleh keterlibatan pemangku kepentingan.

Jamkrindo menyadari bahwa pelibatan pemangku kepentingan dalam menjalankan bisnis Perusahaan sangat penting. Perusahaan yakin bahwa para pemangku kepentingan dapat mengarah pada pembangunan sosial yang lebih adil dan berkelanjutan dengan memberikan mereka yang memiliki hak untuk didengar dan kesempatan untuk dipertimbangkan dalam proses pengambilan keputusan, membantu untuk menentukan masalah material untuk pengelolaan dan pelaporan keberlanjutan, memungkinkan lebih baik manajemen risiko dan reputasi, memungkinkan pengumpulan sumber daya (pengetahuan, orang, uang dan teknologi) untuk memecahkan masalah dan mencapai tujuan yang tidak dapat dicapai oleh Perusahaan, dan memungkinkan pemahaman tentang lingkungan operasi yang kompleks, termasuk perkembangan pasar dan dinamika budaya.

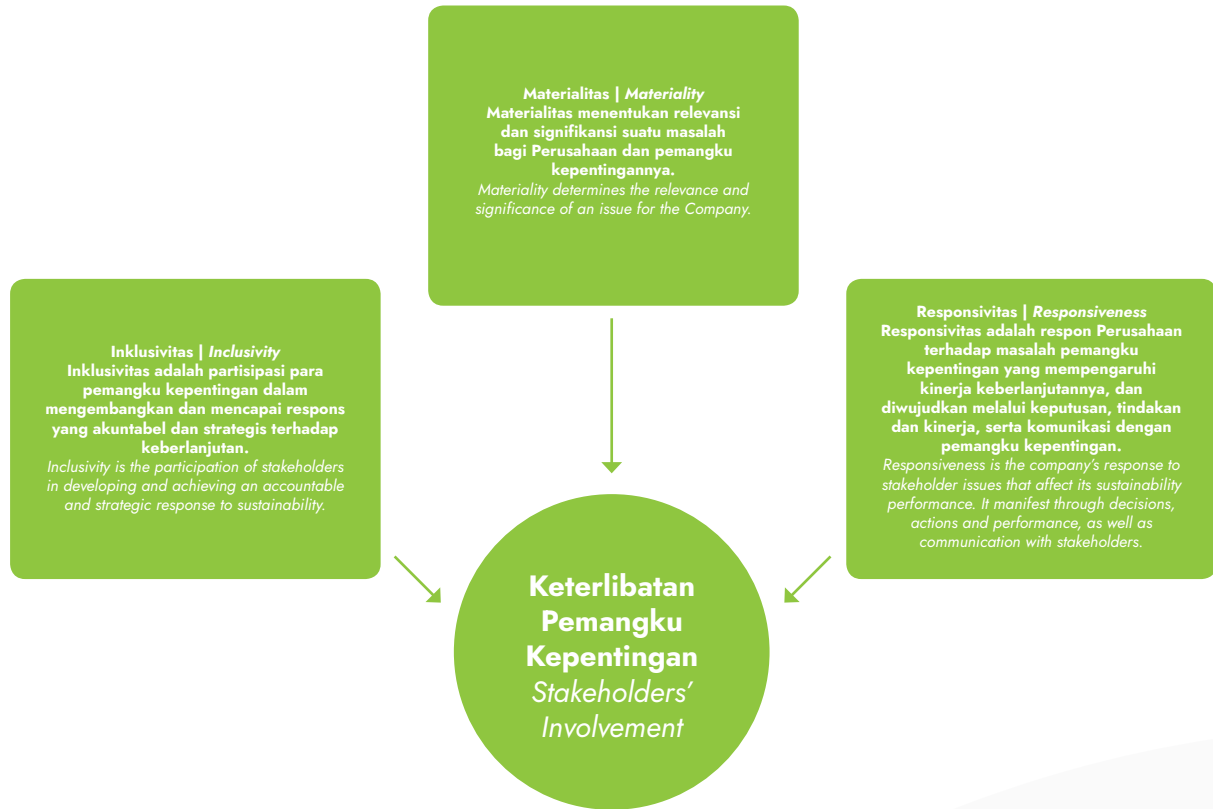
Dalam menjalankan pelibatan pemangku kepentingan, Jamkrindo menerapkan prinsip-prinsip pelibatan pemangku kepentingan yang dikembangkan oleh AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 2015 dan ISO 26000. Terdapat 3 (tiga) prinsip utama yang diterapkan perusahaan dalam melakukan pelibatan pemangku kepentingan, yaitu inklusivitas, materialitas, dan responsivitas. Ketiga prinsip tersebut saling terkoneksi satu sama lain, seperti yang tergambar dalam bagan berikut ini:

Stakeholder involvement is one of the fundamental accountability mechanisms for the Company because it requires the organization to involve stakeholders in identifying, understanding and responding to sustainability issues and concerns, and to report, explain, and respond to stakeholders for decisions, actions and performance. Stakeholder engagement is the process by which an organization engages relevant stakeholders for clear purposes of achieving agreed outcomes.

Stakeholders themselves are not just members of the community or non-governmental organizations. They are individuals, groups of individuals, or organizations that influence and/or could be affected by the organization's activities, products or services, and/or performance related to the issues that stakeholder engagement will address.

Jamkrindo realizes that stakeholder involvement in running the Company's business is very important. The company believes that stakeholders can lead to more equitable and sustainable social development by providing those with the right to be heard and the opportunity to be considered in the decision-making process, helping to determine material issues for sustainability management and reporting, enabling better risk management and reputation, enables the pooling of resources (knowledge, people, money and technology) to solve problems and achieve goals that the Company cannot achieve, and enables an understanding of the complex operating environment, including market developments and cultural dynamics.

In carrying out stakeholder engagement, Jamkrindo applies the principles of stakeholder engagement developed by the AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 2015 and ISO 26000. There are 3 (three) main principles applied by the company in engaging with stakeholders, namely inclusiveness, materiality and responsiveness. These three principles are connected to one another, as illustrated in the following chart:





METODE IDENTIFIKASI KELOMPOK PEMANGKU KEPENTINGAN

Stakeholder Group Identification Method [102-43, 5.d.1]

Perusahaan menggunakan metodologi identifikasi pemangku kepentingan berdasarkan AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 2015 dan ISO 26000 sebagai panduan identifikasi dan interaksi pemangku kepentingan. Perusahaan menggunakan hasil identifikasi tersebut dalam menjalankan pelibatan pemangku kepentingan (*stakeholder engagement*), pemetaan hal-hal yang menjadi perhatian pemangku kepentingan, dan merumuskan program-program berdasarkan kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan.

The company uses a stakeholder identification methodology based on the AA1000 Stakeholder Engagement Standard (AA1000SES) 2015 and ISO 26000 as a guide for stakeholder identification and interaction. Company use the results of this identification in carrying out stakeholder engagement, mapping issues of concern to stakeholders, and formulating programs based on stakeholder needs and expectations.

Metode Identifikasi Kelompok Pemangku Kepentingan Stakeholder Group Identification Method

DEPENDENCY (D)	<p>Kelompok atau individu yang secara langsung atau tidak langsung bergantung pada aktivitas, produk atau layanan dan kinerja Perusahaan, atau sebaliknya</p> <p><i>Groups or individuals who are directly or indirectly dependent on the activities, products or services and performance of the Company, or vice versa</i></p>
RESPONSIBILITY (R)	<p>Kelompok atau individu yang memiliki, atau di masa depan mungkin memiliki, organisasi hukum, tanggung jawab komersial, operasional atau etika/moral atau sebaliknya</p> <p><i>Groups or individuals who have, or may have in the future, legal, commercial, operational or ethical/moral responsibilities or vice versa</i></p>
TENSION (T)	<p>Kelompok atau individu yang membutuhkan perhatian segera dari organisasi terkait dengan masalah keuangan, ekonomi, sosial atau lingkungan yang lebih luas</p> <p><i>Groups or individuals requiring immediate attention from the organization regarding broader financial, economic, social, or environmental issues</i></p>
INFLUENCE (I)	<p>Kelompok atau individu yang dapat berdampak pada Perusahaan atau pemangku kepentingan pengambilan keputusan strategis atau operasional</p> <p><i>Groups or individuals who can have an impact on the Company or stakeholders in strategic or operational decision making</i></p>
DIVERSE PERSPECTIVE (DP)	<p>Kelompok atau individu yang pandangannya berbeda dapat mengarah pada pemahaman baru tentang situasi dan identifikasi peluang untuk tindakan yang mungkin tidak terjadi</p> <p><i>Groups or individuals whose views differ can lead to new understandings of situations and identification of opportunities for action that may not have occurred</i></p>
PROXIMITY (P)	<p>Kelompok atau individu yang memiliki kedekatan geografis dengan wilayah operasional Perusahaan</p> <p><i>Groups or individuals who have geographic proximity to the Company's operational areas</i></p>

PEMANGKU KEPENTINGAN, METODE PELIBATAN, FREKUENSI, TOPIK YANG DIAJUKAN DAN HARAPAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Stakeholders, Method of Engagement, Frequency, Topics Proposed and Stakeholder Expectations [102-40, 102-41, 102-42, 102-43, 102-44]



Dalam menjalankan bisnisnya, pelibatan pemangku kepentingan menjadi elemen yang sangat penting. Untuk menjalankan pelibatan pemangku kepentingan ini, Perusahaan secara berkala melakukan identifikasi terhadap pemangku kepentingan eksternal yang perlu dilibatkan atau tidak perlu dilibatkan dalam kegiatan operasional perusahaan.

Dari proses identifikasi pemangku kepentingan, Perusahaan menentukan bagaimana seharusnya tingkat interaksi pemangku kepentingan tersebut, sesuai dengan Tabel sebelumnya. Dasar yang Perusahaan gunakan dalam menentukan hal tersebut adalah tingkat pengaruh yang diterima langsung oleh Perusahaan. Berdasarkan tingkat pengaruh tersebut, maka Perusahaan mengurutkan pemangku kepentingan mana yang perlu kami libatkan atau tidak dalam kegiatan operasional Perusahaan. [102-42]

In running its business, stakeholder engagement is a very important element. To carry out this stakeholder engagement, the Company periodically identifies external stakeholders who need to be involved or do not need to be involved in the company's operational activities.

From the stakeholder identification process, the Company determines how the level of stakeholder interaction should be, according to the previous table. The basis that the Company uses in determining this is the level of influence received directly by the Company. Based on the level of influence, the Company ranks which stakeholders we need to involve or not to involve in the Company's operational activities. [102-42]



Sementara itu terkait dengan perjanjian antara Perusahaan dan pemangku kepentingan, Perusahaan juga memiliki perjanjian perundingan kolektif yang menjadi bentuk pengambilan keputusan bersama. Misalkan, pemangku kepentingan internal yakni karyawan, Perusahaan menjalankan perjanjian perundingan kolektif dengan perwakilan karyawan (serikat buruh). Perundingan ini membahas beberapa hal seperti kondisi kerja, peraturan perusahaan, tunjangan karyawan, dan lain sebagainya. Perjanjian perundingan kolektif ini merupakan bentuk pengambilan keputusan bersama antara Perusahaan dan karyawan yang menyangkut operasi Perusahaan. **[102-41]**

Setelah diidentifikasi dan ditentukan intensitas interaksi dengan pemangku kepentingan, Perusahaan menentukan metode yang digunakan dalam pelibatan pemangku kepentingan tersebut. Metode pelibatan pemangku kepentingan dapat ditentukan berbeda-beda sesuai dengan kebutuhan dan harapan para pemangku kepentingan. Berbagai forum komunikasi baik formal maupun informal terus dilakukan agar kami dapat senantiasa terdepan dalam menjawab berbagai topik utama dan masalah yang dihadapi oleh pemangku kepentingan, tantangan, kebutuhan, dan keinginan para pemangku kepentingan untuk nantinya Perusahaan dapat melakukan penyesuaian, perubahan, atau penggantian berbagai program atau kebijakan Perusahaan.

Jamkrindo menyusun kerangka hubungan dan pelibatan para pemangku kepentingan dalam kegiatan pengelolaan perusahaan. Perusahaan berupaya mengidentifikasi berbagai pemangku kepentingan dan mengelompokkannya ke dalam 7 (tujuh) kelompok pemangku kepentingan, yakni:

1. Pelanggan
2. Pemegang saham
3. Pemerintah dan Pembuat Kebijakan (*Regulator*)
4. Pegawai
5. Serikat Pekerja
6. Mitra Kerja
7. Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Sosial/Lembaga Swadaya Masyarakat
8. Media

*Meanwhile, in relation to the agreement between the Company and stakeholders, the Company also has a collective bargaining agreement which is a form of joint decision making. For example, internal stakeholders, namely employees, the Company carries out collective bargaining agreements with employee representatives (labor unions). This negotiation discusses several things such as working conditions, company regulations, employee benefits, and so on. This collective bargaining agreement is a form of joint decision making between the Company and employees regarding the Company's operations. **[102-41]***

After identifying and determining the intensity of interactions with stakeholders, the Company determines the methods used in engaging these stakeholders. Stakeholder engagement methods can be determined differently according to the needs and expectations of stakeholders. Various communication forums, both formal and informal, continue to be carried out so that we can always be at the forefront in answering various main topics and problems faced by stakeholders, challenges, needs and desires of stakeholders so that the Company can later make adjustments, changes, or changes to various programs or company policy.

Jamkrindo develops a relationship framework and involves stakeholders in company management activities. The company seeks to identify various stakeholders and classify them into 7 (seven) stakeholder groups, namely:

1. Customers
2. Shareholder
3. Government and Regulator
4. Employees
5. Workers Union
6. Partners
7. Community Organizations / Social Organizations / Non-Governmental Organizations
8. Media

Uraian selengkapnya tentang pelibatan pemangku kepentingan disampaikan dalam tabel berikut:

A complete description of stakeholder engagement is presented in the following table:

Daftar Pemangku Kepentingan, Metode Pelibatan, Frekuensi, Topik yang Diajukan dan Harapan Pemangku Kepentingan

Record of Stakeholders, Method of Engagement, Frequency, Topics Proposed and Stakeholder Expectations [102-40, 102-42, 102-43, 102-44, 5.d.2]

Pemangku Kepentingan Stakeholders [102-40]	Basis Identifikasi Identification basis	Metode Pelibatan Method of Involvement [102-43]	Frekuensi Frequency [102-43]	Topik Utama yang Diajukan Main Topic Proposed [102-44]	Harapan Pemangku Kepentingan Stakeholder Hopes
Pelanggan Customer	D, R, I, P	Website dan Frontline Information Website and Frontline Information	Setiap saat bila diperlukan Anytime when needed	Hubungan komersial/customer retention/kualitas layanan Commercial relations/customer retention/service quality	Mendapatkan layanan dan mutu layanan yang memuaskan Providing satisfactory and high quality service
		Kunjungan langsung Direct Visit	Setiap saat bila diperlukan Anytime when needed	Hubungan komersial/customer retention/kualitas layanan Commercial relations/customer retention/service quality	Informasi produk dan jasa terbaru yang dimiliki Perusahaan Information on the latest products and services owned by the Company
		Call center Call Center	Setiap saat bila diperlukan Anytime when needed	Hubungan komersial/customer retention/kualitas layanan Commercial relations/customer retention/service quality	Mendapatkan solusi apabila ada pertanyaan atau keluhan soal layanan produk dan jasa Get a solution if you have questions or complaints about product and service services
		Pengukuran Kepuasan Pelanggan Measurement of Customer Satisfaction	Setiap saat bila diperlukan Anytime when needed	Hubungan komersial/customer retention/kualitas layanan Commercial relations/customer retention/service quality	Mendapatkan gambaran tentang angka kepuasan dan ketidakpuasan pelanggan. Get an idea of the customer satisfaction and dissatisfaction rates.
Pemegang Saham Shareholders	D, R, I, P	RUPS dan RUPSLB GMS and EGMS	Tahunan Annually	Dividen/pengembangan usaha/tata kelola/manajemen Dividends/business development/governance/management	Perusahaan berjalan secara produktif dan meningkatnya kinerja serta mencapai target dari pemegang saham The company runs productively and improves performance and achieves shareholder targets



Pemangku Kepentingan Stakeholders [102-40]	Basis Identifikasi Identification basis	Metode Pelibatan Method of Involvement [102-43]	Frekuensi Frequency [102-43]	Topik Utama yang Diajukan Main Topic Proposed [102-44]	Harapan Pemangku Kepentingan Stakeholder Hopes
Pemerintah dan Pembuat Kebijakan <i>Government and Policy Makers</i>	D, R, T, I, DP, P	Pelaporan Pelaksanaan Ketaatan <i>Compliance Implementation Reporting</i>	4 (empat) kali dalam setahun <i>4 (four) times a year</i>	Pembangunan/pengembangan usaha/investasi <i>Development/Business development/ investment</i>	Memastikan dipatuhinya ketentuan perundang-undangan yang berlaku <i>Ensure the compliance of applicable laws and regulations</i>
Pegawai <i>Employee</i>	D, R, T, I, P	Media Internal (Majalah) <i>Internal Media (Magazine)</i>	1 (satu) Kali dalam Sebulan <i>1 (One) a month</i>	Distribusi informasi kepada karyawan <i>Information distribution to the employee</i>	Melakukan sosialisasi ihwal kebijakan dan strategi yang berkaitan dengan kepegawaian <i>Outreach policies and strategies related to employment</i>
		Survei Kepuasan Pegawai <i>Employee Satisfaction Survey</i>	1 (satu) kali setahun <i>1 (one) a year</i>	Kepuasan Karyawan <i>Employee Satisfaction</i>	Mengukur tingkat kepuasan pegawai dan menjangkau harapan mereka <i>Measure employee satisfaction levels and capture their expectations</i>
Serikat Pekerja <i>Workers Union</i>	D, R, T, I, P	Pembahasan Perjanjian Kerja Bersama <i>Discussion on Collective Labor Agreement</i>	Saat diperlukan <i>When needed</i>	Ketenagakerjaan/kesejahteraan <i>Employment/welfare</i>	Menciptakan iklim kerja yang kondusif <i>Create conducive working climate</i>
		Pembahasan apabila ada persoalan karyawan dengan manajemen <i>Discussion of possible issue between employee and management</i>	Saat diperlukan <i>When needed</i>	Ketenagakerjaan/kesejahteraan <i>Employment/welfare</i>	Mencari solusi terbaik <i>Look for the best solution</i>
Mitra Kerja, Supplier <i>Work Partners, Suppliers</i>	D, R, T, P	Kontrak kerja Mitra investasi Seminar dan Workshop <i>Employment contract Investment partners Seminar and workshop</i>	Setiap saat bila diperlukan <i>Anytime when needed</i>	Hubungan komersial <i>Commercial relations</i>	Proses pengadaan yang obyektif Memperoleh kerja sama yang saling menguntungkan <i>An objective procurement process Obtain mutually beneficial cooperation</i>
Media Massa <i>Mass Media</i>	T, I, DP	Press Release <i>Press Release</i>	Setiap saat bila diperlukan <i>Anytime when needed</i>	Pelaksanaan program <i>Program implementation</i>	Sumber informasi yang terpercaya Memberikan informasi terkait bisnis Perusahaan yang perlu diketahui oleh publik <i>Trusted sources of news Provide necessary information related to the company's business to the</i>

Pemangku Kepentingan Stakeholders [102-40]	Basis Identifikasi Identification basis	Metode Pelibatan Method of Involvement [102-43]	Frekuensi Frequency [102-43]	Topik Utama yang Diajukan Main Topic Proposed [102-44]	Harapan Pemangku Kepentingan Stakeholder Hopes
<p>Masyarakat, Komunitas Lokal, Organisasi Kemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat <i>Community, Local Communities, Civil Society Organizations, Non-Governmental Organizations</i></p>	<p>D, R, T, I, DP, P</p>	<p>Kerja sama strategis untuk menjalankan program-program Tanggung Jawab Perusahaan, baik di bidang sosial maupun lingkungan <i>Strategic cooperation to carry out Corporate Responsibility programs, both in the social and environmental fields</i></p>	<p>Setiap saat bila diperlukan <i>Anytime when needed</i></p>	<p>Rencana dan aktualisasi kegiatan-kegiatan CSR Perusahaan <i>Plans and actualization of the Company's CSR activities</i></p>	<p>Mengoptimalkan pencapaian Program CSR Perseroan <i>Optimizing the achievement of the Company's CSR Program</i></p>



TENTANG LAPORAN INI

About This Report





TENTANG LAPORAN INI

About This Report

Tahun 2020 merupakan tahun yang penuh tantangan bagi seluruh warga dunia. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada aspek kesehatan masyarakat tetapi juga berdampak pada perekonomian secara makro. Penurunan pertumbuhan ekonomi dan transaksi finansial berdampak pada kinerja perusahaan. Dalam kondisi ini, Perusahaan mampu mempertahankan kinerja yang positif. Dalam kondisi Pandemi ini Perusahaan tetap berkomitmen pada implementasi tanggung jawab sosial serta lingkungan.

PT Jaminan Kredit Indonesia atau “Jamkrindo” atau “Perusahaan”, merupakan perusahaan penjamin kredit yang kegiatan usahanya melakukan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial Penerima Kredit (Terjamin) kepada Penerima Jaminan. Proses Penjaminan Kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut Penerima Jaminan, debitur kredit yang disebut Terjamin, dan Perusahaan Penjamin kredit yang disebut Penjamin. Perusahaan tentunya memiliki tanggung jawab besar untuk dapat membantu pemangku kepentingan agar mampu mengoptimalkan sumber daya alam yang dimiliki.

Sebagai bentuk komitmen dan kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan, antara lain, Pasal 66 C, Undang-Undang No.40/2007 tentang Perusahaan Terbatas, yang mewajibkan Perseroan Terbatas menyampaikan laporan kegiatan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) dalam Laporan Tahunan. Selain itu, per tanggal 1 Januari 2020, OJK mewajibkan perusahaan lembaga keuangan untuk menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang tertuang dalam POJK No.51/POJK.03/2017. Hal ini menunjukkan bahwa isu keberlanjutan semakin mendapatkan perhatian berasal banyak sekali pihak tidak terkecuali pemerintah.

Sebagai bagian dari komitmen Jamkrindo terhadap penyampaian informasi terkait keberlanjutan Perusahaan, kami menerbitkan Laporan Keberlanjutan yang merupakan laporan yang terpisah dari Laporan Tahunan. Laporan Keberlanjutan berisi laporan pelaksanaan dan pencapaian berbagai inisiatif keberlanjutan Perusahaan. Laporan Keberlanjutan Jamkrindo 2020 merupakan laporan kelima yang diterbitkan oleh Perusahaan secara terpisah dengan Laporan Tahunan. Walau terbit terpisah, namun keduanya merupakan satu kesatuan yang saling melengkapi. Laporan sebelumnya yaitu Laporan Keberlanjutan tahun buku 2019 terbit pada Juni 2020. **[102-51]**

Laporan keberlanjutan ini disusun untuk menjadi sumber informasi terutama bagi para investor termasuk para pemangku kepentingan baik internal maupun eksternal. Laporan ini berisi tentang dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang diakibatkan oleh operasional

2020 is a year full of challenges for all citizens of the world. The COVID-19 pandemic does not only have an impact on the public health aspect but also has an impact on the macro economy. The decline in economic growth and financial transactions has an impact on company performance. In this condition, the Company was able to maintain a positive performance. In this pandemic condition, the Company remains committed to the implementation of social and environmental responsibility.

PT Jaminan Kredit Indonesia or “Jamkrindo” or the “Company”, is a credit guarantee company whose business activities are to provide guarantees for the fulfillment of the Creditors’ (Guaranteed) financial obligations to the Guarantee Recipients. The Credit Guarantee process involves at least 3 (three) parties, namely the credit provider business entity called the Guarantee Recipient, the credit debtor called the Guaranteed, and the credit Guarantee Company called the Guarantor. Companies certainly have a big responsibility to be able to help stakeholders to be able to optimize their natural resources.

As a form of commitment and compliance with laws and regulations, among others, Article 66 C, Law No.40/2007 regarding Limited Liability Companies, which requires Limited Liability Companies to submit reports on Social and Environmental Responsibility (TJSL) activities in the Annual Report. In addition, as of January 1, 2020, OJK requires financial institution companies to issue a Sustainability Report as stated in POJK No.51/POJK.03/2017. This shows that the issue of sustainability is getting more and more attention from many parties, including the government.

*As part of Jamkrindo commitment to delivering information related to the Company’s sustainability, we publish a Sustainability Report which is a separate report from the Annual Report. The Sustainability Report contains reports on the implementation and achievements of the Company’s various sustainability initiatives. The Jamkrindo 2020 Sustainability Report is the fifth report published by the Company separately from the Annual Report. Even though they are published separately, both of them are a complementary unit. The previous report, namely the Sustainability Report for the 2019 financial year was published in June 2020. **[102-51]***

This sustainability report is prepared to be a source of information, especially for investors, including internal and external stakeholders. This report contains the economic, environmental and social impacts caused by Jamkrindo daily operations, which includes various

sehari-hari Jamkrindo, yang mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh semua Kantor Wilayah, Cabang dan Kantor Unit Pelayanan di Indonesia. Laporan tidak mencakup kegiatan anak perusahaan, yakni PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. **[102-45, 102-50, 102-52]**

Penyusunan Laporan ini merupakan tanggung jawab penuh Direktur Utama. Adapun data keuangan yang digunakan merujuk pada data keuangan yang terdapat dalam Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik. Data keuangan juga disajikan dalam dua atau lebih periode berturut-turut untuk melihat perubahan baik positif ataupun negatif atas kinerja keuangan Perusahaan. Kami menerbitkan laporan ini menggunakan dua bahasa yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan menggunakan denominasi Rupiah untuk data keuangan.

Dalam Laporan Keberlanjutan tahun 2020, tidak ada pernyataan ulang yang bersifat memperbaiki laporan sebelumnya. Selain itu, juga tidak terdapat perubahan dalam daftar Topik Material dan Batasan Topik. Laporan ini terdapat dua versi yakni edisi cetak dan edisi unduhan yang tersedia pada situs resmi Perusahaan dengan alamat www.jamkrindo.co.id. **[102-48, 102-49]**

*activities carried out by all Regional Offices, Branches and Service Unit Offices in Indonesia. The report does not cover the activities of its subsidiary, namely PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. **[102-45, 102-50, 102-52]***

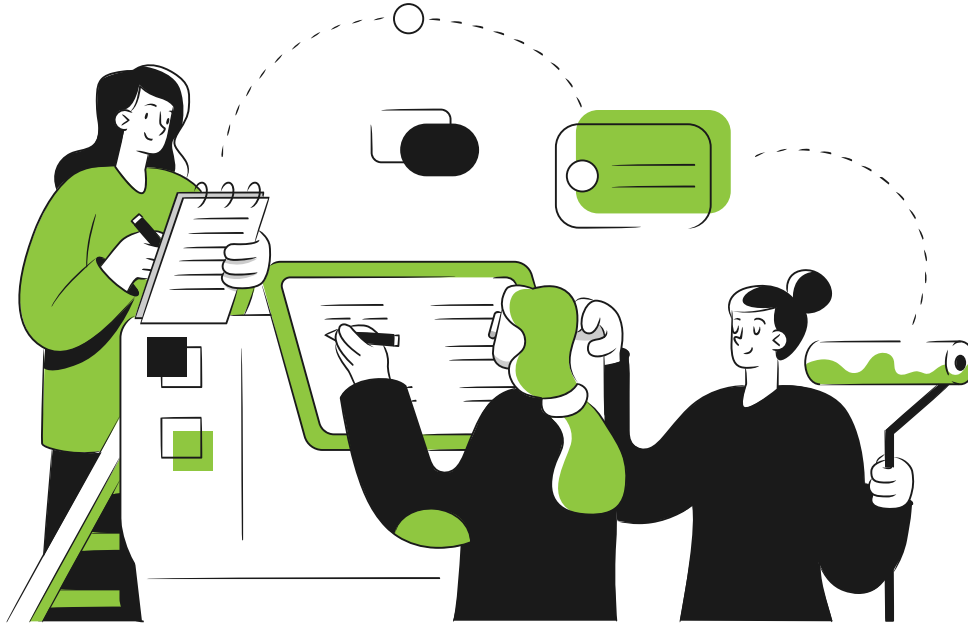
The preparation of this report is the full responsibility of the President Director. The financial data used refers to the financial data contained in the Financial Statements that have been audited by the Public Accounting Firm. Financial data is also presented in two or more consecutive periods to see whether positive or negative changes in the Company's financial performance. We publish this report in two languages, Indonesian and English, using Indonesian Rupiah for financial data.

*In the 2020 Sustainability Report, there is no restatement that can improve the previous report. Also, there are no changes in the list of Material Topics and Topic Boundaries. There are two versions of this report, the printed edition and the download edition, which are available on the Company's official website at the address www.jamkrindo.co.id. **[102-48, 102-49]***



ACUAN DALAM PEMBUATAN LAPORAN

Reference in Report Making [102-54]



Laporan ini disusun berdasarkan POJK No.51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik serta Standar GRI terbaru yaitu versi 2020. Standar GRI yang dikeluarkan oleh Global Sustainability Standards Board (GSBB), lembaga yang dibentuk oleh Global Reporting Initiative (GRI) untuk menangani pengembangan standar laporan keberlanjutan, diadopsi sebagai rujukan karena merupakan panduan internasional yang paling banyak dipakai di tingkat global. Sesuai dengan pilihan yang disediakan dalam Standar GRI, yakni Pilihan Inti dan Pilihan Komprehensif, Laporan ini telah disiapkan sesuai dengan Standar GRI: Pilihan Inti. [102-54]

Kami berusaha untuk menyajikan semua informasi yang wajib atau direkomendasikan pengungkapannya oleh kedua pedoman di atas yakni POJK No.51/POJK.03/2017 dan Standar GRI dalam Laporan Keberlanjutan ini. Untuk memberikan kemudahan pembaca dalam menemukan informasi yang sesuai dengan kedua pedoman, kami mencantumkan nomor indikator atau angka pengungkapan kedua pedoman di belakang kalimat atau alinea yang sesuai.

Data lengkap kecocokan informasi Perusahaan dengan POJK No.51/POJK.03/2017 maupun Indeks Standar GRI disajikan di bagian belakang laporan ini, dimulai pada halaman 246. [102-55]

This report is prepared based on POJK No.51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers and Public Companies as well as the latest GRI Standards, namely the 2020 version. GRI Standards issued by the Global Sustainability Standards Board (GSBB), an institution established by the Global Reporting Initiative (GRI) to deal with the development of sustainability reporting standards, adopted as a reference because it is the most widely used international guide at the global level. In accordance with the options provided in the GRI Standards, namely Core Choices and Comprehensive Options, this Report has been prepared in accordance with the GRI Standards: Core Choices. [102-54]

We try to present all the information that is required or recommended for disclosure by the two guidelines above, namely POJK No.51/POJK.03/2017 and the GRI Standards in this Sustainability Report. To make it easier for readers to find information that is in accordance with the two guidelines, we include the indicator number or the disclosure number of the two guidelines at the back of the appropriate sentence or paragraph.

Complete data on the compatibility of the Company's information with POJK No.51/POJK.03/2017 and the GRI Standard Index are presented at the back of this report, starting on page 246. [102-55]

PERIODE DAN SIKLUS LAPORAN

Reporting Period and Cycle **[102-50, 102-52, 102-51]**



Laporan ini diterbitkan setiap tahun dengan kurun waktu pelaporan 1 Januari - 31 Desember, kecuali diindikasikan lain. Laporan Keberlanjutan Jamkrindo tahun buku 2020 merupakan laporan kelima yang diterbitkan oleh Perusahaan. Laporan ini berisi tentang semua kegiatan tanggung jawab sosial dan lingkungan Jamkrindo selama satu tahun kalender 2020 yang mencakup berbagai kegiatan yang dilakukan oleh semua Kantor Wilayah, Cabang dan Kantor Unit Pelayanan di Indonesia. Laporan tidak mencakup kegiatan anak perusahaan, yakni PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

Melalui laporan ini kami berharap para pemangku kepentingan bisa memperoleh gambaran lebih menyeluruh dan terbuka mengenai segala aktivitas serta perkembangan kegiatan pembangunan berkelanjutan yang telah dijalankan oleh Jamkrindo, untuk periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. **[102-45, 102-50, 102-51, 102-52]**

This report is published annually with the reporting period January 1 - December 31, unless otherwise indicated. The Jamkrindo Sustainability Report for the 2020 financial year is the fifth report published by the Company. This report contains all Jamkrindo social and environmental responsibility activities for one calendar year 2020 which includes various activities carried out by all Regional Offices, Branches and Service Unit Offices in Indonesia. The report does not cover the activities of its subsidiary, namely PT Penjaminan Jamkrindo Syariah.

*Through this report, we hope that stakeholders can get a more comprehensive and open picture of all activities and developments in sustainable development activities that have been carried out by Jamkrindo, for the period 1 January 2020 to 31 December 2020. **[102-45, 102-50, 102-51, 102-52]***



PRINSIP-PRINSIP PENENTUAN KUALITAS LAPORAN

Principles for Determining Report Quality [103-1]

Jamkrindo menerapkan Prinsip-Prinsip untuk Menetapkan Isi Laporan' sebagaimana direkomendasikan dalam Panduan Pelaporan Keberlanjutan GRI, meliputi: [102-46]

1. Pelibatan Pemangku Kepentingan

Kami melibatkan Pemangku Kepentingan dalam penentuan topik material yang diungkapkan dalam Laporan ini melalui *Focus Group Discussion*.

2. Konteks Keberlanjutan

Konten dalam Laporan ini adalah isu atau topik yang berhubungan dengan konteks keberlanjutan, meliputi Topik Ekonomi, Lingkungan dan Sosial. Dalam hal ini, Keberlanjutan bisa diartikan sebagai Kelestarian.

3. Materialitas

Prinsip ini kami terapkan dengan menentukan konten Laporan melalui prosedur penetapan materialitas dengan terlebih dulu mengidentifikasi topik spesifik, kemudian menetapkan bobot dari masing-masing topik tersebut sehingga didapat topik yang material, yakni topik yang kami nilai menjadi prioritas dan penting untuk disampaikan.

4. Kelengkapan

Kami menegakkan prinsip ini dengan melakukan pengujian atas topik yang material, mencakup ketersediaan data maupun penetapan batasan (*boundary*) sehingga mencerminkan dampak ekonomi, lingkungan dan sosial yang signifikan.

Sesuai dengan standar GRI, Perusahaan telah mengimplementasikan enam prinsip pelaporan keberlanjutan yang akan menentukan kualitas Laporan Keberlanjutan. Kami yakin bahwa Laporan Keberlanjutan yang kami susun telah mengakomodasi keenam prinsip-prinsip pelaporan keberlanjutan, yang digambarkan dalam gambar berikut:

Jamkrindo applies the 'Principles for Defining Report Content' as recommended in the GRI Sustainability Reporting Guidelines, including: [102-46]

1. Stakeholder Engagement

We involve Stakeholders in determining the material topics disclosed in this Report through Focus Group Discussions.

2. Sustainability Context

The content in this report is an issue or topic related to the context of sustainability, covering Economic, Environmental and Social Topics. In this case, Sustainability can be defined as Sustainability.

3. Materiality

We apply this principle by determining the content of the Report through the procedure for determining materiality by first identifying specific topics, then assigning weights to each of these topics so that material topics are obtained, namely topics that we consider to be priority and important to be conveyed.

4. Completeness

We enforce this principle by conducting tests on material topics, including data availability and establishing boundaries so that they reflect significant economic, environmental and social impacts.

In accordance with GRI standards, the Company has implemented six sustainability reporting principles that will determine the quality of the Sustainability Report. We believe that the Sustainability Report that we have prepared accommodates the six principles of sustainability reporting, which are illustrated in the following figure:



Akurasi/Accuracy

Informasi yang disajikan harus akurat dan detail sehingga dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan.

The information presented must be accurate and detailed so that it can be used as a consideration for stakeholders in making decisions.



Keseimbangan/Balance

Informasi yang disajikan harus menggambarkan sisi positif dan negatif atas aktivitas perusahaan sehingga penilaian kinerja perusahaan dapat dilakukan secara menyeluruh.

The information presented must describe the positive and negative sides of the company's activities so that the company's performance assessment can be carried out as a whole.



Kejelasan/Clarity

Informasi yang disajikan harus dapat dimengerti dan dapat diakses oleh para pemangku kepentingan.

The information presented must be understandable and accessible to stakeholders.



Keterbandingan/Comparability

Informasi yang disajikan harus disusun secara konsisten sehingga para pemangku kepentingan dapat menganalisis perubahan kinerja perusahaan dari waktu ke waktu atau bahkan dengan perusahaan lain.

The information presented must be compiled in a consistent manner so that stakeholders can analyze changes in company performance over time or even with other companies.



Keandalan/Reliability

Laporan harus memuat dan menggunakan informasi serta proses yang digunakan dalam menyiapkan laporan, yang dapat diperiksa dan mencerminkan kualitas dan materialitas dari informasi yang disajikan.

The report must contain and use the information and processes used in preparing the report, which can be checked and reflects the quality and materiality of the information presented.



Ketepatan Waktu/Punctuality of Time

Laporan harus tersedia secara rutin dan tepat waktu bagi para pemangku kepentingan untuk membuat keputusan yang terinformasi.

Reports should be made available on a regular and timely basis for stakeholders to make informed decisions.



MENDEFINISIKAN ISI LAPORAN DAN BATASAN TOPIK

Defining Report Content and Topic Boundaries [102-46, 103-1]

Berdasarkan opsi yang diperkenankan oleh Standar GRI, Jamkrindo memutuskan untuk penggunaan opsi inti agar Perusahaan dapat memfokuskan pada pelaporan topik-topik material yang penting bagi pemangku kepentingan dan penting bagi Perusahaan. Dalam memilih topik material yang kami laporkan dalam Laporan Keberlanjutan ini, Kami menetapkan 4 (empat) langkah dalam menentukan topik dan isi laporan sesuai dengan Standar GRI, yaitu:

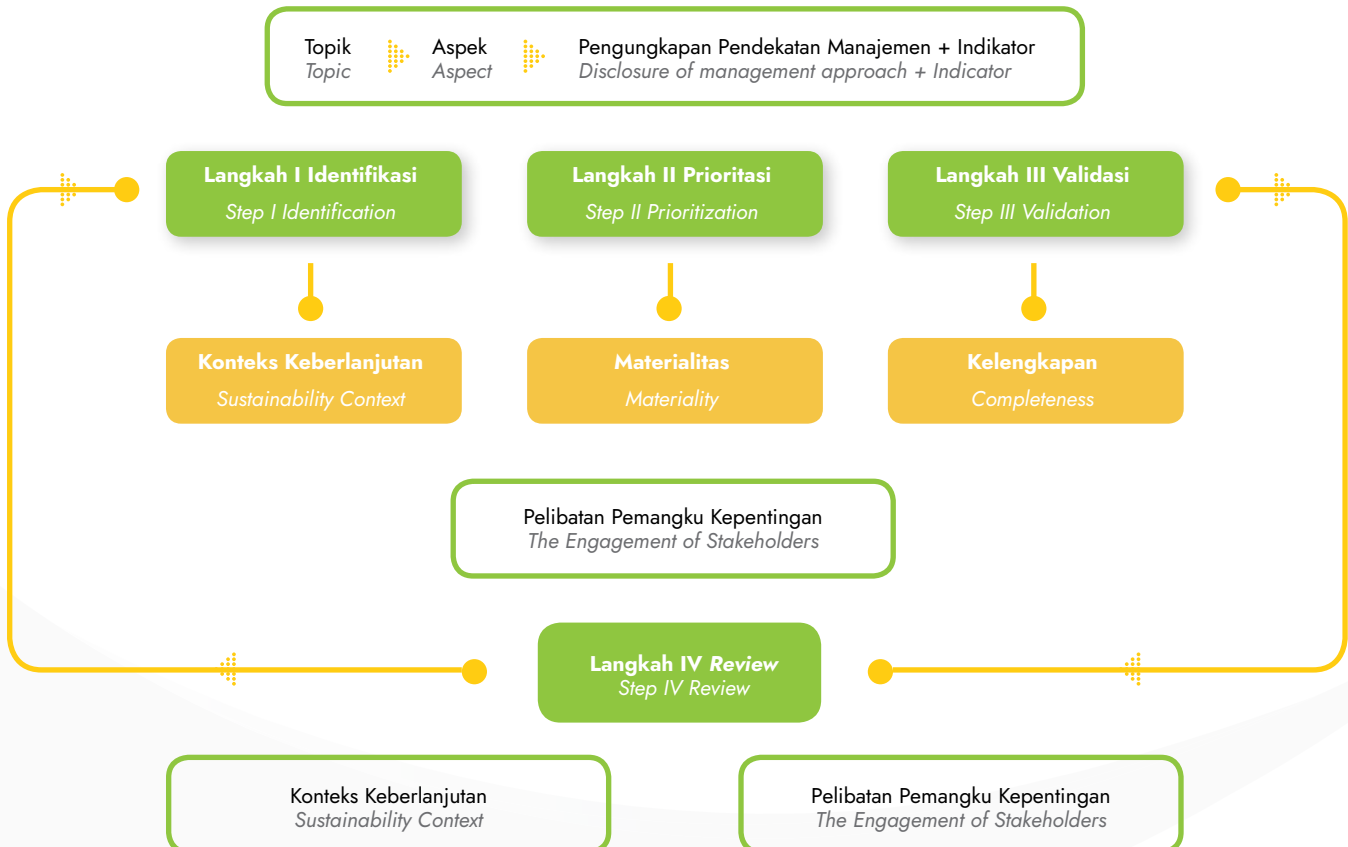
1. Identifikasi: Kami melakukan identifikasi terhadap topik-topik yang material/signifikan dan menetapkan batasan (*boundary*).
2. Prioritas: Kami membuat prioritas atas topik-topik yang telah diidentifikasi pada langkah sebelumnya.
3. Validasi: Kami melakukan validasi atas topik-topik yang dinilai material tersebut.
4. *Review*: Kami melakukan *review* atas laporan setelah diterbitkan guna meningkatkan kualitas laporan tahun berikutnya.

Based on the options permitted by the GRI Standards, Jamkrindo decided to use the core options so that the Company can focus on reporting material topics that are important to stakeholders and important to the Company. In selecting material topics that we report in this Sustainability Report, we define 4 (four) steps in determining the topic and content of the report in accordance with the GRI Standards, namely:

1. *Identification: We identify material / significant topics and set boundaries.*
2. *Priority: We prioritize the topics identified in the previous step.*
3. *Validation: We perform validation on the topics that are assessed as material.*
4. *Review: We review reports after they are published in order to improve the quality of reports for the following year.*

Keempat langkah dalam menetapkan konten Laporan digambarkan dalam Bagan Alur Proses Penetapan Konten Laporan berikut ini:

The four steps in defining the Report content are described in the following Report Content Determination Process Flowchart:



Topik material dalam Laporan ini, seperti disebutkan dalam Standar GRI, adalah topik-topik yang telah diprioritaskan oleh organisasi untuk dicantumkan dalam laporan. Dimensi yang digunakan untuk menentukan prioritas, antara lain, adalah dampak bagi ekonomi, lingkungan, dan sosial. Penetapan topik material dan *boundary* didasarkan pada isu-isu yang berpengaruh signifikan bagi Perusahaan, anak perusahaan serta seluruh pemangku kepentingan.

Laporan ini Kami fokuskan pada beberapa topik utama yang ditetapkan berdasarkan prinsip materialitas dan relevansinya dengan keberlanjutan Perusahaan, yaitu mencakup pengelolaan Program Kemitraan Dan Bina Lingkungan (PKBL) pencapaian kinerja ekonomi yang ditopang oleh penerapan Tata Kelola yang Berkelanjutan. Penetapan topik material dan *boundary* didasarkan pada isu - isu yang berpengaruh signifikan bagi Perusahaan serta seluruh Pemangku Kepentingan. Proses penetapan melibatkan berbagai divisi dalam sebuah *focus group discussion* untuk memberikan analisis terhadap topik-topik material dan *boundary* atas konten Laporan Keberlanjutan. **[102-49, 103-1, 103-3]**

The material topics in this Report, as identified in the GRI Standards, are topics that have been prioritized by the organization for inclusion in the report. The dimensions used to determine priorities, among others, are impacts on the economy, environment, and society. The determination of material topics and boundaries is based on issues that have a significant impact on the Company, its subsidiaries and all stakeholders.

*We focus on some of the main topics based on the materiality principle and its relevance to the Company's sustainability, including the management of the Partnership and Community Development Program (PKBL), the achievement of economic performance supported by the implementation of Sustainability Governance. The determination of material topics and boundaries is based on issues which have a significant impact on the Company and all Stakeholders. The determination process involves various divisions in a focus group discussion to provide an analysis of the Material Topics and Boundaries of the content of the Sustainability Report. **[102-49, 103-1, 103-3]***



DAFTAR TOPIK MATERIAL DAN BATASAN

List of Material Topics and Boundaries [102-47, 102-46, 103-1]

Topik material dan *boundary* dalam Laporan ini adalah relatif sama dengan tahun sebelumnya. Sebab, berdasarkan penilaian kami, semuanya masih relevan dengan kondisi tahun 2019. Topik material dan *boundary* tersebut sebagai berikut: [102-49]

The material topics and boundaries in this Report are relatively the same as the previous year. Because, based on our assessment, everything is still relevant to the conditions in 2019. The material topics and boundaries are as follows: [102-49]

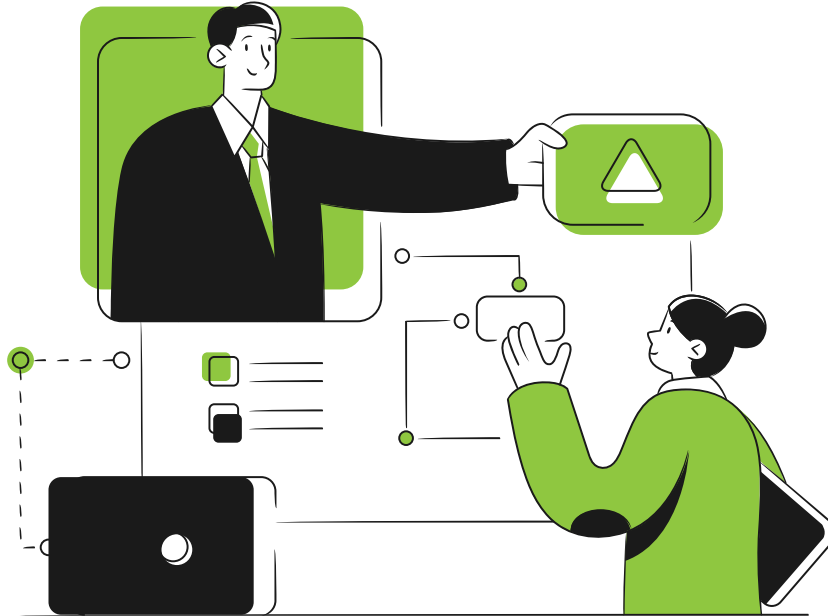
Topik Material Material Topics [102-47]	Kenapa Topik Ini Material Why the Topic is Material [103-1]	Nomor Pengungkapan GRI Standards GRI Standard Disclosure Number	Batasan Topik Topic Boundaries [102-46]	
			Di dalam/ Inside Jamkrindo	Di luar/ Outside Jamkrindo
Topik Ekonomi/Economic Topics				
Kinerja Ekonomi <i>Economic Performance</i>	Karena pencapaian dan kinerja Perusahaan selama tahun pelaporan penting bagi pemangku kepentingan <i>Because the achievements and performance of the Company during the reporting year are important for stakeholders</i>	201-1, 201-3, 201-4	✓	✓
Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>Indirect Economic Impacts</i>	Karena keberadaan Perusahaan memberikan manfaat signifikan bagi masyarakat <i>Because the Company's existence provides significant benefits to the community</i>	203-1, 203-2	✓	✓
Anti Korupsi <i>Anti Corruption</i>	Karena komitmen Perusahaan untuk menyelenggarakan operasional secara bersih, jujur dan transparan dapat berdampak positif bagi tata kelola dan operasional perusahaan <i>This is because the Company's commitment to conduct operations in a clean, honest and transparent manner can have a positive impact on corporate governance and operations</i>	205-3	✓	
Bersaing secara sehat <i>Healthy Competition</i>	Karena cara perusahaan menjalankan bisnis dengan persaingan secara sehat dapat mempengaruhi citra dan kepercayaan terhadap Perusahaan <i>Because the way a company conducts business with fair competition can affect its image and trust in the Company</i>	206-1	✓	✓
Topik Lingkungan/Environment Topics				
Material <i>Material</i>	Karena upaya Perusahaan untuk menghemat penggunaan material, khususnya kertas berdampak signifikan keberlanjutan lingkungan <i>This is because the Company's efforts to conserve materials, especially paper, have a significant impact on environmental sustainability</i>	301-1	✓	
Energi <i>Energy</i>	Karena menggambarkan kepedulian Perusahaan terhadap pengelolaan energi yang ketersediaannya kian terbatas <i>Because it illustrates the Company's concern for energy management, whose availability is increasingly limited</i>	302-1, 302-3, 302-4, 302-5	✓	

Topik Material Material Topics [102-47]	Kenapa Topik Ini Material Why the Topic is Material [103-1]	Nomor Pengungkapan GRI Standards GRI Standard Disclosure Number	Batasan Topik Topic Boundaries [102-46]	
			Di dalam/ Inside Jamkrindo	Di luar/ Outside Jamkrindo
Air dan Limbah Air Water and Effluents	Karena pengelolaan sumber daya air yang ketersediaannya kian terbatas dan bagaimana pengelolaan limbah air sangat penting bagi lingkungan <i>Because the management of water resources, the availability of which is increasingly limited and how water waste management is very important for the environment</i>	303-1, 303-2, 303-3, 303-4, 303-5	√	
Topik Sosial/Social Topics				
Ketenagakerjaan Employee	Karena pengelolaan pegawai/SDM yang baik sangat penting bagi Perusahaan dan Pemangku Kepentingan <i>Because good employee/HR management is very important for the Company and its stakeholders</i>	401-1, 401-2, 401-3	√	
Hubungan Ketenagakerjaan Employment Relations	Hubungan yang baik antara Perusahaan dengan tenaga kerjanya menjadi sangat penting bagi karyawan <i>A good relationship between the company and its workforce is very important for employees</i>	402-1	√	
Kesehatan dan Keselamatan Kerja Occupational Health and Safety	Karena komitmen Perusahaan dalam menyediakan tempat kerja yang aman dan nyaman sangat penting bagi pegawai <i>Because the Company's commitment to providing a safe and comfortable workplace is very important for employees</i>	403-1, 403-2, 403-3, 403-4	√	
Pelatihan dan Pendidikan Training and Education	Komitmen Perusahaan dalam upaya meningkatkan kompetensi pekerja sangat penting dalam meningkatkan kualitas SDM <i>The Company's commitment to improving employee competence is very important in improving the quality of human resources</i>	404-2, 404-3	√	
Pemasaran dan Pelabelan Marketing and Labeling	Menggambarkan komitmen Perusahaan dalam mentaati kaidah pemasaran yang baik, serta penyediaan informasi produk bagi pelanggan/konsumen untuk mencapai kepuasan pelanggan <i>Describes the Company's commitment to adhering to good marketing rules, as well as providing product information for customers/consumers to achieve customer satisfaction</i>	417-1	√	√
Masyarakat Lokal Local Community	Karena komitmen Perusahaan terhadap keterlibatan masyarakat di sekitarnya dalam berbagai program/kegiatan sangat penting bagi masyarakat sekitar Perusahaan <i>Because the Company's commitment to the involvement of the surrounding communities in various programs / activities is very important for the communities around the Company</i>	413-1, 413-2	√	√



EKSTERNAL ASSURANCE

External Assurance [102-56, 7]



Baik GRI maupun POJK merekomendasikan penggunaan *external assurance* oleh pihak ketiga yang independen untuk memastikan kualitas dan kehandalan informasi yang disampaikan dalam laporan ini. Manajemen memahami pentingnya verifikasi oleh pihak independen tersebut. Namun, dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, Perusahaan memutuskan untuk belum menggunakan *assurance* eksternal yang independen. Untuk memenuhi kualitas dan keandalan informasi, pemeriksaan isi Laporan ini dilakukan oleh tim internal Perusahaan. Jamkrindo menjamin dan memastikan bahwa semua data dan informasi yang ada dalam laporan ini telah melalui proses verifikasi dan *review* oleh manajemen puncak demi menyajikan laporan keberlanjutan yang benar, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. [102-56, 7]

Both GRI and POJK recommend the use of external assurance by independent third parties to ensure the quality and reliability of the information presented in this report. Management understands the importance of verification by this independent party. However, with certain considerations, the Company decided not to use external independent assurance. In order to meet the quality and reliability of information, the internal team of the Company will check the contents of this Report. Jamkrindo guarantees and ensures that all data and information contained in this report has gone through a verification and review process by top management in order to present a true, accurate and accountable sustainability report. [102-56, 7]

AKSESIBILITAS DAN UMPAN BALIK

Accessibility and Feedback [102-53]

Kami berharap, dengan adanya laporan ini, segenap pemangku kepentingan dapat mengetahui berbagai informasi mengenai kinerja keberlanjutan yang telah dilaksanakan oleh Perusahaan selama tahun 2020, dan menjadikan laporan ini sebagai rujukan dalam mengambil keputusan di masa yang akan datang. Untuk terwujudnya komunikasi dua arah. Untuk terwujudnya komunikasi dua arah dan agar Perusahaan dapat melakukan evaluasi dalam rangka meningkatkan kualitas Laporan di masa mendatang, kami menyediakan Lembaran Umpan Balik di bagian akhir laporan ini. Dengan lembaran tersebut, diharapkan pembaca dan pengguna laporan ini dapat memberikan usulan, umpan balik, opini dan sebagainya, yang sangat berguna bagi peningkatan kualitas pelaporan di masa depan. Perusahaan memberikan akses informasi seluas-luasnya bagi seluruh pemangku kepentingan, dan investor serta siapa saja mengenai laporan keberlanjutan ini dengan menghubungi: [102-53]

We hope that with this report, all stakeholders can find out various information regarding the sustainability performance that has been carried out by the Company during 2020, and make this report a reference in making decisions in the future. For the realization of two-way communication. To realize two-way communication and so that the Company can conduct evaluations in order to improve the quality of future reports, we provide a Feedback Sheet at the end of this report. With this sheet, it is hoped that readers and users of this report can provide suggestions, feedback, opinions and so on, which are very useful for improving the quality of reporting in the future. The company provides the widest possible access to information for all stakeholders, investors and anyone regarding this sustainability report by contacting: [102-53]

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia

Telp. : +62 21 6540335
Fax. : +62 21 6540344, 6540348
Email : sekper@jamkrindo.co.id
Website : www.jamkrindo.co.id

 @pt_jamkrindo
 @pt_jamkrindo
 Jamkrindo
 PT Jamkrindo



TENTANG JAMKRINDO

About Jamkrindo



 **Jamkrindo**
A member of **iFG**



INFORMASI UMUM DAN IDENTITAS PERUSAHAAN

General Information and Company Identity [102-1, 102-2, 102-3, 102-4, 102-5, 102-6, 102-7, 102-8, 3.b]



Nama Perusahaan
Company Name [102-1]

PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat menjadi **PT Jamkrindo**
PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated to PT Jamkrindo



Bentuk dan Status Badan Usaha
Form and Status of Business Entity

Perseroan Terbatas (PT)
Limited Liability Company



Tanggal Pendirian
Date of Establishment

1 Juli 1970
July 1, 1970



Dasar Hukum Pendirian
Legal Basis of Establishment [102-5]

Akta Pendirian No.25 tanggal 24 Februari 2020 dan diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia tentang Perubahan Anggaran Dasar No.2 tanggal 09 April 2020 yang dibuat dihadapan Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notaris di Jakarta Pusat serta telah mendapat Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia tanggal 9 April 2020 Nomor AHU-0066418.AH.01.11.Tahun 2020

Deed of Establishment No.25 dated February 24, 2020, and was last amended by Deed of Decree of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) regarding Amendment to Articles of Association No.2 dated April 9, 2020, made before Dr. Isyana Wisnuwardhani Sadjarwo, SH., MH., Notary in Central Jakarta and received the Establishment Ratification of a Limited Liability Company from the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia on April 9, 2020, Number AHU-0066418.AH.01.11.of 2020

 **Bidang Usaha**
Line of Business [102-2]

Penjaminan bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, Usaha Menengah, serta Koperasi (UMKMK), Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya.

Guarantee for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (MSMEC), Guarantee for SOEs, Guarantee for Warehouse Receipt System, and other guarantees.

 **Jaringan Usaha**
Business Network [102-6]

9 (sembilan) Kantor Wilayah, 56 (lima puluh enam) Kantor Cabang dan 16 (enam belas) Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia
9 (nine) Regional Offices, 56 (fifty six) Branch Offices dan 16 (sixteen) Service Unit Offices (KUP) spread throughout Indonesia

 **Kepemilikan**
Ownership [102-5]

Saham Seri A Dwiwarna
Pemerintah Republik Indonesia (0,0000001787%)
*Series A Dwiwarna Shares
The Government of Republik Indonesia (0.0000001787%)*

Saham Seri B
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
(99,9999998213%)
*Series B Shares
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)
(99.9999998213%)*

 **Karyawan Tetap**
Permanent Employee [102-8]

965 orang di 2020 / 965 person in 2020



Gedung Jamkrindo

Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telp. : +62 21 6540335
Fax. : +62 21 6540344, 6540348
Email : contact@jamkrindo.co.id
Website : www.jamkrindo.co.id

 @pt_jamkrindo

 @pt_jamkrindo

 Jamkrindo

 PT Jamkrindo



KILAS SEJARAH JAMKRINDO

Kilas Sejarah Jamkrindo

PT Jaminan Kredit Indonesia, atau disebut juga dengan Jamkrindo merupakan perusahaan yang memiliki bidang usaha Penjaminan untuk Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK), Penjaminan bagi BUMN, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan Penjaminan lainnya. Sebagai anak Perusahaan BUMN Holding Asuransi dan Penjaminan Indonesia Financial Group (IFG). Jamkrindo berkomitmen secara penuh dalam melaksanakan dan menunjang kebijakan maupun program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional dalam upaya menyejahterahkan kehidupan bangsa. Implementasi komitmen tersebut dilaksanakan melalui pemberian jaminan kredit bersifat langsung maupun tidak langsung, serta pemberian bantuan konsultasi manajemen kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Dalam upaya meningkatkan ekonomi masyarakat secara merata dan memudahkan aksesibilitas, Jamkrindo terus melakukan pengembangan jaringan kerja hingga ke pelosok negeri serta melakukan perbaikan dan pengembangan pada kualitas layanan.

Jamkrindo didirikan pada pertengahan tahun 1970 sebagai Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). Pada masa itu perkembangan koperasi masih tertinggal dibandingkan dengan perusahaan milik negara dan perusahaan swasta. Dalam perkembangannya, LJKK kemudian diubah menjadi Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PPK) melalui Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1981 tanggal 23 Desember 1981 yang disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1985 tanggal 31 Mei 1985 tentang Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi.

Keberhasilan pelaksanaan fungsi dan tugas Perum PPK dalam mengembangkan koperasi melalui kegiatan penjaminan kredit, membuat Pemerintah memperluas jangkauan pelayanan Perum PPK menjadi tidak hanya terbatas pada koperasi, tetapi juga mencakup UMKM. Atas usaha tersebut, Pemerintah kembali mengeluarkan kebijakan yang bertujuan untuk memperkuat peran Perum PPK melalui penerbitan Peraturan Pemerintah No.95 Tahun 2000 tanggal 7 November 2000 yang sekaligus mengubah nama Perum PPK menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU).

Pada tahun 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden No.2 Tahun 2008 tanggal 26 Januari 2008 tentang Lembaga Penjaminan. Terkait dengan perubahan bisnis Perusahaan yang tidak lagi memberikan pinjaman secara langsung kepada UMKM dan Koperasi melalui pola bagi hasil.

PT Jaminan Kredit Indonesia, or also known as Jamkrindo, is a company that which has the business activities of Guarantee for Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (MSMEC), Guarantee for SOEs, Guarantee for Warehouse Receipt System, and other guarantees. As a subsidiary of the BUMN Holding Insurance and Guarantee Indonesia Financial Group (IFG). Jamkrindo is fully committed to implementing and supporting Government policies and programs in the national economy and development field in an effort to improve the life of the nation. The implementation of these commitments was carried out through the activities of providing direct and indirect credit guarantees, as well as providing management consulting assistance to Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives). In an effort to improve the economy of the community equally and facilitate accessibility, Jamkrindo continues to develop its work network to all corners of the country as well as make improvements and development on service quality.

Jamkrindo was established in the mid-1970s as the Cooperative Credit Guarantee Institution/ Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK). At that time, the development of cooperatives was still behind compared to state-owned enterprises and private companies. In its development, LJKK was later changed to Cooperative Financial Development Public Corporation/ Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PPK) through Government Regulation No.51 of 1981 dated December 23, 1981, which was perfected by Government Regulation No.27 of 1985 dated May 31, 1985, concerning Public Corporation of Cooperative Financial Development.

The successful implementation of the functions and duties of Perum PPK in developing cooperatives through credit guarantee activities has made the Government expand the service coverage of Perum PPK to be limited to cooperatives and include MSMEs. For this effort, the Government again issued a policy aimed to strengthen the role of Perum PPK through the issuance of Government Regulation No.95 of 2000 dated November 7, 2000, which at the same time changed the name of Perum PPK to become Public Corporation of Business Development Facility/Public Company Development Facilities Enterprises (Perum SPU).

In 2008, the Government issued Presidential Regulation No.2 of 2008 dated January 26, 2008, concerning the Guarantee Institution. With regard to business changes, the Company no longer provides loans directly to MSMEs and Cooperatives through profit-sharing patterns.

Tetapi berfokus pada bisnis penjaminan kredit UMKM dan Koperasi, Perum SPU diubah namanya menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2008 tanggal 19 Mei 2008.

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan Peraturan Presiden tersebut, Pemerintah melalui Departemen Keuangan memperkuat dasar hukum pendirian Perusahaan serta perusahaan lain dengan bidang usaha sejenis melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.222/PMK.010/2008 tanggal 16 Desember 2008 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Keuangan No.99/PMK.010/2011 tanggal 8 Juli 2011 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit. Melalui regulasi tersebut, Jamkrindo wajib memiliki izin usaha sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit. Menindaklanjuti aturan tersebut, Menteri Keuangan menerbitkan Keputusan (KMK) No.KEP-77/KM.10/2009 tanggal 22 April 2009 yang menetapkan izin usaha Jamkrindo sebagai Perusahaan Penjaminan Kredit.

Di tahun 2016, Pemerintah meluncurkan Undang-Undang No.1 Tahun 2016 tanggal 19 Januari 2016 tentang Penjaminan, sebagai bentuk keseriusan Pemerintah dalam memayungi dan melembagakan industri penjaminan yang terus mengalami perkembangan sejalan dengan pertumbuhan jasa keuangan di Indonesia.

Pada tahun 2018, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia, peraturan ini diterbitkan guna meningkatkan peran Jamkrindo dalam industri penjaminan nasional sebagai upaya untuk mensukseskan kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional. Pemerintah memandang Jamkrindo perlu melakukan pengembangan usaha dengan menambah kegiatan usaha Perusahaan sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan saat ini, untuk menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional.

Pada tahun 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas melalui PP No.11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00011484. AH..01.01 Tahun 2020 Tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero).

However, it focuses on the MSMEs and Cooperative credit guarantee business, Perum SPU was renamed into the Jaminan Kredit Indonesia Public Corporation/Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) based on Government Regulation No.41 of 2008 dated May 19, 2008.

As a follow up to the implementation of the Presidential Regulation, the Government through the Ministry of Finance strengthened the legal basis for the establishment of the Company and other companies with a similar line of business through the Minister of Finance Regulation (PMK) No.222/PMK.010/2008 dated December 16, 2008, as amended in the Minister of Finance Regulation No.99/PMK.010/2011 dated July 8, 2011, concerning Credit Guarantee Companies and Credit Re-Guarantee Companies. Through the regulation, Jamkrindo was required to have a business license as a Credit Guarantee Company. Following up on the regulation, the Minister of Finance issued a Decree (KMK) No.KEP-77/KM.10/2009 dated April 22, 2009, which stipulated the business license of Jamkrindo as a Credit Guarantee Company.

In 2016, the Government launched Law No.1 of 2016 dated January 19, 2016, concerning Guarantees, as a form of the Government's seriousness in covering and institutionalizing the guarantee industry that continued to develop in line with the growth of financial services in Indonesia.

In 2018, the Government issued Government Regulation No.35 of 2018 concerning Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. This regulation was issued in order to increase the role of Jamkrindo in the national guarantee industry to succeed in Government policies and programs in the national economy and development sector. The Government viewed Jamkrindo as necessary to develop its business by adding the Company's business activities according to current developments and needs, to support Government policies and programs in the national economy and development.

In 2020, President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, officially changed the legal entity of Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia or Jamkrindo to a Limited Liability Company through PP No.11/2020 which was promulgated on February 17, 2020. This decision was upheld through the Decree of the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-00011484. AH..01.01 of 2020 concerning Ratification of the Establishment of a Legal Entity of a Limited Liability Company of PT Jaminan Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero).



Akta pendirian perusahaan perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020.

The deed of establishment of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) was signed at the building of the Ministry of SOEs, Jakarta, on February 24, 2020.

Kemudian di 9 April 2020, Akta Pendirian PT Jamkrindo (Persero) No.25 tanggal 24 Februari 2020 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Dasar No.2 tanggal 9 April 2020 yang menjadikan bergantinya status dan nama Jamkrindo menjadi PT Jamkrindo. Dengan adanya akta tersebut pemegang saham PT Jamkrindo berubah menjadi:

Then on April 9, 2020, the Deed of Establishment of PT Jamkrindo (Persero) No. 25 February 24, 2020, amended with the issuance of Deed of Decision of the Shareholders of PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) concerning the amendment to Article of Association No. 2 dated April 9, 2020, which changed the status and name of Jamkrindo into PT Jamkrindo. With this deed, the shareholders of PT Jamkrindo changed to:

- a. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.365.160,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah)
- b. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebanyak 7.638.732 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp7.638.732.000.000,- (tujuh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah)

- a. *The Republic of Indonesia as much as 1 (one) Dwiwarna series A share, with a total nominal value of IDR1,365,160 (one million three hundred sixty-five thousand one hundred sixty rupiah); and*
- b. *PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as much as 7,638,732 (seven million six hundred thirty-eight thousand seven hundred thirty-two) series B shares, each with a nominal value of IDR1,000,000.- (one million rupiah), so that the whole amounted to IDR7,638,732,000,000 (seven trillion six hundred thirty-eight billion seven hundred thirty-two million rupiah).*

PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan yang saat ini merupakan anggota *holding* Indonesia Financial Group (IFG) dengan induk *holding* PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

PT Jamkrindo is a guarantee company which is currently a member of the holding of the Indonesia Financial Group (IFG) with the holding company of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Perubahan Nama Perusahaan

The Change of the Company's Name

Kronologi proses perubahan nama Jamkrindo sejak awal berdiri hingga saat ini seperti yang telah diuraikan di atas adalah sebagai berikut:

The chronology of the name change process of Jamkrindo since its inception until now - as described above - was as follows:

- Perusahaan pada awalnya didirikan dengan nama Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK), didirikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.51 Tahun 1981 yang merupakan peleburan dari Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK) yang dibentuk tahun 1970. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian disempurnakan melalui Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1985.
- Nama Perusahaan diubah menjadi Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum SPU) berdasarkan Peraturan Pemerintah No.95 Tahun 2000.

- *The Company was originally established under the name of the Cooperative Financial Development Public Corporation (Perum PKK), established according to Government Regulation No.51 of 1981, which was a merger of the Cooperative Credit Guarantee Institution (LJKK) which was formed in 1970. The Government Regulation was then refined through Government Regulation No.27 of 1985.*
- *The Company name was changed to the Public Corporation of Business Development Facility (Perum SPU) based on Government Regulation No.95 of 2000.*

- Nama Perusahaan kembali diubah, menjadi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo) seperti yang dikenal saat ini, melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.41 Tahun 2008.
 - Tahun 2020 Presiden Republik Indonesia Joko Widodo resmi mengubah badan hukum perusahaan menjadi perseroan melalui PP No.11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020 sehingga nama Jamkrindo berubah menjadi PT Jamkrindo (Persero).
 - 9 April 2020 melalui Akta tentang Perubahan Anggaran Dasar nama PT Jamkrindo (Persero) berubah menjadi PT Jamkrindo. **[102-10, 3.f]**
- *The Company name was changed again, becoming the Jaminan Kredit Indonesia Public Corporation (Jamkrindo) as it is known today, through the issuance of the Government Regulation No.41 of 2008.*
 - *In 2020, President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, officially changed the Company's legal entity into a limited liability company through PP No.11/2020, which was promulgated on February 17, 2020, so that the name of Jamkrindo changed to PT Jamkrindo (Persero).*
 - *April 9, 2020, through the Deed on the Amendments to the Articles of Association, the name of PT Jamkrindo (Persero) changed to PT Jamkrindo. **[102-10, 3.f]***

1970 - 1981

Lembaga Jaminan Kredit Koperasi (LJKK)

Penjaminan Kredit Program untri TRI, Kredit Padi Palawija, Kredit Pengadaan Pupuk

Credit Guarantee for untri TRI Program, Padi Palawija Credit, Fertilizer Procurement Credit

1981 - 2000

Perusahaan Umum Pengembangan Keuangan Koperasi (Perum PKK)

Penjaminan Kredit Program untuk Koperasi, seperti: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Kredit Sapi Perah, Kredit Padi Palawija Cengkeh, Kredit Pengadaan Pupuk, KUT

Credit Guarantee for Cooperatives Program, such as: TRI, GLP & GLK, Kopetra, RMU, Sapi Perah Credit, Padi Palawija Cengkeh Credit, Fertilizer Procurement Credit, KUT

2000 - 2008

Perusahaan Umum Sarana Pengembangan Usaha (Perum Sarana)

Penjaminan Kredit dengan *Business Oriented* untuk pengembangan UMKM, pemberian Pinjaman Bagi Hasil, peluncuran Produk Penjaminan Syariah

Credit Guarantee with Business Oriented for MSME development, Profit Sharing Loan, launch of Sharia Guarantee Product

2020 - Sekarang

PT Jamkrindo

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

2020

PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.

2008 - 2020

Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo)

Penjaminan Kredit untuk UMKM yang ditawarkan dalam skim konvensional dan syariah antar lain kredit umum, mikro, konstruksi, penjaminan bank garansi, penjaminan distribusi, penjaminan program dan *Surety Bond* dan penjaminan dalam rangka sinergi BUMN.

Credit Guarantee for MSMEs offered in conventional and sharia schemes among others general credit, micro, construction, guarantee of bank guarantees, distribution guarantee, program guarantee and Surety Bond and guarantee in order to synergy of SOEs.



VISI, MISI DAN BUDAYA PERUSAHAAN

Visi, Misi dan Budaya Perusahaan [102-16, 3.a]

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan usaha yang profesional berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No.S-286/MBU/05/2019 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Jamkrindo Tahun Buku 2019-2023, maka Dewan Pengawas dan Direksi menetapkan Visi, Misi dan Budaya Perusahaan sebagai berikut:

In order to guarantee the implementation of professional business activities based on the Approval Letter from the Ministry of SOEs No.S-286/MBU/05/2019 regarding Jamkrindo's Long-Term Company Plan (RJPP) for the 2019-2023 Financial Year, then the Vision, and Mission of Jamkrindo are as follows:



Visi Vision

Menjadi Perusahaan Penjaminan Terdepan yang Mendukung Perkembangan Perekonomian Nasional.

To become a Leading Guarantee Company that Supports National Economic Development.



Misi Mission

Meningkatkan **Aksesibilitas** finansial UMKMK melalui penyediaan penjaminan yang **Inovatif, Kompetitif** dengan pelayanan **Profesional, Efektif** dan **Efisien** secara **berkelanjutan**.

*Improving The Financial **Accessibility** Of Msme Through The Provision Of Innovative, Competitive Guarantees With **Professional, Effective And Efficient Services** In A **Sustainable Manner**.*

Persetujuan Manajemen Kunci atas Visi dan Misi Perusahaan

Visi, Misi & Nilai Perusahaan telah mendapatkan dukungan dan persetujuan bersama dari Dewan Pengawas dan Direksi Perusahaan, berdasarkan Surat Pengesahan dari Kementerian BUMN No.S-286/MBU/05/2019 tentang Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) Jamkrindo Tahun Buku 2019-2023.

The Key Management Approval of the Company's Vision and Mission

The Company's Vision, Mission & Values have received support and joint approval from the Board of Supervisor Council and Board of Directors of the Company, based on the Approval Letter from the Ministry of SOEs No.S-286/MBU/05/2019 concerning the Corporate Long-Term Plan (RJPP) of Jamkrindo for the 2019-2023 Fiscal Year.

Budaya Perusahaan [102-16]

Nilai Perusahaan di atas kemudian diturunkan dalam budaya Perusahaan dan budaya perusahaan juga mengacu pada arahan Kementerian BUMN kepada seluruh perusahaan BUMN. Budaya perusahaan Jamkrindo terdiri dari 6 (enam) butir nilai-nilai budaya yang dianut Perusahaan, yaitu budaya "AKHLAK". Dengan penjelasan sebagai berikut:

Corporate Culture [102-16]

The value of the company above is then derived in the corporate culture and the corporate culture also refers to the direction of the Ministry of BUMN to all BUMN companies. Jamkrindo corporate culture consists of 6 (six) points of the Company's cultural values, namely the "AKHLAK" culture. With the following explanation:





AKTIVITAS BISNIS DAN BIDANG USAHA

Business Activities and Line of Business [102-2, 3.d]

Kegiatan Usaha Berdasarkan Anggaran Dasar: Penerima Jaminan

Berdasarkan Akta No.2, tanggal 9 April 2020 tentang Perubahan Anggaran Dasar dalam pasal 3 disebutkan Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha sebagai berikut:

1. Maksud dan Tujuan Perseroan ini adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha Penjaminan bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi, Penjaminan bagi Badan Usaha Milik negara, Penjaminan Sistem Resi Gudang, dan penjaminan lainnya serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan berdasarkan prinsip
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perusahaan melakukan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
 - a. Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - b. Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya
 - c. Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh badan usaha milik negara dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan
 - d. Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - e. Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - f. Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - g. Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa *surety bond* yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - h. Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi
 - i. Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi

Business Activities Based on Articles Of Association: Guarantee Recipients

According to Deed No.2, April 9, 2020, concerning Amendments to the Articles of Association in Article 3, the Purpose and Objectives and Business Activities are stated as follows:

1. The Company has the purpose and objectives to carry out business guarantee activities for Micro, Small and Medium Enterprises, as well as Cooperatives, Guarantee for State-Owned Enterprises, Warehouse Receipt System Guarantees, and optimizing the utilization of Company resources based on the Corporate Governance principles.
2. To carry out the purpose and objectives as referred to in paragraph (1), the Company carries out the main business activities as follows:
 - a. Credit guarantee, conservative financing, or financing based on Sharia Principles provided by financial institutions to Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives
 - b. Loan guarantee channeled by savings and loan cooperatives or cooperatives that have a savings and loan business unit for its members
 - c. Credit guarantee and/or partnership program loans are distributed by state-owned enterprises in partnership and community development programs
 - d. Guarantee of debt securities for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives
 - e. Guarantee of goods purchase in installments made to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives
 - f. Guarantee of trade transactions carried out to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives
 - g. Guarantee of the procurement of surety bond goods and/or services carried out for Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives
 - h. Guarantee of Bank Guarantees (Counter-the Bank Guarantees) made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives
 - i. Guarantee of domestic documented letters of credit for Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives

- | | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> j. Penjaminan <i>letter of credit</i> yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi k. Penjaminan kepabeanaan (<i>Custom bond</i>) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi l. Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi m. Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (<i>start up business</i>) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi n. Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi o. Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perseroan dengan badan usaha milik negara lain p. Penjaminan Kredit Berbasis Resi Gudang q. Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan r. Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan s. Pemingkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi t. Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya <p>3. Kegiatan usaha utama Perseroan tersebut diatas dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama (<i>co-guarantee</i>) kecuali kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf r dan huruf s.</p> <p>4. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perseroan.</p> | <ul style="list-style-type: none"> j. <i>Guarantee of letters of credit made to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives</i> k. <i>Customs guarantees (Custom bonds) carried out to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i> l. <i>Excise guarantees carried out to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives</i> m. <i>Financing guarantees for start-up businesses that meet the criteria of Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i> n. <i>The guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small and Medium Enterprises, and Cooperatives</i> o. <i>Guarantee in the context of synergy between the Company and other state-owned enterprises</i> p. <i>Warehouse Receipt Based Credit Guarantee</i> q. <i>Credit guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals according to the purposes and objectives of the Company</i> r. <i>Provision of management consulting services related to Guarantee business activities;</i> s. <i>Rating, management consulting, management services, assistance/ empowerment, along with other services for Micro, Small, and Medium Enterprises, as well as Cooperatives</i> t. <i>Other main business activities after obtaining approval from the Financial Services Authority and/or related institutions according to their authority.</i> <p>3. <i>The main business activities of the Company can be carried out in the form of a joint guarantee (co-guarantee) except for the main business activities, as referred to in paragraph (2) point r and s.</i></p> <p>4. <i>In addition to the main business activities, as referred to in paragraph (2), the Company can carry out business activities to optimize the utilization of the Company's resources.</i></p> |
|--|---|



No.	Kegiatan Activities	Telah/ Belum Dijalankan Has or has not been performed	Keterangan Description
1	Penjaminan kredit, pembiayaan atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah yang diberikan oleh lembaga keuangan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Credit guarantee, conservative financing, or Sharia Principles-based financing provided by financial institutions to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Umum, Penjaminan Kredit Mikro, Penjaminan Kredit Usaha Rakyat, Penjaminan Program PEN <i>Available on the General Credit Guarantee, Micro Credit Guarantee, People's Business Credit Guarantee, National Economic Recovery (PEN) Program Guarantee products</i>
2	Penjaminan pinjaman yang disalurkan oleh Koperasi simpan pinjam atau Koperasi yang mempunyai unit usaha simpan pinjam kepada anggotanya <i>Loan guarantees distributed by savings and loan cooperatives or cooperatives with savings and loan business unit to its members</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna KKLK <i>Available on the Credit to National Institutions (KKLK) Multipurpose Credit Guarantee products</i>
3	Penjaminan kredit dan/atau pinjaman program kemitraan yang disalurkan oleh BUMN dalam rangka program kemitraan dan bina lingkungan <i>Credit Guarantee and/or partnership program loans distributed by state-owned enterprises in the context of partnership and community development programs</i>	✓	Penyaluran program kemitraan <i>Distribution of partnership programs</i>
4	Penjaminan surat utang kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Debt securities guarantee to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	x	belum/tidak dijalankan <i>Has not been performed</i>
5	Penjaminan pembelian barang secara angsuran yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of the purchase of goods in installments done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit OTO <i>Available on OTO Credit Guarantee products</i>
6	Penjaminan transaksi dagang yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Trade transactions guarantee done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat dalam produk Penjaminan Distribusi Barang <i>Available on Goods Distribution Guarantee products</i>
7	Penjaminan pengadaan barang dan/atau jasa <i>surety bond</i> yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of surety bond goods and/or services procurement done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk <i>Surety Bond</i> , <i>Surety Bond Co-Guarantee</i> , Penjaminan Kredit Konstruksi dan Pengadaan Barang/ Jasa <i>Available on Surety Bond, Surety Bond Co-Guarantee, Construction Credit Guarantee and Procurement of Goods/Services products</i>
8	Penjaminan bank garansi (kontra bank garansi) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Guarantee of bank guarantees (counter bank guarantees) done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat dalam produk Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi, Penjaminan Kredit Kontra Bank Garansi Co-Guarantee <i>Available on Counter Bank Credit Guarantee, Counter Bank Credit Co-Guarantee products</i>
9	Penjaminan surat kredit berdokumen dalam negeri yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; <i>Guarantee of domestic documented letters of credit done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives;</i>	x	belum/tidak dijalankan <i>Has not been performed</i>

No.	Kegiatan Activities	Telah/ Belum Dijalankan Has or has not been performed	Keterangan Description
10	Penjaminan <i>letter of credit</i> yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Letter of credit guarantees done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✘	belum/tidak dijalankan <i>Has not been performed</i>
11	Penjaminan kepabeanan (<i>Custom Bond</i>) yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Custom Bonds done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada <i>Customs Bond</i> <i>Available on Customs Bond</i>
12	Penjaminan cukai yang dilakukan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Excise Guarantees done to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk <i>Customs Bond</i> <i>Available on Customs Bond products</i>
13	Penjaminan pembiayaan kepada usaha rintisan (<i>start up business</i>) yang memenuhi kriteria Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi <i>Financing guarantees for start-up businesses which meets the criteria of Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk penjaminan Kredit Umum, dan Penjaminan Kredit Mikro <i>Available on General Credit Guarantee and Micro Credit Guarantee products</i>
14	Penjaminan layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah, serta Koperasi; <i>Guarantee of IT-based money lending services provided to Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Mikro <i>Available on Micro Credit Guarantee products</i>
15	Penjaminan dalam rangka sinergi antara Perusahaan dengan BUMN lain <i>Guarantee in the context of synergy between the Company with other state-owned enterprises</i>	✓	Terdapat dalam produk <i>Surety Bond</i> , Penjaminan Bersama KUR, Penjaminan Pembiayaan Invoice <i>Available on Surety Bond, Co-Guarantee for People's Business Credit, Invoice Financing Guarantee products</i>
16	Penjaminan sistem resi gudang <i>Warehouse receipt system guarantees</i>	✘	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Subsidi Resi Gudang <i>Available on the Warehouse Receipt Subsidy Credit Guarantee products</i>
17	Penjaminan Kredit Berbasis Resi Gudang <i>Warehouse Receipt-based Credit Guarantees</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Skema Subsidi Resi Gudang dan Penjaminan Kredit Resi Gudang <i>Available on Warehouse Receipt Subsidy Scheme Guarantee and Warehouse Receipt Credit Guarantee products</i>
18	Penjaminan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah kepada perorangan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan <i>Credit Guarantee or financing based on Sharia Principles to individuals in accordance with the purpose and objectives of the Company</i>	✓	Terdapat pada produk Penjaminan Kredit Multiguna, Penjaminan Kredit Arrum <i>Available on Multipurpose Credit Guarantee, Arrum Credit Guarantee products</i>
19	Pemberian jasa konsultasi manajemen terkait dengan kegiatan usaha Penjaminan <i>Provision of management consulting services related to Guarantee business activities</i>	✓	Dilakukan oleh korporasi <i>Conducted by the Corporation</i>



No.	Kegiatan Activities	Telah/ Belum Dijalankan Has or has not been performed	Keterangan Description
20	Pemeringkatan, konsultasi manajemen, jasa manajemen, pendampingan/pemberdayaan, serta layanan lainnya bagi Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta Koperasi <i>Ranking, management consulting, management services, assistance/ empowerment, and other services for Micro, Small, and Medium Enterprises, and Cooperatives; and</i>	✓	Dilakukan oleh Divisi Manajemen Risiko dan PUKM <i>Conducted by Risk Management and SMEs Ranking Management Consulting (PUKM) Division</i>
21	Kegiatan usaha utama lainnya setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan/atau instansi terkait sesuai dengan kewenangannya. <i>Other main business activities after obtaining approval from Financial Services Authority and/or other related institutions in accordance with their authorities</i>	✓	Penjaminan Bersama KUR <i>Co-Guarantee for People's Business Guarantee</i>

✓ = sudah dijalankan | ✗ = belum/tidak dijalankan
 ✓ = has been performed | ✗ = has not been performed

Kegiatan usaha utama Perusahaan tersebut di atas dapat dilakukan dalam bentuk Penjaminan bersama (*co-guarantee*) kecuali kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf r dan huruf s. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat 2, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan.

The main Company business activities written above are able to be conducted in the form of co-guarantee unless it is a main business activity mentioned in paragraph 2 letter r and letter s. Apart from the main business activities mentioned in paragraph 2, the Company may conduct business activities in order to optimize the utilization of Company resources.

PRODUK DAN JASA

Product and Services [102-2]



Penjaminan kredit adalah kegiatan pemberian jaminan atas pemenuhan kewajiban finansial penerima kredit (terjamin) kepada penerima jaminan. Proses penjaminan kredit melibatkan sekurang-kurangnya 3 (tiga) pihak, yaitu badan usaha pemberi kredit yang disebut penerima jaminan, debitur kredit yang disebut terjamin, dan perusahaan penjamin kredit yang disebut penjamin.

Prinsip dasar penjaminan kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada penerima jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial terjamin kepada penerima jaminan sampai penerima jaminan menyatakan kredit terjamin tersebut lunas.

Penjaminan kredit diperlukan oleh penerima jaminan pada saat permohonan kredit dari terjamin dinyatakan layak oleh penerima jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

Credit Guarantee is the activity of providing guarantees for the fulfillment of the Credit Recipient's financial obligations (Guaranteed) to the Guarantee Recipient. The Credit Guarantee Process involves at least 3 (three) parties, namely the credit providing business entity called the Guarantee Recipient, the credit debtor called the Guaranteed, and the Credit Guarantee Company called the Guarantor.

The basic principle of Credit Guarantee is the takeover of the risk of the guaranteed's failure in fulfilling its financial obligations to the Guarantee Recipient but does not eliminate the guaranteed's financial obligations to the Guarantee Recipient until the Guarantee Recipient states the Guaranteed Credit is paid off.

*Credit Guarantee is required by the Guarantee Recipient when the loan application from the Guaranteed is declared feasible by the Guarantee Recipient but has not met the banking credit administration requirements, especially in terms of the fulfillment of the collateral adequacy (*unbankable*).*



Skema Penjaminan Kredit

Scheme of Credit Guarantee



Prinsip dasar Penjaminan Kredit adalah pengambilalihan atas risiko kegagalan Terjamin dalam memenuhi kewajiban finansialnya kepada Penerima Jaminan, namun tidak menghilangkan kewajiban finansial Terjamin kepada Penerima Jaminan sampai Penerima Jaminan menyatakan Kredit Terjamin tersebut lunas.

The basic principle of Credit Guarantee is the takeover of the Guaranteed's failure risk in fulfilling their financial responsibility to the Guarantee Recipient, without omitting the Guaranteed's financial responsibility to the Guarantee Recipient until the Guarantee Recipient declared the Guaranteed's credit has been settled.

Penjaminan Kredit diperlukan oleh Penerima Jaminan pada saat permohonan kredit dari Terjamin dinyatakan layak oleh Penerima Jaminan akan tetapi belum memenuhi syarat administrasi perkreditan perbankan, khususnya dari sisi pemenuhan kecukupan agunan (*unbankable*).

*Credit Guarantee is needed by Guarantee Recipient at the time the Guaranteed's credit request is deemed appropriate by the Guarantee Recipient but has not fulfill the administrative requirements of banking credit, particularly in terms of collateral adequacy fulfillment (*unbankable*).*

Jenis-jenis produk usaha Penjaminan antara lain sebagai berikut:

The types of Guarantee business products include the following:

Kegiatan/Activities	Keterangan/Information
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) <i>Guarantee of People's Business Credit (KUR)</i>	Kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan/atau investasi kepada UMKMK di bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum <i>bankable</i> yang dijamin oleh Perusahaan Penjamin. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu pengembangan usaha produktif. <i>Credit/Financing of Working Capital and/or investment to MSMEs and Cooperatives in a productive and feasible, but not yet bankable business field, which is guaranteed by the Guarantee Company. KUR distribution is expected to help the development of productive businesses.</i>

Kegiatan/Activities	Keterangan/Information
<p>Penjaminan KPR Sejahtera FLPP <i>Sejahtera Mortgage Guarantee - Housing Financing Liquidity Facility</i></p>	<p>Penjaminan terhadap penyaluran kredit pemilikan rumah yang merupakan program kerja sama antara Pihak Perbankan dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia dengan suku bunga rendah, cicilan ringan dan tetap sepanjang jangka waktu kredit yang diperuntukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah. <i>Guarantee on housing loan disbursement which is a collaboration program between the Bank and the Ministry of Public Works and Public Housing of the Republic of Indonesia. This guarantee is given with low-interest rates and mild and fixed instalments throughout the period of credit and is intended for low-income communities.</i></p>
<p>Penjamin Sistem Resi Gudang <i>Guarantee on the Warehouse Receipt System</i></p>	<p>Kegiatan pemberian jaminan yang melindungi hak Pemegang Resi Gudang dan/atau Penerima Hak Jaminan apabila terjadi kegagalan, ketidakmampuan dan/atau kebangkrutan Pengelola Gudang dalam menjalankan kewajibannya serta memelihara stabilitas dan integritas Sistem Resi Gudang <i>Guarantee activities that protect the rights of Warehouse Receipt Holders and/or Guarantee Rights Recipients in the event of failure, inability and/or bankruptcy of the Warehouse Manager in carrying out their obligations as well as maintaining the stability and integrity of the Warehouse Receipt System</i></p>
<p>Penjaminan Kredit Umum <i>Guarantee on General Credit</i></p>	<p>Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal Kerja dan/atau Investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Terjamin (Proses penjaminan dilakukan secara kasus per kasus) <i>Guarantee of credit/financing provided by the Guarantee Beneficiary to the Guaranteed for the purposes of additional Working capital and/or Investment in order to increase and develop the Guaranteed business (The guarantee process is carried out on a case by case basis)</i></p>
<p>Penjaminan Kredit Mikro <i>Micro Credit Guarantee</i></p>	<p>Penjaminan atas kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin Pengusaha Mikro dan Kecil, untuk keperluan Modal Kerja dan/atau investasi dalam rangka peningkatan dan pengembangan usaha Produktif, yang jumlah plafond kredit sesuai dengan ketentuan kredit mikro di Penerima Jaminan, yang proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara otomatis bersyarat (<i>Conditional Automatic Cover/CAC</i>). <i>Guarantee of the credit given by the Recipient of Guarantee to the Guaranteed Micro and Small Entrepreneurs, for Working Capital needs and/or investment in the framework of increasing and developing productive businesses, in which the credit limit is in accordance with the microcredit provisions in the Guarantee Recipient. The guarantee process of which is automatic conditional (Conditional Automatic Cover/CAC).</i></p>



Kegiatan/Activities	Keterangan/Information
<p>Penjaminan Kredit Konstruksi & Pengadaan Barang/Jasa</p> <p><i>Guarantee of Construction Credit & Procurement of Goods/Services</i></p>	<p>Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin untuk keperluan tambahan modal kerja usaha jasa konstruksi dan pengadaan barang/jasa sesuai dengan kontrak kerja antara Terjamin dengan <i>Bouwheer</i> (pemilik proyek), yang sumber pengembaliannya berasal dari dana APBN/APBD/BUMN atau swasta nasional.</p> <p><i>Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient to the Guaranteed for additional working capital for the construction and procurement of goods/services in accordance with the employment contract between the Guaranteed and Bouwheer (the project owner), the source of which is from the State/Regional Budget, or State-owned Enterprises, or national private expenditure.</i></p>
<p>Penjaminan Kredit Multiguna</p> <p><i>Multipurpose Credit Guarantee</i></p>	<p>Penjaminan atas kredit/pembiayaan yang diberikan oleh Penerima Jaminan untuk Lembaga Keuangan Lainnya (<i>Non Bank</i>) kepada Terjamin, perorangan (pegawai tetap suatu Perusahaan/instansi Pemerintah) baik yang penyalurannya dilakukan secara langsung maupun melalui lembaga lainnya, yang sumber pengembaliannya dengan cara memotong gaji Terjamin dan proses pengajuan penjaminannya dilakukan secara kolektif.</p> <p><i>Guarantee on credit/financing provided by the Guarantee Recipient of Other (Non-bank) Financial Institutions to the Guaranteed individuals (permanent employees of a Company/ Government agency) whose distribution is done directly or through other institutions, and the source of return is deducted from guaranteed wages. The guarantee application process is done collectively.</i></p>
<p>Penjaminan Distribusi Barang</p> <p><i>Goods Distribution Guarantee</i></p>	<p>Penjaminan kredit untuk kredit/pembiayaan distribusi yang diberikan oleh perusahaan pabrikan (manufaktur) kepada distributor yang mendistribusikan barang. (analisa penjaminan dilakukan dengan <i>case by case</i>)</p> <p><i>Credit guarantees for credit/financing of distribution which is provided by manufacturing companies to distributors who distribute goods. (guarantee analysis is done on case-by-case basis)</i></p>
<p>Penjaminan Bank Garansi/Kontra Garansi</p> <p><i>Guarantee on Guarantee/Counter-Bank Guarantee</i></p>	<p>Penjaminan yang diberikan Penjamin (Jamkrindo) kepada Penerima Jaminan (Bank) yang bersifat tanpa syarat (<i>unconditional</i>) dan Penjamin akan membayar ganti rugi kepada Penerima Jaminan atas tuntutan pencairan Bank Garansi (BG) yang diajukan <i>Obligee</i> ketika Terjamin wanprestasi</p> <p><i>A guarantee given by the Guarantor (Jamkrindo) to the Guarantee Recipient (Bank) that is unconditional and the Guarantor will pay compensation to the Guarantee Recipient for the Bank Guarantee (BG) disbursement claim submitted by the Obligee when the Guaranteed has defaulted</i></p>

Kegiatan/Activities	Keterangan/Information
Surety Bond	<p>Suatu perjanjian 3 pihak antara Penjamin atas dasar keyakinan kepada Terjamin secara bersama-sama berjanji kepada <i>Obligee</i> bahwa apabila Terjamin oleh sebab suatu hal menjadi lalai atau gagal melaksanakan pekerjaan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan <i>Obligee</i>, maka Penjamin akan bertanggung jawab terhadap <i>Obligee</i> untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban Terjamin tersebut</p> <p><i>A three-party agreement between the Guarantor and the Guaranteed on the basis of confidence jointly pledged to the Bondee that if due to any circumstances the Guaranteed has become negligent or fail to carry out work in accordance with the Obligee's demand, the Guarantor will be responsible to the Obligee to settle the Guaranteed's obligations</i></p>
Payment Bond	<p>Jaminan yang diterbitkan oleh Penjamin untuk menjamin Terjamin melakukan pembayaran kepada Penerima Jaminan atas fasilitas dana talangan Penerima Jaminan baik yang berasal dari Penerima Jaminan atau sumber pembiayaan lain yang ditunjuk oleh Penerima Jaminan.</p> <p><i>Guarantee issued by the Guarantor to guarantee the payment of the Guaranteed to the Guarantee Recipient for the bailout facility given to the Guarantee Recipients whose funding source is from the Guarantee Receiver or other funding source designated by the Guarantee Receiver.</i></p>
Customs Bond	<p>Jaminan atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/pembebasan bea masuk barang & import dan pemungutan bea masuk barang lainnya kepada <i>Obligee</i> (Direktorat Jenderal Bea Cukai) apabila Terjamin (importir/produsen eksportir) tidak menyelesaikan kewajibannya</p> <p><i>Guarantee on customs facilities, facilities for suspension/exemption of goods import duty and collection of other goods import duty to the Obligee (Directorate General of Customs and Excise) if the Guaranteed (importer/producer of exporters) does not complete its obligations</i></p>
Penjaminan Keagenan Kargo Cargo Agency Guarantee	<p>Penjaminan yang diberikan kepada Penerima jaminan/<i>Obligee</i> (Perusahaan Penyedia Jasa Pengangkutan) atas kewajiban Terjamin/<i>Principal</i> (Agen Kargo) dalam melakukan pembayaran ongkos angkut barang kepada Penerima Jaminan/<i>Obligee</i>.</p> <p><i>Guarantee given to the Guarantee Beneficiary/Obligee (Transportation Service Provider Company) for the obligations of the Guaranteed/Principal (Cargo Agent) in making the payment of freight charges to the Beneficiary of the Guarantee/Obligee.</i></p>
Penjaminan Invoice Financing Guarantee of Invoice Financing	<p>Penjaminan untuk menjamin kewajiban pembayaran terjamin berdasarkan pada <i>invoice</i> yang diterbitkan oleh penerima jaminan</p> <p><i>Guarantee to guarantee the Guaranteed payment obligations based on invoices issued by Guarantee Recipients</i></p>



Kegiatan/Activities	Keterangan/Information
<p>Penjaminan Supply Chain Financing <i>Guarantee of Supply Chain Financing</i></p>	<p>Penjaminan atas Kredit yang diberikan oleh Penerima Jaminan kepada Terjamin dalam rangka pengerjaan/penyelesaian proyek, pengambilalihan piutang/tagihan, pengadaan barang dan/atau jasa, pembelian barang dan/atau jasa, berdasarkan kontrak atau dokumen sejenis dari Perusahaan Inti tertentu berupa KMK <i>pre-financing</i>, KMK <i>Post Financing</i> dan KMK Distributor.</p> <p><i>Guarantee on Credit given by the Guarantee Recipient to the Guaranteed in the context of Workmanship/project completion, acquisition of receivables/bills, procurement of goods and/or services, purchase of goods and/or services, based on contracts or similar documents from certain Core Companies in the form of KMK Financing, KMK Post Financing, and KMK Distributor.</i></p>
<p>Penjaminan Kemaritiman/Jaring <i>Maritime/Fisheries Guarantee</i></p>	<p>Penjaminan atas pembiayaan untuk modal kerja dan investasi yang dipergunakan untuk kegiatan dibidang Kelautan dan Perikanan.</p> <p><i>Guarantee on financing for working capital and investment used for activities in the field of Marine and Fisheries.</i></p>
<p>Penjaminan Pembiayaan Otomotif <i>Automotive Financing Guarantee</i></p>	<p>Penjaminan atas kredit/pembiayaan guna memiliki kendaraan bermotor yang diberikan oleh lembaga keuangan lainya dengan tujuan modal kerja dan/atau investasi atau multiguna.</p> <p><i>Guarantee of credit/financing to own motorized vehicles provided by other financial institutions for the purpose of working capital and/or investment or multipurpose.</i></p>
<p>Penjaminan Kredit Skema Subsidi Resi Gudang <i>Credit Guarantee on Subsidy Scheme of Warehouse Receipt</i></p>	<p>Kegiatan pemberian jaminan kepada terjamin (Petani, Kelompok Tani, Gabungan Kelompok Tani, dan Koperasi) atas fasilitas kredit Skema Subsidi Resi Gudang yang disalurkan oleh penerima jaminan (Bank Pelaksana/Lembaga Keuangan <i>Non-Bank</i> Penyalur Kredit SSRG) dengan agunan resi gudang yang diterbitkan Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No.9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya</p> <p><i>The activity of giving guarantee with the Warehouse Receipt Subsidy Scheme credit facilities to the guaranteed (such as Farmers, Farmer Groups, Combined Farmer Groups, and Cooperatives) which is distributed by recipients of guarantee (Executing Banks/Non-Bank Financial Institutions Providing Credit) with warehouse receipts issued through the Warehouse Receipt System as a collateral. This is in accordance with Law No.9 of 2011 concerning the Warehouse Receipt System and its amendments.</i></p>
<p>Penjaminan Kredit Resi Gudang <i>Warehouse Receipt Credit Guarantee</i></p>	<p>Penjaminan yang diberikan kepada Terjamin atas Kredit Resi Gudang yang disalurkan oleh Penerima Jaminan dengan agunan resi gudang yang diterbitkan: Melalui Sistem Resi Gudang (SRG) sesuai Undang-undang No.9 tahun 2011 tentang Sistem Resi Gudang beserta perubahannya; atau Oleh Pengelola Agunan melalui perjanjian kerja sama pengelolaan agunan antara Terjamin, Penerima Jaminan dan Pengelola Gudang (<i>Collateral Management Agreement/CMA</i>).</p> <p><i>Guarantee of Warehouse Receipt Credit given to the Guaranteed channeled by the Guarantee Recipient with warehouse receipt issued through the Warehouse Receipt System (SRG) as collateral in accordance with Law No. 9 of 2011 concerning Warehouse Receipt System and its amendments. This type of guarantee can also be given by the Collateral Manager through a collateral management agreement (CMA) between Guaranteed, Guarantee Recipient, and Warehouse Management.</i></p>

Kegiatan/Activities	Keterangan/Information
<p>Penjaminan <i>Fintech</i> <i>Fintech Guarantee</i></p>	<p>Penjaminan atas layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi yang disalurkan oleh lender melalui penyelenggara (<i>peer to peer lending</i>) kepada <i>borrower</i>. <i>Guarantee on information technology-based money lending services that are channelled by the lenders through the organizer (peer to peer lending) to the borrower.</i></p>
<p>Penjaminan KPR <i>Guarantee of Home Ownership Loans</i></p>	<p>Penjaminan terhadap penyalur Kredit Pemilikan Rumah yang diberikan oleh Penerima Jaminan Lembaga Keuangan Lainnya (<i>Non-Bank</i>) kepada Terjamin yang fasilitas pembiayaannya digunakan untuk membeli rumah, rumah susun/apartemen, rumah kantor, rumah toko atau untuk kebutuhan konsumtif lainnya dengan jaminan/agunan berupa rumah, rumah susun/ apartemen, rumah kantor, rumah toko. <i>Guarantee of the Home Ownership Loan given by Other (Non-Bank) Financial Institutions Guarantee Recipient to the Guaranteed whose financing facilities are used to buy houses, flats/apartments, home offices, shop houses or other consumptive needs with collateral in the form of houses, apartment, home office, or shophouse.</i></p>
<p>Penjaminan <i>Capital Management</i> Guarantee (CMG) <i>Guarantee on Capital Management</i> Guarantee (CMG)</p>	<p>Penjaminan atas portofolio kredit dalam 1 (satu) coverage penjaminan sebagai salah satu bentuk Mitigasi Risiko Kredit (MRK) Bank. <i>Guarantee on the loan portfolio in 1 (one) guarantee coverage as one of the Bank's Credit Risk Mitigation.</i></p>
<p>Penjaminan Program PEN <i>PEN Program Guarantee</i></p>	<p>Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi <i>Corona Virus Disease</i> 2019 (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional. <i>Guarantees provided in the context of implementing Government Regulations concerning the Implementation of the National Economic Recovery Program in order to support the State Financial Policy for Handling the 2019 Corona Virus Disease (COVID-19) Pandemic and/or facing threats that endanger the National Economy and or Financial System Stability and National Economic Rescue.</i></p>



PASAR YANG DILAYANI DAN WILAYAH OPERASIONAL

Market Served and Operational Areas [102-6]



Dalam memberikan pelayanan ke penjurong negeri, Jamkrindo hadir dengan Jaringan Layanan yang tersebar diseluruh Indonesia. Berikut adalah peta sebaran wilayah operasional Jamkrindo:

In providing services throughout the country, Jamkrindo comes with a Service Network spread throughout Indonesia. The following is a map of the distribution of Jamkrindo's operational areas:



KANTOR PUSAT

Head Office

PT JAMINAN KREDIT INDONESIA



Gedung Jamkrindo [102-3]

Jamkrindo Building

Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6
Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610
Indonesia

KONTAK

Contact

-  +62 21 6540335
-  +62 21 6540344, 6540348
-  contact@jamkrindo.co.id
-  www.jamkrindo.co.id

ENTITAS ANAK

Subsidiaries

PT PENJAMINAN JAMKRINDO SYARIAH





Gedung Jamsyar

Jamsyar Building

Jl. Letjend Suprpto No.20 Blok A II/4
Cempaka Putih Timur
Jakarta Pusat 10510
Indonesia

KONTAK

Contact

-  +62 21 6540386
-  +62 21 6540389
-  info@jamkrindosyariah.com
-  www.jamkrindosyariah.com



Kantor Wilayah/*Regional Office* [102-4]

Kantor Wilayah <i>Regional Office</i>		Alamat <i>Address</i>
I	Medan	Jl. Bukit Barisan No. 03 Medan – 20111; Telp: (061) 88813219 Fax: (061) 88741192
II	Palembang	Jl. Basuki Rahmat Ruko No. 4 (Depan BLPT) Kec. Kemuning Palembang 30127; Telp: (0711) 5556582 Fax: (0711) 5556589
III	Jakarta	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran, Jakarta Pusat 10610, DKI Jakarta; Telp: (021) 6540335 Fax: (021) 6540387
IV	Bandung	Jl. Soekarno Hatta Km. 12 No. 722 Gedebage, Bandung. Telp : (022) 7815088 Fax: (022) 7800891
V	Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang, Jawa Tengah; Telp: (024) 7601797; Fax: (024)7614138
VI	Surabaya	Gedung Jamkrindo, Jl. Raya Bandara Juanda Km. 2 - 3 Surabaya; Telp: (031) 8685567 Fax: (031) 8670568
VII	Denpasar	Pertokoan Dewata Square Blok A12 Jl. Letda Tantular, Renon. Denpasar-80232; Telp: (0361) 286854 Fax: (0361) 286267
VIII	Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani Km. 3.5 No.210 B Banjarmasin - Kalimantan Selatan; Telp: (0511) 6744706 Fax: (0511) 3273435
IX	Makassar	Jl. Lamadukelleng No.25 B, Makassar 90112 Telp: 0411-875836 Fax: (0411) 8099005

Kantor Cabang Khusus/*Special Branch Office* [102-4]

Kantor Cabang Khusus <i>Special Branch Office</i>	Alamat <i>Address</i>
Kantor Cabang Khusus Jakarta <i>Jakarta Special Branch Office</i>	Gedung Lippo Kuningan Lt. 10, Jl. Haji R. Rasuna Said Kav. B12 RT 6 RW 7 Karet Kuningan Jakarta Selatan 12920

Kantor Cabang/*Branch Offices* [102-4]

Kantor Wilayah <i>Regional Office</i>	Kantor Cabang <i>Branch Offices</i>	Alamat <i>Address</i>	
I	1 Medan	Jl. Sei Serayu No. 40 Medan, Sumatera Utara; Telp: (061) 4152827 / 4155767 Fax: (061) 4156775	
	2 Pekanbaru	Jl. Jend. Sudirman No. 150, Kel. Suka Ramai - Pekanbaru 28113 Telp: 0761-854311, 854870 Fax: 0761-848801	
	3 Aceh	Jl. Syah Kuala No.10 A-B Kel. Bandar Baru Kec. Kuta Alam Banda Aceh 23126; Telp: (0651) 8016790 Fax: (0651) 8011094	
	4 Padang	Jl. Khatib Sulaiman No. 47 C Padang, Sumatera Barat; Telp: (0751) 7050598 Fax: (0751) 447165	
	5 Tanjung Pinang	Komplek Ruko Pamedan Jl. Raja Ali Haji No. 6 Telp: (0771) 316919	
	6 Batam	Jl. Raja Ali Haji Fisabilillah, Komp Ruko Mahkota Raya Blok G No. 9, Batam Center Telp: (0778) 7495993	
	7 Balige	Jl. Sisingamangaraja No.87, Kec. Balige, Kab. Toba Samosir 22316 Sumatera Utara Telp/Fax : (0632) 21501/ (0632) 21722	
	8 Palembang	Jl. Residen Abdul Rozak no.188-189 Kelurahan Kalidoni Palembang; Telp: (0711) 7826393 Fax: (0711) 7826398	
	9 Jambi	Jl. Sumantri Brojonegoro No. 23 RT 11 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung, Kota Jambi Telp: (0741) 668707 Fax: (0741) 668115	
	II	10 Bengkulu	Jl. Ahmad Yani RT. 004 / RW. 001 No. 28 Kelurahan Jitra, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu-38119; Telp: (0736) 344541 Fax: (0736) 344249
		11 Lampung	Jl. Jend Sudirman No.128 RT.001 RW 001, Rawa Laut, Enggal. Bandar Lampung; Telp: (0721) 778511 Fax: (0721) 778513
		12 Pangkalpinang	Jl. A. Yani No. 11 H Pangkalpinang – 33136; Telp: (0717) 432837 Fax: (0717) 436816

Kantor Wilayah Regional Office	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
III	13 Jakarta	Gedung Jamkrindo Jl. Angkasa Blok B-9 Kav. 6 Kota Baru - Bandar Kemayoran Jakarta Pusat - 10610 Telp: (021) 6540409
	15 Pontianak	Jl. Moch. Solor No 4. RT/RW 004/007, Kel. Akcaya, Pontianak Selatan, Kalimantan Barat 78121 Telp: (0561) 749095, Fax: (0561) 7461468
	16 Serang	Ruko Cipare Blok A1 Jl. Jendral A. Yani No. 34, Serang, Banten - 42117, Telp/Fax : (0254) 228999/ (0254) 229247
	17 Tangerang	Ruko Golden Boulevard Blok C No.1 Jl.Pahlawan Seribu, BSD City, Tangerang Selatan 15322
IV	18 Bandung	Jl. Soekarno Hatta KM 12 No. 722 Gedebage, Bandung Telp: (022) 7816267
	19 Cirebon	Jl. Dr Sudarsono No. 10 B RT. 004 RW. 005, Kesambi- Kota Cirebon, Jawa Barat; Telp: (0231) 8336851 Fax: (0231) 8336850
	20 Purwakarta	Jl. Terusan Ibrahim Singadilaga No.6 RT/RW 01/01 No. 55 Kel. Purwamekar, Kec. Purwakarta, Kab. Purwakarta Jawa Barat; Telp: (0264) 8304002 Fax: (0264) 8304002
	21 Sukabumi	Komplek Ruko Bounty Jl. Siliwangi Blok E No. 90 RT.05/02 Kel. Cikole Kec. Cikole Kota Sukabumi 43113; Telp: (0266) 6223811 Fax: (022) 6223868
	22 Tasikmalaya	Jl. Sutisna Senjaya No. 199 A Ruko No. 6 F Kel. Lengkongsari Tawang-Tasikmalaya Telp: (0265) 314169
	23 Semarang	Jl. Pamularsih No. 68 A Semarang; Telp: (024) 7614136 / 7610129 Fax: (024) 7614138
	24 Yogyakarta	Jl. HOS Cokroaminoto No.161 A, Tegalrejo Kota Yogyakarta - 55244; Telp: (0274) 5012288 / 5012323 Fax: (0274) 5012545
V	25 Solo	Jl. Honggowongso No.141 A, RT/RW 004/005 Kel. Kratonan, Kec. Serengan Surakarta; Telp: (0271) 2936030 Fax: (0271) 2936030
	26 Purwokerto	Ruko Centrum Unit A Jl. Komisaris Bambang Suprpto No. 21-23 Kel. Purwokerto Lor, Kec.Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas. Jawa Tengah; Telp: (0281) 6572555 Fax: (0281) 6574755
	27 Kudus	Jl. Jend. Sudirman Ruko Sudirman Square No. 12-14 Kel. Nganguk, Kec Kota Kudus. Jawa Tengah – 59312; Telp: (0291) 430757 Fax: (0291) 430758
	28 Pekalongan	Komplek Ruko Diponegoro Jl. Diponegoro No. 38, Dukuh, Pekalongan Utara. Pekalongan – 51146; Telp: (0285) 4420770 Fax: (0285) 4420777
	29 Surabaya	Jl. Diponegoro No. 171. Surabaya; Telp: (031) 5679848 Fax: (031) 5679592
	30 Kediri	Jl. Kilisuci No.85 Kota Kediri; Telp: (0354) 7418826 Fax: (0354) 680881
VI	31 Banyuwangi	Jl. Letjend S. Parman No. 116, Kel. Sumberrejo, Kec Banyuwangi, Kab Banyuwangi – 68419; Telp: (0333) 418140 Fax: (0333) 425804
	32 Malang	Jl. Letjend S. Parman No. 56 Blok A-4 Malang; Telp: (0341) 4377377 Fax: (0341) 4378177
	33 Madiun	Jl. Thamrin No. 38, Madiun – 63117; Telp: (0351) 4472250 Fax: (0351) 4472249
	34 Denpasar	Jl. Hang Tuah No. 76 Denpasar Telp: (0361) 286854
VII	35 Mataram	Jl. Sriwijaya Ruko 4 No. 179, Mataram; Telp: (0370) 644573/ 644747 Fax: (0370) 644572
	36 Sumbawa Besar	Jl. Hasanuddin No. 82 kec. Sumbawa Besar NTB, Telp: 0371-2629239
	37 Kupang	Jl. Jenderal Soeharto No.110 Blok.A, RT. 20, RW. 008, Kel Naikolan, Kec Maulafa, Kota Kupang-NTT 85111; Telp: (0380) 8553899 Fax: (0380) 8554088



Kantor Wilayah Regional Office	Kantor Cabang Branch Offices	Alamat Address
VIII	38 Samarinda	Jl. A Yani No. 37 Kec. Sungai Pinang, Kel. Sungai Pinang Dalam, Samarinda, Kalimantan Timur 75117; Telp: (0541) 747608 Fax: (0541) 206578
	39 Banjarmasin	Jl. Gatot Subroto No.17 B Kuripan Banjarmasin-70236; Telp: (0511) 3273345 Fax: (0511) 3273435
	40 Palangkaraya	Jl. Yos Sudarso No. 6 Kota Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah 73112 Telp/fax : (0536) 4264269/(0536) 3242394
	41 Tarakan	Jl. Jend Sudirman RT. 04 Kel. Pamusian, Kec. Tarakan Tengah, Tarakan - 77113; Telp: (0551) 30448 Fax: (0551) 30494
	42 Balikpapan	Jl. Jend. Sudirman No.11. Balikpapan - 76114; Telp: (0542) 8504032 Fax: (0542) 8504033
	43 Makassar	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 140 Telp: (0411) 873031
	44 Gorontalo	Jl. HB Hasin (KH Agus Salim) No. 222 Gorontalo Telp: 0435-828003
	45 Mamuju	Jl. Marthadinata No.11 Telp : (0426) 2324878
	46 Ambon	Jl Philip Latumahina No.16 Ruko 1 Ambon 97126; Telp: (0911) 351770
	47 Ternate	Jl. Inpres No. 7 Ubo – Ubo Kel. Tabona Telp: (0921) 3122739
IX	48 Jayapura	Pusat Bisnis Jayapura Ruko Pasifik Permai Blok H No. 17 Kel. Bhayangkara, Kec. Jayapura Utara Telp: (0967) 524424
	49 Manokwari	Jl. Trikora, Wosi, Manokwari Papua Barat Telp: (0986) 214184
	50 Palu	Jl. Dewi Sartika No. 58 C Palu - Sulteng 94121 Telp: (0451) 4131812
	51 Kendari	Jl. La Ode Hadi No. 56 B Kendari – 93118 Telp: (0401) 3196780
	52 Manado	Jl. R.E. Marthadinata No. 43 Manado Telp: (62-431) 865194/865198
	53 Bitung	Jl. Sam ratulangi No.1 Bitung, Sulawesi Utara Telp: (0438) 35939
	54 Pare-pare	Jl. Andi mappatola No. 30 c parepare, Sulawesi Selatan Telp: 0421-2914592
	55 Palopo	Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 90 Kec. Wara Utara, Kota Palopo. Provinsi Sulawesi Selatan - 91911; Telp: (0471) 23006 Fax: (0471) 326925
	56 Sorong	Jl. Basuki Rahmat KM 9 Sorong - Papua Barat Telp: (0951) 329081

Kantor Unit Pelayanan (Kup)/ Service Unit Offices (KUP) [102-4]

Kantor Wilayah Regional Office	KUP KUP	Alamat Address
I	1 Dumai	Jl. Jendral Sudirman No. 391 Dumai Kota Telp: (0765) 439037
	2 Rantau Prapat	Jl. MH Thamrin No. 04 Rantau Prapat Sumatera Utara; Telp: 0624-326333 Fax: 0624-326222
	3 Mandailing Natal	Jl. Willem Iskandar No. 81 Panyabungan – 22913; Telp: 0636-3221148 Fax: 0636-3221774
II	4 Lubuk Linggau	Jalan Yos Sudarso RT 001 No. 366 Kel. Majapahit, Kec. Lubuk Linggau Timur 1, Sumatera Selatan Telp: 0733 3281182
III	5 Bogor	Jl. Pajajaran No. 28, Warung Jambu, Bogor Telp: (0251) 7564211
	6 Cibinong	Ruko Cibinong City Center Jalan Tegar Beriman 1 Blok A No. 29 Cibinong Kab Bogor Telp: (021) 29335250
	7 Bekasi	Komplek Ruko Sentra Bisnis Bekasi Mustika Pura Blok A No. 7 Jl. Insinyur Haji Juanda No.137 Kelurahan Bekasi Jaya Kecamatan Bekasi Timur, Kotamadya Bekasi

Kantor Wilayah Regional Office	KUP KUP	Alamat Address
IV	8 Cimahi	Jl. Amir Mahmud No. 572B-C RT02/RW02, Padasuka, Cimahi Tengah, Cimahi
V	9 Magelang	Ruko Metro Square - Mertoyudan, Jl. Raya Magelang-Yogyakarta, Magelang, Jawa Tengah: Telp: (0293) 3201767 Fax: (0293) 3201770
	10 Cilacap	Jl Jend. Sudirman No. 17, Cilacap, Telp: (0282) 531194/ 532010 Fax: (0282) 531115
VI	11 Surabaya Kota	Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 360 b. Surabaya; Telp: (031) 87858114 Fax: (031) 87858114
	12 Pamekasan	Jl Jokotole No. 26, Barurambat Kota, Kec. Pamekasan, Kab. Pamekasan Telp: 0324 - 3510118
	13 Jember	Jl. Gajah Mada No. 187 Jember Telp: 0331 - 4431044
VIII	14 Bojonegoro	Jl. WR. Supratman No.15, Bojonegoro – 62111; Telp: (0353) 2898420 Fax: (0353) 2899525
	15 Pangkalan Bun	Jl. Iskandar Kec. Arut Selatan, Kab Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah 74113
IX	16 Watampone	Jalan Ahmad Yani No. 29 B Kel. Jeppe'e Kec. Tanete Riattang Barat Kaba Watampone Provinsi Sulsel Telp: 0481 2921375

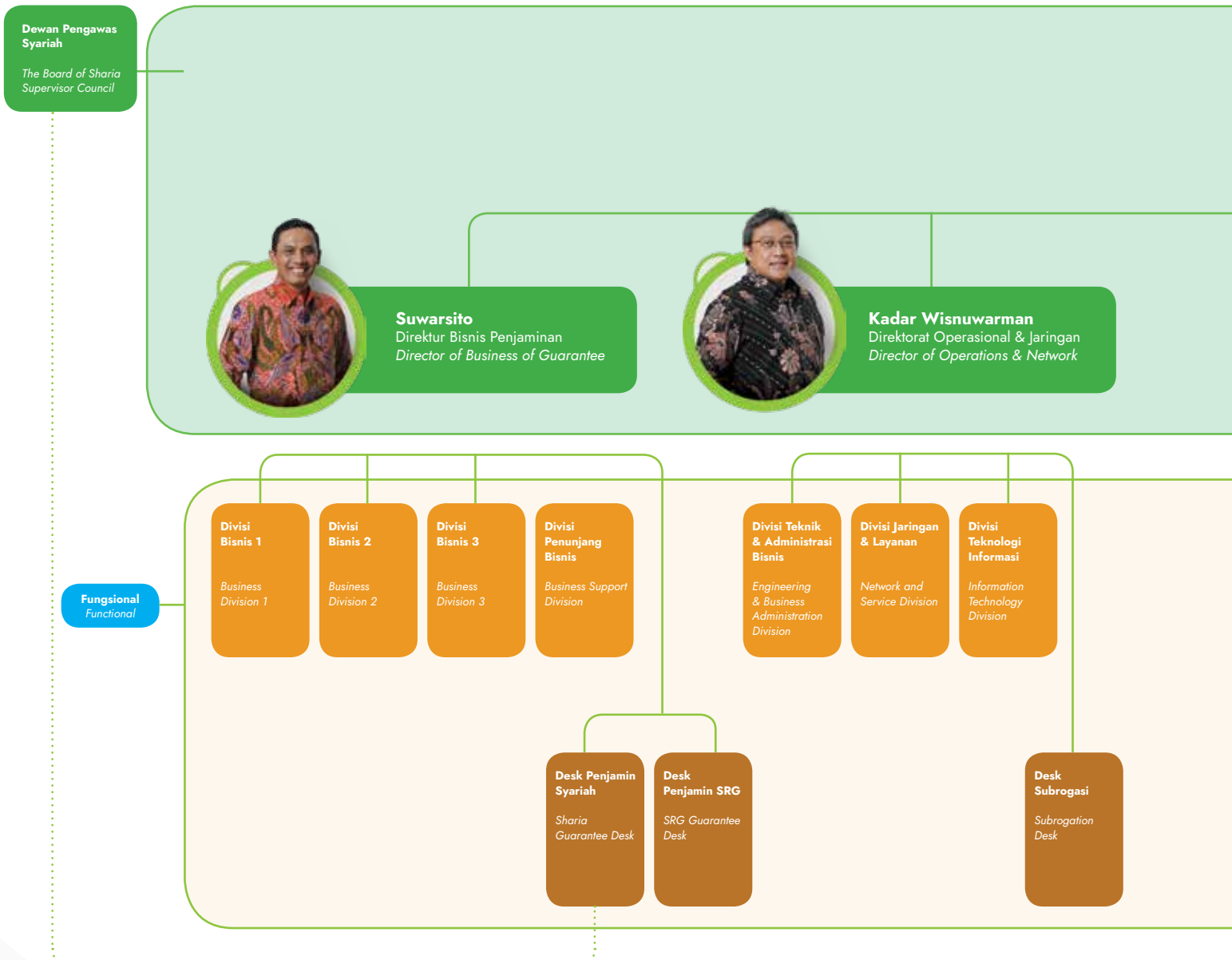


STRUKTUR ORGANISASI

Organizational Structure [102-18]

Struktur Organisasi PT Jamkrindo telah ditetapkan dalam Keputusan Direksi No.01/KD/1/V/2018 tanggal 30 Mei 2018 tentang Struktur Organisasi Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia. Berikut struktur organisasi Perusahaan per 31 Desember 2020.

The organizational structure of PT Jamkrindo has been stipulated in the Decree of the Board of Directors No.01/KD/1/V/2018 dated May 30, 2018 concerning the Organizational Structure of Public Companies Jaminan Kredit Indonesia. The following is the Company's organizational structure as of December 31, 2020.





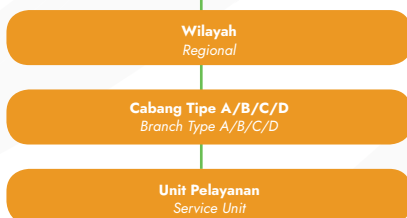
Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Utama
President Director



Sulis Usdoko
Direktur MSDM,
Umum, & Kepatuhan
Director of HRM, General Affairs
and Compliance



I. Rusdonobanu
Direktorat Keuangan,
Investasi & Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment
and Risk Management





SKALA ORGANISASI

Organizational Scale [102-7, 3.c.1, 3.c.2, 3.c.3, 3.c.4]

Jamkrindo memiliki 9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia. Perusahaan memiliki aset sebesar Rp19,38 triliun. Jumlah ini meningkat sebesar 10,47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sementara itu, dalam menjalankan operasional Perusahaan sehari-hari, Jamkrindo didukung oleh 1.743 orang total karyawan pada tahun 2020, dengan 965 karyawan tetap. Skala perusahaan per tahun 2020, baik dari segi operasional maupun finansial dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Jamkrindo has 9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (Kantor Unit Pelayanan or KUP) throughout Indonesia. The company has assets of IDR19.38 trillion. This number increased by 10.47% compared to the previous year. Meanwhile, in carrying out the day-to-day operations of the Company, Jamkrindo is supported by 1,743 total employees in 2020. The scale of the company per 2020, both from an operational and financial perspective, can be seen in the following table:

Deskripsi Description	Satuan Unit	2020	2019
Jumlah Karyawan Tetap Total Permanent Employee	Orang People	965	965
Total Operasi Total of Operation	Unit Kantor Office Unit	9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia <i>9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (Kantor Unit Pelayanan or KUP) throughout Indonesia</i>	9 Kantor Wilayah, 56 Kantor Cabang dan 16 Kantor Unit Pelayanan (KUP) yang tersebar di seluruh Indonesia <i>9 Regional Offices, 56 Branch Offices and 16 Service Unit Offices (Kantor Unit Pelayanan or KUP) throughout Indonesia</i>
Aset Asset	Jutaan Rupiah Million Rupiah	19.122.829	16.770.270
Liabilitas Liabilities	Jutaan Rupiah Million Rupiah	10.266.950	8.092.195
Ekuitas Equity	Jutaan Rupiah Million Rupiah	8.855.879	8.678.075
Imbal jasa penjaminan bersih Net Guarantee Revenue	Jutaan Rupiah Million Rupiah	2.633.393	2.152.072
Laba Bersih Tahun Berjalan Profit for the Year	Jutaan Rupiah Million Rupiah	456.133	198.911

PEMEGANG SAHAM

Shareholders [102-5, 102-45, 3.c.3]

Rincian Pemegang Saham/Pemilik Modal

Perusahaan memiliki bentuk Perusahaan Perseroan (Persero). Kepemilikan Saham dari para Pemegang Saham dapat disampaikan sebagai berikut:

Detail of Shareholders/Capital Owners

The company has the form of a Company Company (Persero). Share Ownership from the Shareholders can be submitted as follow:

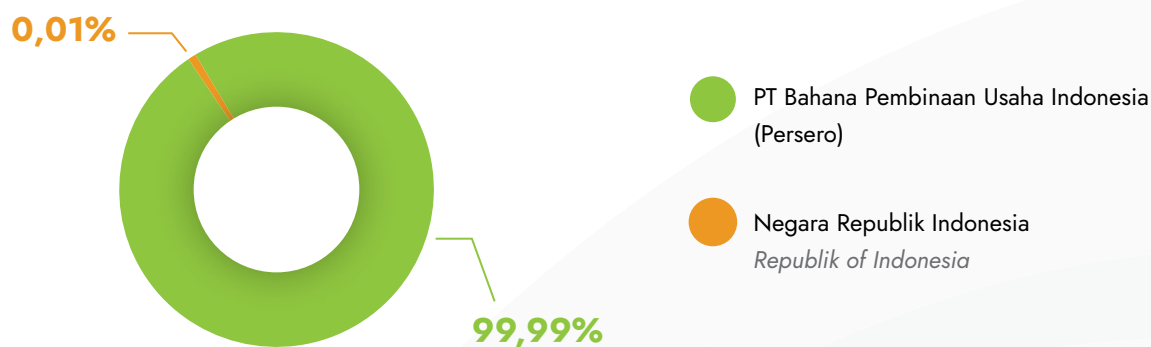
Kepemilikan Saham Pada PT Jamkrindo Per 31 Desember 2020

Share Ownership In PT Jamkrindo As Of December 31, 2020

Pemilik Modal Capital Owner	Nominal Nominal Value (Rp/IDR)	Persentase Kepemilikan Percentage of Ownership
Negara Republik Indonesia <i>The Republic of Indonesia</i>	1.365.160	0,01%
PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero)	7.638.732.000.000	99,99%
Jumlah/ <i>Total</i>	7.638.733.365.160	100,00%

Komposisi Kepemilikan Jamkrindo

Jamkrindo Ownership Composition



Informasi Tentang Pemegang Saham

Pemegang saham utama Perusahaan adalah Negara Republik Indonesia melalui Pemerintah Republik Indonesia/ Kementerian Badan Usaha Milik Negara sebesar 0,01%, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebesar 99,99%.

Perusahaan tidak memiliki kebijakan Program Kepemilikan Saham Karyawan, dan Program Kepemilikan Saham Manajemen. Perusahaan juga tidak melakukan Penawaran Umum Perdana Saham yang memungkinkan kepemilikan saham Perusahaan oleh publik. Seluruh kepemilikan modal sesuai dengan penjelasan di atas. Untuk itu, tidak ada pejabat Perusahaan ataupun karyawan yang memiliki saham Perusahaan.

Information About Shareholders

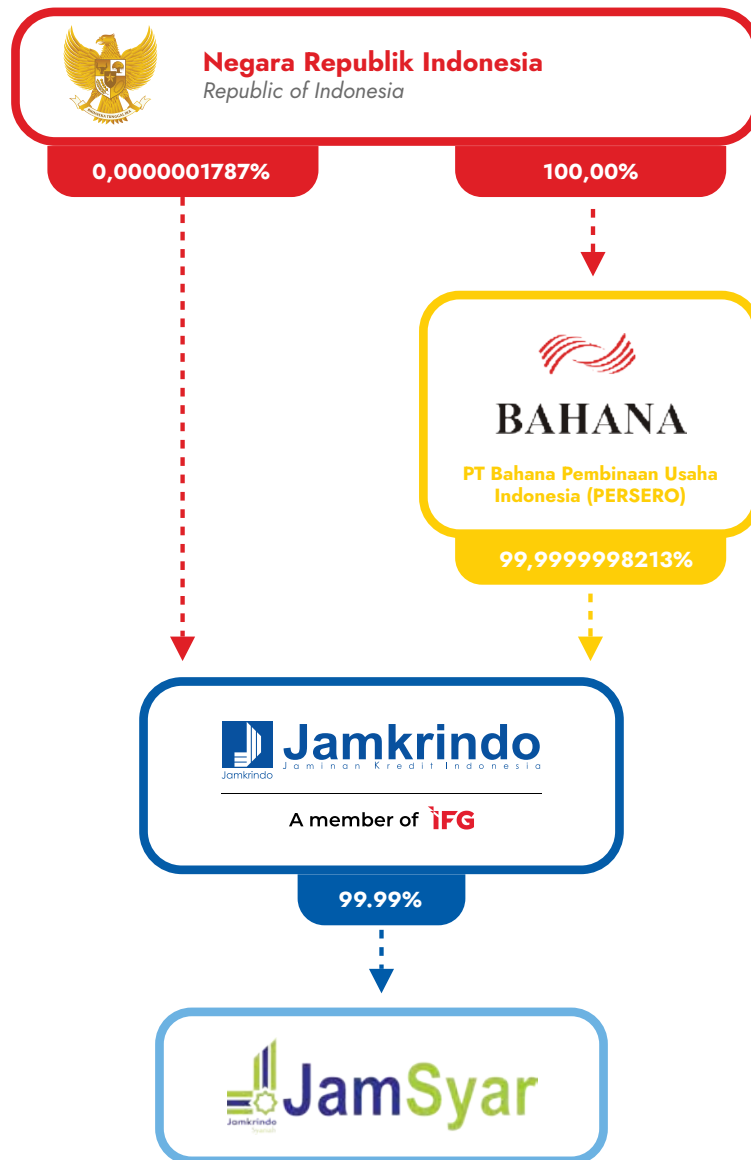
The main shareholders of the Company are the State of the Republic of Indonesia through the Government of the Republic of Indonesia/the Ministry of State-Owned Enterprises at 0.01%, and PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) at 99.99%.

The company does not have an Employee Share Ownership Program and Management Share Ownership Program policies. The company also did not conduct an Initial Public Offering of shares which allowed public ownership of the Company's shares. All capital ownership is in accordance with the explanation above. For this reason, no Company official or employee owns the Company's shares.



STRUKTUR GRUP DAN INFORMASI ENTITAS ANAK PERUSAHAAN

Group Structure and Information on Subsidiaries



Daftar Entitas Anak Dan Entitas Asosiasi/Joint Venture (Jv)/Special Purpose Vehicle (Spv)

List of Subsidiaries and Associates/Joint Venture (Jv)/Special Purpose Vehicle (Spv)

Entitas Anak Subsidiaries	Bidang Usaha Line of Business	Domisili Domicile	Tahun Pendirian Year of Establishment	Tahun Beroperasi Year of Operation	Kepemilikan Saham Shares Ownership (%)		Jumlah Aset Total Assets (Rp-juta) (Rp- million)		Status Operasi Operational Status
					2020	2019	2020	2019	
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah	Jasa Penjaminan Syariah Sharia Guarantee Services	Jakarta	2014	2014	99,997%	99,996 %	1,573,879	1,184,644	Beroperasi Operating



PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (Jamsyar)

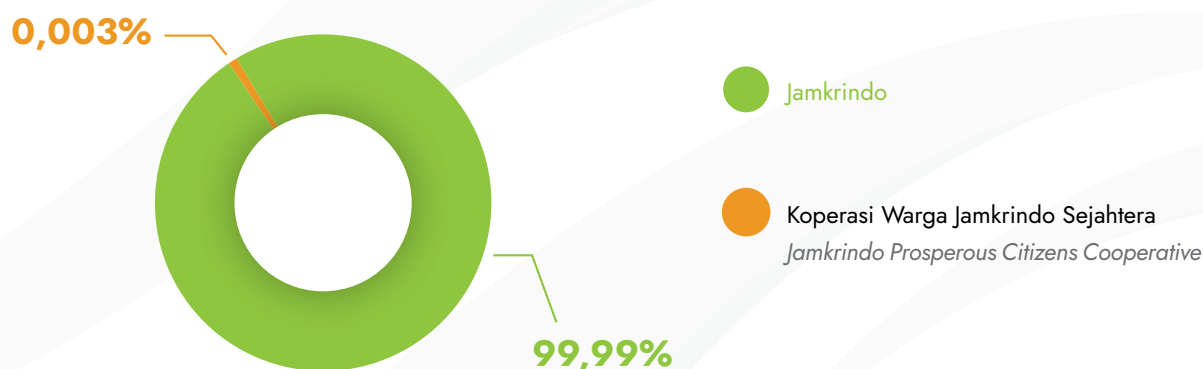
PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") didirikan pada tanggal 16 September 2014 dan mendapatkan izin operasional pada tanggal 7 November 2014. Jamsyar dibentuk melalui Akta Notaris No.68 oleh Notaris Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. tanggal 19 September 2014 dan terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia melalui Keputusan Menteri Hukum dan HAM No.AHU-26462.40.10.2014 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT Penjaminan Jamkrindo Syariah tanggal 24 September 2014, kemudian mendapatkan izin operasi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui surat No.KEP-134/d.05/2014 tanggal 7 November 2014 tentang Pemberian Izin usaha Perusahaan Penjaminan Syariah Kepada PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, serta Surat OJK No.S-34/nB.223/2015 tanggal 15 Januari 2015 tentang Pencatatan Produk Baru PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar bergerak dalam bidang usaha Jasa Penjaminan Syariah, dengan mengusung tagline "Jamsyar Progresif: Profesional, Gesit, responsif, dan Inovatif".

Informasi tentang kepemilikan, kinerja, dan manajemen Jamsyar adalah sebagai berikut,

PT Penjaminan Jamkrindo Syariah ("Jamsyar") was established on September 16, 2014, and obtained an operation permit on November 7, 2014. Jamsyar was formed through Notarial Deed No.68 made by the Notary Aryanti Artisari, S.H., M.Kn. dated September 19, 2014, which was registered with the Ministry of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia through the Decree of the Minister of Justice and Human Rights No.AHU- 26462.40.10.2014 concerning Ratification of the Establishment of Legal Entity of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah dated September 24, 2014, It received an operating permit from the Financial Services Authority (FSA) through the FSA letter No.KEP-134/d.05/2014 dated November 7, 2014, concerning the Granting of a Sharia Guarantee Company Business License to PT Penjaminan Jamkrindo Syariah, and FSA Letter No.S-34/nB.223/2015 dated January 15, 2015, concerning the Listing of New Products of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah. Jamsyar is engaged in the Sharia Guarantee Services business, with the tagline "Progressive Jamsyar: Professional, Agile, Responsive, and Innovative".

Information about Jamsyar's ownership, performance, and management are as follows:

Kepemilikan Saham Jamsyar Jamsyar Shares Ownership





TENAGA KERJA

Employee [102-8]

Jamkrindo memiliki karyawan dengan budaya kerja unggul yang merupakan aset paling berharga dalam memberikan produk dan layanan jasa penjaminan kredit. Per akhir tahun 2020, Jamkrindo memiliki 965 karyawan tetap dan 778 karyawan tidak tetap, sehingga total karyawan berjumlah 1.743 yang mengalami peningkatan sebesar 0,40% dibandingkan jumlah karyawan per 31 Desember 2019 yaitu 1.736 orang. Kenaikan tersebut terutama disebabkan adanya kebutuhan penambahan karyawan pegawai tidak tetap di tahun 2020. Dari total karyawan, baik tetap maupun tidak tetap terdapat 621 karyawan atau 35,62% yang merupakan karyawan wanita. Jamkrindo selalu berpegang pada prinsip kesetaraan dan tidak terdapat perlakuan yang berbeda antara karyawan wanita dan pria.

Pergerakan dan Profil demografi karyawan Jamkrindo dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

Jamkrindo has employees with a superior work culture who are the most valuable assets in providing credit guarantee products and services. As of the end of 2020, Jamkrindo had 965 permanent employees and 778 non-permanent employees, so that the total number of employees amounted to 1,743 which had an increase of 0.40% compared to the number of employees as of December 31, 2019, namely 1,736 people. This increase is mainly due to the need for additional non-permanent employees in 2020. Of the total employees, both permanent and non-permanent, there are 621 employees or 35.62% who are female employees. Jamkrindo always adheres to the principle of equality and there is no different treatment between female and male employees.

Pergerakan dan Profil demografi karyawan Jamkrindo dapat dilihat pada tabel dan bagan berikut ini.

Pergerakan Jumlah Keseluruhan Karyawan dalam 2 (Dua) Tahun Terakhir: 2019-2020

Trend of the Total Number of Employees in the Last 2 (Two) Years: 2019-2020 [102-8]



Demografi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Demographics Based on Employment Status [102-8]

Status Kepegawaian Employment Status	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Number (1)	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Number (1)	Persentase Percentage (%)	Jumlah Number (3=1-2)	Persentase Percentage (%)v
Tetap/Permanent										
Permanen Permanent	586	372	958	54,96%	588	369	957	55,13%	1	0,10%
Penugasan pada entitas anak, PT Jamkrindo Syariah Assigned to subsidiary, PT Jamkrindo Syariah	4	1	5	0,29%	5	1	6	0,35%	(1)	(16,67%)
Penugasan PT LSPP Assigned to PT LSPP	1	1	2	0,11%	1	1	2	0,12%	0	0%
Sub Jumlah Tetap Sub-Total Permanent Employees	591	374	965	55,36%	594	371	965	55,59%	0	0%
Tidak Tetap/Non-Permanent										
Kontrak Contract	501	195	696	39,93%	432	168	600	34,56%	96	16%
Magang Bersertifikasi Certified Apprentice	16	32	48	2,75%	37	76	113	6,51%	(65)	(57,52%)
Prohire Prohire	8	3	11	0,63%	7	2	9	0,52%	2	22,22%
KKWT Entry Level Hire	6	17	23	1,32%	11	38	49	2,82%	(26)	53,06%
Sub Jumlah Tidak Tetap Sub-Total Non-Permanent Employees	531	247	778	44,64%	509	262	771	44,41%	7	0,91%
Jumlah Total	1.122	621	1.743	100,00%	1.103	633	1.736	100,00%	7	0,40%

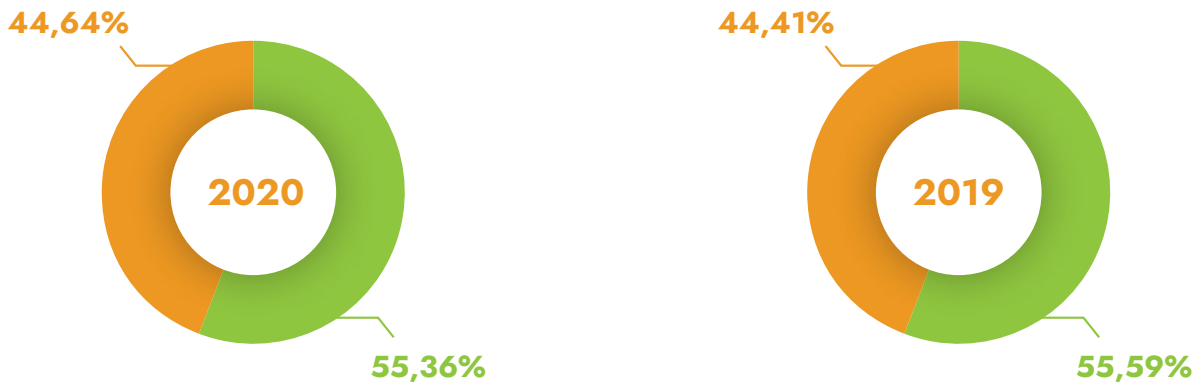
L = Laki-Laki/P = Perempuan

M = Male/F = Female



Komposisi Jumlah Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian

Composition of Total Employees Based on Status



● Karyawan Tidak Tetap / Temporary Employees

● Karyawan Tetap / Permanent Employees

Berdasarkan status kepegawaian, komposisi karyawan Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap khususnya karyawan dengan status Permanen (PKWTT). Penambahan jumlah karyawan Jamkrindo diperoleh dari kenaikan jumlah karyawan tidak tetap, terutama karyawan kontrak.

Based on employment status, the composition of Jamkrindo employees is dominated by permanent employees, especially employees with Permanent status (PKWTT). The increase in the number of Jamkrindo employees was obtained from the increase in the number of non-permanent employees, especially contract employees.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Level Organisasi

Permanent Employee Demographics Based on Organization Level [102-8]

Level Organisasi Organization Level	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)
	(1)				(2)				(3=1-2)	(3/2)
Kepala Divisi Head of Division	12	7	19	1,97%	13	7	20	2,07%	(1)	5,00%
Pejabat Pranata Utama Main Institution Official	3	1	4	0,41%	4	1	5	0,52%	(1)	-20,00%
Kepala Kantor Wilayah Head of Regional Office	9	-	9	0,93%	9	-	9	0,93%	0	0%
Wakil Kepala Kantor Wilayah Deputy Head of Office Region	1	-	1	0,10%	1	-	1	0,10%	0	0%
Kepala Kantor Cabang Head of Branch Office	49	7	56	5,80%	49	7	56	5,80%	0	0%

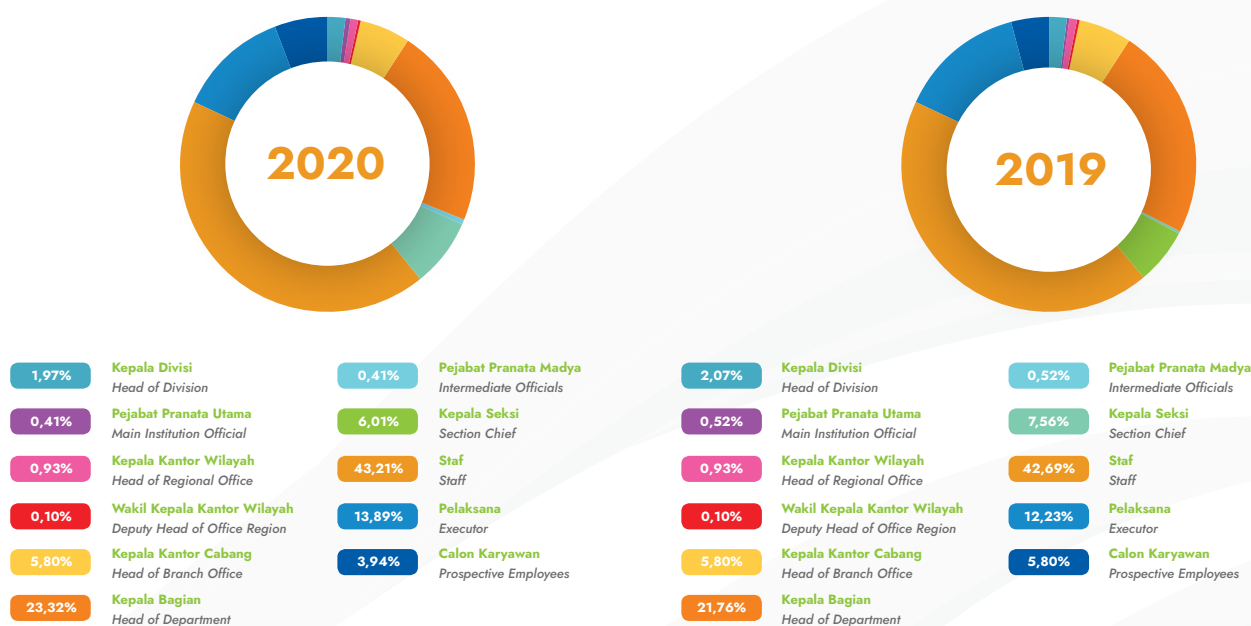
Level Organisasi Organization Level	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
Kepala Bagian Head of Department	165	60	225	23,32%	153	57	210	21,76%	15	7,14%
Pejabat Pranata Madya Intermediate Officials	3	1	4	0,41%	3	2	5	0,52%	(1)	20,00%
Kepala Seksi Section Chief	25	33	58	6,01%	29	44	73	7,56%	(15)	20,55%
Staf Staff	231	186	417	43,21%	238	174	412	42,69%	5	1,21%
Pelaksana Executor	78	56	134	13,89%	74	44	118	12,23%	16	13,56%
Calon Karyawan Prospective Employees	15	23	38	3,94%	21	35	56	5,80%	(18)	(32,14%)
Jumlah Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	0	0%

L = Laki-Laki/P = Perempuan

M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Level Organisasi

Composition of the Number of Permanent Employees by Organizational Level



Berdasarkan level organisasi, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh level Staf. Penambahan terbesar didapatkan dari Kepala Bagian serta Pelaksana, sedangkan terdapat pengurangan Kepala Seksi dan Calon Karyawan Tetap.

Based on the organizational level, the composition of Jamkrindo permanent employees dominated by staff level. The biggest addition is obtained from Head of Section and Executor, while there is a reduction Section Head and Prospective Permanent Employees.



Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan (orang)

Employees Demographics Based by Education Level (people) [102-8]

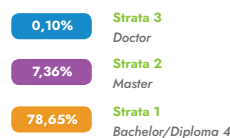
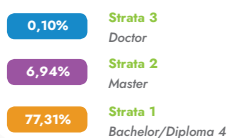
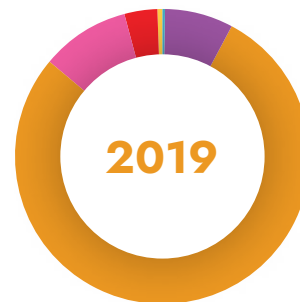
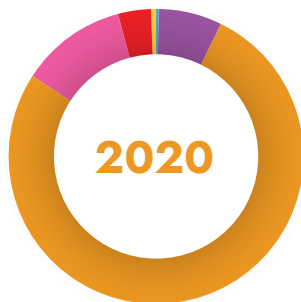
Jenjang Pendidikan Level of Education	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
Strata-3 (S3) Doctor	1	-	1	0,10%	1	-	1	0,10%	0	0%
Strata-2 (S2) Master	46	21	67	6,94%	49	22	71	7,36%	(4)	(5,63%)
Strata-1 (S1)/Diploma-4 (D4) Bachelor/Diploma 4	462	284	746	77,31%	464	295	759	78,65%	(13)	(1,71%)
Diploma 1-2-3 (D1/ D2/D3) Diploma 1-2-3 (D1/ D2/D3)	52	59	111	11,50%	50	44	94	9,74%	17	18,09%
SLTA Sederajat High School or Equivalent	25	10	35	3,63%	25	10	35	3,63%	0	0%
SLTP Sederajat Junior High School or Equivalent	5	-	5	0,52%	5	-	5	0,52%	0	0%
Jumlah Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	0	0%

L = Laki-Laki/P = Perempuan

M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Jenjang Pendidikan

Composition of the Number of Permanent Employees by Education Level



Berdasarkan jenjang pendidikan, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan dengan latar belakang pendidikan Sarjana (S1)/Diploma 4 (D4). Penambahan didapatkan dari Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3), sedangkan terdapat pengurangan pada karyawan dengan latar belakang pendidikan Strata-2 (S2) dan Strata-1 (S1) / Diploma-4 (D4).

Based on education level, the composition of Jamkrindo permanent employees is dominated by employees with a Bachelor's (S1)/Diploma 4 (D4) educational background. The addition is obtained from Diploma 1-2-3 (D1/D2/D3), while there is a reduction in employees with a Strata-2 (S2) and Strata-1 (S1)/Diploma-4 (D4) educational background.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Penempatan/Wilayah Kerja

Employee Demographics based on Placement/Work Area [102-8]

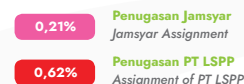
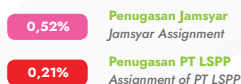
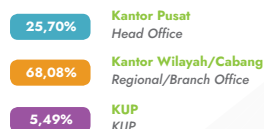
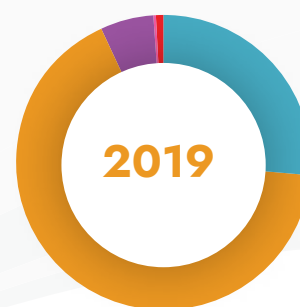
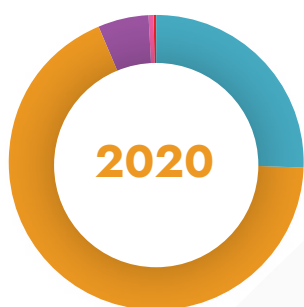
Penempatan/ Wilayah Kerja Placement/Work Area	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
Kantor Pusat Head Office	142	106	248	25,70%	145	110	255	26,42%	(7)	(2,75%)
Kantor Wilayah/ Cabang Regional/Branch Office	411	246	657	68,08%	408	238	646	66,94%	11	1,70%
KUP KUP	33	20	53	5,49%	35	21	56	5,80%	(3)	(5,36%)
Penugasan Jamsyar Assigned to PT Jamsyar	4	1	5	0,52%	5	1	2	0,21%	(1)	(16,67%)
Penugasan PT LSPP Assigned to PT LSPP	1	1	2	0,21%	1	1	6	0,62%	(4)	(66,67%)
Jumlah Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	0	0%

L = Laki-Laki/P = Perempuan

M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Penempatan/Wilayah Kerja

Composition of Number of Permanent Employees by Placement/Work Area



Berdasarkan penempatan/wilayah kerja, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap yang bertugas di Kantor Wilayah/Cabang.

Based on placement/work area, the composition of Jamkrindo permanent employees is dominated by permanent employees who work in Regional/Branch Offices.



Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Rentang Usia

Employee Demographics Based on Age Group [102-8]

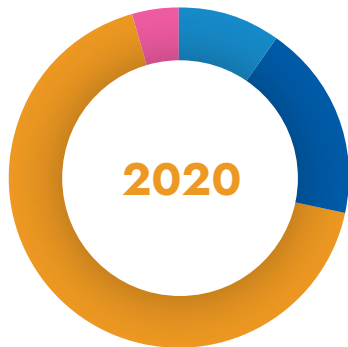
Rentang Usia Age Group	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Number (orang) (people)	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Number (orang) (people)	Persentase Percentage (%)	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
46-55 tahun 46-55 years old	62	25	87	10,05%	56	22	78	8,08%	9	11,54%
36-45 tahun 36-45 years old	115	66	181	18,75%	96	60	156	16,17%	25	16,03%
26-35 tahun 26-35 years old	402	252	654	67,77%	429	265	694	71,92%	(40)	(5,76%)
≤ 25 tahun ≤ years old	12	31	43	4,45%	13	24	37	3,83%	6	16,22%
Jumlah/Total	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	0	0%

L = Laki-Laki/P = Perempuan

M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Rentang Usia

Composition of Number of Permanent Employees by Age Range

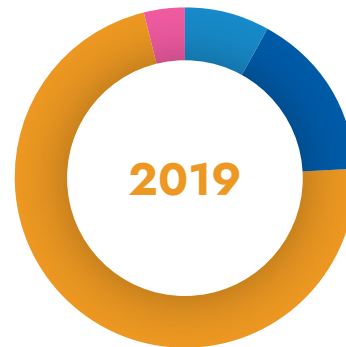


10,05% 46-55 Tahun
46-55 Years old

67,77% 26-35 Tahun
26-35 Years old

18,75% 36-46 Tahun
36-46 Years old

4,45% ≤ 25 Tahun
≤ 25 Years old



8,08% 46-55 Tahun
46-55 Years old

71,92% 26-35 Tahun
26-35 Years old

16,17% 36-46 Tahun
36-46 Years old

3,83% ≤ 25 Tahun
≤ 25 Years old

Berdasarkan kelompok usia, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap yang berada dalam kelompok usia 26-35%.

Based on age group, the composition of permanent employees of Jamkrindo dominated by permanent employees who are in the group ages 26-35%.

Demografi Karyawan Tetap Berdasarkan Masa Kerja

Permanent Employee Demographics based on Years of Service [102-8]

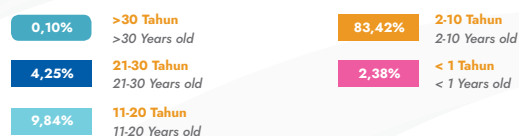
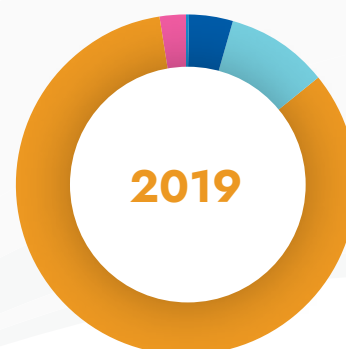
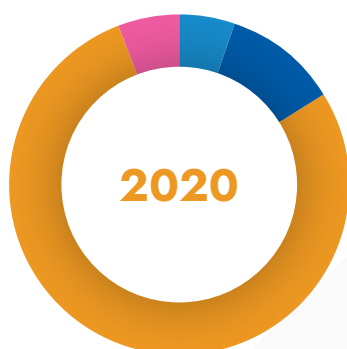
Masa Kerja Years of Service	2020				2019				Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	L	P	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)	L	P	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)	Jumlah Number	Persentase Percentage (%)
			(1)				(2)		(3=1-2)	(3/2)
≥ 30 tahun ≥ 30 years old	-	-	-	-	1	-	1	0,10%	(1)	(100,00%)
21-30 tahun 21-30 years old	34	17	51	5,28%	28	13	41	4,25%	10	24,39%
11-20 tahun 11-20 years old	63	44	107	11,09%	53	42	95	9,84%	12	12,63%
2-10 tahun 11-20 years old	472	281	753	78,03%	502	303	805	83,42%	(52)	(6,46%)
≤ 1 tahun 11-20 years old	22	32	54	5,60%	10	13	23	2,38%	31	134,78%
Jumlah 11-20 years old	591	374	965	100,00%	594	371	965	100,00%	0	0%

L = Laki-Laki/P = Perempuan

M = Male/F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Masa Kerja

Composition of the Number of Permanent Employees by Years of Service



Berdasarkan masa kerja, komposisi karyawan tetap Jamkrindo didominasi oleh karyawan tetap dengan masa kerja 2-10 tahun. Terdapat penambahan karyawan tetap Jamkrindo dengan masa kerja 11-20 tahun dan 21-30 tahun, sedangkan karyawan tetap dengan masa kerja 2-10 tahun mengalami penurunan. Kemudian apabila dilihat dari aspek gender, Sebagian besar karyawan tetap Jamkrindo adalah karyawan laki-laki.

Based on years of service, the composition of Jamkrindo permanent employees dominated by permanent employees with 2-10 years of service. There are additional Jamkrindo permanent employees with a period of 11-20 years and 21-30 years, while permanent employees with 2-10 years of service has decreased. Then when viewed from the aspect of gender, most employees Jamkrindo is still a male employee.



Demografi Pegawai Berdasarkan Gender/Jenis Kelamin

Employee Demographics Based on Gender [102-8]

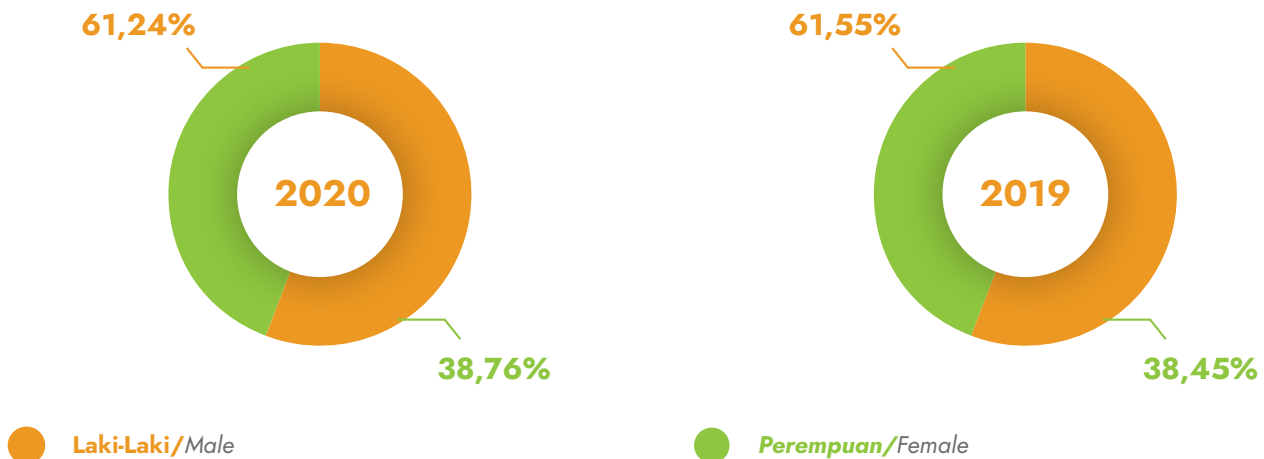
Jenis Kelamin Gender	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Jumlah Number (orang) (people)	Komposisi Composition (%)	Jumlah Number (orang) (people)	Komposisi Composition (%)	Jumlah Number (orang) (people)	Persentase Percentage
	(1)		(2)		(3=1-2)	(3/2)
Laki-laki (L) Male (M)	591	61,24%	594	61,55%	(3)	(0,5%)
Perempuan (P) Female (F)	374	38,76%	371	38,45%	3	0,8%
Jumlah Total	965	100,00%	965	100,00%	0	0%

L = Laki-Laki / P = Perempuan

M = Male / F = Female

Komposisi Jumlah Karyawan Tetap Berdasarkan Gender

Composition of the Number of Permanent Employees by Gender



Perusahaan juga memiliki pegawai kontrak dan outsource. Pegawai outsource didapatkan berdasarkan pemindahan pekerjaan (operasi) dari satu perusahaan ke perusahaan lain. Hal ini biasanya dilakukan untuk memperkecil biaya produksi atau untuk memusatkan perhatian kepada hal utama dari perusahaan tersebut. Selama tahun 2020, terdapat 730 orang karyawan kontrak dan outsource.

The company also has contract and outsourced employees. Outsourced employees are obtained based on job transfers (operations) from one company to another. This is usually done to minimize production costs or to focus attention on the main points of the company. During 2020, there were 730 contracted and outsourced employees.

RANTAI PASOKAN

Supply Chain [102-9]



Rantai pasok merupakan sistem organisasi, orang, aktivitas, informasi, dan sumber daya yang terlibat dalam memasok produk atau layanan kepada konsumen. Untuk bisa mengelola rantai pasok, perusahaan mengimplementasikan sistem *Supply Chain Management (SCM)* yang berkaitan dengan kegiatan yang diperlukan untuk perencanaan, pengendalian, dan pengoperasian arus produk. Jamkrindo menjalin kerja sama dengan pihak ketiga sebagai pemasok barang dan jasa. Dalam menjalin kerja sama, Jamkrindo senantiasa berpatokan pada ketentuan dan peraturan yang berlaku sehingga kerja sama tersebut saling menguntungkan.

Jamkrindo telah memiliki Pedoman kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa yang telah disahkan melalui Peraturan Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jamkrindo Nomor 16/Per-Dir/4/VII/2019 tentang Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia tanggal 10 Juli 2019. Kemudian terdapat pembaharuan Perdir PBJ No.03/Per-Dir/4/III/2020 tanggal 11 Maret 2020 tentang Pedoman Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa.

A supply chain is a system of organizations, people, activities, information and resources involved in supplying products or services to consumers. To be able to manage the supply chain, the company implements a Supply Chain Management (SCM) system that deals with the activities required for planning, controlling, and operating product flows. Jamkrindo collaborates with third parties as suppliers of goods and services. In establishing cooperation, Jamkrindo always adheres to the applicable rules and regulations so that the cooperation is mutually beneficial.

Jamkrindo already has a policy guideline for the procurement of goods and services which has been legalized through the Regulation of the Directors of the Public Company (Perum) Jamkrindo Number 16/Per-Dir/4/VII/2019 concerning Guidelines for the Procurement of Goods and Services for Public Companies (Perum), Jaminan Kredit Indonesia dated July 10, 2019. Then there is a renewal of No.03/Per-Dir/4/III/2020 dated March 11, 2020 concerning Guidelines for Procurement of Goods and Services Policy.



Berdasarkan pedoman tersebut, berkaitan dengan etika yang harus ditegakkan oleh insan Jamkrindo dalam proses pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.
3. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.
4. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan-perundangan yang berlaku.
5. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Based on these guidelines, the ethics that must be upheld by Jamkrindo personnel in the procurement process are as follows:

1. The company treats providers of goods or services including the procurement process according to sound, open, impartial business principles based on applicable regulations.
2. The company must carry out the procurement process in a transparent and accountable manner based on applicable regulations with reference to the principles of effectiveness, efficiency and economy.
3. Companies use goods and services providers based on written documents.
4. The company must maintain the confidentiality of information and documents on the procurement of goods and services in accordance with the prevailing laws and regulations.
5. The company does not engage in corruption, collusion and nepotism in the activities of procuring goods and services.

Selama tahun 2020, Perusahaan memiliki 234 Kontrak dengan total nilai kontrak Rp87.620.169.802 **[102-9]**

During 2020, the Company had 234 Contracts with a total contract value of IDR87,620,169,802 **[102-9]**

Jumlah Pemasok Barang dan Jasa dan Nilai Kontrak Pekerjaan

Number of Suppliers of Goods and Services and Value of Work Contracts

Keterangan Description	Jumlah Pemasok Barang Total Suppliers of Goods		Nilai Kontrak Pekerjaan (Juta Rupiah) The Value of Job Contract (Million Rupiah)	
	2020	2019	2020	2019
Pemasok Barang Goods Suppliers	23	25	9.172,773	12.630,183
Pemasok Jasa Service Suppliers	65	68	78.447,396	87.611,563
Jumlah Total	88	93	87.620,169	100.241,746

PERUBAHAN SIGNIFIKAN SELAMA PERIODE PELAPORAN

Significant Changes during the Reporting Period [102-10]

Pada tahun 2020 Jamkrindo secara resmi mengubah badan hukum Perusahaan Umum Jaminan Kredit Indonesia atau Jamkrindo menjadi Perseroan Terbatas sesuai dengan PP No.11/2020 yang telah diundangkan pada 17 Februari 2020. Keputusan ini dikuatkan melalui Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-00011484. AH..01.01 Tahun 2020 tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia atau disingkat PT Jamkrindo (Persero). Akta pendirian perusahaan perseroan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) ditandatangani di gedung Kementerian BUMN, Jakarta pada 24 Februari 2020.

Kemudian di 9 April 2020, Akta Pendirian PT Jamkrindo (Persero) No.25 tanggal 24 Februari 2020 mengalami perubahan dengan dikeluarkannya Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia Tentang Perubahan Anggaran Dasar No.2 tanggal 09 April 2020 yang menjadikan bergantinya status dan nama Jamkrindo menjadi PT Jamkrindo. Dengan adanya akta tersebut pemegang saham PT Jamkrindo berubah menjadi:

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 (satu) lembar saham seri A Dwiwarna, dengan nilai nominal seluruhnya Rp1.365.160,- (satu juta tiga ratus enam puluh lima ribu seratus enam puluh rupiah)
2. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) sebanyak Rp7.638.732 (tujuh juta enam ratus tiga puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh dua) lembar saham seri B, masing-masing saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000,- (satu juta Rupiah), sehingga keseluruhannya menjadi senilai Rp7.638.732.000.000 (tujuh triliun enam ratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus tiga puluh dua juta rupiah)

PT Jamkrindo merupakan perusahaan penjaminan yang saat ini merupakan anggota BUMN *holding* Asuransi dan Penjaminan dengan induk *holding* PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Perubahan bentuk perusahaan dan struktur kepemilikan perusahaan merubah struktur tata kelola perusahaan. Namun secara tugas dan fungsi dalam organ tata kelola tidak mengalami perubahan yang mendasar. Perusahaan berkeyakinan bahwa perubahan bentuk hukum dan struktur kepemilikan perusahaan tidak akan memberikan dampak yang *negative* bagi isu keberlanjutan Perusahaan dan tidak berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha baik jangka pendek maupun jangka panjang, namun justru akan memperkuat komitmen Perusahaan untuk menjalankan prinsip-prinsip dan merancang program-program keberlanjutan yang efisien dalam meningkatkan kinerja keberlanjutan.

In 2020 Jamkrindo officially changed the legal entity of the Jaminan Kredit Indonesia Public Company or Jamkrindo to become a Limited Liability Company under PP No.11/2020 which was promulgated on February 17, 2020. This decision was strengthened by the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia Number AHU-00011484. AH..01.01 Year 2020 concerning the Ratification of the Establishment of a Limited Liability Company Legal Entity Limited Liability Company (Persero) PT Guarantee Kredit Indonesia or abbreviated as PT Jamkrindo (Persero). The deed of establishment of the limited liability company PT Guarantee Kredit Indonesia (Persero) was signed at the Ministry of BUMN building, Jakarta on February 24, 2020.

Then on April 9, 2020, the Deed of Establishment of PT Jamkrindo (Persero) No.25 dated February 24, 2020 was amended by the issuance of the Deed of Decision Statement of the Shareholders of the Company (Persero) PT Guarantee Kredit Indonesia concerning Amendments to the Articles of Association No.2 dated April 9, 2020, which changed the status and name of Jamkrindo to PT Jamkrindo. With this deed, the shareholders of PT Jamkrindo changed to:

1. *The Republic of Indonesia, comprising 1 (one) series A Dwiwarna share, with a total nominal value of IDR1,365,160, - (one million three hundred sixty-five thousand one hundred and sixty rupiah)*
2. *PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) totaling IDR7,638,732 (seven million six hundred thirty eight thousand seven hundred thirty two) series B shares, each share with a nominal value of IDR1,000,000 (one million Rupiah), so that the total amount is IDR7,638,732,000,000 (seven trillion six hundred thirty-eight billion seven hundred thirty-two million rupiah)*

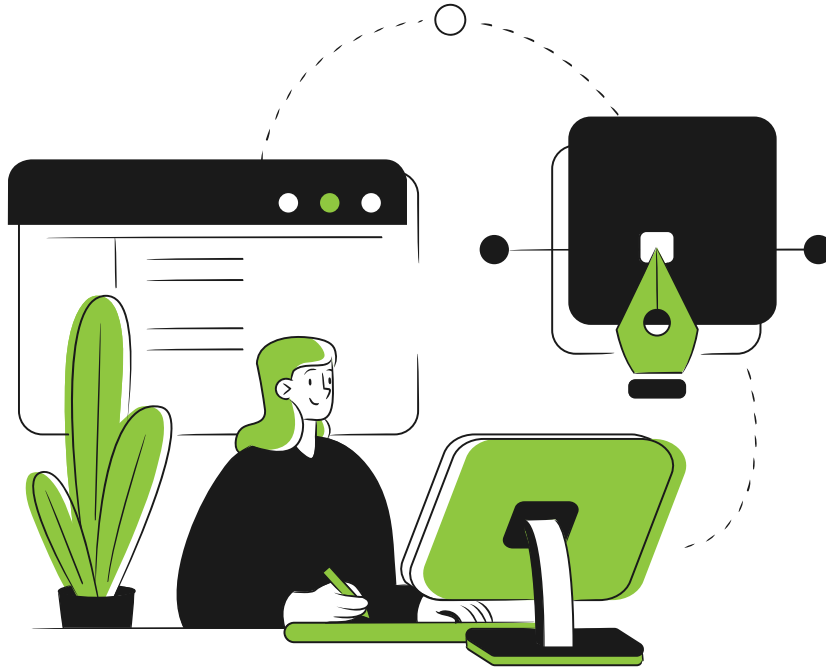
PT Jamkrindo is an underwriting company which is currently a member of the holding of the SOE holding Insurance and Guarantee with the holding company of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero).

Changes in the shape of the company and the structure of company ownership change the structure of corporate governance. However, in terms of duties and functions in the governance organ there has been no fundamental change. The company believes that changes in the legal form and ownership structure of the company will not have a negative impact on the Company's sustainability issues and will not have a significant impact on the business continuity both in the short and long term, but will in fact strengthen the Company's commitment to implementing the principles and designing programs. sustainability efficiency in improving sustainability performance.



SERTIFIKASI

Certification [102-12, 102-13, 3.e]



Sertifikasi yang Berlaku di Tahun 2020

Certification that Applies in 2020 [102-12]

Tanggal Dikeluarkannya Sertifikasi <i>Date of Certification Issued</i>	Jenis Sertifikat <i>Certificate Type</i>	Deskripsi Sertifikasi <i>Certificate Description</i>	Dikeluarkan Oleh <i>Issued by</i>	Masa Berlaku Hingga <i>Validity Period Until</i>
2 Mei 2018 <i>May 2, 2018</i>	Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2015 <i>ISO 9001: 2015 Quality Management Certification</i>	Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu dengan standar bertaraf Internasional yang bertujuan untuk menjamin produk atau jasa yang dihasilkan suatu Perusahaan <i>Quality Management System Certification with international standards which aims to guarantee the products or services produced by a company</i>	Sucofindo	1 Mei 2021 <i>May 1, 2021</i>
5 Agustus 2020 <i>August 5, 2020</i>	Sertifikasi Sistem Manajemen Anti Suap (SMAP) ISO 37001:2016 <i>Anti-Bribery Management System Certification ISO 37001:2016</i>	Sertifikasi untuk mengambil langkah-langkah preventif guna mencegah, mendeteksi, maupun mengatasi penyusapan yang terjadi di lingkungan perusahaan <i>Certification to take preventive measures to prevent, detect, or resolve bribery that occurs within the company</i>	PT SAI Global Indonesia	4 Agustus 2023 <i>August 4, 2023</i>
21 Desember 2020 <i>December 21, 2020</i>	Sertifikasi Pemeringkatan AA+ dari Pefindo <i>AA+ Rating Certification from Pefindo</i>	Sertifikasi terhadap Perusahaan atas Risiko Kredit <i>Certification of Companies for Credit Risk</i>	PT Pemeringkatan Efek Indonesia (PEFINDO)	1 Desember 2021 <i>December 1, 2021</i>

KEANGGOTAAN ASOSIASI

Membership of Association [102-12, 102-13, 3.e]



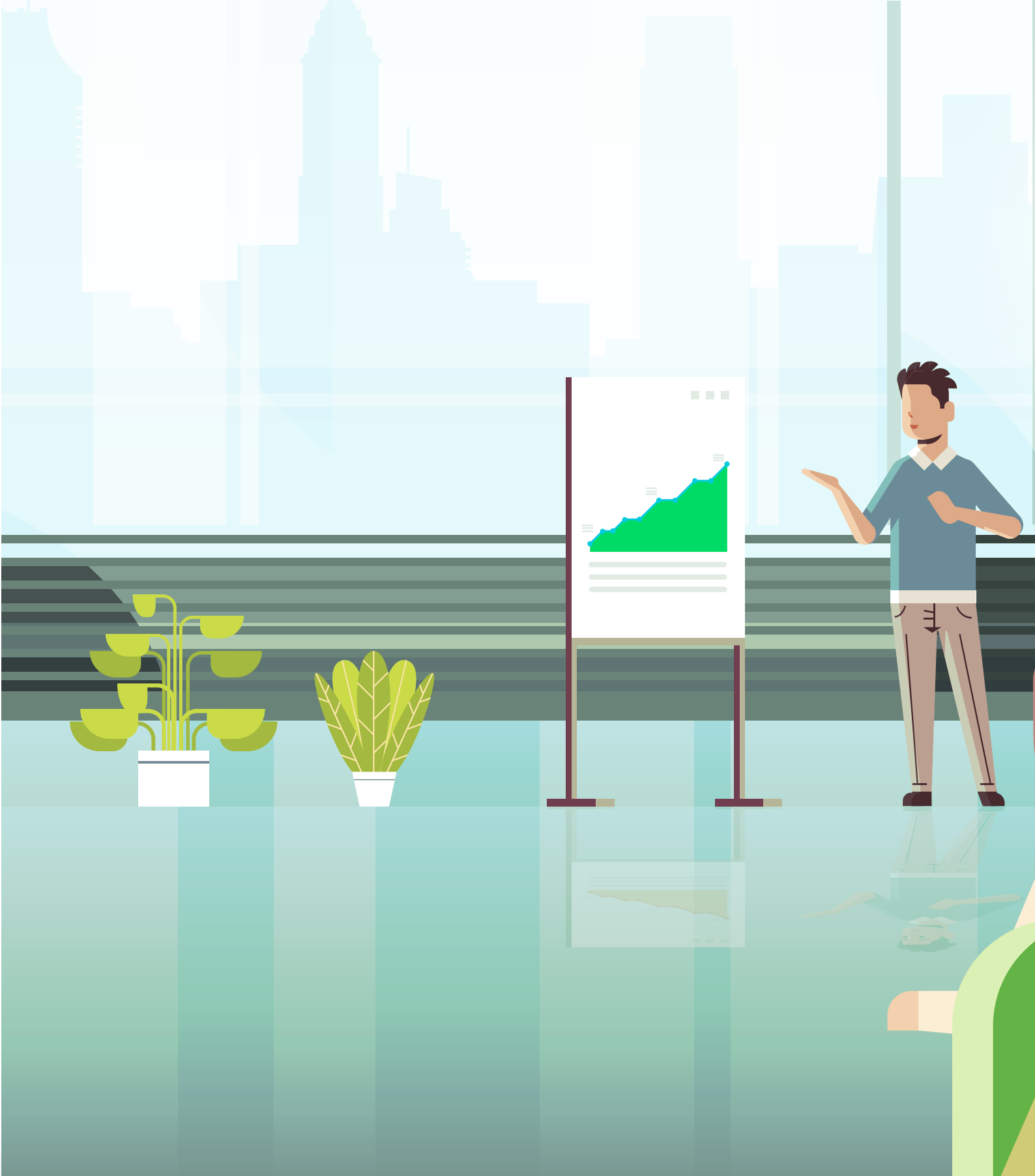
Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang penjaminan kredit, Jamkrindo bergabung dalam asosiasi/perhimpunan sebagai berikut:

As a Company engaged in credit guarantee, Jamkrindo joins the following associations:

Daftar Keanggotaan Asosiasi

List of Association Membership [102-13]

No.	Nama Asosiasi/Perhimpunan <i>The Name of an Association</i>	Posisi di Asosiasi (Pengurus/Anggota) <i>Position in Association (Officials/Members)</i>
1	ASIPPINDO (Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia/ <i>Indonesian Guarantee Company Association</i>)	Ketua Asosiasi dan Wakil Sekretaris Jendral II <i>Association Chair and Deputy Secretary General II</i>



TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

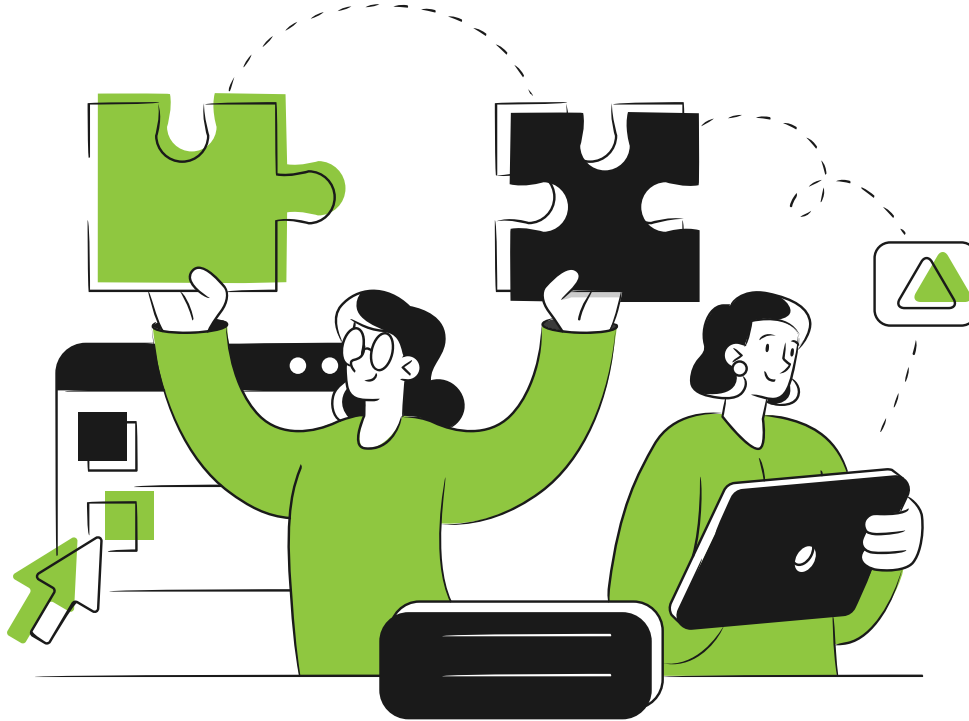
Sustainable Governance





TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

Sustainable Governance



Tata Kelola Perusahaan yang Baik, atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan sebuah mekanisme yang diciptakan sebagai upaya mengatur hubungan antar organ dalam entitas usaha; baik hubungan internal maupun eksternal yang berlandaskan pada perundang - undangan dan etika berusaha. Penerapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) telah menjadi kebutuhan dunia usaha di seluruh dunia, termasuk Indonesia. GCG merupakan prinsip-prinsip yang mendasari proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan kepatuhan terhadap peraturan Perundang-Undangan serta cerminan dunia usaha yang memiliki etika.

Perusahaan memiliki komitmen untuk menjalankan prinsip-prinsip GCG telah berlandaskan pada budaya Perusahaan yang berorientasi pada kepuasan konsumen, proaktif terhadap perubahan lingkungan usaha, bersikap jujur, berpikiran positif dan berdedikasi tinggi, bekerja tekun dan disiplin dengan mengutamakan kepentingan Perusahaan, serta selalu meningkatkan profesionalisme demi pencapaian nilai tambah bagi Perusahaan. Nilai-nilai budaya Jamkrindo ini telah diimplementasikan di seluruh jajaran Jamkrindo yang juga merupakan kode etik Jamkrindo sehingga manajemen dan karyawan memiliki acuan yang jelas dan terukur dalam berfikir dan bertindak sehingga membawa Jamkrindo mencapai tujuan.

Good Corporate Governance (GCG) is a mechanism created as an effort to regulate the relationship between organs in a business entity; both internal and external relations based on legislation and business ethics. The implementation of Good Corporate Governance (GCG) practices has become a necessity for businesses around the world, including Indonesia. GCG is the principles that underlie the processes and mechanisms of company management based on compliance with laws and regulations as well as a reflection of the ethical business world.

The company is committed to implementing GCG principles which are based on a corporate culture that is oriented towards customer satisfaction, proactive towards changes in the business environment, is honest, thinks positively and is highly dedicated, works diligently and discipline by prioritizing the interests of the Company, always increasing professionalism for the sake of value achievement. added for the Company. Jamkrindo cultural values have been implemented throughout the ranks of Jamkrindo which is also Jamkrindo code of ethics so that management and employees have clear and measurable references in thinking and acting so as to bring Jamkrindo to achieve its goals.

PRINSIP DAN TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

Corporate Governance Principles and the objectives of the implementation

Praktik GCG dikembangkan Jamkrindo sebagai komitmen untuk terus berinovasi dalam upaya penyempurnaan implementasi GCG di lingkup keorganisasian di lingkungan Jamkrindo, dimana hal ini memberikan Perusahaan kepercayaan diri dalam menghadapi setiap tantangan ke depan dan menjadi entitas usaha dengan kompetensi yang kompetitif. Dalam mengimplementasikan GCG, Jamkrindo mengacu pada beberapa peraturan dan perundang-undangan, utamanya Undang-Undang No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan Undang-Undang No.47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Undang-Undang ini memberikan fondasi menyeluruh terhadap aspek pengelolaan organisasi, mulai dari hak dan kewajiban pemegang saham, tugas dan wewenang Direksi dan Dewan Komisaris, hingga hubungan Perusahaan dengan pemangku kepentingan internal dan eksternal.

Sebagai entitas usaha dimana Pemerintah Indonesia menjadi Pemegang Saham, penerapan GCG di lingkup Perusahaan juga mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/2011 tentang Penetapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.PER-09/MBU/2012 tanggal 6 Juli 2012, dimana disebutkan bahwa GCG adalah prinsip-prinsip yang mendasari suatu proses dan mekanisme pengelolaan perusahaan berlandaskan perundang-undangan dan etika berusaha. Penerapan prinsip-prinsip GCG yang mencakup transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, kemandirian dan kewajaran merupakan landasan yang kuat bagi keberlanjutan aktivitas usaha Perusahaan. Selain itu penerapan GCG yang mengacu pada praktik terbaik akan meningkatkan kepercayaan Pemegang Saham dan para pemangku kepentingan yang akan membawa Perusahaan kepada kemajuan yang signifikan dan berkelanjutan. Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN tersebut, tujuan penerapan prinsip-prinsip GCG pada entitas usaha BUMN adalah:

1. Mengoptimalkan nilai BUMN agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional.
2. Mendorong pengelolaan BUMN secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ perusahaan.

The practice of GCG was developed by Jamkrindo as a commitment to continue to innovate in efforts to improve the implementation of GCG in the organizational sphere of Jamkrindo, where this gives the Company the confidence to face every challenge ahead and become a business entity with competitive competencies. In implementing GCG, Jamkrindo refers to several laws and regulations, especially Law No.19 of 2003 concerning State Owned Enterprises (BUMN) and Law No.47 of 2007 concerning Limited Liability Companies. This law provides a comprehensive foundation for aspects of organizational management, starting from the rights and obligations of shareholders, the duties and authorities of the Board of Directors and the Board of Commissioners, to the Company's relations with internal and external stakeholders.

As a business entity in which the Government of Indonesia is the shareholder, the implementation of GCG within the scope of the Company also refers to the Regulation of the Minister of BUMN No.PER-01/MBU/2011 concerning the Determination of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises (BUMN) as amended by Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-09/MBU/2012 dated July 6, 2012, where it states that GCG is the principles that underlie a company management process and mechanism based on legislation and business ethics. The application of GCG principles which include transparency, accountability, responsibility, independence and fairness is a strong foundation for the sustainability of the Company's business activities. In addition, the implementation of GCG which refers to best practices will increase the trust of Shareholders and stakeholders which will lead the Company to significant and sustainable progress.

Based on the SOE Ministerial Regulation, the objectives of implementing GCG principles in SOE's business entities are:

1. *Optimizing the value of SOE's so that the company has strong competitiveness, both nationally and internationally.*
2. *Encouraging the professional, efficient, and effective management of SOE's, as well as empowering functions and increasing the independence of company organs.*



3. Mendorong organ perusahaan dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan di sekitar BUMN.
 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional.
 5. Meningkatkan iklim yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.
3. *Encourage company organs to make decisions and carry out actions based on high moral values and compliance with laws and regulations, as well as awareness of SOE's social responsibility towards stakeholders and environmental sustainability around SOE's.*
 4. *Increase the contribution of SOE's in the national economy.*
 5. *Increasing a conducive climate for the development of national investment.*

Prinsip implementasi GCG yang digunakan Perusahaan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/2011 serta Pedoman Umum GCG dari Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) melalui azas-azas GCG yang umum dikenal dengan sebutan TARIF, yaitu transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), kemandirian (*independency*) dan kewajaran (*fairness*) pada seluruh Organ Perusahaan baik Pemegang Saham, Dewan Komisaris maupun Direksi yang tercantum dalam Surat Keputusan Bersama Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia No:01/SKB/1/XII/2020, KEP-08/DK-JAMKRINDO/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*).

The principles of implementing GCG used by the Company refer to the SOE Minister Regulation No.PER-09/MBU/2011 as well as the General Guidelines for GCG from the National Committee on Governance (KNKG) through GCG principles commonly known as TARIF, namely transparency, accountability, responsibility, and independence and fairness in all Company Organs, including Shareholders, Board of Commissioners and Directors as stated in the Joint Decree of the Commissioners and Directors of PT Jaminan Kredit Indonesia No:01/SKB/1/XII/2020, KEP-08/DK-JAMKRINDO/XII/2020 dated December 30, 2020 concerning Guidelines for the Implementation of Good Corporate Governance.

Prinsip Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *Principles of Implementing Good Corporate Governance*



Landasan Hukum

Penerapan GCG di lingkungan Perusahaan mengacu kepada beberapa peraturan/perundangan yang berlaku di Indonesia, diantaranya:

1. Undang-Undang Republik Indonesia
 - a. Undang-Undang Republik Indonesia No.19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
 - b. Undang-Undang Republik Indonesia No.47 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
 - c. Undang-Undang Republik Indonesia No.1 Tahun 2016 tentang Penjaminan.
 - d. Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - e. Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
 - f. Undang-Undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia No.25 tahun 2003.
 - g. Undang-Undang Republik Indonesia No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi.
 - h. Undang-Undang Republik Indonesia No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Peraturan Pemerintah
 - a. Peraturan Pemerintah No.35 Tahun 2018 tentang Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia.
 - b. Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
 - c. Peraturan Pemerintah No.45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN.

Landasan Hukum

The implementation of GCG in the Company's environment refers to several regulations/laws that apply in Indonesia, including:

1. Laws of the republic Indonesia
 - a. Law of the Republic of Indonesia No.19 of 2003 on State-Owned Enterprises.
 - b. Law of the Republic of Indonesia No.47 of 2007 About Limited Liability Company
 - c. Law of the Republic of Indonesia No.1 year 2016 about Guarantee.
 - d. Law of the Republic of Indonesia No.20 of 2001 on Amendments to the Republic Act Indonesia No.31 of 1999 concerning the Eradication of Corruption Crimes.
 - e. Law of the Republic of Indonesia No.28 of 1999 concerning Clean and Free State Administrators of Corruption, Collusion and Nepotism.
 - f. Law of the Republic of Indonesia No.15 of 2002 concerning the Crime of Money Laundering as has been amended by the Republic Act Indonesia No.25 of 2003.
 - g. Law of the Republic of Indonesia No.14 of 2008 regarding Information Disclosure.
 - h. Law of the Republic of Indonesia No.11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions.
2. Government regulations
 - a. Government Regulation No.35 of 2018 concerning Indonesian Public Company (Perum) Credit Guarantee.
 - b. Government Regulation No.38 of 2008 concerning Amendments to Government Regulation No.6 Year 2006 concerning the Management of State/Regional Property.
 - c. Government Regulation No.45 of 2005 concerning Establishment, Management, Supervision, and Dissolution SOE's.



3. Peraturan Menteri BUMN

- a. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan perubahannya No.PER-09/MBU/2012 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara.
- b. Peraturan Menteri BUMN No.PER-01/MBU/06/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- c. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris Badan Usaha Milik Negara.
- d. Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- e. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.
- f. Peraturan Menteri BUMN No.PER-02/MBU/2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang Panduan Penyusunan Pengelolaan Teknologi Informasi BUMN.
- g. Peraturan Menteri BUMN No.PER-10/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawasan Badan Usaha Milik Negara.
- h. Peraturan Menteri Negara BUMN No.PER-05 MBU/2006 tentang Komite Audit bagi BUMN.

4. Keputusan Menteri BUMN

- a. Keputusan Sekretaris Menteri Negara BUMN No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

5. Pedoman Umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG).

3. SOE's Minister Regulation

- a. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and the amendment No.PER-09/MBU/2012 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (Good Corporate Governance) in the Agency State Owned Enterprises.*
- b. *SOE's Minister Regulation No.PER-01/MBU/06/2017 concerning the Second Amendment to the Regulation of the Minister of SOEs No.PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Stipulation Income Directors, Board Commissioner/Board State Owned Enterprise Supervisor.*
- c. *Regulation Minister Country SOE's No.PER-02/MBU/02/2015 about Requirements, System Method Appointment and Dismissal of Board Members Commissioner of State-Owned Enterprises.*
- d. *SOE's Minister Regulation No.PER-02/MBU/06/2016 regarding the Amendment to the Regulation of the Minister of SOE's No.PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Stipulation Income Directors, Board Commissioner/Board State Owned Enterprise Supervisor.*
- e. *Regulation Minister Country SOE's No.PER-04/MBU/2014 concerning Guidelines for Income Determination Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Supervisors of the Agency State Owned Enterprises.*
- f. *Regulation Minister SOE's No.PER-02/MBU/2013 dated February 18, 2013 regarding Guidelines for Preparation SOE's Information Technology Management.*
- g. *SOE's Minister Regulation No. PER-10/MBU/2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervision Board State-owned enterprises.*
- h. *Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No.PER-05 MBU/2006 regarding the Audit Committee for SOEs.*

4. SOE's Minister Decree

- a. *Decree of the Secretary of the State Minister for SOEs No.SK-16/S.MBU/2012 dated 6 June 2012 concerning Indicators/Parameters of Assessment and Evaluation of the Implementation of Governance Good Corporate Governance (GCG) in SOE's.*

5. General Guidelines for Indonesian GCG by the National Committee Governance Policy (KNKG).

ROADMAP TATA KELOLA

Corporate Governance Roadmap

Roadmap Tata Kelola

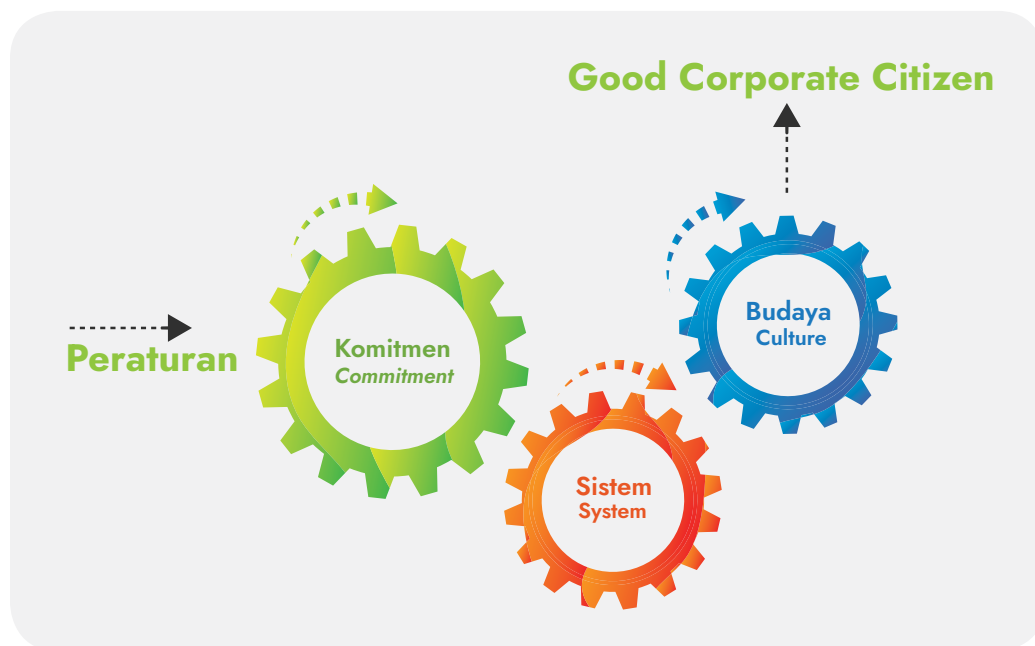
Proses GCG merupakan cara atau mekanisme yang dilakukan oleh perusahaan dan manajemen dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG untuk menjalankan fungsi dan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Wujud dari komitmen, struktur GCG, sistem dan prosedur yang telah disusun oleh Perusahaan bertujuan untuk menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan perusahaan yang profesional secara efektif dan efisien.

Jamkrindo memiliki *Roadmap* dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG guna mencapai *Good Corporate Citizen* dengan mekanisme di bawah ini:

Corporate Governance Roadmap

The GCG process is a method or mechanism carried out by the company and management in implementing GCG principles to carry out its functions and duties in accordance with the applicable laws and regulations. The manifestation of the commitment, GCG structure, systems and procedures that have been prepared by the Company aims to create added value for stakeholders through effective and efficient professional management of the company.

Jamkrindo has a *Roadmap* in implementing GCG principles in order to achieve *Good Corporate Citizen* with the following mechanism:



Patuh terhadap seluruh regulasi atau pedoman yang dijalankan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *best practice*.

Operasional Perusahaan dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan pengendalian Internal, manajemen risiko, dan penerapan WBS.

Memberikan pelayanan terbaik untuk kegiatan penjaminan bagi UMKMK dan dapat menjadi *Role Mode* bagi Perusahaan sejenis.

Comply with all applicable regulations or guidelines company in accordance with applicable laws and regulations applicable and *best practice*.

Company operations can work effectively and efficiently through compliance with Internal control, management risk, and WBS implementation.

Providing the best service for guarantee activities for UMKMK and can be a *Role Mode* for the Company kind.



Komitmen

Dalam penerapan prinsip-prinsip GCG tersebut, seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk tunduk dan patuh terhadap seluruh peraturan dan perundang undangan yang berlaku, serta yang berlaku umum. Dukungan dari manajemen memberikan peran besar dalam menentukan arah dan tujuan penerapan GCG di Jamkrindo. Dalam praktiknya, Manajemen Jamkrindo menjadi contoh bagi karyawan untuk terus berkomitmen dalam penerapan GCG yang berkelanjutan. Jamkrindo akan menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap proses bisnis dan melakukan penyempurnaan perangkat pendukung GCG.

Sistem

Dalam mendukung komitmen GCG yang berkelanjutan di Jamkrindo, maka diperlukan sistem operasional perusahaan yang dapat bekerja secara efektif dan efisien melalui kepatuhan terhadap perundang-undangan yang berlaku, sistem pengendalian internal yang memadai dan pengelolaan manajemen risiko yang baik serta penerapan sistem pelaporan pelanggaran yang efektif.

Budaya

Nilai-nilai budaya Jamkrindo merupakan landasan bagi Insan Perusahaan dalam bekerja agar lebih jelas dan terstruktur. Dalam rangka penerapan GCG Jamkrindo, maka seluruh Insan Jamkrindo berkomitmen untuk menerapkan nilai-nilai budaya perusahaan yang selaras dengan prinsip-prinsip GCG.

Tujuan implementasi GCG yang dilakukan Jamkrindo adalah untuk menjadi Perusahaan Penjaminan yang memberikan nilai bagi para pemangku kepentingan melalui pengelolaan Perusahaan yang efektif dan efisien dengan menciptakan nilai-nilai budaya sehingga dapat meningkatkan tingkat kepercayaan, membangun citra Perusahaan (*brand image*) dan reputasi Perusahaan yang baik serta benchmark bagi perusahaan sejenis lainnya.

Pencapaian dan *milestones* penerapan GCG Jamkrindo dapat dilihat pada gambar berikut ini:

Commitment

In implementing these GCG principles, all Jamkrindo employees are committed to obeying all applicable laws and regulations, as well as those that are generally accepted. Support from management plays a major role in determining the direction and objectives of GCG implementation at Jamkrindo. In practice, Jamkrindo Management is an example for employees to continue to be committed to implementing sustainable GCG. Jamkrindo will apply GCG principles in every business process and make improvements to GCG supporting tools.

System

In supporting sustainable GCG commitment at Jamkrindo, a company operational system that can work effectively and efficiently through compliance with applicable laws, an adequate internal control system and good risk management as well as the implementation of an effective violation reporting system is needed.

Culture

Jamkrindo cultural values are the foundation for the Company's Individuals to work to make them clearer and more structured. In the context of implementing Jamkrindo GCG, all Jamkrindo employees are committed to implementing corporate cultural values that are in line with GCG principles.

The goal of Jamkrindo GCG implementation is to become a guarantee company that provides value to stakeholders through effective and efficient company management by creating cultural values in order to increase the level of trust, build a good corporate image (brand image) and corporate reputation as well as benchmarks for other similar companies.

The achievements and milestones for implementing Jamkrindo GCG can be seen in the following figure:

Rekam Jejak Perkembangan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik

Track Record Of The Development Of Good Corporate Governance Implementation





STRUKTUR TATA KELOLA KEBERLANJUTAN

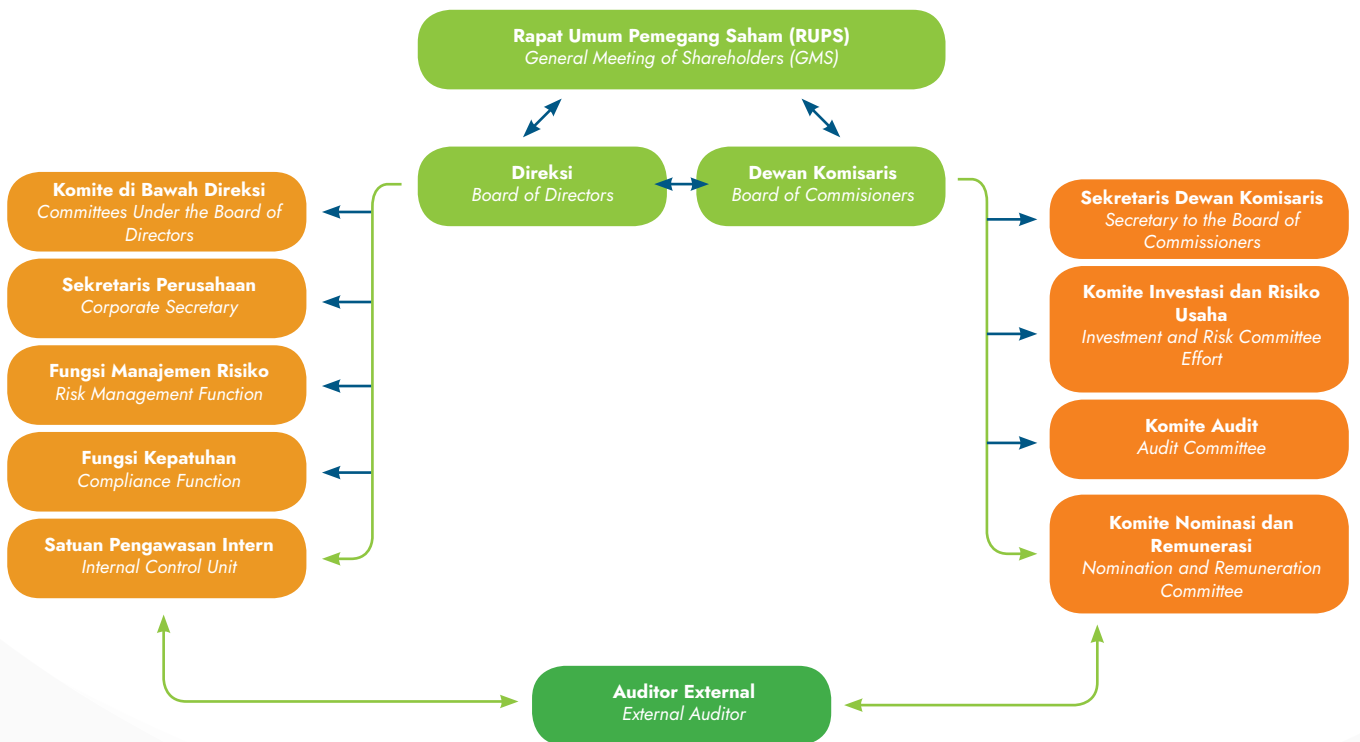
Sustainability Governance Structure [102-18, 5.a]

Prinsip-prinsip Tata Kelola atau *Governance Principles* sebagaimana telah dijelaskan di atas, diterapkan di lingkup Perusahaan melalui 2 (dua) aspek utama, yaitu Struktur Tata Kelola atau *Governance Structure*, serta Proses Tata Kelola atau *Governance Process*. Ke-2 aspek ini berkesinambungan satu dengan lainnya, yang pada akhirnya akan mencerminkan Hasil Tata Kelola atau *Governance Outcome* sesuai dengan yang diharapkan.

The Governance Principles as described above are implemented within the Company through 2 (two) main aspects, namely the Governance Structure and the Governance Process. These 2 aspects are continuous with one another, which in the end will reflect the Governance Outcome as expected.

Struktur Tata Kelola merupakan organ atau perangkat yang dimiliki oleh Perusahaan, baik organ atau perangkat yang dibentuk karena kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, maupun organ atau perangkat yang dibentuk karena kebutuhan internal dalam rangka meningkatkan penerapan GCG. Sedangkan Proses Tata Kelola merupakan rangkaian proses, kebiasaan, aturan, dan institusi yang memengaruhi pengelolaan Perusahaan secara keseluruhan. Proses Tata Kelola mencakup peraturan dan perundang-undangan yang berlaku bagi Perusahaan, Prosedur Tetap, Piagam, dokumen, hingga aturan diberlakukan yang mengatur hubungan antar organ atau perangkat.

Governance structure is an organ or apparatus that is owned by the Company, both organs or devices that are formed due to compliance with the prevailing laws and regulations, as well as organs or devices that are formed due to internal needs in order to improve the implementation of GCG. Meanwhile, the Governance Process is a series of processes, habits, rules, and institutions that affect the overall management of the Company. The Governance Process covers the rules and regulations that apply to the Company, Standard Procedures, Charter, documents, until the rules are enforced that regulate the relationship between organs or devices.



- Organ Utama
Main Organs
- Organ Pendukung
Supporting Organs
Supporting Organs
(Board of Commissioners)
- Organ Pendukung
(Direksi)
Supporting Organs
(Board of Directors)
- Organ Eksternal
(Auditor Independen)
External Organs
(Independent Auditor)

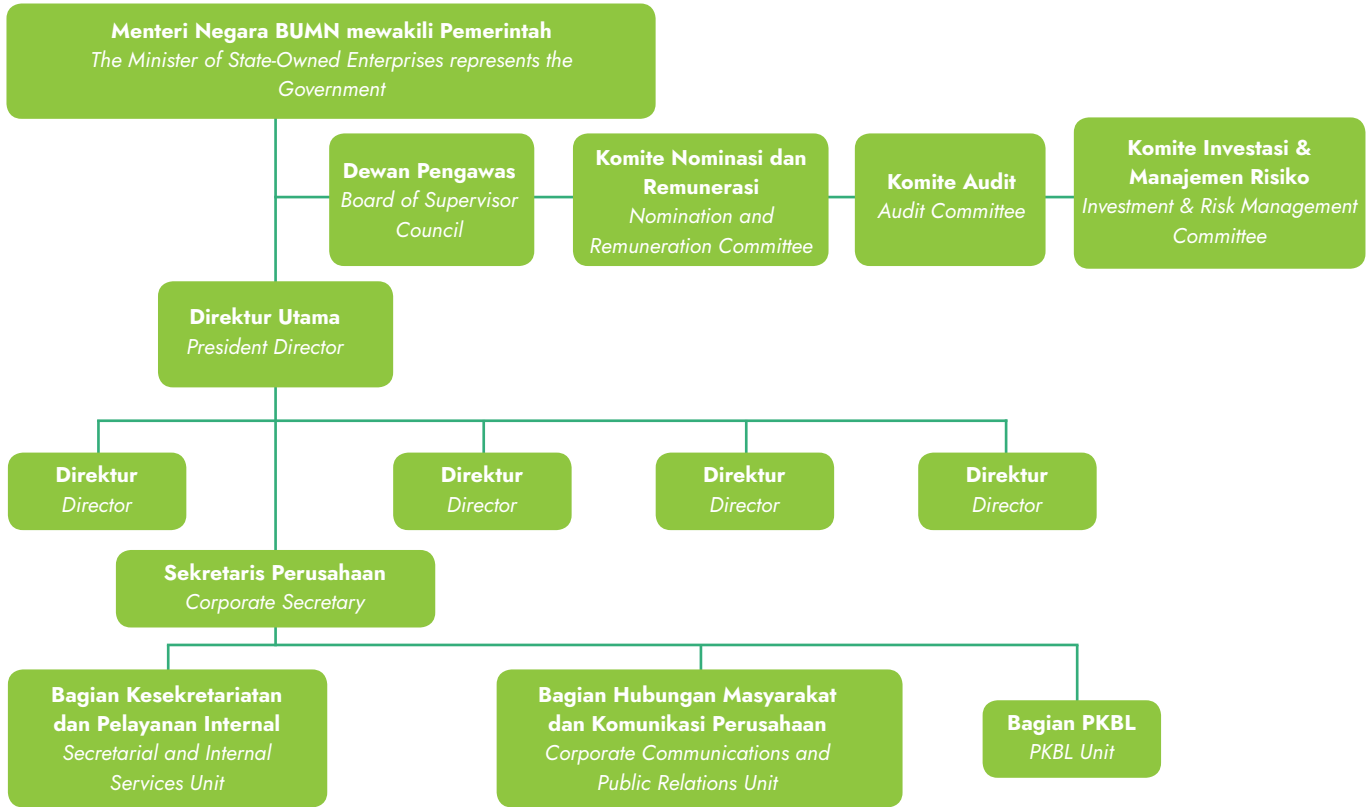
Salah satu aspek GCG yang diimplementasikan oleh Perusahaan adalah aspek Tata Kelola Keberlanjutan. Untuk dapat melaksanakan keseluruhan program Keberlanjutan di lingkup Perusahaan, pelaksanaan keseluruhan program ini terbagi dalam beberapa Divisi/Unit dengan tanggung jawab yang sesuai dengan kategori program yang mengacu kepada ISO 26000 tentang Panduan Tanggung Jawab Sosial. Jamkrindo belum memiliki organ khusus yang mengelola isu keberlanjutan secara keseluruhan. Keberlanjutan merupakan tanggung jawab Direktur Utama. Sedangkan pelaksanaan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan dijalankan oleh Unit PKBL Jamkrindo dibentuk dengan tujuan agar pengelolaan PKBL dapat dilaksanakan secara optimal dan terfokus dengan memisahkan penanganan fungsi pembinaan (evaluasi, penyaluran, penagihan, pelatihan, promosi dan sebagainya) dengan fungsi administrasi dan keuangan. Unit PKBL Jamkrindo merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari struktur organisasi Jamkrindo secara keseluruhan. [102-18]

One of aspect of GCG implemented by the Company is the aspect of Sustainability Governance. In order to be able to carry out the entire Sustainability program within the Company, the implementation of this entire program is divided into several Divisions/Units with responsibilities in accordance with the program category referring to ISO 26000 on Social Responsibility Guidelines. Jamkrindo does not yet have a special organ that manages overall sustainability issues. Sustainability is the responsibility of the President Director. While the implementation of the Social and Environmental Responsibility program is run by the Jamkrindo PKBL Unit, it was formed with the aim that PKBL management can be carried out optimally and focused by separating the handling of the coaching functions (evaluation, distribution, billing, training, promotion and so on) with administrative and financial functions. Jamkrindo PKBL unit is an integral part of Jamkrindo overall organizational structure. [102-18]

Struktur Organisasi unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Jamkrindo pada saat Laporan Keberlanjutan ini di publikasikan adalah sebagai berikut:

The organizational structure of the Jamkrindo Partnership and Community Development Program unit at the time this Sustainability Report was published is as follows:

Direktur Board of Directors	Nama Name
Direktur Utama President Director	Putrama Wahyu Setyawan
Direktur Bisnis Penjaminan Director of Guarantee Business	Suwarsito
Direktur Operasional & Jaringan Director of Operations & Network	Kadar Wisnuwarman
Direktur MSDM, Umum & Kepatuhan Director of HRM, General Affairs & Compliance	Sulis Usdoko
Direktur Keuangan, Investasi & Manajemen Risiko Director of Finance, Investment & Risk Management	I. Rusdonobanu
Staf Staff	Nama Name
Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary	Abdul bari
Kepala Bagian PKBL Head of PKBL	Nenden Kania Puji Asri
Staf PKBL PKBL Staff	Retno Indriani



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (RUPS)

General Meeting of Shareholders (GMS)

RUPS merupakan organ Perusahaan pemegang kekuasaan tertinggi dalam struktur organisasi tata kelola, dengan kewenangan yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Sebagai wadah pemegang saham untuk mengambil keputusan penting, perusahaan memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan RUPS, agar keputusan yang diambil sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berdasarkan pada kepentingan usaha Perusahaan. Wewenang yang dimiliki oleh RUPS antara lain adalah meminta pertanggungjawaban dari Dewan Komisaris dan Direksi terkait kinerja perusahaan, memberhentikan Direksi dan/atau Komisaris, mengubah Anggaran Dasar, dan lain-lain.

RUPS dan Jenis-jenisnya

RUPS dan/atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi dengan tidak mengurangi wewenang RUPS untuk menjalankan haknya sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Wewenang RUPS sebagai organ tertinggi Perusahaan dibatasi oleh Undang-undang sebagaimana tertuang dalam Pasal 75 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Dengan mengedepankan prinsip-prinsip GCG dalam rangka mekanisme utama perlindungan dan pelaksanaan hak-hak pemegang saham, maka pelaksanaan RUPS adalah hal yang esensial. Sebagai organ GCG yang menjadi wadah para pemegang saham untuk mengambil keputusan, RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris. Meski demikian, RUPS dan atau Pemegang Saham tidak dapat melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi, dan wewenang Dewan Komisaris serta Direksi.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan dan Undang-Undang No.40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya atau RUPS Luar Biasa.

The GMS is the Company's organ that holds the highest power in the governance organizational structure, with authority not given to the Board of Directors or the Board of Commissioners. As a forum for shareholders to make important decisions, the company has the obligation to hold a GMS, so that the decisions taken are in accordance with the provisions of the articles of association and laws and regulations based on the Company's business interests. The authorities possessed by the GMS, among others, are to hold the Board of Commissioners and Directors accountable for the company's performance, dismiss the Board of Directors and/or Commissioners, amend the Articles of Association, and others.

GMS and its Types

The GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions and powers of the Board of Commissioners and Directors without reducing the authority of the GMS to exercise their rights in accordance with the Articles of Association and laws and regulations. The authority of the GMS as the highest organ of the Company is limited by the Law as stipulated in Article 75 of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

By prioritizing the principles of GCG in the framework of the main mechanism of protection and implementation of shareholder rights, the implementation of the GMS is essential. As a GCG organ that serves as a forum for shareholders to make decisions, the GMS has authority that is not delegated to the Board of Directors or the Board of Commissioners. However, the GMS and/or Shareholders cannot intervene in the duties, functions and powers of the Board of Commissioners and Board of Directors.

Based on the Company's Articles of Association and Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, the GMS consists of the Annual GMS and Other GMS or Extraordinary GMS.



Jenis Jenis RUPS Type of GMS

RUPS Tahunan

yang diadakan untuk membahas laporan tahunan dan perhitungan tahunan Perusahaan dan dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku.

Annual GMS

is held to discuss the annual report along with annual calculations of the Company and is carried out no later than 6 (six) months after the financial year.

RUPS Lainnya/Luar Biasa

yang dapat diadakan sewaktu-waktu jika dipandang perlu oleh Direksi, Dewan Komisaris atau Pemegang Saham untuk menetapkan hal-hal yang tidak dilakukan dalam RUPS Tahunan.

Other / Extraordinary GMS

which can be held at any time if deemed necessary by the Board of Directors, Board of Commissioners or Shareholders to determine matters that are not discussed in the Annual GMS.

Selain kedua RUPS tersebut di atas, pemegang saham juga memiliki mekanisme Keputusan Sirkuler, yaitu pengambilan keputusan oleh pemegang saham di luar mekanisme RUPS. Keputusan Sirkuler memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Keputusan RUPS, dengan syarat seluruh pemegang saham memberikan persetujuan secara tertulis atas usul yang akan diputuskan dalam perihal Keputusan Sirkuler. Hal ini sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Apart from the aforementioned two GMS, shareholders also have a Circular Decision mechanism, namely decision making by shareholders outside the GMS mechanism. Circular Decisions have the same legal force as GMS Resolutions, provided that all shareholders give their approval in writing of the proposal to be decided in the matter of Circular Decisions. This is in accordance with Article 91 of Law No.40 of 2007 concerning Limited Liability Companies.

Baik RUPS Tahunan dan RUPS Lainnya memiliki wewenang tertinggi dalam struktur Tata Kelola Perusahaan sekaligus merupakan forum bagi pemegang saham untuk menggunakan hak dan wewenangnya terhadap pengelolaan Perusahaan.

Both the Annual GMS and Other GMS have the highest authority in the structure of Corporate Governance as well as a forum for shareholders to exercise their rights and powers over the management of the Company.

Penyelenggaraan RUPS di Sepanjang Tahun 2020

Implementation of GMS throughout 2020

Di sepanjang tahun 2020, Jamkrindo menyelenggarakan RUPS dan keputusan pemegang saham, yaitu:

Throughout 2020, Jamkrindo held GMS and shareholder decisions, namely:

1. Rapat Pembahasan Bersama mengenai Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2020 Jamkrindo, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Januari 2020
2. RUPS Tahunan Tahun Buku 2019 yang dilaksanakan pada 30 Juni 2020.
3. Keputusan Sirkuler tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.
4. Keputusan Sirkuler tanggal 26 Oktober 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia.
5. Keputusan Sirkuler tanggal 16 November 2020 tentang Persetujuan Penetapan Revisi RKAP Tahun 2020.

1. *Joint Discussion Meeting regarding the Ratification of the Company's Work Plan and Budget for the 2020 Financial Year of Jamkrindo, which was held on January 15, 2020*
2. *The 2019 Fiscal Year Annual GMS was held on June 30, 2020.*
3. *Circular Decision dated February 21, 2020 regarding the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia.*
4. *Circular Decree dated October 26, 2020 regarding the Dismissal and Appointment of the President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia.*
5. *Circular Decision dated November 16, 2020 concerning Approval for Determination of the 2020 RKAP Revision.*

DEWAN KOMISARIS

Board of Commisioners [102-22]



Dewan Komisaris diangkat oleh Pemegang Saham untuk memberikan pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Dasar hukum pengangkatan Dewan Komisaris diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-02/MBU/02/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Melalui Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2020 tanggal 17 Februari 2020 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM) Jaminan Kredit Indonesia Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) dimana Jamkrindo berubah status hukumnya dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT), dan Peraturan Pemerintah No.20 Tahun 2020, PT Jamkrindo (Persero) berubah status menjadi PT Jamkrindo dan merupakan salah satu anak usaha dari PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) terhitung sejak 17 Maret 2020, serta berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, menetapkan anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo sebagai anggota Dewan Komisaris PT Jamkrindo untuk pertama kalinya. Untuk selanjutnya penyebutan Dewan Pengawas berubah menjadi Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners is appointed by the Shareholders to provide oversight of the management of the company which is run by the Board of Directors. The legal basis for the appointment of the Board of Commissioners is regulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No.PER-02/MBU/02/2015 on the Requirements and Procedures for the Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

Through Government Regulation No.11 of 2020 dated 17 February 2020 regarding the Change of Legal Entity for a Public Company (PERUM) of Indonesian Credit Guarantee to a Limited Liability Company (Persero) where Jamkrindo changed its legal status from a Public Company (Perum) to a Limited Liability Company (PT), and Government Regulation No.20 of 2020, PT Jamkrindo (Persero) changed its status to PT Jamkrindo and is a subsidiary of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as of March 17, 2020, and based on the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, appointed a member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo as a member of the Board of Commissioners of PT Jamkrindo for the first time. Henceforth, the designation of the Supervisory Board will change to the Board of Commissioners.



Susunan Dewan Komisaris Jamkrindo per 31 Desember 2020

Composition of Jamkrindo Board of Commissioners as of December 31 2020 [102-22]

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Term of Office
Sri Mulyanto	Komisaris Utama/ Independen <i>President Commissioner/ Independent</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of Minister of State-Owned Enterprises No.SK-233/MBU/10/2017 dated October 27 2017 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21 2020</i>	27 Oktober 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2022 <i>October 27 2017 until the GMS held on 2022</i>	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas) <i>First term (never served in the Board of Commissioners/ Supervisory Board prior)</i>
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of Minister of State-Owned Enterprises No.SK-241/MBU/10/2019 dated October 17 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21 2020</i>	17 Oktober 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 <i>October 17 2019 until the GMS held on 2024</i>	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas) <i>First term (never served in the Board of Commissioners/ Supervisory Board prior)</i>
Diah Natalisa	Komisaris <i>Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of Minister of State-Owned Enterprises No. SK-88/MBU/05/2017 dated May 3 2017 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21 2020</i>	3 Mei 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2021 <i>May 3 2017 until the GMS held on 2021</i>	Ke-1 <i>First term</i>
Noor Ida Khomsiyati	Komisaris <i>Commissioner</i>	Keputusan Menteri No.SK-76/MBU/4/2016 tanggal 12 April 2016 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of Minister of State-Owned Enterprises No.SK-76/MBU/4/2016 dated April 12 2016 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21 2020</i>	12 April 2016 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2021 <i>April 12 2016 until the GMS held on 2021</i>	Ke-1 <i>First term</i>
Ari Wahyuni	Komisaris <i>Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of Minister of State-Owned Enterprises No.SK-02/MBU/01/2019 dated January 3 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21 2020</i>	3 Januari 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 <i>January 3 2019 until the GMS held on 2024</i>	Ke-1 <i>First term</i>

Sesuai keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) selaku Para Pemegang Saham Perusahaan memutuskan untuk melakukan perubahan keanggotaan Dewan Komisaris, sebagai berikut:

- Pada tanggal 18 Januari 2021, Para Pemegang Saham menetapkan pemberhentian Diah Natalisa sebagai Komisaris karena masa jabatannya yang telah habis, dan mengangkat Hernita Alius sebagai Komisaris Independen.
- Pada tanggal 2 Juni 2021, Para Pemegang Saham memutuskan untuk memberhentikan Noor Ida Khomsiyati dari jabatannya sebagai Komisaris dengan alasan masa tugasnya yang berakhir pada 12 April 2021, sekaligus mengangkat Desty Arlaini sebagai Komisaris yang baru.

Dengan demikian, susunan Dewan Komisaris Jamkrindo hingga disahkannya laporan tahunan tanggal 26 November 2021 dapat disampaikan sebagai berikut.

In accordance to the decree of Minister of State-Owned Enterprises and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero) as the Shareholders of the Company, the Company has decided to carry out changes in the membership of the Board of Commissioners, as follows:

- *On January 18 2021, The Shareholders established the removal of Diah Natalisa as Commissioner as her term in office has expired, and appoint Hernita Alius as Independent Commissioner.*
- *On June 2 2021, The Shareholders have decided to remove Noor Ida Khomsiyati from her position as commissioner with the reason being the expiration of her term on April 12 2021, and appoint Desty Arlaini as the new Commissioner.*

Therefore, the composition of Jamkrindo Board of Commissioners until the approval of the annual report on November 26, 2021 may be given as follows.

Susunan Dewan Komisaris Jamkrindo per tgl bln disahkannya laporan keberlanjutan 2020

The composition of the Jamkrindo Board of Commissioners as of the date of the ratification of the 2020 sustainability report [102-22]

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Decree	Masa Jabatan Length of Service	Periode Jabatan Term of Office
Sri Mulyanto	Komisaris Utama/ Independen President Commissioner/ Independent	Keputusan Menteri BUMN No.SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 Decree of Minister of State-Owned Enterprises No.SK-233/MBU/10/2017 dated October 27 2017 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21 2020	27 Oktober 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2022 October 27 2017 until the GMS held on 2022	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) First term (never served in the Board of Commissioners/Supervisory Board prior)



Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Appointment Decree	Masa Jabatan Length of Service	Periode Jabatan Term of Office
M. Muchlas Rowi	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of Minister of State-Owned Enterprises No.SK-241/MBU/10/2019 dated October 17 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21 2020</i>	17 Oktober 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 <i>October 17 2019 until the GMS held on 2024</i>	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) <i>First term (never served in the Board of Commissioners/Supervisory Board prior)</i>
Hernita Alius	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-19/MBU/01/2021 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/1/2021 tanggal 21 Februari 2021 <i>Decree of Minister of State-Owned Enterprises as Shareholder Series A No. -19/MBU/01/2021 and Letter of Decree of BPUI as Shareholder Series B No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/1/2021 dated February 21 2021</i>	18 Januari 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 <i>January 18 2021 until the GMS held on 2026</i>	Ke-1 (sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Komisaris/Dewan Pengawas) <i>First term (never served in the Board of Commissioners/Supervisory Board prior)</i>
Ari Wahyuni	Komisaris <i>Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN No.SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 <i>Decree of Minister of State-Owned Enterprises No.SK-02/MBU/01/2019 dated January 3 2019 jo. No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21 2020</i>	3 Januari 2019 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2024 <i>January 3 2019 until the GMS held on 2024</i>	Ke-1 <i>First term</i>
Desty Arlaini	Komisaris <i>Commissioner</i>	Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-182/MBU/06/2021 dan Surat Keputusan BPUI selaku Pemegang Saham Seri B No.05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021 <i>Decree of Minister of State-Owned Enterprises as Shareholder Series A No.SK-182/MBU/06/2021 and Letter of Decree of BPUI as Shareholder Series B No.05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/VI/2021 dated June 2 2021</i>	2 Juni 2021 s.d 1 RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 <i>June 2 2021 until the GMS held on 2026</i>	Ke-1 <i>First term</i>

Susunan Dewan Pengawas Syariah Jamkrindo per 31 Desember 2020

The composition of the Jamkrindo Sharia Supervisory Board as of December 31, 2020

Nama Nama	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Masa Jabatan Term of Office	Periode Jabatan Term of Office
Hasanudin	Ketua Dewan Pengawas Syariah <i>Chairman of the Sharia Supervisory Board</i>	Jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 2006, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No.123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016. <i>The position of Chairman of the Sharia Supervisory Board has been held since 2006, and was reappointed in 2016 through the Decree of the Board of Directors No.123/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016.</i>	1 Juli 2016 – Sekarang <i>July 1, 2016 – Present</i>	Ke-3 <i>Third Period</i>
Muhammad Syakir Sula	Anggota Dewan Pengawas Syariah <i>Member of Sharia Supervisory Board</i>	Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 2009, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No.123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016. <i>The position of Member of the Sharia Supervisory Board has been held since 2009, and was reappointed in 2016 through the Decree of the Board of Directors No. 123/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016.</i>	1 Juli 2016 - Sekarang <i>July 1, 2016 – Present</i>	Ke-3 <i>Third Period</i>



Profil Dewan Komisaris Board Of Commissioners Profile



Sri Mulyanto

Komisaris Utama/Independen

President Commissioner/Independent

Periode Jabatan: 27 Oktober 2017 – 26 Oktober 2022, Periode Pertama
Term of Office: October 27, 2017 – October 26, 2022, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Klaten
8 Oktober / October 8

1958

62 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Master of Economic Policy and Planning, Northeastern University, Boston, Amerika Serikat (1993)
(S1) Sarjana Ekonomi Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983)

Education

Master of Economic Policy and Planning, Northeastern University, Boston, United States (1993)
Bachelor of Economics of Universitas Sebelas Maret, Surakarta (1983)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Ketua Dewan Pengawas/Independen diemban sejak 27 Oktober 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN No.SK-233/MBU/10/2017 tanggal 27 Oktober 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Ketua Dewan Pengawas/Komisaris Utama ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Sri Mulyanto diubah dari Ketua Dewan Pengawas/Independen menjadi Komisaris Utama/Independen.

Appointment History

The position of Chairman of the Supervisory Board/Independent has been carried out since October 27, 2017, through the Decree of the Minister of SOEs No.SK-233/MBU/10/2017 dated October 27, 2017, concerning Dismissal and Appointment of Chairman of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is his first period as Chairman of the Supervisory Board/President Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Sri Mulyanto's position was changed from Chairman of the Supervisory Board/Independent to President Commissioner/Independent.

Riwayat Profesi

Direktur Umum dan SDM PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Komisaris PT Antam (2011-2012), Komisaris PT Jasa Raharja (2008-2012), Asisten Deputi Bidang Usaha Jasa III, Kementerian BUMN (2010), Asisten Deputi Urusan Usaha Asuransi, Kementerian BUMN (2006), Asisten Deputi Urusan Usaha Jasa Konstruksi, Kementerian BUMN (2002).

Professional History

Director of General Affairs and HR of PT Pegadaian (Persero) (2012-2017), Commissioner of PT Antam (2011-2012), Commissioner of PT Jasa Raharja (2008-2012), Assistant Deputy for Services Business III, the Ministry of SOEs (2010), Assistant Deputy for Insurance Business Affairs, the Ministry of SOEs (2006), Assistant Deputy of Construction Services Business Affairs, the Ministry of SOEs (2002).

Rangkap Jabatan

Sri Mulyanto tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

Sri Mulyanto does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

Sri Mulyanto tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Sri Mulyanto does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders. serta dengan pemegang saham utama.



Muhammad Muchlas Rowi

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Periode Jabatan: 17 Oktober 2019 – 16 Oktober 2024, Periode Pertama

Term of Office: October 17, 2019 – October 16, 2024, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Garut
31 Agustus / August 31

1972

48 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S1) Sarjana Ilmu Filsafat Universitas Gadjah Mada (1998)
(S2) Magister Manajemen di STIE IBMT Surabaya (2019)

Education

Bachelor of Philosophy of Gadjah Mada University (1998)
Master of Management of STIE IBMT Surabaya (2019)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas Independen diemban sejak 17 Oktober 2019 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-241/MBU/10/2019 tanggal 17 Oktober 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas Independen/Komisaris Independen ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Muchlas Rowi diubah dari Anggota Dewan Pengawas Independen menjadi Komisaris Independen.

Appointment History

The position of Member of the Independent Supervisory Board has been carried out since October 17, 2019, through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-241/MBU/10/2019 dated October 17, 2019, concerning Dismissal and Appointment of Member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is his first period as the Independent Supervisory Board/Independent Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Muchlas Rowi's position was changed from Member of the Independent Supervisory Board/Independent to Independent Commissioner.

Riwayat Profesi

Bendahara Badan Pembina Harian (BPH) Institut Bisnis Muhammadiyah (2019 - sekarang), Pemilik Rosbuck Milk & Coffee (2018 - sekarang), General Manager Marketing PT Intan Sejati Klaten (2016-2018), Pimpinan Umum Monday Media Group (2015 - sekarang), Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014-sekarang).

Professional History

Treasurer of Daily Development Board of Muhammadiyah Business Institute (2019 - present), Rosbuck Milk & Coffee's owner (2018 - present), General Manager of Marketing of PT Intan Sejati Klaten (2016 - 2018), Managing Director of Monday Media Group (2015 - present), Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014 - present).

Rangkap Jabatan

Pimpinan Umum Monday Media Group (2015 - sekarang), Komisaris PT Fantasi Megah Bersama (2014 - sekarang).

Concurrent Position

Managing Director of Monday Media Group (2015-present), Commissioner of PT Fantasi Megah Bersama (2014 - present).

Hubungan Afiliasi

Muhammad Muchlas Rowi tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Muhammad Muchlas Rowi does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Dra. Hernita Alius, M.M, M.Si

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Periode Jabatan: 18 Januari 2021 - 17 Januari 2026, Periode Pertama

Term of Office: January 18, 2021 – January 17, 2026, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Jakarta

13 Oktober / October 13

1959

63 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Magister Sains, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia (2006)

(S2) Magister Manajemen Universitas Bhayangkara (2004)

(S1) Sarjana Ekonomi dari Fakultas Ekonomi Universitas Krisnadwipayana (1986)

(DIII) Diploma dari Sekolah Tinggi Akutansi Negara (1981)

Education

Master of Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia (2006)

Master of Management, Bhayangkara University (2004)

Bachelor of Economics from Faculty of Economics, Krisnadwipayana University (1986)

Diploma III from The State Accounting College (1981)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Komisaris Independen diemban sejak 18 Januari 2021 melalui Keputusan Para Pemegang Saham PT Jamkrindo, Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku para Pemegang Saham PT Jamkrindo No.SK-19/MBU/01/2021 dan No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/1/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Komisaris Independen ini merupakan periode pertama, sebelumnya tidak pernah menjabat dalam jajaran Dewan Pengawas/Dewan Komisaris Perusahaan.

Appointment History

The position of the Independent Commissioner has been carried out since January 18, 2021, through the resolution of shareholders of PT Jamkrindo, the Decree of the Minister of SOEs and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia as the capital owner of PT Jamkrindo No.SK-19/MBU/01/2021 and No.02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/1/2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia. This position is his first period as the Independent Commissioner, previously he had never served in the Supervisory Board /Board of Commissioners of the Company.

Riwayat Profesi

Supervisor Inspektur pajak di Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak Tangerang (2000 - 2006), Supervisor Inspektur pajak di Kantor Pelayanan Pajak Madya Tangerang (2006 - 2009), Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2009 - 2012), Supervisor Inspektur pajak Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu (2012 - 2016), Kepala di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Cilandak (2016 - 2017), dan Direktur PT Indobagus Investama (2018).

Professional History

Supervisor of Tax Inspector at Tangerang Tax Inspection and Investigation Office (2000 - 2006), Supervisor of Tax Inspector at Tangerang Medium Tax Office (2006 - 2009), Supervisor of Tax Inspector at Jakarta Tax Office, Cilandak (2009 - 2012), Supervisor of Tax Inspector at Jakarta Tax Office, Pasar Minggu (2012 - 2016), Head of Jakarta Tax Office, Cilandak (2016-2017), and Director of PT Indobagus Investama (2018).

Rangkap Jabatan

Hernita Alius tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

Hernita Alius does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

Hernita Alius tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi.

Affiliate Relationships

Hernita Alius does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Diah Natalisa

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan: 3 Mei 2017 – 2 Mei 2021, Periode Pertama
(tidak lagi menjabat sejak 18 Januari 2021)

Term of Office: May 3, 2017 – May 2, 2021, 1st Period
(no longer in office since January 18, 2021)

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

Palembang
15 November / November 15

1976

57 Tahun
Years Old

Pendidikan

Profesor dan (S3) Doktor Ilmu Ekonomi Universitas Airlangga (1999)
(S2) Magister Manajemen, University of Kentucky (1992)
(S1) Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Universitas Sriwijaya (1987)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 3 Mei 2015 melalui Keputusan Menteri BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No. SK-88/MBU/05/2017 tanggal 3 Mei 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Diah Natalisa diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No. SK-19/MBU/01/2021 dan Keputusan Direktur Utama PT BPUI (Persero) No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 tanggal 18 Januari 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia, Diah Natalisa tidak lagi menjabat sebagai Dewan Komisaris karena masa jabatannya yang habis di tahun 2021.

Riwayat Profesi

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB (2016-sekarang), Koordinator KOPERTIS Wilayah II Kemdikbud RI (2008-2016), Ketua Program Studi Magister Manajemen Universitas Sriwijaya (2005-2008).

Rangkap Jabatan

Deputi Bidang Pelayanan Publik Kementerian PANRB (2016-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Diah Natalisa tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Diah Natalisa memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama melalui rangkap jabatannya di Kementerian PANRB.

Education

Professor and Doctor of Economics from Airlangga University (1999)
Master of Management from University of Kentucky (1992)
Bachelor of Economics majoring in Management from Sriwijaya University (1987)

Appointment History

Served as a Member of the Supervisory Board since May 3, 2015 through the Decree of the Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No. SK-88/MBU/05/2017 dated May 3, 2017 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is her first period as Member of the Supervisory Board/Board of Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No. SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Diah Natalisa's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No. SK-19/MBU/01/2021 and the President Director of PT BPUI (Persero) Decree No. 02/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/I/2021 dated January 18, 2021 concerning Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of PT Jaminan Kredit Indonesia, Diah Natalisa no longer serves as Board of Commissioners due to her expired term in 2021.

Professional History

Deputy for Public Service of the Ministry of PANRB (2016-present), Coordinator of KOPERTIS Region II of the Ministry of Education and Culture of the Republic of Indonesia (2008-2016), Chairman of the Master of Management Study Program of Sriwijaya University (2005-2008).

Concurrent Position

Deputy for Public Service of the Ministry of PANRB (2016-present)

Affiliate Relationships

Diah Natalisa does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors. Diah Natalisa has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of PANRB.



Noor Ida Khomsiyati

Komisaris

omisariss

Periode Jabatan: 12 April 2016 – 11 April 2021, Periode Pertama
(tidak lagi menjabat sejak 2 Juni 2021)

Term of Office: April 12, 2016 – April 11, 2021, 1st Period
(no longer in office since June 2, 2021)

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domisile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Pati
8 Mei / May 8

1971

49 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Magister jurusan Manajemen SDM Universitas Bhayangkara (2006)
(S1) Sarjana Hukum Universitas Diponegoro Semarang (1995)

Education

Master of HR Management of Bhayangkara University, (2006)
Bachelor of Law of Diponegoro University, Semarang (1995)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas diemban sejak 12 April 2016 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-76/MBU/4/2016 tanggal 12 April 2016 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas/Dewan Komisaris ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Noor Ida Khomsiyati diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris.

Appointment History

The position of Member of the Supervisory Board has been carried out since April 12, 2016, through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-76/MBU/4/2016 dated April 12, 2016, concerning Dismissal and Appointment of Member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is her first period as the Supervisory Board/Board of Commissioner. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Noor Ida Khomsiyati's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner.

Riwayat Profesi

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014-sekarang), Kepala Bagian Pelayanan dan Bantuan Hukum I Kementerian BUMN (2012-2014), Anggota Dewan Komisaris PT Pos Indonesia (Persero) (2013-2015), Kepala Subbagian Pelayanan dan Bantuan Hukum II C Kementerian BUMN (2010-2012), Kepala Subbagian Pelayanan Hukum Kementerian BUMN (2006-2010).

Professional History

Head Division of Legal Assistance of Legal Bureau, Secretariat of the Ministry of SOEs (2014 - present), Head Division of Service and Legal Assistance 1 of the Ministry of SOEs (2012 - 2014), Member of the Board of Commissioners of PT Pos Indonesia (Persero) (2013 - 2015); Subdivision Head of Services and Legal Assistance II C of the Ministry of SOEs (2010 - 2012), Subdivision Head of Legal Services of the Ministry of SOEs (2006 - 2010).

Rangkap Jabatan

Kepala Bagian Bantuan Hukum Biro Hukum Sekretariat Kementerian BUMN (2014-sekarang)

Concurrent Position

Head Division of Legal Assistance of Legal Bureau, Secretariat of the Ministry of SOEs (2014-present)

Hubungan Afiliasi

Noor Ida Khomsiyati tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Noor Ida Khomsiyati memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama melalui rangkap jabatannya di Kementerian BUMN.

Affiliate Relationships

Noor Ida Khomsiyati does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors. Noor Ida Khomsiyati has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of SOEs.



Desty Arlaini

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan: 2 Juni 2021 – 1 Juni 2026, Periode Pertama

Term of Office: June 2, 2021 – June 1, 2026, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bogor, West Java, Indonesia

Palembang

4 Desember / December 4

1976

44 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Magister jurusan Ilmu Manajemen Universitas Indonesia (2006)

(S1) Sarjana jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YAI (2000)

(D3) Ahli Madya jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (1997)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas Komisaris diemban sejak 2 Juni 2021 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia selaku Para Pemegang Saham PT Jaminan Kredit Indonesia Pemilik Modal No.05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUINI/2021 tanggal 2 Juni 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris PT Jaminan Kredit Indonesia ini merupakan periode pertama.

Riwayat Profesi

Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN (2021-sekarang), Penata Kelola Perusahaan Negara Madya Kementerian BUMN (2021-sekarang), Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN (2020-2021), Asisten Deputi Bidang Perkebunan dan Kehutanan Kementerian BUMN (2020), Koordinator Kementerian BUMN (2020-2021), Pengendali Kelompok Kementerian BUMN (2020), Komisaris PT Perkebunan Nusantara VI (2020-2021), Komisaris PT Perkebunan Nusantara II (2018-2020), Asisten Deputi Usaha Industri Agro dan Farmasi I Kementerian BUMN (2018-2019), Kepala Bidang Usaha Industri Agro dan Farmasi I Kementerian BUMN (2017-2020), Sekretaris Dewan Komisaris PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (2013-2018), Sekretaris Dewan Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (2011-2014), Anggota Komite PT Sang Hyang Seri (Persero) (2009-2011).

Rangkap Jabatan

Plt. Asisten Deputi Bidang Jasa Logistik Kementerian BUMN (2021-sekarang), Penata Kelola Perusahaan Negara Madya Kementerian BUMN (2021-sekarang)

Hubungan Afiliasi

Desty Arlaini tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Desty Arlaini memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama seri A melalui rangkap jabatannya di Kementerian BUMN.

Education

Master of Management Science, University of Indonesia (2006)

Bachelor of Economics majoring in Accounting, YAI College (2000)

Associate of Accounting, State College of Accounting (1997)

Appointment History

The position as Commissioner has been carried out since June 2, 2021, through the Decree of the Minister of SOEs No.SK-182/MBU/06/2021 and President Director Decree of PT BPUI (Persero) No.05/SK-DIR/RUPS-AP/BPUINI/2021 dated June 2, 2021 concerning Dismissal and Appointment of PT Jaminan Kredit Indonesia Board of Commissioners Member and President Director of PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Persero). This position is his first period as Commissioner.

Professional History

Act. Assistant Deputy for Logistics Services of the Ministry of SOEs (2021-present), Middle Officials Of The Ministry of SOEs (2021-present), Assistant Deputy for Plantation and Forestry of the Ministry of SOEs (2020-2021), Assistant Deputy for Plantation and Forestry of the Ministry of SOEs (2022)0, Coordinator of the Ministry of SOEs (2020-2021), Controlling Group of The Ministry of SOEs (2020), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara VI (2020-2021), Commissioner of PT Perkebunan Nusantara II (2018-2020) , Assistant Deputy of Agro and Pharmaceutical Industry I Ministry of SOEs (2018-2019), Head of Agro and Pharmaceutical Industry I Ministry of SOEs (2017-2020), Secretary of the Board of Commissioners of PT Asuransi Jasa Indonesia (Persero) (2017-2020) 2013-2018, Secretary of the Board of Commissioners of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2011-2014), Committee Member of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2009-2011).

Concurrent Position

Act. Assistant Deputy for Logistics Services of the Ministry of SOEs (2021-present), Middle Officials Of The Ministry of SOEs (2021-present)

Affiliate Relationships

Desty Arlaini does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors Desty Arlaini has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of SOEs.



Ari Wahyuni

Komisaris

Commissioner

Periode Jabatan: 3 Januari 2019 – 2 Januari 2024, Periode Pertama

Term of Office: January 3, 2019 – January 2, 2024, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Bogor, Jawa Barat, Indonesia

Bogor, West Java, Indonesia

Surabaya

9 November / November 9

1966

54 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Master of Public Management Carnigie - Mellon University (1994)

(S1) Ilmu Hukum (keperdataan) Universitas Diponegoro (1990)

Education

Master of Public Management Carnigie- Mellon University (1994)

Bachelor of Law (civil affairs) Diponogoro University (1990)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Komisaris diemban sejak 3 Januari 2019 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-02/MBU/01/2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas Perum Jamkrindo. Jabatan Anggota Dewan Pengawas ini merupakan periode pertama. Sesuai Keputusan Menteri BUMN No.SK-51/MBU/02/2020 tanggal 21 Februari 2020 tentang Pengangkatan Anggota-anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan (Persero) PT Jaminan Kredit Indonesia, jabatan Ari Wahyuni diubah dari Anggota Dewan Pengawas menjadi Komisaris.

Appointment History

The position of Member of the Board of Commissioners has been carried out since January 3, 2019, through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-02/MBU/01/2019 dated January 3, 2019, concerning Dismissal and Appointment of Member of the Supervisory Board of Perum Jamkrindo. This position is her first period as the Supervisory Board. In accordance with the Decree of the Minister of SOEs No.SK-51/MBU/02/2020 dated February 21, 2020 concerning the Appointment of Members of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company (Persero) of PT Jaminan Kredit Indonesia, Ari Wahyuni's position was changed from Member of the Supervisory Board to Commissioner.

Riwayat Profesi

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (September 2018 - sekarang), Direktur Sistem Manajemen Investasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2013 - September 2018), Dewan Pengawas PERURI (2013 - 2018), Sekretaris Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2009 - 2013), Dewan Komisaris PT PANN (2010 - 2013), Kepala Pusdiklat Keuangan Umum BPPK (2008 - 2009), Kepala Bagian Pengawasan Kebijakan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi dan Riset BAPEPAM (2004 - 2006), Kepala Bagian Perundang-undangan, Biro Perundang-Undangan dan Bantuan Hukum BAPEPAM (1990 - 2000).

Professional History

Director of Financial Management Development of the Public Service Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (September 2018 - present), Director of Investment Management System of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2013 - September 2018), PERURI Supervisory Board (2013 - 2018), Secretary of the Directorate General of Budget of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2009 - 2013), Board of Commissioners Member of PT PANN (2010 - 2013), Head of BPPK General Finance Education and Training Center (2008 - 2009), Division Head of Investment Policy Supervision, Investment Management and Research Bureau of BAPEPAM (2004 - 2006), Division Head of Legislation, Legislation, and Legal Assistance Bureau of BAPPEPAM (1990 - 2000).

Rangkap Jabatan

Direktur Pembinaan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Kementerian Keuangan Republik Indonesia (September 2018 - sekarang)

Concurrent Position

Director of Financial Management Development of the Public Service Agency of the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (September 2018 - present)

Hubungan Afiliasi

Ari Wahyuni tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Komisaris lainnya maupun Dewan Pengawas Syariah, dan Direksi. Ari Wahyuni memiliki hubungan afiliasi dengan pemegang saham utama melalui rangkap jabatannya di Kementerian Keuangan.

Affiliate Relationships

Ari Wahyuni does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors. Ari Wahyuni has affiliation with majority shareholders through her concurrent position at the Ministry of Finance.



1 **Sri Mulyanto**
Komisaris Utama/Independen
President Commissioner/Independent

2 **Muhammad Muchlas Rowi**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

3 **Dra. Hernita Alius, M.M, M.Si *)**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

4 **Diah Natalisa **)**
Komisaris
Commissioner

5 **Noor Ida Khomsiyati ***)**
Komisaris
Commissioner

6 **Ari Wahyuni**
Komisaris
Commissioner

7 **Desty Arlaini ****)**
Komisaris
Commissioner

*) Hernita Alius menjabat sebagai Komisaris Independen pada tanggal 18 Januari 2021.

**) Diah Natalisa tidak lagi menjabat Komisaris terhitung sejak tanggal 18 Januari 2021.

***) Noor Ida Khomsiyati berakhir masa jabatan sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 12 April 2021.

****) Desty Arlaini menjabat sebagai Komisaris terhitung sejak tanggal 2 Juni 2021.

*) *Hernita Alius served as Independent Commissioner on January 18, 2021.*

**) *Diah Natalisa has not served as Commissioner since February 21, 2020.*

***) *Noor Ida Khomsiyati's term as Commissioner ends on April 12, 2021.*

****) *Desty Arlaini has served as Commissioner since June 2, 2021.*



Profil Dewan Pengawas Syariah Profile Of Sharia Supervisory Board



Prof. Dr. Hasanudin, AF, MA

Ketua Dewan Pengawas Syariah

Chairman of the Sharia Supervisory Board

Periode Jabatan: 1 Juli 2016 – sekarang, Periode Ketiga

Term of Office: July 1, 2016 – Present, 3rd Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Tangerang Selatan, Banten, Indonesia
South Tangerang, Banten, Indonesia

Majalengka
18 Juli / July 18

1945

75 Tahun
Years Old

Pendidikan

- (S3) Doktor bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994)
- (S2) Magister bidang Syariah dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989)
- (S1) Sarjana jurusan Syariah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974)

Education

- Doctor of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1994)
- Master of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1989)
- Bachelor of Sharia from UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (1974)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Ketua Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 19 Oktober 2006 untuk periode hingga 50 Juni 2013, diangkat lagi untuk periode 1 Juli 2013 - 30 Juni 2016, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No.123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Appointment History

The position of Chairman of the Sharia Supervisory Board has been carried out since October 19, 2006 for the period of June 5, 2013, re-appointed again for the period of July 1, 2013 to June 30, 2016, and re-appointed again in 2016 through the Board of Directors Decree No.123/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016.

Riwayat Profesi

Anggota BPKN (Badan Perlindungan Konsumen Nasional) (2004 – 2007), Dekan Fakultas Syariah UIN Jakarta (2002 – 2006), Dosen Pendidikan Kader Ulama (PKU) MUI DKI Jakarta.

Professional History

Member of BPKN (National Consumer Protection Agency) (2004 - 2007), Dean of the Faculty of Sharia UIN Jakarta (2002 - 2006), Lecturer in Ulema Cadre Education (PKU) of Indonesia Council of Ulema (MUI) DKI Jakarta.

Rangkap Jabatan

Ketua Dewan Pengawas Syariah Bank Victoria Syariah (1998 - sekarang), Ketua Dewan Pengawas Syariah Asuransi Asei Syariah, Anggota Majelis Pertimbangan Kesehatan dan Syariah Kementerian Kesehatan RI, Anggota Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (2000 - sekarang), Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat (2010 - sekarang).

Concurrent Position

Chairman of the Victoria Syariah Bank Supervisory Board (1998 - present), Chair of the Asuransi Asei Syariah's Supervisory Board, Member of the Health and Sharia Advisory Council of the Indonesian Ministry of Health, Member of the National Sharia Council of the Indonesian Council of Ulema (2000 - present), Chairperson of the Central Commission of Indonesian Council of Ulema's Fatwa (2010 - present).

Hubungan Afiliasi

Hasanudin tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya maupun Dewan Komisaris, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Hasanudin does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Ir. H. Muhammad Syakir Sula, AAIJ, FIIS

Anggota Dewan Pengawas Syariah

Member of the Sharia Supervisory Board

Periode Jabatan: 1 Juli 2016 - sekarang, Periode Ketiga

Term of Office: July 1, 2016 – Present, 3rd Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Selatan, DKI Jakarta, Indonesia

South Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Poso
12 Februari / February 12

1964

56 Tahun
Years Old

Pendidikan

Sarjana Pertanian di Universitas Padjajaran (UNPAD) Bandung (1989)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Anggota Dewan Pengawas Syariah diemban sejak tahun 19 Oktober 2006 untuk periode hingga 50 Juni 2013, diangkat lagi untuk periode 1 Juli 2013 - 30 Juni 2016, dan diangkat kembali pada tahun 2016 melalui Surat Keputusan Direksi No.123/Kep-Dir/X/2016 tanggal 14 Oktober 2016.

Riwayat Profesi

Anggota Komite Perbankan Syariah Bank Indonesia (2008 - 2012), Deputi Humas Badan Wakaf Indonesia (2008 - 2014), Staff Ahli Direksi ICDIF-LPPI (2008 - 2015), Dewan Pengawas Syariah Bank Tabungan Negara-Unit Syariah (2010 - 2017), Anggota Komite Pengembangan Jasa Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (2015 - 2017), Dewan Pengawas Syariah PT Central Asia Raya (2005 - 2016).

Rangkap Jabatan

Komisaris PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - sekarang), Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) Panin Daichi Life (2015 - sekarang), Ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) PT Reasuransi Nasional Indonesia (2013 - sekarang).

Hubungan Afiliasi

Muhammad Syakir Sula tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya maupun Dewan Komisaris, Direksi, serta dengan pemegang saham utama.

Education

Bachelor of Agriculture from Universitas Padjadjaran, Bandung (1989)

Appointment History

The position of Member of the Sharia Supervisory Board has been carried out since October 19, 2006 for the period of June 5, 2013, re-appointed again for the period of July 1, 2013 to June 30, 2016, and re-appointed again in 2016 through the Board of Directors Decree No.123/Kep-Dir/X/2016 dated October 14, 2016.

Professional History

Member of the Bank Indonesia Sharia Banking Committee (2008 - 2012), Indonesian Waqf Agency Deputy Public Relations (2008 - 2014), Expert Staff of ICDIF-LPPI Directors (2008 - 2015), Sharia Supervisory Board of the Bank Tabungan Negara - Sharia Unit (2010 - 2017), Member of the Financial Services Authority Sharia Financial Services Development Committee (2015 - 2017), PT Central Asia Raya Sharia Supervisory Board (2005 - 2016).

Concurrent Position

Commissioner of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - Now), Chairman of the Panin Daichi Life Sharia Supervisory Board (2015 - Now), Chairman of PT Reasuransi Nasional Indonesia Sharia Supervisory Board (2013 - Now).

Affiliate Relationships

Muhammad Syakir Sula does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



DIREKSI

Board of Directors [102-22]

Direksi adalah organ dibawah RUPS yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan operasional perusahaan. Secara lebih rinci, Direksi bertugas menjalankan visi misi Perusahaan, merancang strategi bisnis, mengelola sumber daya Perusahaan, serta mengendalikan kegiatan operasi agar dapat menghasilkan kinerja keuangan dan non-keuangan yang optimal. Direksi juga menjadi representasi Perusahaan baik secara internal maupun eksternal, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas pengelolaan Perusahaan berjalan secara efisien dan efektif serta sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

The Board of Directors is an organ under the GMS that is fully responsible for the implementation of company operations. In more detail, the Board of Directors is tasked with carrying out the Company's vision and mission, designing business strategies, managing Company resources, and controlling operations in order to produce optimal financial and non-financial performance. The Board of Directors also represents the Company both internally and externally, having the responsibility to ensure that all of the Company's management activities run efficiently and effectively and in accordance with GCG principles.

Meskipun di tahun 2020 Jamkrindo merubah status hukumnya dari Perusahaan Umum (Perum) menjadi Perseroan Terbatas (PT), di tahun 2020 terjadi pergantian keanggotaan Direksi. Susunan dan komposisi Direksi di sepanjang tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Even though in 2020 Jamkrindo changed its legal status from a Public Company (Perum) to a Limited Liability Company (PT), in 2020 there was a change in the membership of the Board of Directors. The composition and composition of the Board of Directors throughout 2020 are as follows:

Susunan Direksi Jamkrindo per 31 Desember 2020

The Composition of the Board of Directors of Jamkrindo as of 31 December 2020 [102-22]

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Beginning of Term of Office	Periode Jabatan Term of Office
Putrama Wahyu Setyawan	Direktur Utama President Director	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Jamkrindo No.SK-347/MBU/10/2020 dan No.048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as Jamkrindo Shareholder No.SK-347/MBU/10/2020 and No.048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 dated October 26, 2021 concerning the Dismissal and Appointment of the President Director of PT Guarantee Kredit Indonesia</i>	26 Oktober 2020 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2025 <i>October 26, 2020 until the GMS that will be held in 2025</i>	Ke-1 1 st
Sulis Usdoko	Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Director of HRM, General Affairs, and Compliance	Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-187/MBU/09/2017 <i>The Decree of the Minister of SOEs as the Seri A Shareholder No.SK-187/ MBU/09/2017</i>	7 September 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2022 <i>September 7, 2017 until the GMS that will be held in 2022</i>	Ke-1 1 st

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Beginning of Term of Office	Periode Jabatan Term of Office
Kadar Wisnuwarman	Direktur Operasional dan Jaringan merangkap Direktur Bisnis Penjaminan <i>Director of Operations and Network, as well as Director of Guarantee Business</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Periode Ke-2: Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-249/MBU/11/2018 • <i>The Decree of the Minister of SOEs as the Seri A Shareholder No.SK-22/MBU/01/2018.</i> • Periode Ke-1: Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-12/MBU/2013 j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-44/MBU/2014. • <i>The Decree of the Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No.SK-12/ MBU/2013 j.o The Decree of the Minister of SOEs as the Seri A Shareholder No.SK-44/ MBU/2014</i> 	21 November 2017 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2022 <i>November 21, 2017 until the GMS that will be held in 2022</i>	Ke-1 1 st
I. Rusdonobanu	Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance, Investment and Risk Management</i>	<ul style="list-style-type: none"> • Periode Ke-2: Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-22/MBU/01/2018. • <i>The Decree of the Minister of SOEs as the Seri A Shareholder No.SK-22/MBU/01/2018</i> • Periode Ke-1: Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-12/MBU/2013 j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-44/MBU/2014. • <i>The Decree of the Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No.SK-12/ MBU/2013 j.o The Decree of the Minister of SOEs as the Seri A Shareholder No.SK-44/ MBU/2014</i> 	15 Januari 2018 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2023 <i>January 15, 2018 until the GMS that will be held in 2023</i>	Ke-2 2 nd

Pada tanggal keputusan RUPS tanggal 22 Maret 2021, Suwarsito diangkat sebagai Direktur Bisnis Penjaminan menggantikan Amin Mas'udi yang meninggal dunia pada tanggal 7 November 2020. Dengan demikian, susunan Direksi Jamkrindo hingga disahkannya laporan keberlanjutan ini bertambah 1 (satu) orang yaitu:

On the date of the resolution of the GMS on March 22, 2021, Suwarsito appointed as Director of Guarantee Business replacing AminMas'udi who pass away on November 7, 2020. Thus, the composition of the Jamkrindo Board of Directors until it is ratified This sustainability report increases by 1 (one) person, namely:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Awal Jabatan Beginning of Term of Office	Periode Jabatan Term of Office
Suwarsito	Direktur Bisnis Penjaminan <i>Director of Guarantee Business</i>	Keputusan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham Seri A No.SK-94/MBU/03/2021 dan Keputusan BPUI No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 <i>The Decree of the Minister of SOEs as the Seri A Shareholder No.SK-94/MBU/03/2021 and the Decree of BPUI No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021</i>	22 Maret 2021 s.d RUPS yang akan diselenggarakan di tahun 2026 <i>March 22, 2021 until the GMS that will be held in 2023</i>	Ke-1 1 st



Profil Dewan Komisaris Board Of Directors Profile



Putrama Wahyu Setyawan

Direktur Utama

President Director

Periode Jabatan: 26 Oktober 2020 – 25 Oktober 2025, Periode Pertama
Term of Office: October 26, 2020 – October 25, 2025, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia
Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Yogyakarta
28 November / November 28

1969

51 Tahun
Years Old

Pendidikan

- (S1) Sarjana Kehutanan dari Universitas Gadjah Mada (1994)
- (S2) Akuntansi Manajemen dari Universitas Gadjah Mada (1996)

Education

- Bachelor of Forestry from Gadjah Mada University (1994)
- Master of Management Accounting from Gadjah Mada University (1996)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur Utama diemban sejak 26 Oktober 2020 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemegang Saham Jamkrindo No.SK-347/MBU/10/2020 dan 048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 tanggal 26 Oktober 2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direktur Utama PT Jaminan Kredit Indonesia.

Appointment History

The position of President Director has been carried out since October 26, 2020 through the Decree of the Minister of SOEs as the shareownership of Jamkrindo No.SK-347/MBU/10/2020 and No.048/SK-DIR/CORP/BPUI/X/2020 dated October 26, 2021, concerning Dismissal and Appointment of President Director of PT Jaminan Kredit Indonesia.

Riwayat Profesi

Wakil Direktur BNI pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 10 Maret 2016. Sebelumnya Menjabat sebagai Kepala Divisi Corporate Remedial & Recovery, PT BNI Tbk (2011 - 2014), Kepala Badan Usaha Milik Negara & Pemerintah Divisi Institusi (2014 - 2015), Kepala Divisi Commercial Remedial & Recovery, PT BNI Tbk (2015 - 2016), dan Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business, PT BNI Tbk (2016).

Professional History

Vice Director of BNI at the General Meeting of Shareholders (GMS) on March 10, 2016. Previously Served as Head of Corporate Remedial & Recovery Division, PT BNI Tbk (2011 - 2014), Head of State-Owned Enterprises & Government, Institutional Division (2014 - 2015), Head of Commercial Remedial & Recovery Division, PT BNI Tbk (2015 - 2016), and Senior Executive Vice President (SEVP) Middle Business, PT BNI Tbk (2016).

Rangkap Jabatan

Putrama Wahyu Setyawan tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

Putrama Wahyu Setyawan does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

Putrama Wahyu Setyawan tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

Putrama Wahyu Setyawan does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Suwarsito

Direktur Bisnis Penjaminan

Director of Business of Guarantee

Periode Jabatan: 22 Maret 2021 – 21 Maret 2026, Periode Pertama

Term of Office: March 22, 2021 – March 21, 2026, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Sragen

28 Februari / February 28

1972

48 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S1) Sarjana di Universitas Diponegoro Semarang Jurusan Ekonomi 1996

(S2) Magister Manajemen di Universitas Hasanuddin Makassar 2007

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur diemban sejak 22 Maret 2021 melalui Keputusan Menteri BUMN No.SK-94/MBU/03/2021 dan No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia, dan dibacakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada Senin, 22 Maret 2021.

Riwayat Profesi

Kepala Divisi Bisnis PT Jamkrindo (2018-2021), Kepala Divisi Bisnis Penjaminan Bank (2016-2018), Kepala Kantor Wilayah III Jakarta PT Jamkrindo (April 2016-Agustus 2016), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Jakarta (2013-2016), Kepala Divisi Umum PT Jamkrindo (2012-2013), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Bandung (Januari 2012-Desember 2012), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Pekanbaru (2011-2012), Kepala Kantor PT Jamkrindo Cabang Banjarmasin (2010-2011)

Rangkap Jabatan

Suwarsito tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Suwarsito tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, sertadengan pemegang saham utama.

Education

Bachelor of Economics from Diponegoro University, Semarang in 1996

Master of Management from Hasanuddin University, Makassar in 2007

Appointment History

The position of Director has been carried out since March 22, 2021 through the Decree of the Minister of SOEs No.SK-94/MBU/03/2021 and No.03/SK-DIR/RUPS-AP/BPUI/III/2021 concerning Dismissal and Appointment of Member of Board of Director of PT Jaminan Kredit Indonesia and was reading at the General Meeting of Shareholders on Monday, March 22, 2021.

Professional History

Head of Business Division of PT Jamkrindo (2018-2021), Head of Bank Guarantee Business Division (2016-2018), Head of Jakarta Regional Office III PT Jamkrindo (April 2016-August 2016), Head of PT Jamkrindo Jakarta Branch Office (2013-2016), Head of General Division of PT Jamkrindo (2012-2013), Head of Office of PT Jamkrindo Bandung Branch (January 2012-December 2012), Head of Office of PT Jamkrindo Pekanbaru Branch (2011-2012), Head of Office of PT Jamkrindo Banjarmasin Branch (2010-2011)

Concurrent Position

Suwarsito does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Affiliate Relationships

Suwarsito does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Kadar Wisnuwarman

Direktur Operasional dan Jaringan

Director of Operations and Network

Periode Jabatan: 21 November 2017 – 20 November 2022, Periode Pertama

Term of Office: November 21, 2017 – November 20, 2022, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Cibubur, Jawa Barat, Indonesia

Cibubur, West Java, Indonesia

Malang
31 Oktober / October 31

1971

49 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Magister Manajemen, Universitas Hasanuddin (2002)

(S1) Manajemen, Universitas Airlangga (1996)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur diemban sejak 21 November 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-249/MBU/11/2017 tanggal 21 November 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama.

Riwayat Profesi

Pranata Utama Perum Jamkrindo untuk ditugaskan sebagai Direktur Utama PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - 2017), Kepala Kantor Cabang Jakarta Khusus, Perum Jamkrindo (2013 - 2014), Kepala Divisi Penjaminan Komersial, Perum Jamkrindo (2013), Kepala Divisi Klaim dan Subrogasi, Perum Jamkrindo (2013), Sekretaris Perusahaan Perum Jamkrindo (2012 - 2013), Kepala Kantor Cabang Denpasar, Perum Jamkrindo (2011 - 2012), Kepala Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2010 - 2011), Kepala Bagian Penjaminan Kantor Pusat, Perum Jamkrindo (2006 - 2010), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Jakarta, Perum Jamkrindo (2004 - 2006), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Bandung, Perum Jamkrindo (2004), Kepala Bagian Operasional Kantor Cabang Pontianak, Perum Jamkrindo (2003 - 2004).

Rangkap Jabatan

Kadar Wisnuwarman tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Kadar Wisnuwarman tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Education

Master of Management, Hasanuddin University (2002)

Bachelor of Management, Universitas Airlangga (1996)

Appointment History

The position of Director has been carried out since November 21, 2017 through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-249/MBU/11/2017 dated November 21, 2017 concerning Appointment of Member of Board of Director of Perum Jamkrindo. This position is his first period as Director.

Professional History

Main Institution's Officer of Perum Jamkrindo to be assigned as President Director of PT Penjaminan Jamkrindo Syariah (2014 - 2017), Head of Jakarta Special Branch Office, Perum Jamkrindo (2013 - 2014), Head of the Commercial Guarantee Division, Perum Jamkrindo (2013), Head of Claims and Subrogation Division, Perum Jamkrindo (2013), Corporate Secretary of Perum Jamkrindo (2012 - 2013), Head of Denpasar Branch Office, Perum Jamkrindo (2011 - 2012), Head of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2010 - 2011), Section Head of Guarantee of the Head Office, Perum Jamkrindo (2006 - 2010), Section Head of Operations of Jakarta Branch Office, Perum Jamkrindo (2004 - 2006), Section Head of Operations of Bandung Branch Office, Perum Jamkrindo (2004), Section Head of Operations of Pontianak Branch Office, Perum Jamkrindo (2003 - 2004).

Concurrent Position

Kadar Wisnuwarman does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Affiliate Relationships

Kadar Wisnuwarman does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



Sulis Usdoko

Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan

Director of Human Resources Management,
General Affairs and Compliance

Periode Jabatan: 7 September 2017 – 6 September 2022, Periode Pertama
Term of Office: September 7, 2017 – September 6, 2022, 1st Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Bekasi, Jawa Barat, Indonesia
Bekasi, West Java, Indonesia

Semarang
5 September / September 5

1960

60 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Ekonomi Manajemen, Universitas Brawijaya (2003)
(S1) Teknik Sipil, Universitas Brawijaya (1985)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur diemban sejak 7 September 2017 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-187/MBU/09/2017 tanggal 7 September 2017 tentang Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama. Sebelum pengangkatannya di tahun 2017, Sulis Usdoko belum pernah menjabat pada jajaran Direksi Perum Jamkrindo.

Riwayat Profesi

Direktur Bidang Collection Management, Asset Management, Legal dan Dokumen Perkreditan, Bank BTN (2015 - 2017), Kepala Divisi Bidang Dana Pihak Ketiga Retail dan Jasa-jasa, Bank BTN (2011 - 2015), Kepala Divisi Teknologi Informasi, Bank BTN (2008 - 2011), Kepala Kantor Cabang Kelas 1, Kelas 1, dan Kepala Kantor Cabang Utama, Bank BTN (1997 - 2010), Staf hingga Kepala Bagian, Bank BTN (1986 - 1995).

Rangkap Jabatan

Sulis Usdoko tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/ lembaga lain.

Hubungan Afiliasi

Sulis Usdoko tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Education

Master of Management Economics, Universitas Brawijaya (2003)
Bachelor of Civil Engineering, Universitas Brawijaya (1985)

Appointment History

The position of Director has been carried out since September 7, 2017 through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-187/MBU/09/2017 dated September 7, 2017 concerning Appointment of Member of Board of Director of Perum Jamkrindo. This position is his first period as Director. Prior to his appointment in 2017, Sulis Usdoko had never served in the Board of Directors of Perum Jamkrindo.

Professional History

Director of Collection Management, Asset Management, Legal and Credit Documents, Bank BTN (2015 - 2017), Head of Third Party Funds Retail and Services Division, BTN Bank (2011 - 2015), Head of Information Technology Division, Bank BTN (2008 - 2011), Head of Branch Office Class 1, and Head of Main Branch Offices, BTN Bank (1997 - 2010), Staff to Head of Section, Bank BTN (1986 - 1995).

Concurrent Position

Sulis Usdoko does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Affiliate Relationships

Sulis Usdoko does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



I. Rusdonobanu

Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko

Director of Finance, Investment and Risk Management

Periode Jabatan: 15 Januari 2018 – 14 Januari 2023, Periode Kedua

Term of Office: January 15, 2018 – January 14, 2023, 2nd Period

Warga Negara Indonesia

Indonesian Citizen

Domisili/Domicile

Jakarta Timur, DKI Jakarta, Indonesia
East Jakarta, DKI Jakarta, Indonesia

Balikpapan

25 Februari / February 25

1959

61 Tahun
Years Old

Pendidikan

(S2) Master Of Science Jurusan Ekonomi North Eastern University Boston, Amerika Serikat (1995)

(S1) Sarjana Ekonomi jurusan Manajemen Perusahaan Universitas Pancasila (1988)

(D3) Sarjana Muda Akuntansi STAN Jakarta (1981)

Education

Master of Science, Majoring in Economics, Northeastern University Boston, USA (1995)

Bachelor of Economics majoring in Corporate Management, University of Pancasila (1988)

Diploma of Accounting of STAN Jakarta (1981)

Riwayat Penunjukan

Jabatan Direktur diemban sejak 15 Januari 2013 melalui Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-12/MBU/2013 tanggal 15 Januari 2013 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur dan Pengangkatan Anggota Direksi Perum Jamkrindo, j.o Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-44/MBU/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Umum (Perum) Jaminan Kredit Indonesia. Jabatan Direktur ini merupakan periode pertama. Kemudian diangkat kembali berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN selaku Pemilik Modal Perum Jamkrindo No.SK-22/MBU/01/2018, untuk periode kedua.

Appointment History

The position of Director has been carried out since January 15, 2013 through the Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-12/MBU/2013 dated January 15, 2013 concerning Dismissal, Change of Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors perum Jamkrindo, j.o Decree of the Minister of SOEs as the capital owner of Perum Jamkrindo No.SK-44/MBU/2014 concerning Changes in Nomenclature of Members of the Board of Directors of Indonesian Public Corporation (Perum) Credit Guarantee. This position is his first period as Director. Then reappointed based on the Decree of the Minister of SOEs as the Capital Owner of Perum Jamkrindo No.SK-22/MBU/01/2018, for the second period.

Riwayat Profesi

Plt. Direktur Utama Perum Jamkrindo (7 September 2017 – 21 November 2017), Asisten Deputi Usaha Jasa II Kementerian BUMN (2010 - sekarang). Anggota Komisaris PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011), Anggota Komisaris PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008 - 2011), Anggota Komisaris PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007 - 2011), Anggota Komisaris PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003 - 2009), Asisten Deputi Usaha Perkebunan II Kementerian BUMN (2006 - 2010), Kepala Bidang Usaha Perkebunan IIA Kementerian BUMN (2006), Pj. Kepala Bidang Usaha Sarana Produksi Pertanian Kementerian BUMN (2002 - 2006).

Professional History

Act. President Director of Perum Jamkrindo (September 7, 2017 - November 21, 2017), Assistant Deputy for Services Business II, the Ministry of SOEs (2010 - present) Member of the Board of Commissioners of PT Krakatau Steel (Persero) Tbk (2011), Member of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara X (Persero) (2008 - 2011), Member of the Board of Commissioners of PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) (2007 - 2011), Member of the Board of Commissioners of PT Sang Hyang Seri (Persero) (2003 - 2009), Assistant Deputy of Plantation Business II, the Ministry of SOEs (2006 - 2010), Head of Plantation Business Division IIA, the Ministry of SOEs (2006), Acting Head of Agriculture Production Facility Business Division of the Ministry of SOEs (2002 - 2006).

Rangkap Jabatan

I. Rusdonobanu tidak memiliki rangkap jabatan pada perusahaan/lembaga lain.

Concurrent Position

I. Rusdonobanu does not have a concurrent position at other companies/institutions.

Hubungan Afiliasi

I. Rusdonobanu tidak memiliki hubungan afiliasi baik kepada anggota Direksi Lainnya, Dewan Komisaris maupun Dewan Pengawas Syariah, serta dengan pemegang saham utama.

Affiliate Relationships

I. Rusdonobanu does not have affiliation with other members of the Board of Commissioners or the Sharia Supervisory Board, the Board of Directors, and with majority shareholders.



1 **Putrama Wahyu Setyawan**
Direktur Utama
President Director

2 **Suwarsito**
Direktur Bisnis Penjaminan
Director of Business of Guarantee

3 **Kadar Wisnuwarman**
Direktur Operasional dan Jaringan
Director of Operations and Network

4 **Sulis Usdoko**
Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan
Director of Human Resources Management, General Affairs and Compliance

5 **I. Rusdonobanu**
Direktur Keuangan, Investasi dan Manajemen Risiko
Director of Finance, Investment and Risk Management



PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Competency Development for the Board of Commissioners and Directors

[102-27, 5.b]

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Dewan Komisaris/Board of Commissioners				
Sri Mulyanto Komisaris Utama/Independen President Commissioner/ Independent	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive, Legal Aspects in The Management of State-Owned Enterprises	Fairmont Hotel Jakarta, 26 – 27 Maret 2021 March 26 – 27, 2021	Pertamina Training & Consulting
Noor Ida Khomsiyati Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive, , Legal Aspects in The Management of State-Owned Enterprises	Fairmont Hotel Jakarta, 26 – 27 Maret 2021 March 26 – 27, 2021	Pertamina Training & Consulting
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Webinar Force Majeure dalam Kepailitan & PKPU Force Majeure Webinar in Bankruptcy & PKPU	Online Training, 13 Mei 2020 May 13, 2020	SNP Law Firm, BenihBaik.com
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Investigasi Forensik Forensic Investigation	Online Training, 26 – 27 Oktober 2020 October 26 – 27, 2020	Visi Integritas
Diah Natalisa Dewan Komisaris Board of Commissioners	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN	Fairmont Hotel Jakarta, 26 – 27 Maret 2021 26 – 27 Maret 2021	Pertamina Training & Consulting
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive, Legal Aspects in The Management of State-Owned Enterprises	Fairmont Hotel Jakarta, 26 – 27 Maret 2021 March 26 – 27, 2021	Pertamina Training & Consulting
Ari Wahyuni Komisaris Board of Commissioners	Kompetensi Teknis Technical Competencies	In-Depth Understanding of ASEAN Corporate Governance Scorecard and Sustainability Report In-Depth Understanding of ASEAN Corporate Governance Scorecard and Sustainability Report	Online Training, 16 – 17 Desember 2020 December 16 – 17, 2020	Indonesian Institute for Corporate Directorship

Nama dan Jabatan Name and Position	Jenis Pendidikan dan Pelatihan Types of Education and Training	Materi Pendidikan dan Pelatihan Education and Training Materials	Tempat/Tanggal Place/Date	Penyelenggara Organizer
Muhammad Muchlas Rowi Komisaris Independen Independent Commissioner	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive, Legal Aspects in The Management of State-Owned Enterprises	Fairmont Hotel Jakarta, 26 – 27 Maret 2021 March 26 – 27, 2021	Pertamina Training & Consulting
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Understanding How to Prevent Corruption in New Reality	Online Training, 15 Juli 2021 July 15, 2021	Indonesian Institute for Corporate Directorship
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	In-Depth Understanding of ASEAN Corporate Governance Scorecard and Sustainability Report	Online Training, 16 – 17 Desember 2020 December 16 – 17, 2020	Indonesian Institute for Corporate Directorship
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Investigasi Forensik Forensic Investigation	Online Training, 26 – 27 Oktober 2020 October 26 – 27, 2020	Visi Integritas
Direksi/Board of Directors				
Randi Anto (Direktur Utama selama Periode 21 November 2017-26 Oktober 2020) (President Director for the Period of November 21, 2017 - October 26, 2020)	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Strategi Cerdas Pengendalian Manajemen Risiko di Era Pandemi COVID-19 Smart Strategy to Control Risk Management in the COVID-19 Pandemic Era	Online Training, 26 Agustus 2020 August 26, 2020	Eddy Sinulangga (Professional Banker, Financial and Banking Consultant & Assesor)
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Risk Management Refreshment Program	Online Training, 26 Agustus 2020 August 26, 2020	IBI-BCC
Sulis Usdoko Direktur MSDM, Umum dan Kepatuhan Director of HRM, General Affairs, and Compliance	Sertifikasi Certification	Machine Learning	Online Training, 19 Februari – 25 Maret 2020 February 19 – March 25, 2020	Berkeley School of Information
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	Global Business and Politics	Online Training, Agustus – Oktober 2020 August – October 2020	Yale School of Management Executive Education
	Kompetensi Teknis Technical Competencies	12th Global Peter Drucker Forum	Online Training, 28 – 31 Oktober 2020 October 28 – 31, 2020	Global Peter Drucker Forum 2020



MANAJEMEN RISIKO DAN PRINSIP PENCEGAHAN

Risk Management and Prevention Principles [102-11, 102-15, 102-30, 4.c.1, 5.c]

Manajemen Risiko merupakan sistem yang digunakan untuk memperkuat aspek akuntabilitas Direksi dalam mendukung proses pengambilan keputusan dan pengembangan kinerja Perusahaan. Manajemen Risiko merupakan salah satu upaya pencegahan yang dilakukan atas kerugian atau dampak yang mungkin timbul akibat dari adanya kejadian risiko. Komitmen dalam penerapan Manajemen Risiko, sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem manajemen Perusahaan secara keseluruhan, dinyatakan dalam Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko yang dibangun sesuai konteks dan kapabilitas Perusahaan. Manajemen Risiko Perusahaan diimplementasikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan Perusahaan dengan menggunakan ISO 31000:2018.

Operational Risk Management

Dalam meminimalkan dampak kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan operasional, Perusahaan juga memasukan potensi tersebut ke dalam bagian sistem Manajemen Risiko Jamkrindo. Sesuai dengan peraturan Direksi Jamkrindo, risiko operasional adalah risiko yang antara lain disebabkan adanya ketidakcukupan dan atau tidak berfungsinya proses internal, kesalahan manusia, kegagalan sistem, atau adanya problem eksternal yang mempengaruhi operasional Perusahaan.

Risiko operasional tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor yaitu kegagalan sistem/downtime & teknologi, kesalahan manusia (*human error*), peralatan (*mechanical and engineering*), pihak *external*, *fraud*, kegagalan proses internal, organisasi & SDM, *Counterpart*, HSE (*Health, Safety and Environment*), dan Teknologi Informasi.

Dalam rangka menerapkan Manajemen Risiko Operasional, Jamkrindo telah memiliki panduan untuk melaksanakan *Risk and Control Self-Assessment* (RC SA). RC SA tersebut dilaksanakan dengan pendekatan *bottom-up*, dimana identifikasi dan penilaian risiko dilaksanakan oleh Kepala Bagian atau Seksi di Unit Kerja Kantor Pusat, Kantor Cabang dan Kantor Anak Cabang. Penetapan level pelaksana identifikasi dan penilaian risiko tersebut didasarkan pada pertimbangan level tersebut merupakan Pejabat yang terendah di unit kerjanya, sehingga mereka mengetahui permasalahan teknis dan kaitan antara permasalahan teknis tersebut dengan pencapaian tujuan Perusahaan.

Risk Management is a system used to strengthen the accountability of the Board of Directors in supporting the decision-making process and developing the Company's performance. Risk management is one of the preventive measures taken for impacts or losses that may arise as a result of a risk event. Commitment in the application of Risk Management, as an integral part of the Company's management system as a whole, is stated in the Risk Management Policies and Procedures which are developed according to the context and capabilities of the Company. Company Risk Management is implemented in accordance with the conditions and needs of the Company by using ISO 31000: 2018.

Operational Risk Management

In minimizing the impact of losses arising from operational activities, the Company also includes this potential in the Jamkrindo Risk Management system. In accordance with the regulations of the Jamkrindo Board of Directors, operational risk is the risk that, among others, is due to the inadequacy and/ or malfunction of internal processes, human error, system failure, or external problems that affect the Company's operations.

Operational risk can be caused by several factors, namely system failure/downtime & technology, human error, equipment (mechanical and engineering), external parties, fraud, failure of internal processes, organization & HR, Counterpart, HSE (Health, Safety, and Environment), and Information Technology.

In order to implement Operational Risk Management, Jamkrindo has guidelines for implementing Risk and Control Self-Assessment (RC SA). The RC SA is implemented using a bottom-up approach, where risk identification and assessment is carried out by the Head of Section or Section in the Work Unit of the Head Office, Regional Offices and Branch Offices. The implementation level for the identification and risk assessment is determined based on the consideration that this level is the lowest official in the work unit, so that they are aware of technical problems and the relationship between these technical problems and the achievement of the Company's goals.

Implementasi Manajemen Risiko

Kegiatan Manajemen Risiko dilakukan secara periodik dan insidental. Kegiatan Manajemen Risiko yang dilakukan secara periodik adalah proses manajemen risiko yang terdiri dari 4 tahapan proses, yaitu identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan monitoring dan evaluasi risiko.

Pada tahap awal, proses yang dilakukan adalah Identifikasi dan Penilaian Risiko *Inherent*. Atas hasil identifikasi risiko dan penilaian risiko tersebut dilakukan evaluasi untuk perbaikan proses manajemen risiko.

Kegiatan Manajemen Risiko yang bersifat insidental adalah pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan pada tahap-tahap tertentu sesuai dengan yang ditetapkan dalam SOP proses bisnis berbasis risiko dan pemberian opini terkait dengan hal-hal yang harus dimintakan pendapat kepada Divisi Manajemen Risiko.

Kegiatan insidental berupa pemberian opini sesuai Surat Edaran Direksi No.12/SE/5/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang SOP Pendapat (Opini) Manajemen Risiko Jamkrindo yaitu untuk hal-hal yang bersifat strategis dan berdampak signifikan bagi keberlangsungan perusahaan, pembuatan produk dan/atau aktivitas baru, transaksi dengan nilai tertentu, kebijakan penghapus bukuan piutang perusahaan, pembuatan SOP, RJPP, RKAP, implementasi penggunaan aplikasi/software baru, penentuan bank baru untuk penempatan deposito dan investasi, dan kebijakan lainnya yang bersifat strategis.

Kelengkapan Manajemen Risiko

Untuk implementasi manajemen risiko secara terintegrasi, maka diperlukan beberapa kelengkapan yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan manajemen risiko. Terkait dengan hal tersebut, Jamkrindo telah menyusun beberapa kelengkapan sebagai berikut:

1. Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko
Peraturan Direksi tentang Penerapan Manajemen Risiko merupakan peraturan yang menyatakan tentang penerapan manajemen risiko dan perangkat pendukung yang diperlukan. Dalam peraturan tersebut dilampirkan pernyataan tentang pengelolaan risiko yang merupakan pernyataan Direksi dan seluruh Pejabat Jamkrindo mengenai kebijakan penanganan risiko perusahaan. Pernyataan tersebut merupakan bentuk tertulis dari komitmen Direksi dan Pejabat Jamkrindo dalam menerapkan manajemen risiko dalam setiap tahapan kegiatan.

Risk Management Implementation

Risk Management activities are carried out periodically and incidentally. Risk Management activities that are carried out periodically are risk management processes which consist of 4 stages of the process, namely risk identification, risk assessment, risk management and risk monitoring and evaluation.

At the initial stage, the process carried out is identification and assessment of internal risks. The results of the risk identification and risk assessment are evaluated to improve the risk management process.

Incidental Risk Management activities are the implementation of risk management which is carried out at certain stages in accordance with the SOP for risk-based business processes and the provision of opinions related to matters that must be sought for opinions from the Risk Management Division.

Incidental activities in the form of giving opinions in accordance with the Circular of the Board of Directors No.12/SE/5/IV/2019 dated April 18, 2019 on the SOP of Opinion for Jamkrindo Risk Management, namely for matters that are strategic and have a significant impact on the sustainability of the company, manufacturing and/or new activities, transactions with a certain value, policies on write-off of company accounts, preparation of SOP, RJPP, RKAP, implementation of new applications/ software, determination of new banks for deposit and investment placements, and other strategic policies.

Completeness of Risk Management

For the implementation of integrated risk management, a number of features are required to support the implementation of risk management. In relation to this, Jamkrindo has compiled the following items:

1. *Directors Regulation on the Implementation of Risk Management*
The Board of Directors Regulation on the Implementation of Risk Management is a regulation about the implementation of risk management and the necessary supporting tools. The regulation is attached with a statement regarding risk management which is a statement from the Board of Directors and all Jamkrindo Officials regarding the company's risk management policy. This statement is in a written form as the commitment of the Directors and Jamkrindo officials in implementing risk management in every stage of activity.



2. Organisasi Manajemen Risiko Jamkrindo secara struktural, Direksi telah menetapkan struktur organisasi yang di dalamnya terdapat Divisi Manajemen Risiko dan PUKM. Di samping organisasi yang bersifat struktural, terdapat pula struktur yang bersifat ad hoc, yaitu Komite Manajemen Risiko Jamkrindo. Komite Manajemen Risiko (KMR) adalah komite yang beranggotakan Direksi dan Kepala Divisi yang berkaitan dengan pengelolaan Manajemen Risiko Perusahaan. Komite Manajemen Risiko berperan untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi risiko usaha, jenis, dan dampaknya terhadap kegiatan Perusahaan, menetapkan *risk appetite* dan *risk tolerance* Perusahaan, dan memberikan laporan atas pelaksanaan Manajemen Risiko Perusahaan kepada Dewan Komisaris.
 3. Di samping itu, untuk kelancaran pelaksanaan proses manajemen risiko, di setiap unit kerja ditunjuk seorang *Person in Charge* (PIC) yang bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan proses manajemen risiko di masing-masing unit kerja. Dalam melaksanakan tugasnya, PIC Manajemen Risiko berkoordinasi dan berkonsultasi kepada Divisi Manajemen Risiko dan PUKM.
 4. Kebijakan Manajemen Risiko Jamkrindo merupakan pedoman atau acuan penerapan Manajemen Risiko yang terintegrasi di Perusahaan dan pedoman penyusunan kebijakan pendukung di korporasi dan tingkat Unit Kerja. Kebijakan Manajemen Risiko tersebut kemudian diturunkan (*cascading*) ke dalam SOP yang terdapat di dalam Divisi Manajemen Risiko dan PUKM.
 5. SOP Manajemen Risiko merupakan SOP yang ditujukan untuk memberikan panduan teknis dalam pelaksanaan proses manajemen risiko pada Jamkrindo. SOP Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Direksi No.13/SE/5/IV/2019 tanggal 18 April 2019 tentang *Standard Operating Procedure* (SOP) Manajemen Risiko Jamkrindo.
 6. Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Manajemen Risiko diterbitkan dengan Surat Edaran Direksi No.40/SE/5/XII/2018 tanggal 21 Desember 2018. Petunjuk Teknis tersebut memuat penjelasan mengenai panduan teknis penerapan Manajemen Risiko di Jamkrindo. Panduan teknis penerapan Manajemen Risiko tersebut secara garis besar adalah:
 - Penetapan Konteks dan Kriteria
 - Identifikasi Risiko
 - Analisis Risiko
 - Evaluasi Risiko
 - Penanganan Risiko
 - Monitoring Risiko
 - Komunikasi dan Konsultasi Risiko
 - Pencatatan dan Pelaporan Risiko
 - Toleransi Risiko
2. *Jamkrindo Risk Management Organization structurally, the Board of Directors has established an organizational structure which includes the Risk Management Division and PUKM. In addition to the structural organization, there is also an ad hoc structure, namely the Jamkrindo Risk Management Committee. The Risk Management Committee (Komite Manajemen Risiko or KMR) is a committee consisting of Directors and Heads of Divisions in managing the Company's Risk Management. The Risk Management Committee has the role of conducting regular assessments and providing recommendations on business risks, types, and impacts on the Company's activities, determining the Company's risk appetite and risk tolerance, and providing reports on the implementation of Company Risk Management to the Board of Commissioners.*
 3. *In addition, for the smooth implementation of the risk management process, a Person in Charge (PIC) is appointed in each work unit to coordinate the implementation of the risk management process in each work unit. In carrying out its duties, the Risk Management PIC coordinates and consults the Risk Management Division and PUKM.*
 4. *Jamkrindo Risk Management Policy is a guideline or reference for the implementation of integrated Risk Management in the Company and guidelines for formulating supporting policies at the corporate and work unit levels. The Risk Management Policy is then cascaded into SOPs in the Risk Management Division and PUKM.*
 5. *Risk Management SOP is an SOP which is intended to provide technical guidance in the implementation of the risk management process at Jamkrindo. Risk Management SOP is issued with a Circular Letter of the Board of Directors No.13/SE/5/IV/2019 dated April 18, 2019 on the Jamkrindo Risk Management Standard Operating Procedure (SOP).*
 6. *Guidelines for Risk Management Implementation are issued in a Circular Letter of the Board of Directors No.40/SE/5/XII/2018 dated December 21, 2018. These Technical Guidelines contain an explanation of the technical guidelines for the implementation of Risk Management at Jamkrindo. The technical guidelines for the implementation of Risk Management are as follows:*
 - *Setting Context and Criteria*
 - *Risk identification*
 - *Risk Analysis*
 - *Risk Evaluation*
 - *Risk Management*
 - *Risk Monitoring*
 - *Risk Communication and Consultation*
 - *Recording and Reporting of Risks*
 - *Risk Tolerance*

7. SOP Proses Bisnis Berbasis Risiko merupakan SOP dari suatu proses bisnis yang disusun dengan mempertimbangkan risiko yang terkait di dalam proses tersebut. SOP tersebut ditujukan untuk memastikan bahwa risiko yang tercantum dalam *risk register* dan pengendalian risiko yang diperlukan telah dipertimbangkan dalam pelaksanaan proses bisnis, sementara untuk jenis-jenis risiko baru dipastikan telah mendapatkan opini dari Divisi Manajemen Risiko dan PUKM sebagai *second opinion* dalam pertimbangan pengambilan keputusan. Mengingat jenis kegiatan yang ada di Jamkrindo cukup beragam, maka penyusunan SOP proses bisnis berbasis risiko dilakukan secara bertahap oleh setiap pemilik proses bisnis.
8. Sistem Pendukung Manajemen Risiko Terintegrasi telah ada sejak tahun 2011, perusahaan telah mulai membangun Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko. Aplikasi tersebut berfungsi untuk mempermudah proses identifikasi, penilaian risiko, dan tindak lanjut penanganan risiko. Dengan adanya aplikasi, data risiko dapat tersimpan dalam bentuk *data base* yang terstruktur.

Jenis Dan Pengelolaan Risiko Selama Tahun 2020

Beberapa risiko yang relatif signifikan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

1. Target bisnis tidak tercapai. Risiko ini dimitigasi dengan cara:
 - a. Penyusunan strategi bisnis yang disesuaikan dengan kondisi pasar,
 - b. Komunikasi intens dengan mitra melalui telepon/email/media komunikasi lainnya,
 - c. Penyesuaian terhadap target RKAC tahun 2020,
 - d. Untuk keperluan *On The Spot* (OTS) hendaknya memperhatikan kondisi wilayah domisili Terjamin/Penerima Jaminan yang akan dikunjungi dan tetap memperhatikan protokol kesehatan
 - e. Mengoptimalkan Penjaminan program PEN
2. Penularan COVID-19 pada SDM Perusahaan. Risiko ini dimitigasi dengan cara
 - a. Program sosialisasi protokol kesehatan di kantor dan sekitar kantor (poster, *virtual meeting*, sosmed, dst)
 - b. Penerapan protokol kesehatan secara massif & penambahan fasilitas sarana/prasarana perusahaan untuk mendukung *protocol* kesehatan
 - c. Penyemprotan secara berkala di lingkungan kerja dan pemeriksaan kesehatan rapid/*swab test* secara berkala
 - d. Gerakan Jamkrindo Peduli

Jenis Dan Pengelolaan Risiko Selama Tahun 2020

Some of the relatively significant risks in 2020 are as follows:

1. *Business targets are not achieved. This risk is mitigated by:*
 - a. *Preparation of business strategies adapted to market conditions*
 - b. *Intense communication with partners via telephone/email/other communication media*
 - c. *Adjustment to the 2020 RKAC target*
 - d. *For the purposes of On The Spot (OTS) should pay attention to the condition of the domicile area. The Guaranteed / Guarantee Beneficiary to be visited and still pay attention to health protocol*
 - e. *Optimizing the Guarantee of the PEN program*
2. *COVID-19 transmission in the Company's HR. This risk is mitigated by*
 - a. *Health protocol socialization programs in the office and around the office (posters, virtual meetings, social media, etc.)*
 - b. *Massive application of health protocols; addition of company facilities/infrastructure to support health protocols*
 - c. *Periodic spraying in the work environment and periodic rapid health checks/swab tests*
 - d. *Jamkrindo Cares Movement*



- | | |
|---|--|
| <p>3. Ketidakesuaian Data pada Sistem ICPR. Dimitigasi dengan cara dilakukan perbaikan sistem integrasi dan rekonsiliasi antara kantor pusat dengan cabang unit kerja</p> <p>4. Penyelesaian klaim tidak sesuai SLA. Risiko ini dimitigasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi dengan Penerima Jaminan untuk pemenuhan kelengkapan berkas, b. Usulan penyempurnaan sistem klaim online. <p>5. Kehilangan aset perusahaan. Risiko ini dimitigasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Inventaris <i>asset</i> perusahaan b. Penumpukan barang inventaris yang sudah habis nilai bukunya <p>6. Rasio klaim penjaminan. Risiko ini dimitigasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Penetapan batas maksimum rasio klaim untuk setiap Penerima Jaminan, b. Dilakukan <i>bandling</i> produk c. Selektif dalam pemilihan mitra d. Mengoptimalkan Penjaminan program PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) e. Melakukan perbaikan TC pada PKS <p>7. Subrogasi tidak tertagih. Risiko ini dimitigasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Melakukan koordinasi bersama Penerima Jaminan dalam penagihan subrogasi, b. Melakukan sosialisasi rekonsiliasi data terkait penjaminan, klaim dan penagihan subrogasi kepada Penerima Jaminan, <p>8. Bisnis penjaminan terhambat. Risiko ini dimitigasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Komunikasi dengan mitra melalui telepon/email/media komunikasi lainnya b. Menyampaikan tentang kebijakan restruk sesuai POJK No.11/POJK.03/2020 c. Pembuatan sistem <i>reminder</i> jangka waktu PKS dengan mitra d. <i>Monitoring</i> penyusunan PKS sesuai SLA <p>9. Terhambatnya pembayaran klaim. Risiko ini dimitigasi dengan cara:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Rekonsiliasi dengan Penerima Jaminan b. Melakukan koordinasi dengan Penerima Jaminan untuk pemenuhan kelengkapan berkas c. Mensosialisasikan kepada mitra agar dalam proses pengajuan klaim juga melalui sistem Online d. Komunikasi dengan mitra melalui telepon/email/media komunikasi lainnya | <p>3. <i>Data discrepancy in the ICPR System. Mitigated by improving the integration and reconciliation system between the head office and branch work units</i></p> <p>4. <i>Settlement of claims that are not in accordance with the SLA. This risk is mitigated by:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Coordinate with the Guarantee Beneficiary to fulfill the completeness of the file</i> b. <i>Proposed improvements to the online claim system.</i> <p>5. <i>Loss of company assets. This risk is mitigated by:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Company asset inventory</i> b. <i>Accumulation of inventory items that have</i> <p>6. <i>Guarantee claims ratio. This risk is mitigated by:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Determination of the maximum limit of the claim ratio for each Beneficiary</i> b. <i>Product banding is carried out</i> c. <i>Be selective in partner selection</i> d. <i>Optimizing the Guarantee for the PEN (National Economic Recovery) program</i> e. <i>Performing TC repair on MCC</i> <p>7. <i>Subrogation is not collectible. This risk is mitigated by:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Coordinate with the Guarantee Beneficiary in subrogation collection</i> b. <i>Conduct socialization of data reconciliation related to guarantees, claims and subrogation collections to Guarantee Beneficiaries</i> <p>8. <i>Guarantee business is hampered. This risk is mitigated by:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Communication with partners via telephone/email/other communication media</i> b. <i>Delivering on the restructuring policy in accordance with POJK No. 11/POJK.03/2020</i> c. <i>Making a reminder system for the PKS period with partners</i> d. <i>Monitoring the preparation of PKS according to SLA</i> <p>9. <i>Delayed claim payment. This risk is mitigated by:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> a. <i>Reconciliation with the Beneficiary</i> b. <i>Coordinate with the Guarantee Beneficiary to fulfill the completeness of the files</i> c. <i>Socializing to partners so that in the claim submission process also through the Online system</i> d. <i>Communication with partners via telephone/email/other communication media</i> |
|---|--|

10. Kesalahan pelaporan perpajakan. Risiko ini dimitigasi dengan cara:
- Perubahan Atas Kesalahan Pelaporan Pajak
 - Mengisi rekapan transaksi pemotongan pajak

10. *Tax reporting errors. This risk is mitigated by:*

- Changes to Tax Reporting Errors*
- Fill in the tax deduction transaction summary*

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko [102-30]

Berdasarkan hasil *risk maturity assessment* tahun 2020 rekomendasi dan saran atas implementasi manajemen risiko sebagai berikut:

1. Pengkayaan Risk Register yang dimiliki Perusahaan

Proses identifikasi dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasi kembali ke setiap Unit Kerja terkait atas risiko-risiko yang diidentifikasinya, khususnya risiko-risiko yang mendapat prioritas untuk dikelola. Proses identifikasi risiko juga dapat dikaitkan dengan aktivitas masing-masing unit kerja yang terdapat pada aplikasi BIA dan SIMR.

2. Pembentukan Budaya melalui Sosialisasi Manajemen Risiko dalam lingkup yang lebih luas.

Tujuan utama dari penerapan manajemen risiko adalah penciptaan budaya manajemen risiko diseluruh tingkatan organisasi. Setiap Karyawan adalah pengelola risiko (*Every employee is risk manager*), wajib menjaga keamanan aset perusahaan dengan cara mengetahui risiko-risiko yang melekat pada setiap aktivitas dan produk/layanan yang menjadi tanggung jawabnya; manajemen risiko merupakan bagian dari sistem manajemen dan melekat pada setiap aktivitas sehari-hari perusahaan. Adanya penyebaran COVID-19 di Indonesia, menyebabkan perusahaan merencanakan ulang sosialisasi manajemen risiko ke Unit Kerja di beberapa Kantor Cabang dan Kantor Wilayah. Namun demikian sosialisasi agar dapat tetap berjalan dengan menggunakan sarana video conference/teleconference (zoom, google meets, dan lain-lain) agar pegawai tetap mendapatkan informasi dan pengetahuan terkait dengan manajemen risiko perusahaan dan manfaatnya bagi kegiatan operasional perusahaan sehari-hari

Evaluation of the Effectiveness of the Risk Management System [102-30]

Based on the results of the 2020 *risk maturity assessment*, recommendations and suggestions for the implementation of risk management are as follows:

1. Enrichment of the Company's Risk Register

The identification process can be carried out by reconfirming to each related Work Unit the identified risks, in particular the risks that are prioritized to be managed. The risk identification process can also be linked to the activities of each work unit contained in the BIA and SIMR applications.

2. Formation of Culture through Risk Management Socialization in a wider scope.

The main objective of implementing risk management is the creation of a risk management culture at all levels of the organization. Every employee is a risk manager, must maintain the security of company assets by knowing the risks inherent in each activity and product/service for which he is responsible; risk management is part of the management system and is embedded in every activity company day-to-day. The spread of COVID-19 in Indonesia has caused the company to re-plan the socialization of risk management to Work Units in several Branch Offices and Regional Offices. However, the socialization can continue to run by using video conference/teleconference facilities (zoom, google meets, etc.) so that employees can still get information and knowledge related to the company's risk management and its benefits for the company's daily operational activities.



3. Peningkatan Kompetensi Manajemen Risiko untuk Personil di Unit Kerja Pengelola Risiko

Untuk meningkatkan pengetahuan dan mempercepat pengembangan kerangka kerja manajemen risiko, perlu dilakukan peningkatan kompetensi manajemen risiko Personil di Divisi Manajemen Risiko dan PUKM melalui training sertifikasi Manajemen Risiko dan/atau *Business Continuity Management* (BCM) yang ada di Indonesia. Industri penjaminan merupakan industri yang berkembang sangat pesat sejalan dengan dukungan pemerintah terhadap pengembangan UMKM dan mikro di Indonesia. Perkembangan tersebut perlu diikuti dengan peningkatan kemampuan pengelolaan risiko yang dikoordinir oleh Divisi Manajemen Risiko dan PUKM yang diharapkan mampu menjadi motor penggerak perubahan di perusahaan.

Banyaknya personil-personil yang memiliki sertifikasi bidang Manajemen Risiko seperti halnya di beberapa BUMN menjadi salah satu faktor sukses penerapan manajemen risiko dan BCM di perusahaan.

Selama tahun 2020, manajemen risiko telah dijalankan dengan efektif dan efisien sehingga tidak terdapat kejadian risiko yang berdampak negatif bagi perusahaan dan pemangku kepentingan serta tidak berdampak pada keberlanjutan perusahaan.

[102-30]

3. Improving Risk Management Competence for Personnel in the Risk Management Work Unit

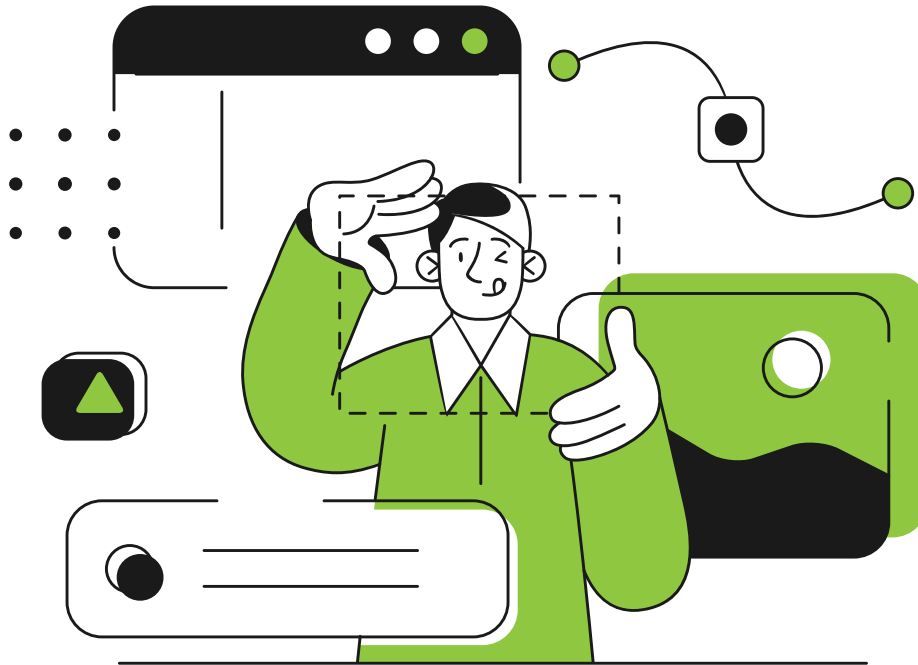
To increase knowledge and accelerate the development of a risk management framework, it is necessary to increase the competence of risk management personnel in the Risk Management Division and PUKM through Risk Management and/or Business Continuity Management (BCM) certification training in Indonesia. The guarantee industry is an industry that is growing very rapidly in line with government support for the development of MSMEs and micro-enterprises in Indonesia. These developments need to be followed by an increase in risk management capabilities coordinated by the Risk Management Division and PUKM which are expected to be the driving force of change in the company.

The large number of personnel who have certification in the field of Risk Management as is the case in several SOEs is one of the successful factors in implementing risk management and BCM in the company.

During 2020, risk management has been carried out effectively and efficiently so that there are no risk events that have a negative impact on the company and stakeholders and do not have an impact on the company's sustainability. [102-30]

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN (SPP)

Whistleblowing System (WBS) [102-17]



Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) merupakan sistem yang dapat dijadikan media bagi saksi pelapor untuk menyampaikan informasi mengenai tindakan pelanggaran yang diindikasikan terjadi di dalam suatu perusahaan berdasarkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan dan niat baik untuk kepentingan Perusahaan.

Perusahaan telah memiliki Pedoman Pengelolaan Sistem Pelaporan Pelanggaran *Whistleblowing System* (WBS) yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Direksi No.31/Per-Dir/1/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

Seluruh karyawan Jamkrindo berkomitmen untuk mempraktikkan *Whistleblowing System* dalam rangka melaksanakan sistem pelaporan pelanggaran. Karyawan juga dituntut untuk berpartisipasi aktif untuk ikut melaporkan bila menemukan adanya pelanggaran. Sementara itu, Jamkrindo juga memiliki komitmen untuk membuat kebijakan untuk melindungi pelapor.

Berdasarkan laporan pengaduan karyawan Perusahaan kepada Tim Pengelola WBS, terdapat 5 (lima) pengaduan di tahun 2020 dan 1 (satu) pengaduan pelanggaran di tahun 2019

The Whistleblowing System is a system that can be used as a medium for whistle-blower witnesses to convey information about indicated violations occurring within the Company based on evidence that can be accounted for and good intentions for the benefit of the Company.

The Company has already had a Guideline of violation reporting system or Whistleblowing System (WBS) for the management, which is determined based on the Board of Directors' Regulation No.31/Per-Dir/1/XII/2020, December 30, 2020.

All employees of Jamkrindo are committed to practicing the Whistleblowing System to implement a violation reporting system. Employees are also required to actively participate in reporting when they find violations. Meanwhile, Jamkrindo also commits to making policies to protect the whistle-blowers.

Based on the reports of complaints from Company employees to the WBS Management Team, there were 5 (five) complaints in 2020 and 1 (one) complaint of violations in 2019.



Jumlah Pelaporan yang Masuk berdasarkan Media Pelaporan

Number of Incoming Reports based on Reporting Media

Media Penyampaian Media Penyampaian	2020	2019
Surat Letter	-	-
Email Completed Followed-Up of Report	5	1
Situs Web Website	-	-
SMS SMS	-	-
Lain-lain Others	-	-
Jumlah Total	5	1

Sistem Status Pelaporan Pelanggaran (SPP)

Whistleblowing System (WBS) Report Status [102-17]

Status Laporan Report Status	2020	2019
Laporan Dalam Proses Report Still In-Process	3	-
Laporan yang Selesai Ditindaklanjuti Completed Followed-Up of Report	-	-
Laporan Tidak Terbukti Unproven Report	-	-
Laporan dengan Tindak Lanjut Report with a Follow-Up	2	1
Jumlah Amount	5	1

KODE ETIK

Code of Conduct [102-16]

Perusahaan memiliki komitmen untuk berusaha meningkatkan kinerja Perusahaan dengan berbasiskan budaya Perusahaan melalui Tata Kelola Perusahaan yang baik dengan berpedoman pada prinsip-prinsip transparansi, keadilan, akuntabilitas dan independen, sehingga dapat mendukung kebijakan Pemerintah di bidang pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi). Hal ini tertuang dalam Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Jaminan Kredit Indonesia Nomor 02/SKB/1/XII/2020, Kep-09/DK-Jamkrindo/XIII/2020 tanggal 30 Desember 2020.

The Company is committed to its effort in improving the Company's performance based on the Company's culture through Good Corporate Governance by adhering to the principles of transparency, fairness, accountability, and independence so that it can support Government policies in the development of Micro, Small and Medium Enterprises and Cooperatives (MSMEs and Cooperatives). It was stated in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Guarantee Kredit Indonesia Number 02/SKB/1/XII/2020, Kep-09/DK-Jamkrindo/XIII/2020 dated December 30, 2020.

Standar perilaku Perusahaan adalah transparansi dan pengungkapan informasi kemandirian, pertanggungjawaban dan kewajaran. Penerapan standar etika usaha tersebut merupakan cara Perusahaan berbisnis dalam rangka mewujudkan komitmen untuk:

The Company's standard of behavior is transparency and disclosure of information, independence, accountability, and fairness. The application of business ethics standards is the Company's way in doing business to realize its commitment to:

1. Menempatkan kepuasan pelanggan sebagai prioritas utama.
2. Menerapkan Standar Etika dalam seluruh kegiatan usaha berdasarkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
3. Senantiasa secara proporsional dalam rangka pemberian jasa yang bermutu tinggi kepada bisnis Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKM dan Koperasi).
4. Memperlakukan semua stakeholder sebagai mitra.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan stakeholder dengan baik.

1. Place customer satisfaction as a top priority.
2. Implement Ethical Standards in all business activities based on the principles of Good Corporate Governance.
3. Always be proportional in providing high-quality services to the Micro, Small, Medium Enterprises, and Cooperatives.
4. Treat all stakeholders as partners.
5. Serve and try to anticipate the needs of stakeholders well.

Etika Perusahaan Company Ethics

Etika Perusahaan dengan Pemangku Kepentingan

1. Perusahaan harus memperlakukan stakeholder secara baik dan adil dengan memenuhi hak-hak stakeholder.
2. Perusahaan wajib meningkatkan kinerja dan memelihara citra positif dalam rangka meningkatkan nilai bagi stakeholder.
3. Perusahaan wajib menjaga kerahasiaan informasi dan data.
4. Perusahaan harus mematikan pemberian informasi yang tidak menyesatkan kepada stakeholder.
5. Perusahaan harus melayani dan berupaya mengantisipasi kebutuhan stakeholder dengan baik.

Company Ethics with Stakeholders

1. Companies must treat stakeholders well and fairly by fulfilling stakeholder rights.
2. Companies are required to improve performance and maintain a positive image in order to increase value for stakeholders.
3. The company is obliged to maintain the confidentiality of information and data.
4. The company must stop providing information that is not misleading to stakeholders.
5. The company must serve and try to anticipate stakeholder needs properly.



Etika Perusahaan dengan Karyawan

1. Perusahaan harus mengutamakan kesehatan, keselamatan kerja, peningkatan kualitas dan kesejahteraan Karyawan dengan pemenuhan hak-hak Karyawan secara proporsional sehingga diharapkan Karyawan dapat menunjukkan kinerja secara maksimal.
2. Perusahaan memberikan kesempatan kerja yang sama kepada semua Karyawan tanpa memperhatikan latar belakang, etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang, atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
3. Perusahaan memberikan kesempatan yang sama dalam pengembangan diri Karyawan.
4. Perusahaan memberikan penghargaan berdasarkan kompetensi dan kinerja Karyawan.
5. Perusahaan menciptakan lingkungan kerja, komunikasi dan hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja yang kondusif dan produktif.
6. Perusahaan harus menghargai martabat manusia tanpa memperhatikan perbedaan latar belakang etnis, agama, jenis kelamin, usia, cacat tubuh yang dimiliki seseorang atau keadaan khusus lainnya yang dilindungi oleh peraturan perundang-undangan.
7. Perusahaan harus menjunjung tinggi prinsip umum kemanusiaan, hak dan kewajiban berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
8. Perusahaan mengizinkan Karyawan melakukan kegiatan rangkap di luar Perusahaan untuk kegiatan sosial kemasyarakatan, keanggotaan profesi, asosiasi atau kelompok sejenisnya.

Etika Perusahaan dengan Mitra Kerja (Pelanggan)

1. Perusahaan berupaya menjalankan praktik usaha yang saling menguntungkan dengan mitra kerja berdasarkan perjanjian kerja sama yang berimbang.
2. Perusahaan membangun komunikasi secara intensif dengan mitra kerja untuk mencari solusi yang terbaik dalam rangka peningkatan hasil kerja sama.
3. Perusahaan harus menjaga hubungan yang kondusif dengan mitra kerja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Perusahaan harus menghindari penyalahgunaan hubungan kemitraan.

Company Ethics with Employees

1. Companies must prioritize occupational health, safety, quality improvement and employee welfare by fulfilling employee rights proportionally so that employees are expected to show maximum performance.
2. The company provides equal employment opportunities to all rich people regardless of background, ethnicity, religion, gender, age, disability, or other special circumstances protected by laws and regulations.
3. The company provides equal opportunities for employee self-development.
4. The company provides awards based on employee competence and performance.
5. The company creates a conducive and productive work environment, communication and working relationships with superiors, subordinates and co-workers.
6. Companies must respect human dignity regardless of differences in ethnic background, religion, gender, age, disability or other special conditions protected by statutory regulations.
7. The company must uphold the general principles of humanity, rights and obligations based on the prevailing laws and regulations.
8. The Company allows employees to carry out multiple activities outside the Company for social activities, professional membership, associations or similar groups.

Corporate Ethics with Partners (Customers)

1. The company seeks to carry out mutually beneficial business practices with business partners based on a balanced cooperation agreement.
2. The company builds intensive communication with business partners to find the best solution in order to increase the results of cooperation.
3. The company must maintain a conducive relationship with business partners in accordance with the applicable laws and regulations.
4. Companies must avoid abuse of partnership relationships.

Etika Perusahaan dengan Penyedia Barang dan Jasa

1. Perusahaan memperlakukan penyedia barang atau jasa (*supplier*) termasuk proses pengadaan sesuai prinsip bisnis yang sehat, terbuka, tidak memihak berdasarkan ketentuan yang berlaku.
2. Perusahaan harus melakukan proses pengadaan secara transparan dan akuntabel berdasarkan peraturan yang berlaku dengan mengacu prinsip efektivitas, efisiensi dan ekonomis.
3. Perusahaan menggunakan penyedia barang dan jasa dilakukan berdasarkan dokumen secara tertulis.
4. Perusahaan harus menjaga kerahasiaan informasi dan dokumen pengadaan barang dan jasa sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
5. Perusahaan tidak melakukan korupsi, kolusi dan nepotisme dalam kegiatan pengadaan barang dan jasa.

Etika Perusahaan dengan Pesaing

1. Perusahaan harus melaksanakan persaingan usaha yang sehat dengan mengedepankan keunggulan produk dan kualitas layanan.
2. Perusahaan harus menghindari perilaku yang menyesatkan dan atau tindakan yang tidak jujur.
3. Perusahaan menentang kesepakatan atau kesepakatan yang bersifat anti kompetisi.
4. Perusahaan tidak melakukan kerja sama tanpa alasan yang dapat diterima dan wajar.

Etika Perusahaan dengan Pemerintah

1. Perusahaan wajib mematuhi Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Perusahaan harus membina hubungan dan komunikasi yang baik dengan Pemerintah.
3. Perusahaan harus mendukung program-program Pemerintah sesuai dengan peraturan dan undangundang yang berlaku.

Etika Perusahaan dengan Masyarakat

1. Perusahaan memelihara lingkungan yang bersih dan sehat.
2. Perusahaan mendukung kegiatan sosial, budaya, tradisi, agama dan hak azasi manusia.
3. Perusahaan berpartisipasi dalam pemberdayaan ekonomi masyarakat sekitar.
4. Perusahaan mengoptimalkan penyaluran program-program tanggung jawab sosial Perusahaan kepada masyarakat (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan).
5. Perusahaan tidak melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada diskriminasi masyarakat berdasarkan suku, agama, ras dan antar golongan.

Company Ethics with Goods and Service Providers

1. *The company treats providers of goods or services (suppliers) including the procurement process in accordance with sound, open, impartial business principles based on applicable regulations.*
2. *The company must carry out the procurement process in a transparent and accountable manner based on applicable regulations with reference to the principles of effectiveness, efficiency and economy.*
3. *Companies use goods and services providers based on written documents.*
4. *The company must maintain the confidentiality of information and documents on the procurement of goods and services in accordance with applicable laws and regulations.*
5. *The company does not engage in corruption, collusion and nepotism in the activities of procuring goods and services.*

Company Ethics with Competitors

1. *Companies must carry out fair business competition by prioritizing product excellence and service quality.*
2. *The company must avoid misleading and / or dishonest behavior.*
3. *The company is against any agreement or understanding that is anti-competitive in nature.*
4. *The company does not cooperate without an acceptable and reasonable reason.*

Company Ethics with the Government

1. *The company must comply with the prevailing laws and regulations.*
2. *Companies must maintain good relationships and communication with the Government.*
3. *Companies must support Government programs in accordance with applicable laws and regulations.*

Company Ethics with Society

1. *The company maintains a clean and healthy environment.*
2. *The company supports social, cultural, traditional, religious and human rights activities.*
3. *The company participates in the economic empowerment of the surrounding community.*
4. *The company optimizes the distribution of corporate social responsibility programs to the community (Partnership and Community Development Program).*
5. *The company does not take actions that lead to community discrimination based on ethnicity, religion, race and between groups.*



Etika Perusahaan dengan Media Massa

1. Perusahaan harus memberikan informasi yang relevan.
2. Perusahaan menjadikan media massa sebagai mitra dalam menciptakan kerja sama yang kondusif berdasarkan hubungan saling menghormati dan saling menguntungkan.
3. Perusahaan menerima dan menindaklanjuti secara proporsional terhadap kritik-kritik membangun yang disampaikan melalui media massa.

Company Ethics with Mass Media

1. The company must provide relevant information.
2. The company makes the mass media a partner in creating conducive cooperation based on mutual respect and mutual benefit.
3. The company accepts and follows up proportionally on constructive criticism conveyed through the mass media.

Standar Perilaku Insan Jamkrindo

Standards of Conduct for Jamkrindo Personnel

Tanggung Jawab Pribadi dan Profesi

1. Seluruh Insan Perusahaan wajib mematuhi seluruh ketentuan Perusahaan tentang kepegawaian.
2. Seluruh Insan Perusahaan wajib memahami dan mematuhi seluruh ketentuan baik yang dikeluarkan oleh Perusahaan maupun regulator sesuai bidang tugas dan tanggung jawabnya.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus berdedikasi, loyal, giat dan teliti dalam bekerja serta selalu berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemampuan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Seluruh Insan Perusahaan harus menerapkan kepentingan Perusahaan di atas kepentingan pribadi atau golongan.

Personal and Professional Responsibilities

1. All Company Personnel are required to comply with all Company regulations regarding employment.
2. All Company Personnel are required to understand and comply with all regulations issued by the Company and regulators in accordance with their duties and responsibilities.
3. All Company personnel must be dedicated, loyal, active and thorough in their work and always strive to improve their knowledge and abilities for the smooth execution of their duties.
4. All Company personnel must apply the Company's interests above personal or group interests.

Menciptakan Lingkungan Kerja yang Kondusif

1. Seluruh Insan Perusahaan harus bersikap santun dalam berkomunikasi.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hubungan kerja dengan atasan, bawahan dan rekan kerja.
3. Seluruh Insan Perusahaan harus menghindari tindakan dan ucapan yang mengandung unsur pelecehan, penghinaan, sikap mengejek, memfitnah dan merendahkan.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan perselingkuhan dan tindakan pelecehan seksual secara verbal, visual maupun fisik termasuk pelecehan atas privasi dan status.
5. Seluruh Insan Perusahaan dilarang (baik di kantor maupun di luar kantor):
 - a. Menggunakan, memiliki, mendistribusikan atau menjual narkoba atau obat-obatan terlarang.
 - b. Mengonsumsi minuman beralkohol.
 - c. Melakukan semua bentuk perjudian.
 - d. Melakukan semua bentuk tindakan kriminal.

Creating a Conducive Work Environment

1. All Company personnel must be polite in communicating.
2. All Company personnel must uphold ethical values in working relationships with superiors, subordinates and co-workers.
3. All Company personnel must avoid actions and speech that contain elements of harassment, insult, mocking, slander and degrading attitude.
4. All Company personnel are prohibited from committing adultery and sexual harassment verbally, visually or physically, including harassment of privacy and status.
5. All Company Personnel are prohibited (both in the office and outside the office):
 - a. Use, possess, distribute or sell narcotics or illegal drugs.
 - b. Drinking alcoholic beverages.
 - c. Doing all forms of gambling.
 - d. Committing all forms of criminal acts.

6. Seluruh Insan Perusahaan wajib memelihara lingkungan yang sehat.
7. Seluruh Insan Perusahaan agar mengupayakan penggunaan telepon secara efisien dan efektif serta menghindari penggunaan telepon untuk kepentingan pribadi secara berlebihan serta merespon bunyi telepon atau tanda panggilan pada kesempatan pertama.

6. *All Company Personnel are required to maintain a healthy environment.*
7. *All Company personnel should make efforts to use the telephone efficiently and effectively and to avoid excessive personal use of the telephone and respond to telephone sounds or call alerts at the first opportunity.*

Menghindari Segala Benturan Kepentingan dan Potensinya yang Memicu Perilaku Tidak Sehat dan Tidak Jujur

Avoid All Conflicts of Interest and Their Potentials That Lead to Unhealthy and Dishonest Behavior

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan tenaga, pemikiran dan kemampuan kerjanya untuk kepentingan Perusahaan.
2. Pekerjaan atau kegiatan di luar jam kantor dapat dilakukan sepanjang tidak memanfaatkan nama dan kepentingan Perusahaan.
3. Seluruh Insan Perusahaan yang sudah tidak aktif atau telah mengundurkan diri dilarang menggunakan setiap bentuk hak cipta, hak milik intelektual, data dan informasi Perusahaan serta melakukan kegiatan atas nama Perusahaan.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan atas nama pribadi atau golongan.
5. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh melakukan investasi dana Perusahaan dengan memperjanjikan keuntungan pribadi dengan pihak lain.
6. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima suap atau pembayaran dalam bentuk apapun dari pihak yang memiliki hubungan langsung ataupun tidak langsung dengan jabatan atau tugasnya.
7. Seluruh Insan Perusahaan tidak boleh menerima dan memberikan hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga dapat mempengaruhi keputusan bisnis yang sehat.
8. Seluruh Insan Perusahaan dilarang menjadi penyedia barang dan jasa yang secara langsung maupun tidak langsung menjual barang, hak atau jasa kepada Perusahaan.
9. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan *mark up* harga penjualan atau pembelian baik untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.
10. Seluruh Insan Perusahaan dilarang memanfaatkan jabatannya untuk memberikan perlakuan istimewa kepada pihak lain.

1. *All personnel of the Company use their personnel, thoughts and work abilities for the benefit of the Company.*
2. *Work or activities outside office hours can be carried out as long as it does not take advantage of the name and interests of the Company.*
3. *All Company personnel who are no longer active or have resigned are prohibited from using any form of copyright, intellectual property rights, Company data and information as well as carrying out activities on behalf of the Company.*
4. *All Company Personnel may not invest Company funds on behalf of individuals or groups.*
5. *All Company Personnel may not invest Company funds by agreeing personal gain with other parties.*
6. *All Company personnel may not accept bribes or payment in any form from parties who have a direct or indirect relationship with their position or duties.*
7. *All Company Personnel may not accept and give gifts in any form that can reasonably be suspected to influence sound business decisions.*
8. *All Company personnel are prohibited from becoming providers of goods and services that directly or indirectly sell goods, rights or services to the Company.*
9. *All Company personnel are prohibited from marking up sales or purchase prices for personal or other party purposes.*
10. *All Company Personnel are prohibited from taking advantage of their positions to give preferential treatment to other parties.*

Menjaga Aset, Harta dan Informasi demi Kepentingan Perusahaan

Safeguarding Assets, Assets and Information for the Interest of the Company

1. Seluruh Insan Perusahaan menggunakan aset Perusahaan hanya untuk kepentingan Perusahaan dan tidak diperkenankan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
2. Seluruh Insan Perusahaan harus bertanggung jawab melindungi harta Perusahaan dari pencurian, penggelapan dan penyalahgunaan aset sesuai wewenangnya masing-masing.

1. *All Company personnel use the Company's assets only for the Company's interests and are not permitted for personal or group interests.*
2. *All Company personnel must be responsible for protecting the Company's assets from theft, embezzlement and misuse of assets in accordance with their respective authorities.*



3. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga data dan informasi beserta perangkatnya sesuai dengan kewenangannya agar tidak disalahgunakan, dirusak, dicuri, atau tidak diakses oleh pihak lain yang tidak bertanggung jawab.
4. Seluruh Insan Perusahaan tidak diperkenankan menggunakan nama, logo, hak cipta dan berbagai aksesoris milik Perusahaan untuk kepentingan pribadi.
5. Seluruh Insan Perusahaan wajib menjaga informasi internal Perusahaan yang bersifat rahasia dan tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, teman, golongan, atau kelompok apapun dan manapun.
6. Seluruh Insan Perusahaan wajib membuat dan memberikan laporan dan data-data dengan benar dan jujur kepada pihak yang berkepentingan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Mematuhi Hukum dan Perundang-Undangan

1. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan kegiatan insider trading guna memperoleh keuntungan pribadi dan tidak bertindak sebagai pialang, pencari atau perantara lain untuk kepentingan pribadi atau golongan dalam transaksi yang dilakukan Perusahaan.
2. Seluruh Insan Perusahaan dilarang terlibat atau melibatkan diri pada investasi dan atau praktik yang bersifat pencucian uang (*money laundering*).
3. Seluruh Insan Perusahaan dilarang membuat kesepakatan, perikatan, pernyataan baik langsung maupun tidak langsung yang menunjukkan bahwa Perusahaan memiliki keterikatan dengan partai politik manapun, namun Perusahaan memberikan kebebasan bagi seluruh insan Perusahaan untuk menyalurkan aspirasi politiknya dengan syarat :
 - a. Tidak mengatasnamakan Perusahaan,
 - b. Tidak menggunakan aset Perusahaan dalam aktivitas politiknya,
 - c. Tidak memberikan kontribusi apapun atas nama Perusahaan,
 - d. Apabila menduduki jabatan di Partai Politik (parpol) dan menjadi calon/anggota legislatif dianggap mengundurkan diri dari Perusahaan.
4. Seluruh Insan Perusahaan dilarang melakukan tindakan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

3. *All Company Personnel are required to safeguard data and information and their devices according to their authority so that they are not misused, damaged, stolen, or not accessed by other parties who are not responsible*
4. *All personnel of the Company are not permitted to use the name, logo, copyrights and various accessories belonging to the Company for personal gain.*
5. *All Company Personnel are obliged to safeguard the Company's internal information which is confidential and not use it for personal gain, family, friends, class, or any group whatsoever.*
6. *All Company Personnel are required to prepare and provide reports and data correctly and honestly to interested parties in accordance with applicable laws and regulations.*

Obey Laws and Regulations

1. *All personnel of the Company are prohibited from engaging in insider trading activities for personal gain and do not act as brokers, seekers or other intermediaries for personal or class interests in transactions conducted by the Company.*
2. *All Company Personnel are prohibited from being involved or involving themselves in investment and or money laundering practices.*
3. *All Company personnel are prohibited from making understandings, engagements, statements, either directly or indirectly, indicating that the Company has ties to any political party, however the Company provides freedom for all Company personnel to channel their political aspirations with the following conditions:*
 - a. *Not on behalf of the company,*
 - b. *Do not use Company assets in its political activities,*
 - c. *Not making any contribution on behalf of the Company,*
 - d. *If he holds a position in a political party (parpol) and becomes a legislative candidate/member, he is considered to have resigned from the company.*
4. *All Company personnel are prohibited from committing acts of corruption, collusion and nepotism (KKN).*

Dalam melakukan penegakan Kode Etik di seluruh lini Perusahaan, setiap pelanggaran terhadap Kode Etik dikenakan ketentuan atau sanksi pelanggaran yang berlaku sebagaimana diuraikan dalam ketentuan internal mengenai Pemberian Sanksi yang ditetapkan oleh Jamkrindo, yang berupa peringatan tertulis, penurunan grade, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Semua pemangku kepentingan dapat menyampaikan saran dan kekhawatiran terkait etika melalui mekanisme pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system/WBS*) **[102-17]**

Selama tahun 2020, terdapat 12 (dua belas) pelanggaran kode etik dengan jenis sanksi berupa teguran tertulis, surat peringatan 1, dan surat peringatan 2.

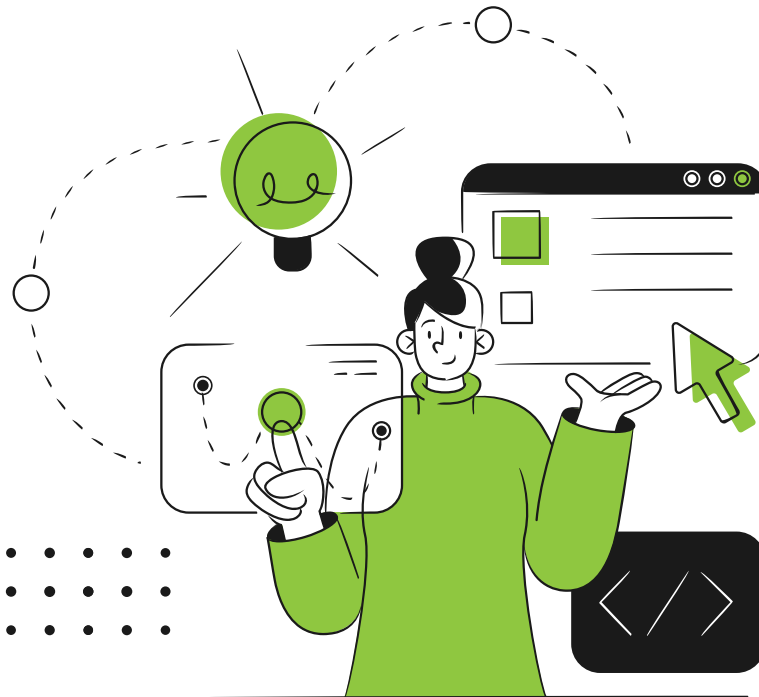
*In enforcing the Code of Ethics in all lines of the Company, every violation of the Code of Ethics is subject to provisions or sanctions for violations that apply as outlined in the internal provisions regarding the sanctions set by Jamkrindo, in the form of written warnings, downgrades, and termination of employment (PHK). All stakeholders can submit suggestions and concerns related to ethics through the whistleblowing system (WBS) **[102-17]***

During 2020, there were 12 (twelve) violations of the code of ethics with types of sanctions in the form of a written warning, a warning letter 1, and a warning letter 2.



KONFLIK KEPENTINGAN

Conflicts of Interest [102-25]



Menghindari konflik kepentingan sejalan dengan komitmen Jamkrindo untuk mengimplementasikan GCG, dimana salah satu prinsipnya adalah prinsip independensi yang menjamin pengelolaan Perusahaan secara mandiri tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selain pada prinsip independensi, Perusahaan juga berpegang teguh pada prinsip integritas yang harus dimiliki oleh setiap individu dalam lingkup perusahaan.

Salah satu bentuk konkrit dari komitmen Perusahaan tersebut adalah dengan menekankan bahwa setiap individu yang berada dalam lingkup perusahaan, terutama bagi mereka yang masuk kedalam struktur organisasi perusahaan, wajib menghindari segala bentuk benturan kepentingan yang dapat merugikan Perusahaan. Setiap individu juga dilarang melakukan aktivitas yang menguntungkan kepentingan pribadi, keluarga, maupun kerabatnya secara langsung maupun tidak langsung. Apabila ada individu yang sedang menghadapi benturan kepentingan, diwajibkan untuk segera membebaskan diri dari situasi tersebut atau memberitahu pimpinannya atau pihak yang bertanggung jawab atas hal tersebut.

Avoiding conflicts of interest is in line with Jamkrindo commitment to implementing GCG, where one of its principles is the principle of independence which guarantees the Company's management that is autonomous, free of conflict of interest, and influence/pressure from any parties that are not in accordance with the prevailing rules and legislation. Apart from the principle of independence, the Company also adheres to the principle of integrity that must be possessed by every individual within the company.

One of the concrete forms of the Company's commitment is to emphasize that every individual within the scope of the company, especially those who are included in the company's organizational structure, is obliged to avoid all forms of conflict of interest that could harm the Company. Every individual is also prohibited from engaging in activities that directly or indirectly benefit his or her personal, family, or family interests. If there are individuals who are facing a conflict of interest, they are obliged to immediately free themselves from the situation or notify their leadership or the party responsible for it.

Secara spesifik, Jamkrindo mengatur benturan kepentingan bagi Dewan Komisaris dan Direksi. Seluruh anggota Dewan Komisaris Jamkrindo telah menandatangani surat pernyataan bebas benturan kepentingan yang menyatakan tidak adanya hubungan afiliasi dengan anggota Direksi maupun anggota Dewan Komisaris lainnya. Sementara itu, bagi Direksi, pernyataan yang ditandatangani pada awal pengangkatan sebagai Direksi dan diperbaharui setiap awal tahun adalah bahwa pernyataan bahwa anggota Direksi maupun keluarganya tidak mempunyai kepemilikan saham maupun menjadi pengurus pada perusahaan maupun kegiatan usaha yang berkaitan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan bidang usaha Perusahaan.

Pada tahun 2020, tidak terdapat pelanggaran yang melibatkan benturan kepentingan oleh Dewan Komisaris, Dewan Direksi, maupun seluruh Insan Jamkrindo. **[102-25]**

Specifically, Jamkrindo regulates conflicts of interest for the Board of Commissioners and Directors. All members of the Jamkrindo Board of Commissioners have signed a conflict-of-interest free statement stating that they are not affiliated with other members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners. Meanwhile, for Directors, the statement signed at the beginning of appointment as Directors and updated at the beginning of each year state that members of the Board of Directors and their families do not own shares or become managers of companies or business activities that are directly or indirectly related to the line of business. Company.

*In 2020, there were no violations involving a conflict of interest by the Board of Commissioners, Board of Directors, or all Jamkrindo Personnel. **[102-25]***



KINERJA EKONOMI KEBERLANJUTAN

Sustainable Economic Performance





KONDISI PEREKONOMIAN NASIONAL DAN REGIONAL AKIBAT PANDEMI COVID-19

National and Regional Economic Conditions Due to the COVID-19 Pandemic

[103-1, 103-2, 103-3, 4.c.3]

Pandemi COVID-19 yang terjadi pada tahun 2020, tidak hanya mempengaruhi aspek kesehatan masyarakat, tetapi juga berpengaruh pada perekonomian. Pandemi ini memaksa berbagai negara untuk menerapkan *social distancing* untuk menekan penyebaran virus. Pemerintah Indonesia sendiri telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak April 2020 yang berdampak luas dalam proses produksi, distribusi, dan kegiatan operasional lainnya yang pada akhirnya mengganggu kinerja perekonomian. Dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini tidak hanya dirasakan secara nasional tetapi juga secara regional dan global.

Sementara secara regional, hampir semua perekonomian negara di Asia mengalami resesi kecuali Vietnam, Taiwan, dan China. Vietnam berhasil unggul dengan tidak pernah mencatat kontraksi sepanjang tahun 2020 dibandingkan Taiwan dan China. Sementara Indonesia berada di urutan keenam. Tentunya pemerintah Indonesia telah berupaya semaksimal mungkin untuk dapat meredam dampak dari pandemi COVID-19 ini. Dalam kaitan ini, bauran kebijakan dilakukan melalui penerbitan landasan hukum yang kuat, yakni UU No.2 Tahun 2020, sehingga otoritas dapat menempuh langkah-langkah luar biasa secara cepat dan akuntabel dalam mengatasi pandemi dan mendorong pemulihan ekonomi. Pemerintah menempuh kebijakan fiskal ekspansif melalui pemberian stimulus dalam jumlah besar yang mengakibatkan pelebaran defisit dan peningkatan pembiayaan APBN 2020. Kemudian, Pemerintah juga mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tanggal 20 Maret 2020, Pemerintah menginstruksikan agar prioritas kebijakan APBN 2020 difokuskan untuk mempercepat penanganan COVID-19, mempercepat pelaksanaan refocusing, realokasi, dan pengadaan barang dan jasa untuk penanganan COVID-19.

Selain itu, pemerintah juga tercatat telah mengeluarkan stimulus ekonomi sebanyak tiga kali. Pada stimulus ekonomi ketiga tertanggal 31 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengeluarkan dana Rp405 triliun atau setara dengan 2,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia. Dana tersebut dialokasikan ke dalam empat pos program, yakni jaring pengaman sosial (27%), bantuan kesehatan (19%), bantuan industri (17%), dan penyembuhan ekonomi nasional (34%).

The COVID-19 pandemic that occurred in 2020, does not only affects aspects of public health, but also affects the economy. This pandemic has forced various countries to implement social distancing measures to reduce the spread of the virus. The Indonesian government itself has implemented Large-Scale Social Restrictions (PSBB) since April 2020 which have had a broad impact on the process of production, distribution and other operational activities which ultimately disrupt economic performance. The negative impact of the COVID-19 pandemic is felt not only nationally but also regionally and globally.

Meanwhile, regionally, almost all economies in Asia experienced a recession, except for Vietnam, Taiwan and China. Vietnam managed to excel by never recording a contraction throughout 2020 compared to Taiwan and China. Meanwhile, Indonesia is in sixth place. Of course, the Indonesian government has made every effort to be able to reduce the impact of the COVID-19 pandemic. In this regard, the policy mix is carried out through the issuance of a strong legal basis, namely Law No.2 of 2020, so that the authorities can take extraordinary steps quickly and accountably in overcoming the pandemic and promoting economic recovery. The government pursued an expansionary fiscal policy by providing large amounts of stimulus which resulted in a widening of the deficit and an increase in the 2020 State Budget financing. Then, the Government also issued Presidential Instruction Number 4 of 2020 dated March 20, 2020, where the Government instructed that the 2020 State Budget policy priorities be focused on accelerating the handling of COVID-19, in the form of accelerating the implementation of refocusing, reallocation, and procurement of goods and services for handling COVID-19.

Apart from that, the government was also noted to have issued economic stimuli three times. In the third economic stimulus dated March 31, 2020, the Indonesian government spent IDR405 trillion or the equivalent of 2.5 percent of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP). The funds are allocated to four program posts, namely social safety nets (27%), health assistance (19%), industrial assistance (17%), and national economic recovery (34%).

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 juga mengalami dampak negatif yang signifikan dari pandemi COVID-19 ini. Badan Pusat Statistik (BPS) merilis data perekonomian Indonesia 2020 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku yaitu mencapai Rp15.434,2 triliun dan PDB per kapita mencapai Rp56,9 juta atau US\$3.911,7. Ekonomi Indonesia tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen (c-to-c) dibandingkan tahun 2019. Dari sisi produksi, kontraksi pertumbuhan terdalam terjadi pada Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan sebesar 15,04 persen. Sementara itu, dari sisi pengeluaran hampir semua komponen terkontraksi, Komponen Ekspor Barang dan Jasa menjadi komponen dengan kontraksi terdalam sebesar 7,70 persen. Sementara, Impor Barang dan Jasa yang merupakan faktor pengurang terkontraksi sebesar 14,71 persen.

Di tengah tekanan inflasi yang rendah, Bank Indonesia menempuh bauran kebijakan akomodatif yang mencakup pemberian stimulus moneter melalui penurunan suku bunga dan pelonggaran moneter (*Quantitative Easing*) dalam jumlah besar. Kebijakan itu juga didukung dengan langkah stabilisasi nilai tukar Rupiah, pelonggaran kebijakan makroprudensial, dan digitalisasi sistem pembayaran. Selain itu, penguatan koordinasi kebijakan juga dilakukan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan melalui program restrukturisasi bagi UMKM dan korporasi, serta inisiatif lainnya untuk menjaga fungsi intermediasi pembiayaan yang ditempuh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) turut merelaksasi kebijakan untuk mengurangi tekanan likuiditas perbankan.

The Indonesian economy in 2020 will also experience a significant negative impact from the COVID-19 pandemic. The Central Bureau of Statistics (Badan Pusat Statistik or BPS) released data on the Indonesian economy 2020 which is measured based on Gross Domestic Product (GDP) at current prices, reaching IDR15,434.2 trillion and GDP per capita reaching IDR56.9 million or US\$3,911.7. The Indonesian economy in 2020 experienced a growth contraction of 2.07 percent (c-to-c) compared to 2019. From the production side, the deepest growth contraction occurred in the Transportation and Warehousing Sector by 15.04 percent. Meanwhile, from the expenditure side, almost all components contracted, the Component of Exports of Goods and Services became the component with the deepest contraction of 7.70 percent. Meanwhile, imports of goods and services, which were a reducing factor, contracted by 14.71 percent.

In the midst of low inflationary pressure, Bank Indonesia pursued an accommodative policy mix that included providing monetary stimulus through a large reduction in interest rates and monetary loosening (Quantitative Easing). This policy was also supported by measures to stabilize the Rupiah exchange rate, loosen macroprudential policies, and digitize the payment system. In addition, strengthening policy coordination was also carried out to maintain financial system stability through restructuring programs for MSMEs and corporations, as well as other initiatives to maintain the financing intermediary function pursued by the Financial Services Authority (OJK). Meanwhile, the Deposit Insurance Corporation (LPS) also relaxed policies to reduce pressure on banking liquidity.



Sumber : Badan Pusat Statistik
 Source : Central Bureau of Statistics

PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA TRIWULAN IV - 2020

Economic Growth Indonesia Quarter IV - 2020

Berita Resmi Statistik No.13/02Th. XXIV, 5 Februari 2021
 Official News of Statistics No13/02Th.XXIV, February 5, 2021

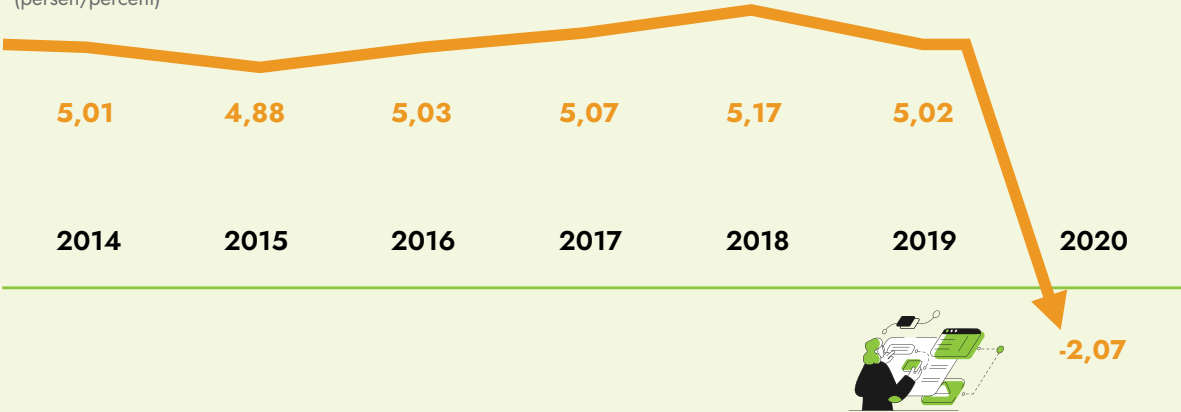
C-TO-C -2,07%	C-TO-C -2,19%	C-TO-C -0,42%	PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) HARGA BERLAKU 2020 Growth of Gross Domestic Product (GDP) Current Prices 2020 Rp15.434,2 Triliun/Trillion
-------------------------	-------------------------	-------------------------	---

PDB PER KAPITA 2020/GDP Per Capita in 2020
Rp56.938.723 (US\$ 3.911,7)



PERTUMBUHAN PRODUK DOMESTIK BRUTO (PDB) 2014-2020

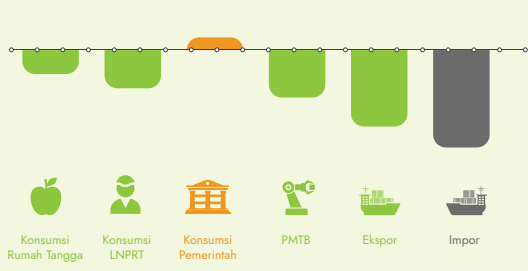
Gross Domestic Product (GDP) Growth 2014-2020
 (persen/percent)



PERTUMBUHAN PDB MENURUT LAPANGAN USAHA (2020)
 GDP growth by business field (2020)
 (persen/percent)



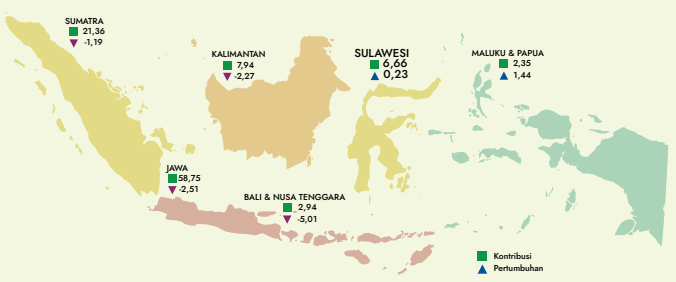
PERTUMBUHAN PDB MENURUT PENGELUARAN (2020)
 GDP growth by expenditure (2020)
 (persen/percent)



PERTUMBUHAN DAN KONTRIBUSI PDRB MENURUT WILAYAH

Growth And Grdp Contribution By Region

Tahun 2020 Pulau Jawa memberikan kontribusi terhadap perekonomian Indonesia sebesar 58,75 persen dengan pertumbuhan -2,51 persen
 In 2020 the Island of Java contributed to the Indonesian economy by 58.75 percent with a growth of -2.51 percent.



PERKEMBANGAN INDUSTRI PENJAMINAN KREDIT DI TENGAH PANDEMI COVID-19

Development of the Credit Guarantee Industry Amid the COVID-19 Pandemic

Di dalam Laporan Perekonomian Indonesia Tahun 2020, Bank Indonesia menyampaikan bahwa dalam upaya mengatasi gejolak perekonomian yang disebabkan oleh pandemic COVID-19, pemerintah di beberapa negara telah melakukan berbagai upaya perbaikan ekonomi yang dapat terlihat dampaknya pada triwulan III-2020 meskipun masih tumbuh negatif (terkontraksi).

Pada semester II tahun 2020, stabilitas sistem keuangan terus membaik seiring dampak kebijakan pelonggaran dan penurunan ketidakpastian pasar keuangan. Indeks Stabilitas Sistem Keuangan (ISSK) makin terjaga pada zona normal-stabil dan tetap di bawah *threshold*. Implementasi program restrukturisasi kredit yang terus berlanjut turut menopang stabilitas sistem keuangan. Rasio *Non Performing Loan* (NPL) tercatat stabil dibandingkan semester I 2020 dan berada di batas aman, yakni 3,06% (bruto) pada Desember 2020 dan 0,99% (neto) pada November 2020. Permodalan bank tetap tinggi tercermin pada rasio kecukupan modal (CAR) bank yang berada pada level 24,13%, di atas *threshold* persyaratan prudensial. Likuiditas perbankan sebagaimana tercermin pada Rasio Alat Likuid/Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) terus meningkat dan mencapai level 31,67%.

Kinerja perbankan tetap terjaga didukung efisiensi dan profitabilitas yang tetap baik, tercermin dari indikator efisiensi, rasio biaya operasional terhadap pendapatan operasional (BOPO) sebesar 86,04%, dan indikator profitabilitas, rasio *Net Interest Margin* (NIM) dan *return on assets* (ROA), yang terjaga di level 4,29% dan 1,63% pada November 2020. Peningkatan likuiditas bank terutama dalam bentuk kepemilikan obligasi negara diperkirakan turut membantu menahan penurunan profitabilitas akibat perlambatan pertumbuhan kredit dan peningkatan pembentukan cadangan seiring dengan kecenderungan peningkatan risiko. Secara keseluruhan, kepemilikan surat-surat berharga di perbankan mencapai Rp1.467 triliun pada akhir Desember 2020.

In the 2020 Indonesian Economic Report, Bank Indonesia stated that in an effort to overcome the economic turmoil caused by the COVID-19 pandemic, the government in several countries had made various efforts to improve the economy where the impact could already be seen in the third quarter of 2020 even though it still grew negatively (contracted).

In the second semester of 2020, financial system stability continued to improve in line with the impact of easing policies and reduced financial market uncertainty. The Financial System Stability Index (Indeks Stabilitas Sistem Keuangan or ISSK) is increasingly maintained in the normal-stable zone and remains below the threshold. The ongoing implementation of the credit restructuring program has also supported financial system stability. The Non-Performing Loan (NPL) ratio was recorded stable compared to semester I 2020 and is within safe limits, namely 3.06% (gross) in December 2020 and 0.99% (net) in November 2020. Bank capital remains high as reflected in the capital adequacy ratio (CAR) at the level of 24.13%, above the prudential threshold. Banking liquidity as reflected in the ratio of Liquid Assets/Third Party Funds continued to increase and reached the level of 31.67%.

Banking performance was maintained, supported by good efficiency and profitability, as reflected in the efficiency indicator, the ratio of operating costs to operating income (BOPO) of 86.04%, and indicators of profitability, the ratio of Net Interest Margin (NIM) and return on assets (ROA), which was maintained at 4.29% and 1.63% levels in November 2020. Increased bank liquidity, particularly in the form of government bond holdings, is expected to help curb the decline in profitability due to slower credit growth and increased reserve formation in line with the upward trend in risk. Overall, ownership of securities in banks reached IDR1,467 trillion at the end of December 2020.



Pertumbuhan kredit perbankan tercatat kontraksi sebesar 2,41% pada Desember 2020 yang bersumber dari seluruh jenis penggunaan kredit, baik kredit modal kerja, investasi, maupun konsumsi. Faktor lemahnya permintaan terindikasi lebih dominan sebagai penyebab masih rendahnya penyaluran kredit perbankan. Permintaan kredit yang lemah terkait erat dengan permintaan domestik yang belum kuat dan kondisi dunia usaha akibat pandemi COVID-19. Dari sisi penawaran, kapasitas perbankan dalam penyaluran sangat memadai sejalan dengan pelonggaran kebijakan moneter dalam bentuk penurunan suku bunga dan injeksi likuiditas, serta relaksasi kebijakan makroprudensial.

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) terus meningkat hingga triwulan III, meskipun kemudian sedikit melambat pada akhir 2020. DPK terus tumbuh tinggi hingga 12,88% (yoy) pada September 2020 namun sedikit melambat di Desember 2020 menjadi 11,11%. Kontribusi perlambatan pertumbuhan bersumber dari giro dan deposito, terutama dari korporasi BUMN, antara lain sejalan dengan kebutuhan pemenuhan kewajiban akhir tahun. Sementara itu, pertumbuhan DPK perseorangan terus meningkat terutama terjadi pada tabungan di tengah perlambatan pertumbuhan deposito.

Banking credit growth recorded a contraction of 2.41% in December 2020, originating from all types of credit use, including working capital, investment, and consumption loans. The factor of weak demand is indicated to be more dominant as the cause of the low level of bank credit distribution. Weak credit demand is closely related to weak domestic demand and conditions in the business world due to the COVID-19 pandemic. On the supply side, bank's channelling capacity was very adequate in line with the easing of monetary policy in the form of lowering interest rates and liquidity injections, as well as relaxation of macroprudential policies.

Growth in third party funds (dana pihak ketiga or DPK) continued to increase until the third quarter, although then slowed slightly at the end of 2020, where it grew at a high rate of 12.88% (yoy) in September 2020 but slowed slightly in December 2020 to 11.11%. The contribution to the slowdown in growth came from demand deposits and time deposits, particularly from state-owned enterprises, among others in line with the need to meet year-end obligations. Meanwhile, growth in individual deposits continued to increase, especially in savings amidst slowing growth in time deposits.

KINERJA EKONOMI JAMKRINDO

Economic Performance of Jamkrindo [103-1, 103-2, 103-3, 201, 6.b.1, 6.b.2]

Pada tahun 2020, Jamkrindo telah berkomitmen penuh dalam penerapan prinsip keberlanjutan dalam operasional perusahaan, yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial. Komitmen ini juga mendukung visi perusahaan yang menjadi tujuan perusahaan, yaitu menjadi pilihan utama pelaku usaha dalam layanan penjaminan untuk mendukung pertumbuhan dan pemerataan perekonomian nasional. Visi ini menjadi acuan Jamkrindo dalam mencapai target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). [103-1, 103-2]

Total kredit yang dijamin Perusahaan tahun 2020 mencapai Rp188.600 miliar, turun 7,54% dari tahun sebelumnya Rp203.991 miliar. Namun demikian, pencapaian tersebut berada di atas target yang ditetapkan pada RKAP 2020 sebesar Rp170.515 miliar atau dengan pencapaian sebesar 110,61%.

Penurunan penjaminan kredit tersebut utamanya disebabkan turunnya penjaminan untuk produk Non KUR dari Rp144.979 miliar di tahun 2019 menjadi Rp59.012 miliar di tahun 2020.

Dari kredit yang dijamin di tahun 2020 Perusahaan memperoleh Pendapatan dari Imbal Jasa Penjaminan (IJP) sebesar Rp2.826 miliar, meningkat 18,14% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.313 miliar. Pencapaian tersebut mencapai 121,70% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP). Tahun 2020 realisasi penyaluran KUR mencapai Rp197.000 miliar, meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebesar Rp140.120 miliar yang diberikan kepada 6.110.000 debitur.

Jamkrindo yang merupakan Anak Holding BUMN Asuransi dan Penjaminan dari Indonesia Finansial Group (IFG) memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di bidang pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKMK). Pada tahun 2020 berhasil mencapai volume penjaminan sebesar Rp102.674 miliar. Realisasi penjaminan KUR tahun 2020 adalah sebesar Rp102.674 miliar atau mencapai 128,34% dari anggaran dalam RKAP 2020 yaitu sebesar Rp80.000 miliar. Dibandingkan tahun 2019, realisasi penjaminan KUR meningkat 73,99% dimana tahun 2019 penjaminan KUR adalah sebesar Rp59.012 miliar. Sedangkan pendapatan IJP KUR adalah sebesar Rp1.957 miliar atau 116,48% dari target yang ditetapkan dalam RKAP 2020 yaitu sebesar Rp1.680 miliar. Pendapatan IJP KUR tahun 2020 juga meningkat 28,91% dari tahun sebelumnya Rp1.518 miliar.

In 2020, Jamkrindo has fully committed to the practice of sustainability principles in the company's operations, which are economic, environmental, and social. This commitment also supports the company vision which becomes the company's objective, to become the main choice of enterprises for guarantee services to support the national economic growth and equity. The above vision has become the reference of Jamkrindo in achieving targets that has been set in the Company Work Plan and Budget. [103-1, 103-2]

The total number of credits guaranteed by the Company in 2020 reached IDR188,600 billion, decreased by 7.54% from the previous year of IDR203,991 billion. Even so, the achievement has still surpassed the set target in the 2020 Company Work Plan and Budget of IDR170,515 billion or with the achievement of 110.61%.

The decrease in credit guarantee above is mainly attributed to the decrease in guarantee for Non-People's Business Credit product from IDR144,979 billion in 2019 to IDR59,012 billion in 2020.

Out of the credit guaranteed in 2020, the Company earned income from Guarantee Fees (IJP) amounted to IDR2,826 billion, an increase of 18.14% from the previous year of IDR2,313 billion. This achievement reached 121.70% of the target of the Company's Work Plan and Budget (RKAP). In 2020, the realization of the People's Business Credit distribution reached IDR197,000 billion, increased from the previous year with IDR140,120 billion which were distributed to 6,110,000 debtors.

Jamkrindo which is a subsidiary of the Insurance and Guarantee BUMN Holding of the Indonesia Financial Group (IFG), responsibility and authority to perform business activities in the field of Micro, Small, Medium Enterprise, and Cooperatives (UMKMK) development. On 2020, the volume of guarantee has successfully reached IDR102,674 billion. The realization of People's Business Credit guarantee in 2020 is IDR102,674 billion or reaching 128.34% of the budget set in the 2020 Company Workplan and Budget which is IDR80,000 billion. Compared to 2019, the realization of People's Business Credit guarantee increased by 73.99% where in 2019, the numbers amounted to IDR59,012 billion. Meanwhile, the income from People's Business Credit guarantee fee amounted to IDR1.957 billion or 116.48% from the target set in the 2020 Company Workplan and Budget which is IDR1,680 billion. The income from People's Business Credit guarantee fee in 2020 also increased by 28.91% from the previous year, which was IDR1,518 billion.



Selain itu Perusahaan juga menerima Imbal Jasa Penjaminan dari kredit konsumtif, kredit produktif, PEN, dan Suretyship. Total Imbal Hasil Penjaminan Perusahaan adalah sebesar Rp2.826 miliar, meningkat 22,17% dari periode sebelumnya. Atas produk penjaminan yang bersifat syariah, Perusahaan juga menerima Imbal Jasa Kafalah dengan nilai total sebesar Rp500 miliar, meningkat 51,05% dari tahun sebelumnya.

Beban klaim yang dibukukan Perusahaan juga mengalami penurunan menjadi Rp2.180 miliar atau menurun 1,08% dari tahun sebelumnya sebesar Rp2.204 miliar, sehingga Perusahaan membukukan penjaminan bersih sebesar Rp802 miliar, naik 93,71% dari tahun 2019 sebesar Rp414 miliar.

Di tahun 2020, Perusahaan mampu menekan beban usaha menjadi Rp903 miliar atau turun 8,87% dari tahun sebelumnya Rp991 miliar. Selain itu, Pendapatan Lain-lain yang dibukukan Perusahaan tahun 2020 meningkat secara signifikan menjadi Rp51 miliar dari tahun sebelumnya Rp24 miliar, sehingga laba sebelum pajak yang dibukukan Perusahaan tahun 2020 mencapai Rp722 miliar, meningkat signifikan sebesar 298,89% dari tahun sebelumnya Rp181 miliar. Setelah membukukan pajak kini sebesar Rp148 miliar, pada tahun 2020 Perusahaan berhasil membukukan laba tahun berjalan dari penjaminan KUR sebesar Rp456 miliar, meningkat signifikan sebesar 130,30% dari tahun sebelumnya Rp198 miliar.

Dalam menghadapi pandemic COVID-19, Jamkrindo juga memberikan layanan penjaminan PEN. PEN adalah Penjaminan yang diberikan dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam rangka mendukung kebijakan keuangan Negara untuk penanganan pandemi *Coronavirus Disease* (COVID-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional. Sedangkan Pendapatan IJP PEN adalah sebesar Rp123 miliar pada tahun 2020.

[6.b.1, 6.b.2]

In addition, the Company also receives Guarantee Fees from consumer loans, productive loans, PEN, and Suretyship. The total fee on coDRorate guarantees was IDR2,826 billion, an increase of 22.17% from the previous period. For guarantee products that are sharia-compliant, the Company also received Kafalah Fees with a total value of IDR500 billion, an increase of 51.05% from the previous year.

Claim expenses recorded by the Company also decreased to IDR2,180 billion, or decreased 1.08% from IDR2,204 billion in the previous year, so the Company booked a net guarantee of IDR802 billion, up 93.71% from IDR414 billion in 2019.

In 2020, the Company was able to reduce operating expenses to IDR903 billion, down 8.87% from the previous year of IDR991 billion. In addition, the Other Income recorded by the Company in 2020 increased significantly to IDR51 billion from the previous year of IDR24 billion, so that the profit before tax recorded by the Company in 2020 reached IDR722 billion, a significant increase of 298.89% from the previous year of IDR181 billion. After posting current taxes of IDR148 billion, in 2020 the Company managed to book a profit for the year from KUR guarantees of IDR456 billion, a significant increase of 130.30% from the previous year of IDR198 billion.

In facing the COVID-19 pandemic, Jamkrindo also provides the service of National Economic Recovery (PEN) guarantee. PEN is a guarantee given to support the state financial policy in response to the handling of Coronavirus Disease (COVID-19) pandemic and/or to face threats jeopardizing the national economy and/or financial system stability and to salvage the national economy. Meanwhile, the PEN's guarantee fee is IDR123 billion in 2020.

[6.b.1, 6.b.2]

DISTRIBUSI NILAI EKONOMI

Economic Value Distribution [103-1, 103-2, 201-1]

Untuk dapat mendukung pembangunan berkelanjutan, diperlukan komitmen Perusahaan untuk menjalankan bisnis dengan mengedepankan tiga pilar keberlanjutan yaitu ekonomi, lingkungan, dan sosial.

Jamkrindo memiliki komitmen untuk menerapkan prinsip berkelanjutan yang mampu menciptakan nilai ekonomi, sosial, dan ekologis di dalam proses dan pada tingkatan pengambilan kebijakan maupun pengambilan keputusan yang dapat mendorong kesuksesan Perseroan dengan tetap berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Antara lain untuk menjamin keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Perusahaan menjalankan strategi bisnis yang mengintegrasikan strategi ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk memastikan Perusahaan dapat mendistribusikan nilai ekonomi maksimal kepada pemangku kepentingan, baik itu pelanggan, pegawai, pemerintah, pemasok, maupun masyarakat. [103-1, 103-2, 201-1]

Distribusi nilai ekonomi perusahaan menjadi sangat penting. Jamkrindo menghasilkan nilai ekonomi langsung yang kemudian dapat didistribusikan kepada para pemangku kepentingan. Pendapatan Jamkrindo ini kemudian menjadi perolehan nilai ekonomi yang akan didistribusikan kepada para pemangku kepentingan.

Selama tahun 2020 Perusahaan menghasilkan nilai ekonomi sebesar Rp1,65 triliun, meningkat 35% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp1,22 triliun. Dari nilai ekonomi yang dihasilkan tersebut, sebesar Rp27,19 miliar digunakan untuk biaya komisi, Rp346,89 miliar digunakan untuk kegiatan usaha Perusahaan (diluar biaya kepada pegawai, CSR, dan pembayaran kepada pemasok barang dan jasa), sebesar Rp452,89 miliar didistribusikan kepada pegawai dalam bentuk gaji, tunjangan, dan biaya pelatihan, sebesar Rp16,26 miliar didistribusikan kepada masyarakat untuk program CSR melalui PKBL, dan sebesar Rp87,62 miliar didistribusikan kepada pemasok barang dan jasa. Selain itu Perusahaan juga mendistribusikan nilai ekonominya kepada pemegang saham dalam bentuk dividen sebesar Rp400 miliar dan kepada pemerintah dalam bentuk pajak sebesar Rp266,33 miliar baik berupa pembayaran pajak final maupun pajak penghasilan non final.

To be able to support sustainable development, it requires the Company's commitment to running a business by prioritizing three pillars of sustainability, namely economic, environmental and social.

Jamkrindo is committed to implementing sustainable principles that are able to create economic, social and ecological value in the process and at the level of policy making and decision making that can drive the success of the Company while still contributing to the achievement of the Sustainable Development Goals. Among other things, to ensure the integrity of the environment as well as the safety, capability, welfare, and quality of life of present and future generations. The Company carries out a business strategy that integrates economic, social and environmental strategies to ensure that the Company can distribute maximum economic value to stakeholders, be it customers, employees, government, suppliers, or the community. [103-1, 103-2, 201-1]

The distribution of the company's economic value is very important. Jamkrindo generates direct economic value which can then be distributed to stakeholders. Jamkrindo's income is then an economic value gain which will be distributed to stakeholders.

During 2020 the Company generated an economic value of IDR1.65 trillion, an increase of 35% compared to 2019, which was IDR1.22 trillion. Of the resulting economic value, IDR27.19 billion was used for commission fees, IDR346.89 billion was used for the Company's business activities (excluding costs to employees, CSR, and payment to suppliers of goods and services), IDR452.89 billion was distributed to employees in the form of salaries, allowances, and training costs, IDR16.26 billion was distributed to the community for CSR programs through PKBL, and IDR87.62 billion was distributed to suppliers of goods and services. In addition, the Company also distributes its economic value to shareholders in the form of dividends of IDR400 billion and to the government in the form of taxes of IDR266.33 billion, both in the form of payment of final tax and non-final income tax.



Total nilai ekonomi yang didistribusikan selama tahun 2020 adalah sebesar Rp1,59 triliun, meningkat 50,34% dibandingkan tahun 2019 yaitu sebesar Rp1,06 triliun. Sehingga, pada tahun 2020 jumlah ekonomi yang ditahan adalah sebesar Rp56,13 miliar, menurun sebesar 64,73% dibandingkan dengan tahun 2019. Berdasarkan Laporan Keuangan 2019 yang telah dinyatakan ulang, terdapat manfaat pajak yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp152,33 miliar pada tahun 2019. **[103-3, 201-1, 201-2, 201-3, 201-4].**

*The total economic value distributed during 2020 was IDR1.59 trillion, an increase of 50.34% compared to 2019 which was IDR1.06 trillion. Thus, in 2020 the number of retained economic value was IDR56.13 billion, a decrease of 64.73% compared to 2019. Based on the restated 2019 Financial Statements, there was a significant tax benefit of IDR152.33 billion in 2019. **[103-3, 201-1, 201-2, 201-3, 201-4].***

Berikut ini tabel yang menjabarkan nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan selama tahun 2020:

The following table describes the direct economic value generated and distributed during 2020:

Nilai Ekonomi Langsung yang Dihasilkan dan Didistribusikan

Direct Economic Value Generated and Distributed [201-1, 201-2, 201-3, 201-4]

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Imbalan Jasa Penjaminan Bersih <i>Net Guarantee Revenues</i>	2.633.393	2.152.072	22,37%
Beban Klaim <i>Claim Expenses</i>	(1.830.400)	(1.737.95)	5,32%
Penjaminan Bersih <i>Net Guarantee</i>	802.993	414.113	93,91%
Pendapatan Investasi Bersih <i>Net Investment Income</i>	799.211	782.810	2,10%
Pendapatan (Beban) lain-lain <i>Other Income (Expense)</i>	51.130	24.612	107,74%
Nilai Ekonomi Yang Dihasilkan <i>Economic Value Generated</i>	1.653.334	1.221.535	35,35%
Komisi Bersih <i>Commission - net</i>	(27.195)	(48.138)	(43,51%)
Beban Usaha (diluar Beban Pegawai dan CSR) <i>Operating Expenses (Exclude Employee Expenses and CSR Expense)</i>	(346.892)	(436.882)	(20,60%)
Beban Sumber Daya Manusia <i>Human Resource Expenses</i>	(452.897)	(444.202)	55,85%
Pembayaran Kepada Masyarakat melalui Program CSR (PKBL) <i>Payments to the Community through the CSR Program (PKBL)</i>	(16.261)	(10.434)	55,85%
Pembayaran kepada Pemasok Barang dan Jasa <i>Payments to Suppliers of Goods and Services</i>	(16.261)	(10.434)	(12,59%)

Uraian Description	2020	2019	Pertumbuhan (%) Growth (%)
Pembayaran kepada Pemerintah Berupa Beban Pajak Penghasilan <i>Payments to the Government in the form of Income Tax Expense</i>	(266.336)	17.273	(1641,92%)
Pembayaran Kepada Penyandang Dana dalam Bentuk Dividen <i>Payments to Funders in the Form of Dividends</i>	(400.000)	(39.754)	906,19%
Total Nilai Ekonomi Didistribusikan <i>Total Economic value Distributed</i>	(1.597.201)	(1.062.378)	50,34%
Nilai Ekonomi Yang Ditahan <i>Economic Value Withheld</i>	56.133	159.157	(64,73%)

Kontribusi kepada Pemerintah [103-3, 201-3]

Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara, khususnya di dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Di sisi lain pajak juga sangat penting dalam mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Sejalan dengan hal tersebut, Jamkrindo berkomitmen untuk ikut andil mendukung program pemerintah. Salah satu bentuk kontribusi perusahaan kepada negara adalah memenuhi kewajiban perusahaan sebagai wajib pajak dengan membayar pajak secara tepat waktu. Berikut adalah rincian pembayaran pajak kepada negara: [103-3, 201-3]

Contribution to the Government [103-3, 201-3]

Taxes have a very important role in the life of the state, especially in the implementation of development, as taxes are a source of state income to finance all expenditures including development expenditures. On the other hand, taxes are also very important in regulating economic growth through tax policies. In line with this, Jamkrindo is committed to taking part in supporting government programs. One form of the company's contribution to the state is to fulfill the company's obligations as taxpayers by paying taxes in a timely manner. The following is a breakdown of tax payments to countries: [103-3, 201-3]

Jenis Pajak Types Of Taxes	2020	2019
Pajak Kini <i>Current Tax</i>	143,691	17,965
Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax</i>	4,338	(174,385)
Jumlah <i>Total</i>	148,029	(156,420)



KEWAJIBAN PERSEROAN ATAS PROGRAM IMBALAN PASTI

The Company's Obligations for a Defined Benefit Program

[103-1, 103-2, 103-3, 201-3]

Pemerintah telah mengatur program imbalan pasca kerja perusahaan dalam UU No.13 Tahun 2003. UU Ketenagakerjaan ini merupakan acuan Jamkrindo terkait pemenuhan hak karyawan yang berkaitan dengan imbalan pasca kerja atau pensiun. Dalam pelaksanaannya, perusahaan mengacu undang-undang tersebut ditambah dengan metode dalam PSAK 24 (Revisi 2014), yaitu metode perhitungan aktuarial yang digunakan untuk menentukan nilai kini kewajiban manfaat pasti dan biaya jasa kini. [103-1]

Implementasi program pensiun pada perusahaan ini dengan mengikutsertakan karyawan ke dalam Program Asuransi Kesejahteraan Karyawan dan Program Kesejahteraan Karyawan melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Perusahaan juga melakukan pembukuan imbalan pasca kerja manfaat pasti ini sesuai dengan UU Ketenagakerjaan. [103-2]

Dalam pelaksanaan program ini, perusahaan memiliki 2 (dua) program, yaitu program pensiun imbalan pasti dan program iuran pasti. Program pensiun imbalan pasti merupakan program yang dapat menentukan jumlah imbalan pensiun yang akan diberikan kepada karyawan. Penyelenggaraan program ini tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No.25/KPTS/PKK.3/XI/1987 tanggal 23 November 1987, No.01/DIR/I/2002 tanggal 7 Januari 2002. Program ini terdiri dari Program Jaminan Hari Tua (JHT) dan Program Tunjangan Hari Tua (THT). Acuan perhitungannya berdasarkan usia, masa kerja atau kompensasi. Program ini diselenggarakan bagi karyawan yang periode kerjanya dimulai sebelum tahun 1995.

Sedangkan, program iuran pasti merupakan pembayaran iuran oleh perusahaan yang dihitung berdasarkan prosentase tertentu dari gaji pokok karyawan kepada program asuransi pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun lembaga keuangan. Iuran ini dibebankan dalam laporan laba rugi pada saat terutang. [103-2]

Adapun manfaat yang akan diperoleh dari program pensiun manfaat pasti adalah sebagai berikut:

- a. Program JHT sebesar 30 x gaji karyawan

The government has regulated the company's post-employment benefits program in Law No.13 of 2003 on Manpower. This Manpower Law is a reference for Jamkrindo regarding the fulfillment of employee rights related to post-employment or retirement benefits. In practice, the company refers to the law and is supplemented by the method in PSAK 24 (Revised 2014), which is the actuarial calculation method used to determine the present value of defined benefit obligations and current service costs.

[103-1]

The company has implemented a pension program by enrolling employees in the Employee Welfare Insurance Program and the Employee Welfare Program through the Financial Institution Pension Fund (Dana Pensiun Lembaga Keuangan or DPLK). The company also records the defined benefit post-employment benefits in accordance with the Manpower Law. [103-2]

In implementing this program, the company has 2 (two) programs, namely a defined benefit pension plan and a defined contribution plan. A defined benefit pension plan is a plan that determines the amount of pension benefits to be given to employees. The implementation of this program is stated in the Decree of the Board of Directors No.25/KPTS/PKK.3/XI/1987 dated 23 November 1987, No.01/DIR/I/2002 dated January 7, 2002. This program consists of the Old Age Security (Jaminan Hari Tua or JHT) Program and the Old Age Allowance (Tunjangan Hari Tua or THT) Program. The reference for the calculation is based on age, years of service, or compensation. This program is organized for employees whose work period started before 1995.

Meanwhile, the defined contribution plan is the contribution payment by the company which is calculated based on a certain percentage of the employee's basic salary to the pension insurance program administered by the financial institution pension fund. This fee is charged to the income statement when it is due. [103-2]

The benefits to be obtained from the defined benefit pension plan are as follows:

- a. *JHT program of 30 x employee salaries*

- b. Program THT sebesar 2,5% x masa kerja x gaji karyawan. Skema program pensiun ini adalah dengan cara perusahaan yang mendanai program pensiun dan pembayaran iuran bulanan oleh karyawan. Kontribusi pendanaan sebesar 4,4% dari gaji pokok karyawan dan 6,6% ditanggung perusahaan. Selama tahun 2020, jumlah karyawan yang diikutsertakan dalam program ini masing-masing sebanyak 2 dan 915. **[103-3, 201-3]**
- b. THT program of 2.5% x years of service x employee salaries. This pension plan scheme is done by the company which funds and pays the pension program, as well as the monthly contribution payments by the employees. The funding contribution is 4.4% of the basic salary of the employees and 6.6% is borne by the company. During 2020, the number of employees involved in this program were 2 and 915 respectively. **[103-3, 201-3]**

Selama tahun 2020 terdapat peningkatan jumlah liabilitas imbalan pasca kerja dibandingkan tahun sebelumnya. Jumlah liabilitas imbalan pasca kerja pada tanggal 31 Desember 2020 adalah Rp57.927.486.735,00. Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penyesuaian gaji pokok karyawan sehingga jumlah liabilitas imbalan pasca kerja meningkat sebesar Rp24.759.179.396,00 atau 74.65%. **[103-3, 201-3]**

During 2020 there was an increase in the amount of post employment benefit liabilities compared to the previous year. The total liability for post-employment benefits as of December 31, 2020 is IDR57,927,486,735.00. This increase was due to an adjustment in the basic salary of employees so that the total liability for post-employment benefits increased by IDR24,759,179,396.00 or 74.65%. **[103-3, 201-3]**

Liabilitas Imbalan Pasca Kerja

(dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain)

Post-employment Benefits Liabilities

(in million Rupiah unless otherwise stated)

Uraian Description	2020	2019	Perubahan Changes	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Jumlah Liabilitas Imbalan Pasca Kerja Total Post-employment Benefits Liabilities	8,418	8,122	296	3,64%



RASIO UPAH KARYAWAN PEMULA MENURUT GENDER TERHADAP UPAH MINIMUM REGIONAL/PROVINSI

Ratio of Entry Level Employee Wages by Gender Against Regional/Provincial Minimum Wages **[103-1, 103-2, 103-3, 202, 6.c.2b]**

Jamkrindo berkomitmen dalam memberikan kesejahteraan kepada karyawannya dengan taat pada Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam UU ini tertuang pembahasan terkait pemberian Upah Minimum Regional. Dalam implementasinya, Jamkrindo memberikan upah kepada karyawan baru jauh di atas Upah Minimum Regional (UMR). Selain itu, Jamkrindo juga tidak membedakan pemberian upah berdasarkan gender, melainkan mengacu pada kompetensi karyawan. **[103-1, 103-2]**

Jamkrindo is committed to providing welfare to its employees in compliance with Law No.13 of 2003 on Manpower. This law contains a discussion regarding the provision of a Regional Minimum Wage. In its implementation, Jamkrindo provides wages to new employees far above the Regional Minimum Wage (Upah Minimum Regional or UMR). In addition, Jamkrindo also does not differentiate wages based on gender, but refers to the competence of employees. **[103-1, 103-2]**

Upah minimal yang diberikan sebesar Rp4.649.654,- untuk level pendidikan lulusan D-3 dan Rp5.212.751,- untuk level pendidikan lulusan S-1. Upah ini berlaku untuk semua wilayah operasi. **[103-3, 202-1]**

The minimum wage given is IDR4,649,654,- for the education level of Diploma graduates and IDR5,212,751,- for the level of education of Bachelor's Degree graduates. This wage applies to all areas of operation. **[103-3, 202-1]**

Tabel Perbandingan Upah Minimum Jamkrindo dengan UMR

Tabel of Comparison Between Jamkrindo Minimum Wage and Regional Minimum Wage (UMR) **[202-1]**

Lokasi Location	Rata-rata UMR Average UMR		Rata-rata Upah Minimal Average Minimum Wage		Rasio Gaji/UMR Wage/UMR Ratio	
	2020	2019	2020	2019	2020	2019
Semua Wilayah Operasi All Operational Regions	4.267.349,-	3.940.973,-	4.539.447,-	4.091.318,-	1 : 1,1	1 : 1,0

DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG

Indirect Economic Impact [103-1, 103-2, 103-3, 203]

Sebagai perusahaan yang bertanggung jawab, Jamkrindo berkomitmen untuk meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat melalui kegiatan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Walaupun tujuan awal perusahaan adalah menciptakan laba semaksimal mungkin, tetapi perusahaan juga berupaya memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasional perusahaan.

[103-1, 103-2]

Kebijakan ini mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No.02/MBU/04/2020 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Selain itu, penyalurannya juga mengacu pada Peraturan Direksi No.02/Per-Dir/1/II/2021 tentang perubahan atas peraturan direksi nomor 15/per-dir/1/VII/2019 tentang pedoman pendelegasian kewenangan administrasi dan kebijakan PT Jamkrindo [103-2]

Program Kemitraan merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana BUMN. Mitra binaan adalah usaha kecil yang mendapatkan pinjaman dari Program Kemitraan. Sedangkan, Program Bina Lingkungan merupakan program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana BUMN. Perusahaan selalu melibatkan masyarakat setempat dalam penyusunan program PKBL agar program ini berjalan efektif (uraian selengkapnya terdapat di Laporan Pelaksanaan PKBL Jamkrindo 2020).

[6.c.3a, 103-3, 203-1]

Selama tahun pelaporan, Jamkrindo melaksanakan program kemitraan sebagai berikut:

Program Kemitraan Jamkrindo

Jamkrindo Partnership Program [6.c.3a, 103-3, 203-1, 413-1]

No.	Uraian Description	2020		2019	
		Mitra Binaan Fostered Partners	Jumlah/Total Rp/IDR	Mitra Binaan Fostered Partners	Jumlah/Total Rp/IDR
1.	Sektor Perdagangan Trade Sector	76	2.452.000.000	29	1.059.000.000
2.	Sektor Jasa Service Sector	27	715.000.000	7	275.000.000
3.	Sektor Peternakan Livestock Sector	14	420.000.000	15	750.000.000

As a responsible company, Jamkrindo is committed to increase the awareness of the community through the Partnership and Community Development Program (Program Kemitraan dan Bina Lingkungan or PKBL). Although the initial goal of the company is to create the maximum possible profit, the company also seeks to provide benefits for the community and the environment around the company's operational area.

[103-1, 103-2]

This policy refers to SOE Minister Regulation No.02/MBU/04/2020 concerning the Partnership and Community Development Program for State-Owned Enterprises. In addition, the distribution also refers to the Board of Directors Regulation No.02/Per-Dir/1/II/2021 regarding changes to the board of directors regulation number 15/per-dir/1/VII/2019 regarding guidelines for delegation of administrative authority and PT Jamkrindo policies [103-2]

The Partnership Program is a program that aims to increase the ability of small businesses to become resilient and independent through the use of SOE funds. Foster partners are small businesses that get loans from the Partnership Program. Meanwhile, the Community Development Program is a program to empower the social conditions of the community by SOEs through the use of SOE funds. The company always involves the local community in the preparation of the PKBL program so that this program can run effectively (a full description is available in the Jamkrindo PKBL Implementation Report 2020).

[6.c.3a, 103-3, 203-1]

During the reporting year, Jamkrindo implemented the following partnership programs:



No.	Uraian Description	2020		2019	
		Mitra Binaan Fostered Partners	Jumlah/Total Rp/IDR	Mitra Binaan Fostered Partners	Jumlah/Total Rp/IDR
4.	Sektor Pertanian <i>Agricultural Sector</i>	21	395.000.000	23	1.115.000.000
6.	Sektor Perikanan <i>Fisheries Sector</i>	11	330.000.000	-	-
7.	Sektor Industri <i>Industrial Sector</i>	3	60.000.000	47	1.932.500.000
	Jumlah <i>Total</i>	152	4.372.000.000	121	5.131.500.000

Adapun program bina lingkungan yang dilaksanakan di tahun 2020 mencakup pada 8 jenis bantuan. Berikut realisasi program bina lingkungan: **[6.c.3a, 103-3, 203-1, 203-2]**

*The environmental development program implemented in 2020 includes 8 types of assistance. The following is the realization of the community development program: **[6.c.3a, 103-3, 203-1, 203-2]***

Program Bina Lingkungan Jamkrindo

*Jamkrindo Community Development Program **[6.c.3a, 103-3, 203-1, 413-1]***

No.	Uraian Descriptions	2020 (Rp/IDR)	2019 (Rp/IDR)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
1.	Bantuan sosial masyarakat <i>Social Community Assistance</i>	4.000.358.220	2.973.553.093	34,53%
2.	Bantuan korban bencana alam dan non alam <i>Assistance for Victims of Natural and Non-Natural Disasters</i>	2.697.807.445	237.032.782	1038,16%
3.	Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan <i>Educational and/or Training Assistance</i>	2.029.064.103	1.001.117.503	102,68%
4.	Bantuan Sarana Ibadah <i>Worship Facilities Assistance</i>	1.477.647.000	517.951.600	185,29%
5.	Bantuan Korban Bencana Alam dan Non Alam Karena Wabah <i>Assistance for Victims of Natural and Non-Natural Disasters due to Epidemic</i>	815.610.623	-	-

No.	Uraian Descriptions	2020 (Rp/IDR)	2019 (Rp/IDR)	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease
6.	Bantuan pengembangan prasarana <i>Public Infrastructure Assistance</i>	584.710.000	233.414.000	150,50%
7.	Bantuan peningkatan kesehatan dan/atau sarana umum <i>Health Improvement /or Facilities Development Assistance</i>	166.680.000	201.539.566	-17,30%
8.	Bantuan pelestarian alam <i>Nature Preservation Assistance</i>	117.750.000	137.793.333	-14,55%
Jumlah/Total		11.889.627.391	5.302.401.877	124%

PRAKTIK PENGADAAN

Procurement Practices [103-1, 103-2, 103-3, 204-1]

Jamkrindo memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada seluruh pihak untuk menjadi mitra atau vendor perusahaan sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku di perusahaan. Hal ini juga didukung dengan sosialisasi tahapan pengadaan di situs perusahaan. Jamkrindo juga telah menerapkan proses *e-Procurement*. Adapun tahapan *e-Procurement* di Jamkrindo adalah sebagai berikut: 1) Pendaftaran; 2) Verifikasi; 3) Tender; dan 4) Evaluasi Vendor.

Jamkrindo menegaskan bahwa proses pendaftaran pengadaan ini tidak dipungut biaya. Jamkrindo juga berkomitmen untuk melaksanakan pengadaan secara bersih, transparan, dan akuntabel dengan berupaya taat pada kebijakan anti penyuapan yang disusun oleh perusahaan. Adapun dalam praktik pengadaannya, Jamkrindo bekerja sama dengan pemasok sebanyak 86 perusahaan dengan total nilai pengadaan sebesar Rp87.620.169.802,00. [103-3, 204-1]

Jamkrindo provides the widest possible opportunity for all parties to become partners or vendors of the company in accordance with the terms and conditions applicable in the company. This is also supported by the socialization of the procurement stages on the company website. Jamkrindo has also implemented an e-Procurement process. The stages of e-Procurement at Jamkrindo are as follows: 1) Registration; 2) Verification; 3) Tender; and 4) Vendor Evaluation.

Jamkrindo emphasized that the procurement registration process is free of charge. Jamkrindo is also committed to carrying out procurement in a clean, transparent and accountable manner by striving to comply with the anti-bribery policies formulated by the company. As for its procurement practices, Jamkrindo collaborates with 86 suppliers with a budget of IDR87,620,169,802.00. [103-3, 204-1]



Jumlah Pemasok Pada Pelaksanaan Pengadaan

Number of Suppliers in the Implementation of Procurement [2014-1]

No.	Pemasok Supplier	Nilai (Rp) Amount (IDR)
1	PT Satkomindo Mediyasa	2.453.220.000
2	PT Icon+	19.800.000
3	KAP HGK	1.470.200.000
4	PT Bhinneka Mentari Dimensi	2.977.957.047
5	PT Mitrasindo Jayatama	4.325.000.000
6	PT Datalink Mitra Abadi	874.136.450
7	PT Bintang Jamtama Sejahtera	9.073.838.367
8	Biro Administrasi Bhayangkara	19.783.400
9	PT Telkom Indonesia	10.935.640.100
10	PT Aplikanusa Lintasarta	3.069.135.300
11	PT Anugrah Karunia Perkasa Abadi	198.000.000
12	CV. Tata Permata Plantation	125.015.000
13	PT Datascrip	83.624.440
14	PT. Feel Buy Indonesia	58.115.000
15	Pilar Teknotama Sinergi	265.000.000
16	PT Medatama Persada Utama	33.660.000
17	KAP HMR	1.806.420.200
18	PT. Anuegrah Nirwana Bersama	857.224.000
19	PT Asuransi BRI Life	5.011.596.750
20	Mitra Karya Sejati	2.993.859.000
21	PT Duta Damai Indonesia	135.605.250
22	PT Abdi Jasa Tama	966.000.000
23	PT. Binaman Utama	387.200.000
24	PT Gibran Kreasi Pratama	506.412.600
25	PT. Kreatif Karya Solusi	700.500.000
26	Kowajasa	975.000
27	Indonesian Cloud	12.650.000
28	PT. Calmic Indonesia	12.870.000

No.	Pemasok Supplier	Nilai (Rp) Amount (IDR)
29	IdWebhost	1.879.640
30	PT Rentokil	87.120.000
31	Jaya Print	846.400
32	PT Praptasentosa Gunajasa	37.400.000
33	Suyanto and partner	660.000.000
34	PT Mardika Griya Prasta	558.181.000
35	PT Atoz Mega Indonesia	33.319.050
36	PT Cahaya Dinamika Jaya	153.505.000
37	PT Cevral Consulting	87.000.000
38	PT Brikawa Berkah Indonesia	2.432.492.000
39	PT Nayottama Dinamika Indonesia	425.000.000
40	PT Risk Management Guard	388.393.500
41	PT Asta Protek Jiarsi	971.300.000
42	PT Roundsquare Digital Pariwara	65.000.000
43	PT SAI Global	43.450.000
44	PT Gibran Kreasi Firdaus	43.380.600
45	PT Elit	2.000.000
46	PT Virkea Empresa Sistema	258.500.000
47	PT Vinotindo Grahasarana	13.617.450
48	PT Prima Pesona	747.208.186
49	PT Ivena Gloria Ardana	493.250.000
50	PT HRC Prima Sejahtera	12.398.760.000
51	CV. Mahameru Citratama	489.500.000
52	PT Anugrah Solusi Mandiri	84.700.000
53	PT IMQ Multimedia Utama	249.700.000
54	CV Unggul Mitra Mandiri	19.900.000
55	PT Indo Solusi Lestari	209.000.000
56	PT Accel Mitra Solusi	84.700.000
57	PT Amico Multimedia Nusantara	426.800.000
58	PT Adara Fortuna Indonesia	57.096.500



No.	Pemasok Supplier	Nilai (Rp) Amount (IDR)
59	PT Balai Pustaka (Persero)	1.179.200.000
60	PT Telkomsel	92.400.000
61	PT Bina Persada Kinerja	940.000.000
62	Zoom Video Communications Inc.	2.231.572
63	PT Duta Distribusi Servisindo	31.394.000
64	PT Alika Komunikasi Indonesia	403.000.000
65	Perum Peruri	105.620.000
66	PT. Masa Depan Siber Indonesia	225.000.000
67	Sucofindo	90.200.000
68	PT Indonesian Cloud	25.300.000
69	PT Mitra Integrasi Informatika	1.732.280.000
70	PT Inti Marketing Komunika	210.210.000
71	Kantor Konsultan Aktuaria Muh Imam Basuki dan Rekan	242.000.000
72	Surveyor Indonesia	25.850.000
73	LM FEB UI	1.091.475.000
74	PT Lemti UI	135.300.000
75	PT BSI Group Indonesia	18.975.000
76	PT Padma Radya Aktuaria	544.500.000
77	PT Argas Dilaga	156.981.000
78	PT Berca Hardayaperkasa	979.000.000
79	PT Gaya Putra Abadi	1.680.000.000
80	PT Nawa Darsana Teknologi	1.980.000.000
81	BRI Micro Finance Center	474.000.000
82	Perum PNRI	678.216.000
83	PT Pefindo	140.000.000
84	PT Megah Perkasa Teknologi	2.860.000.000
85	Jusuf Inradewa & Partners	80.000.000
86	PT Transforma Rekayasa dan Solusi	600.600.000

ANTI KORUPSI

Anti-Corruption [102-11, 103-1, 103-2, 103-3, 205]



Jamkrindo berkomitmen penuh dalam memberantas praktik korupsi yang dampaknya menjangkau sendi-sendi kehidupan. Maka dari itu, perusahaan berupaya untuk melakukan pencegahan korupsi dengan menetapkan kebijakan antikorupsi. Kebijakan ini dibuat agar semua pihak di perusahaan patuh terhadap kebijakan antikorupsi dan undang-undang antikorupsi terkait. Dalam pelaksanaan operasional perusahaan, isu-isu antikorupsi juga semakin digaungkan dengan adanya penetapan kebijakan anti penyuapan dan *whistleblowing system*. Kebijakan ini mendorong agar pemangku kepentingan berpartisipasi aktif dalam mencegah korupsi.

Komitmen Perusahaan ini didukung diantaranya dengan penetapan sejumlah pedoman dan kebijakan dalam rangka pencegahan praktika korupsi berikut penetapan peraturan pendukung, diantaranya pedoman dan kebijakan Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP), melaksanakan Serifikasi SMAP berdasarkan SNI 37001 : 2016 *Anti Bribery System* yaitu pada tahun 2020, Peraturan Direksi tentang *Due Diligence*, Penundaan Transaksi Bisnis, Anti Fraud dan *Whistleblowing System*. Sejumlah inisiatif strategis juga direalisasikan dengan Langkah aksi diantaranya : pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) di Perusahaan, pemberlakuan *Whistleblowing System* di Perusahaan dan melaksanakan Serifikasi SMAP berdasarkan SNI 37001 : 2016 *Anti Bribery System* pada tahun 2020. [103-1, 103-2]

Jamkrindo is fully committed to eradicating corrupt practices whose impact reaches every aspect of life. Therefore, the company seeks to prevent corruption by establishing an anti-corruption policy. This policy is made so that all parties in the company comply with anti-corruption policies and related anti-corruption laws. In implementing the company's operations, anti-corruption issues are also increasingly echoed by the establishment of anti-bribery policies and a whistleblowing system. This policy encourages stakeholders to actively participate in preventing corruption.

The Company's commitment is supported by, among others, the establishment of several guidelines and regulations to prevent corruption practices followed by establishment of supporting regulations, such as the guideline and regulation of Anti-Bribery Management System (SMAP), performing SMAP Certification based on SNI 37001:2016 Anti Bribery System in 2020, Director Regulation regarding Due Diligence, Business Transaction Postponement, Anti Fraud, and Whistleblowing System. Several strategic initiatives has also been realized with action steps including: the formation of Gratification Control Unit (UPG) in the Company, the implementation of Whistleblowing System in the Company and the conduct of SMAP Certification based on SNI 37001:2016 Anti Bribery System in 2020.

[103-1, 103-2]



Kebijakan, inisiatif strategis berikut Langkah aksi disusun dan dilaksanakan dalam rangka mendukung terwujudnya Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) dalam penyelenggaraan kegiatan usaha penjaminan. Peraturan dan kebijakan ditetapkan sebagai pedoman internal Perusahaan agar seluruh insan di Perusahaan patuh terhadap regulasi anti korupsi, gratifikasi, anti penyuapan yang telah ditetapkan Pemerintah dan menjadi komitmen bersama seluruh stake holder Perusahaan. Diharapkan kepatuhan terhadap ketentuan regulasi dan pedoman internal bukan hanya menjadi Budaya Perusahaan, dalam praktika penyelenggaraan usaha juga menjadi standar perilaku seluruh insan Perusahaan. **[103-1, 103-2]**

Mandatory atas penetapan kebijakan Perusahaan dan dukungan Perusahaan untuk mendukung lingkungan usaha yang bersih, Perusahaan juga mendorong dan mengajak mitra strategis untuk menyepakati adanya klausul pasal tambahan tentang gratifikasi, anti penyuapan, anti korupsi dan anti pencucian uang sebagai bagian kesepakatan Para Pihak dalam penyusunan dan pembaharuan Kerja Sama Penjaminan maupun dalam Perjanjian Kontrak dengan mitra penyedia barang dan jasa ke Perusahaan. Kebijakan dan langkah aksi ini diterapkan dalam rangka mendorong seluruh *stake holder* Perusahaan berpartisipasi aktif dalam mencegah korupsi, gratifikasi dan anti penyuapan. Guna memberi pengetahuan tambahan dan peningkatan kompetensi *Human Capital* Perusahaan, kepada insan Perusahaan juga terbuka kesempatan yang luas untuk mengikuti pelatihan dan program pengembangan *Human Capital*. Komitmen ini semakin didukung dengan pelaksanaan pelatihan *Awareness Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)* kepada insan perusahaan yang diselenggarakan pada tanggal 21 April 2021 sampai dengan 23 April 2021 dengan jumlah peserta pelatihan sebanyak 80 Peserta.

Dapat disampaikan bahwa selama tahun 2020, tidak terdapat laporan kasus korupsi di perusahaan. Hal ini berarti insan perusahaan telah patuh terhadap komitmen dan kebijakan perusahaan tentang anti penyuapan, gratifikasi dan tindak pidana korupsi yang telah ditetapkan oleh perusahaan. . **[103-3, 205-3]**

*The regulations, strategic initiatives and action steps are conceived and implemented in order to support the realization of Good Corporate Governance in the practice of guarantee business activities. The rules and regulations are set as the Company's internal guidelines so that every individual in the Company abide to the anti-corruption, gratification, and anti-bribery regulations established by the Government and becomes a shared commitment among all of the Company's stakeholders. It is expected that the obedience to the regulation and internal guidelines does not end as the Company's Culture, but also becomes a behavioral standard in the business management practices for all individual in the company. **[103-1, 103-2]***

A mandatory establishment of Company policies and Company support to reinforce a clean business environment, the Company also pushes and urges strategic partners to agree on additional clauses regarding gratification, anti-bribery, anti-corruption, and anti-money laundering as part of the agreement of the parties in the creation and renewal of Guarantee Cooperation or Contract Agreement with goods and services provider partners to the Company. These regulations and action steps are implemented in order to push the active participation of all Company stake holders in preventing corruption, gratification, and anti-bribery. To provide further knowledge and competency of the Company's Human Capital, a wide opportunity is open for every individual to attend in trainings and programs aimed at Human Capital development. This commitment is further supported by the SMAP Awareness training for the Company employees which was held on April 21 2021 until April 23 2021 with a total number of trainees reaching 80 participants.

*It can be said that during 2020, there were no reports of corruption cases in the company. This means that the company's personnel have complied with the company's commitments and policies regarding anti-bribery, gratification and criminal acts of corruption that have been set by the company. **[103-3, 205-3]***

PERSAINGAN SEHAT

Fair Competition [103-1, 103-2, 103-3, 206]



Persaingan bisnis kini semakin ketat, sehingga perlu strategi-strategi perusahaan dengan nilai bersaing sehat sesuai peraturan yang berlaku. Jamkrindo yang pada tahun 2020 telah berbentuk Perseroan tunduk pada Undang-Undang No.5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Jamkrindo terus berkomitmen untuk menjunjung tinggi etika bisnis dengan berfokus pada upaya menciptakan produk yang berkualitas dan layanan yang profesional. Oleh karena itu, praktik kolusi dengan kompetitor dengan tujuan mengurangi efek kompetisi pasar tidak dapat ditoleransi oleh perusahaan. [103-1, 103-2, 6.c.1]

Terkait pengawasan atas pelaksanaan UU No.5 Tahun 1999 dibentuk lembaga negara independen yang disebut Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU). KPPU bertugas untuk mengawasi dan menegakkan hukum larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, KPPU berhak menetapkan sanksi atas perusahaan yang melakukan pelanggaran. Di tahun 2020, Jamkrindo tidak mendapatkan sanksi dari KPPU. Hal ini berarti bahwa Jamkrindo tidak terlibat dalam praktik monopoli dan telah menerapkan prinsip bersaing sehat dalam operasional perusahaannya. [206-1]

Business competition is now getting tougher, so that company strategies with a value of fair competition are needed according to applicable regulations. Jamkrindo, which in 2020 has change its legal entity to the form of a Limited Liability Company, is subject to Law No.5 of 1999 on the Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. Jamkrindo continues to be committed to upholding business ethics by focusing on creating quality products and professional services. Therefore, the practice of collusion with competitors with the aim of reducing the effects of market competition cannot be tolerated by companies. [103-1, 103-2, 6.c.1]

Regarding the supervision of the implementation of Law No.5 of 1999, an independent state institution called the Business Competition Supervision Commission (Komisi Pengawasan Persaingan Usaha or KPPU) was formed. KPPU has the duty to supervise and enforce the law on the prohibition of monopolistic practices and/or unfair business competition. Furthermore, KPPU has the right to impose sanctions on companies that commit violations. In 2020, Jamkrindo will not be sanctioned by KPPU. This means that Jamkrindo is not involved in monopolistic practices and has implemented the principle of fair competition in its company operations. [206-1]



KINERJA LINGKUNGAN

Environmental Performance

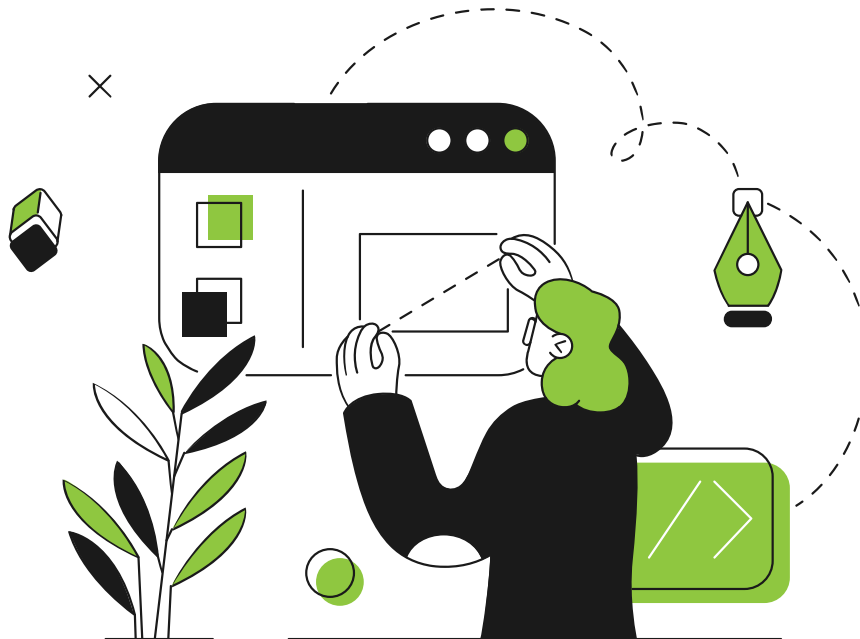




KEBIJAKAN DAN PENDEKATAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI JAMKRINDO

Environmental Management Policies and Approaches at Jamkrindo

[103-1, 103-2, 103-3, 6.d.2]



Isu lingkungan kini menjadi isu global yang menuntut perusahaan turut andil dalam mengurangi dampak buruk dari kerusakan lingkungan yang terjadi. Kesadaran atas kelestarian lingkungan ini perlu dimiliki oleh setiap individu. *Campaign Go Green* yang kini semakin dikenal masyarakat menjadi sebuah motivasi dalam menjaga lingkungan yang dimulai dari individu. Perusahaan pun kini semakin dituntut untuk memiliki kesadaran lingkungan dengan berbagai upaya pelestarian lingkungannya. Hal ini dikarenakan semakin banyaknya bencana alam yang terjadi, beberapa penyebabnya diakibatkan oleh aktivitas alam seperti perubahan iklim dan aktivitas manusia itu sendiri. Perubahan iklim mengakibatkan musim kemarau berkepanjangan dan musim hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan berbagai bencana alam, seperti banjir, pohon tumbang, dan tanah longsor.

[103-1, 103-2]

Jamkrindo merupakan perusahaan yang telah berorientasi terhadap isu keberlanjutan, kini turut berperan dan berkontribusi dalam pelestarian lingkungan. Upaya ini konsisten dilakukan sejak tahun 2019 dimulai dengan melakukan hal-hal kecil dan sederhana, seperti:

- Mengolah limbah
- Menghemat penggunaan kertas

The environmental issue has now become a global issue which demands companies to take part in reducing the negative impacts of environmental damage that has occurred. Every individual needs to take ownership of this environmental sustainability awareness. The Go Green campaign, which is now increasingly recognized by the public, is a motivation in protecting the environment, starting with individuals. Companies are now increasingly required to have environmental awareness in the form of various environmental preservation efforts. This is due to the increasing number of natural disasters that occur, some caused by natural activities such as climate change, and some caused by human activities themselves. Climate change has resulted in a prolonged dry season and a high intensity rainy season causing various natural disasters, such as floods, fallen trees, and landslides.

[103-1, 103-2]

Jamkrindo, a company that has been oriented towards sustainability issues, now plays a role and contributes to environmental preservation. This effort has been consistently carried out since 2019, starting by doing small and simple things, such as:

- Waste management
- Save paper usage

- c. Memilah limbah sampah sesuai jenisnya (organik dan anorganik)
- d. Menghemat penggunaan listrik, air, dan bahan bakar minyak (BBM)
- e. Menanam dan merawat pohon di sekitar lingkungan perusahaan
[103-1, 103-2]

Komitmen ini terus dilaksanakan secara konsisten dan semakin pro-lingkungan. Hal ini terbukti dengan adanya kegiatan Jamkrindo *Go Green Lifestyle* sejak tahun 2019 yang berdasar pada memorandum divisi MSDM No.B.171/INT/SDM/OPS/II/2020 terkait Program Jamkrindo *Go Green Lifestyle*. Adapun jenis kegiatan ini adalah:

1. Mengurangi penggunaan air dalam kemasan plastik
2. Meniadakan penyediaan air minum kemasan plastik dan hanya menyediakan air minum isi ulang
3. Memberikan fasilitas berupa *tumbler* sebagai wadah air minum di kantor bagi karyawan. **[103-1, 103-2]**

Kegiatan *Go Green* yang telah dilaksanakan sejak tahun 2019 memberikan nilai finansial yang menguntungkan. Hal ini dikarenakan adanya efisiensi penggunaan listrik, air, BBM, dan peralatan kantor yang berdampak pada penurunan biaya operasional. Efisiensi ini telah dilakukan dalam pengelolaan gedung. Selain itu, Jamkrindo juga mengoptimalkan teknologi informasi sehingga dapat meminimalisasi penggunaan kertas.
[103-2]

- c. *Sorting waste according to its type (organic and inorganic)*
- d. *Save the use of electricity, water and fuel oil (bahan bakar minyak or BBM)*
- e. *Planting and caring for trees in the environment around the company.* **[103-1, 103-2]**

This commitment continues to be implemented consistently and is increasingly pro-environment. This is evidenced by the Jamkrindo Go Green Lifestyle activities since 2019 which are based on the HR Division Memorandum No.B.171/INT/SDM/OPS/II/2020 on the Jamkrindo Go Green Lifestyle Program. The types of activities are:

1. *Reducing the use of water in plastic packaging*
2. *Eliminate the supply of plastic bottled drinking water and only provide refillable drinking water*
3. *Providing facilities in the form of tumblers as a container for drinking water in the office for employees.* **[103-1, 103-2]**

Go Green activities that have been carried out since 2019 provide profitable financial value. This is due to the efficient use of electricity, water, fuel and office equipment which has an impact on reducing operational costs. This efficiency has been carried out in building management. In addition, Jamkrindo also optimizes information technology so that it can minimize paper usage.
[103-2]



PENGGUNAAN KERTAS

The Usage of Paper [103-1, 103-2, 103-3, 301, 6.c.3c]

Dalam penggunaan kertas, Jamkrindo memiliki kebijakan penghematan dengan cara lebih banyak menggunakan surat elektronik atau email dalam menyampaikan informasi. Penghematan kertas juga dilakukan melalui pemanfaatan kertas bekas untuk konsep surat, atau jika memungkinkan mencetak naskah dalam kertas bolak-balik.

Beberapa aktivitas perusahaan yang melakukan efisiensi dalam penggunaan kertas, seperti:

1. Penggunaan teknologi informasi (*e-mail*) dalam menyampaikan informasi
2. Pemanfaatan kertas bekas untuk konsep surat
3. Mencetak naskah draft dalam kertas bolak-balik
4. Naskah melakukan pengecekan secara optimal sebelum dicetak

Pengecekan naskah secara paripurna sebelum dicetak agar terhindarkan dari kesalahan juga mendapat perhatian. Dengan demikian, pencetakan ulang yang memboroskan kertas bisa dihindarkan. Penghematan penggunaan kertas penting dilakukan karena Jamkrindo menyadari bahwa pembuatan kertas identik dengan penebangan dan pemanfaatan pohon sebagai bahan baku kertas. [103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 6.c.3c]

Pada tahun 2020, jumlah penggunaan kertas Jamkrindo mencapai 1185 rim, meningkat jika dibandingkan tahun 2019 yang membutuhkan kertas sebanyak 1150 rim. Penggunaan kertas tersebut meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah karyawan di tahun 2020. Dengan penggunaan sebanyak itu, rasio penggunaan kertas tahun 2020 adalah 3,96 rim per karyawan, turun dibanding rasio penggunaan kertas tahun 2019 yakni 4,26 rim per karyawan. Adapun limbah kertas diserahkan kepada pihak ketiga untuk didaur ulang. Dalam operasional sehari-hari, Perusahaan tidak menggunakan kertas hasil daur ulang tersebut. [103-3, 301-1]

Dalam usaha menjaga lingkungan, Jamkrindo menjalankan operasional perusahaan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reuse, Reduce, and Recycle*). Terkait pengolahan kembali limbah kertas, perusahaan menyerahkan proses daur ulang kepada pihak ketiga.

In the use of paper, Jamkrindo has a policy of saving by using more electronic mail or email in conveying information. Paper savings are also made through the use of used paper for letter drafts, or if possible printing manuscripts on paper back and forth.

Several company activities that increase paper usage efficiency, such as:

1. *Use of information technology (e-mail) in conveying information*
2. *Utilization of used paper for letter drafts*
3. *Print the draft text on paper back and forth*
4. *Manuscripts are checked optimally before printing*

Full checking of manuscripts before printing in order to avoid errors also received attention. Thus, reprinting that wastes paper can be avoided. It is important to save paper use because Jamkrindo realizes that paper making is synonymous with logging and using trees as paper raw materials. [103-1, 103-2, 103-3, 301-1, 6.c.3c]

In 2020, Jamkrindo's total paper usage reached 1185 reams, an increase compared to 2019 which required 1150 reams of paper. The use of paper increased in line with the increase in the number of employees in 2020. With such use, the paper usage ratio in 2020 was 3.96 reams per employee, down from the paper usage ratio in 2019 which was 4.26 reams per employee. The paper waste is handed over to third parties for recycling. In its daily operations, the Company does not use the recycled paper. [103-3, 301-1]

*In an effort to protect the environment, Jamkrindo runs the company's operations by applying the 3R (*Reuse, Reduce, and Recycle*) principles. Regarding the reprocessing of waste paper, the company submits the recycling process to third parties.*

Jumlah Penggunaan Kertas

Amount of Paper Use [301-1]

Tahun Year	Konsumsi A4 A4 consumption		Konsumsi F4 F4 consumption	
	Rim Reams	Berat Weight	Rim Reams	Berat Weight
2020	1150	2507	35	85,05
2019	1100	2398	50	121,5

Catatan:

1. Kertas A4

- Asumsi jenis kertas yang digunakan adalah kertas fotokopi ukuran A4, berat 70gsm (gram square meter)
- Ukuran kertas A4 = 21,0 x 29,7 cm
- Rumus perhitungan berat per rim (500 lembar) adalah $21,0 \times 29,7 \times 70 \times 500 / 10.000 = 2.183$ gram/rim atau 2,18 kg/rim

2. Kertas F4

- Asumsi jenis kertas yang digunakan adalah kertas fotokopi ukuran F4, berat 70gsm (gram square meter)
- Ukuran kertas F4 = 21 x 33 cm
- Rumus perhitungan berat per rim (500 lembar) adalah $21 \times 33 \times 70 \times 500 / 10.000 = 2.425,5$ gram/rim atau 2,43 kg/rim

Note

1. Paper A4

- Assuming the type of paper used is A4 size photocopy paper, weight 70gsm (gram square meter)
- A4 paper size = 21.0 x 29.7 cm
- The formula for calculating the weight per ream (500 sheets) is $21.0 \times 29.7 \times 70 \times 500 / 10,000 = 2.183$ grams/ream or 2.18 kg/ream

2. Paper F4

- Assuming that the type of paper used is copy paper size F4, weight 70gsm (gram square meter)
- F4 paper size = 21 x 33 cm
- The formula for calculating the weight per ream (500 sheets) is $21 \times 33 \times 70 \times 500 / 10,000 = 2,425.5$ grams/ream or 2.43 kg/ream

Jumlah Material Kertas dalam Kegiatan Operasional dan Usaha 2016-2020 (rim)

Amount of Paper Materials in Operations and Business Activities
2016-2020 (ream)





EFISIENSI ENERGI

Energy Efficiency [103-1, 103-2, 103-3, 302]

Perusahaan tidak hanya melakukan efisiensi dalam penggunaan kertas, melainkan dalam penggunaan listrik. Listrik merupakan energi tak terbarukan yang kesediannya semakin terbatas. Oleh karena itu, Jamkrindo telah menyadari dan berkomitmen penuh untuk melakukan efisiensi energi listrik. Adapun kebijakan yang diambil dalam upaya efisiensi penggunaan listrik adalah sebagai berikut:

1. Mengganti lampu dengan lampu LED
2. Melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi waktu lembur
3. Memperbanyak panel kaca ruangan
4. Alat elektronik sudah dipastikan dalam kondisi mati saat karyawan pulang.
5. Optimalisasi penggunaan AC dari AC Central ke AC Cassete/ Split sehingga dapat dikontrol sesuai dengan kebutuhan ruangan [103-2]

Perusahaan menggunakan listrik yang bersumber dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai sumber energi untuk kegiatan operasional. Untuk penggunaan energi listrik, Jamkrindo memiliki kebijakan penghematan, di antaranya, dengan mengganti lampu perkantoran dengan lampu hemat energi, serta melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi lembur. Perusahaan juga memastikan bahwa semua alat elektronik telah dimatikan saat karyawan usai bekerja dan keluar dari ruangan. Penghematan penggunaan listrik penting dilakukan karena Jamkrindo menyadari bahwa ketersediaan energi listrik di Indonesia masih terbatas. [103-1]

Total penggunaan energi listrik pada tahun 2020 tercatat sebesar 1604,95 kWh, menurun jika dibanding tahun 2019 dengan penggunaan sebesar 2608,38 kWh. Penurunan penggunaan listrik tersebut terjadi karena adanya perubahan sistem kerja karyawan pada kondisi pandemi COVID-19 yaitu menjadi *Work From Home* (WFH)/*Work form office* (WFO). Dengan penggunaan listrik sebesar itu, rasio per karyawan pada tahun 2020 tercatat sebesar 3,60 kWh, turun dibanding rasio tahun 2019, yakni 6,57 kWh per karyawan. [103-3, 201-1]

Selain listrik, menggunakan sumber daya alam tak terbarukan yang digunakan perusahaan adalah penggunaan bahan bakar minyak (BBM) dalam aktivitas operasional. Penggunaan BBM ini untuk keadaan operasional dan mengoperasikan genset. Sementara itu, dalam upaya menghemat penggunaan BBM, Jamkrindo menempuh kebijakan antara lain menyiapkan sistem, sarana dan prasarana untuk menekan biaya operasional yang berhubungan dengan konsumsi BBM. [6.d.3b]

Companies are not only making efficient use of paper, but in using electricity. Electricity is a non-renewable energy whose availability is increasingly limited. Therefore, Jamkrindo has fully realized and is fully committed to carrying out electrical efficiency. The policies taken in an effort to make efficient use of electricity are as follows:

1. *Replace the lamp with an LED lamp*
2. *Performing efficiency in working hours by reducing overtime*
3. *Increase the glass panels of the room*
4. *Electronic devices are confirmed to have been turned off when employees return home.*
5. *Optimization of AC usage from AC Central to AC Cassete/ Split so that it can be controlled according to room needs [103-2]*

The company uses electricity sourced from the State Electricity Company (PLN) as an energy source for operational activities. For the use of electrical energy, Jamkrindo has a saving policy, among others, by replacing office lamps with energy-saving lamps, as well as improving working hours by reducing overtime. The company also ensures that all electronic devices are turned off when employees have finished work and left the room. It is important to save electricity use because Jamkrindo realizes that the availability of electrical energy in Indonesia is still limited. [103-1]

*The total use of electrical energy in 2020 was recorded at 1604.95 kWh, a decrease when compared to 2019 with usage of 2608.38 kWh. The decline in electricity use occurred due to changes in the employee's work system during the COVID-19 pandemic, namely to *Work From Home* (WFH)/*Work form office* (WFO). With the use of electricity, the ratio per employee in 2020 was recorded at 3.60 kWh, down from the ratio in 2019, which was 6.57 kWh per employee. [103-3, 201-1]*

In addition to electricity, the use of non-renewable natural resources used by the company is the use of fuel oil (BBM) in operational activities. The use of this fuel is for operational conditions and operating generators. Meanwhile, in an effort to save fuel use, Jamkrindo has adopted policies including preparing systems, facilities and infrastructure to reduce operational costs related to fuel consumption. [6.d.3b]

Total penggunaan BBM pada tahun 2020 tercatat sebesar 91.925 liter untuk Bensin dan 1.764 liter untuk solar, menurun jika dibanding tahun 2019 dengan penggunaan sebesar 115.752 liter untuk bensin dan tetap untuk solar sebesar 1.764 liter. Penurunan penggunaan BBM tersebut juga disebabkan adanya perubahan sistem kerja karyawan pada kondisi pandemi COVID-19 yaitu menjadi *Work From Home (WFH)/Work form office (WFO)*. **[103-3, 201-1]**

Secara keseluruhan, penggunaan energi Jamkrindo pada tahun 2020 adalah sebesar 8.987 GJ, menurun sebesar 36,12% dibandingkan dengan tahun 2019. Penggunaan energi tersebut dapat menghasilkan pendapatan penjaminan Jamkrindo di tahun 2020 sebesar Rp2,63 triliun. Intensitas penggunaan energi Jamkrindo adalah sebesar 0,0034 GJ/Juta Rupiah. Hal ini menunjukkan adanya penurunan intensitas energi sebesar 50,74% dibanding tahun sebelumnya. Penurunan intensitas energi ini selain mencerminkan menurunnya kegiatan perusahaan akibat pandemi COVID-19, juga menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam upaya penghematan energi. **[6.d.3a, 6.d.3b]**

*The total use of fuel oil in 2020 was recorded at 91,925 liters for gasoline and 1,764 liters for diesel, a decrease when compared to 2019 with the use of 115,752 liters for gasoline and fixed for diesel at 1,764 liters. The decrease in fuel use was also due to changes in the employee's work system during the COVID-19 pandemic, namely to *Work From Home (WFH)/Work form office (WFO)*. **[103-3, 201-1]***

*Overall, Jamkrindo's energy use in 2020 was 8,987 GJ, a decrease of % compared to 2019. This energy use could generate Jamkrindo's 2020 guarantee income of IDR2.63 trillion. The intensity of Jamkrindo's energy use is 0.0034 GJ/ Million Rupiah. This indicates a decrease in energy intensity by 50.74% compared to the previous year. This decrease in energy intensity not only reflects the decline in company activities due to the COVID-19 pandemic, but also shows the company's success in energy saving efforts. **[6.d.3a, 6.d.3b]***



Penggunaan Listrik

Electricity Usage [302-1, 302-3, 302-4]

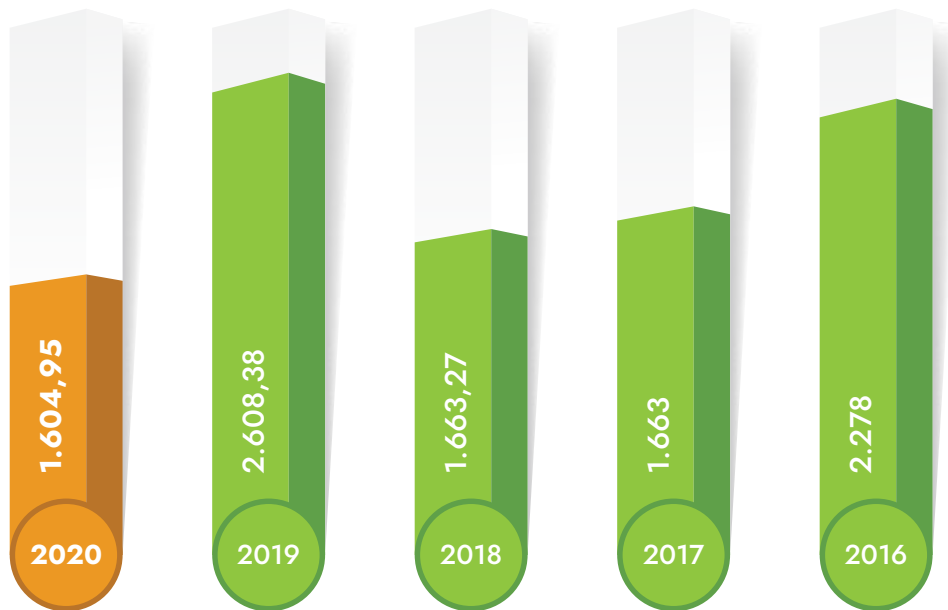
Penggunaan Energy Listrik Use Electrical Energy	2020	2019	2018
Volume (kWh) Volume (kWh)	1604,95	2608,38	1663,27
Volume (Gigajoule) Volume (Gigajoule)	5777	9390	5987
Rasio konsumsi energi listrik (kWh/pengguna Gedung*) Electric energy consumption ratio (kWh/Building users*)	3,60 Kwh/Karyawan 3,60 Kwh/Employee	5,49 Kwh/Karyawan 5,49 Kwh/Employee	1,89 Kwh/Karyawan 1,89 Kwh/Employee

Catatan/Note:

pengguna gedung terdiri dari karyawan, manajemen building, dan pengguna gedung lainnya
building users consist of employees, building management, and other building users

Penggunaan Volume Energi Listrik dalam Kegiatan Operasional dan Usaha 2016-2020 (kWh)

Use of Electrical Energy Volume in Operations and Business Activities
2016-2020 (kWh) [302-2]



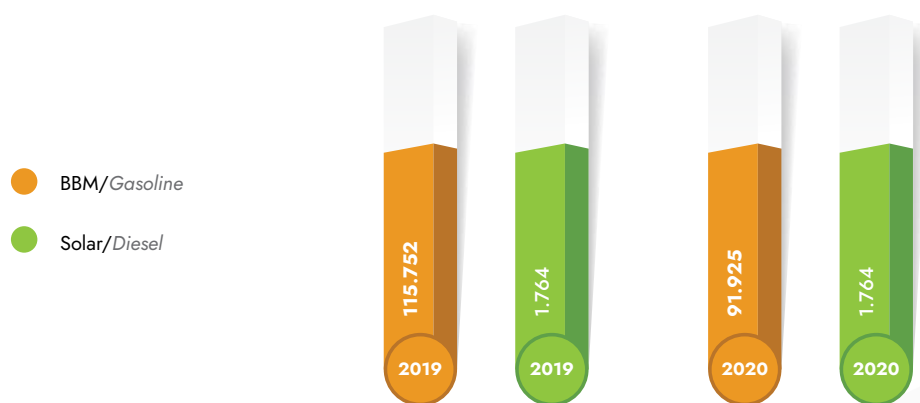
Penggunaan BBM

Fuel Usage [302-1, 302-3, 302-4]

Bahan Bakar Fuel	Konsumsi BBM Tahun 2020 2020 Fuel Consumption		Konsumsi BBM Tahun 2019 2019 Fuel Consumption	
	Liter	Gigajoule	Liter	Gigajoule
BBM Gasoline	91.925	3.143	115.752	3.819
Solar Diesel	1.764	67,03	1.764	67,03

Penggunaan BBM dan Solar dalam Kegiatan Operasional dan Usaha

Use of Fuel and Solar in Operations and Business Activities Use of Fuel and Solar in Operations and Business Activities



Intensitas Energi

Energy Intensity [302-1, 302-3, 302-4]

Energi Energy	Satuan Unit	2020	2019	2018
Konsumsi Energi Listrik Electricity Energy Consumption	GJ	5.777	9.390	5987
Konsumsi Energi BBM Fuel Energy Consumption	GJ	3.143	4.612	4720
Konsumsi Energi Solar Diesel Energy Consumption	GJ	67,03	67,03	64,79
Total Konsumsi Energi Total Energy Consumption	GJ	8.987	14.069	10.772
Pendapatan Penjaminan Guarantee Revenue	Juta Rupiah Million Rupiah	2.633.393	2.152.072	1.248.710
Intensitas Energi Energy Intensity	GJ/Juta Rupiah GJ/Million Rupiah	0,0034	0,0065	0,0086

Catatan/Note:

Konversi kWh ke Gigajoule: 1kWh = 0,0036 GJ
 Conversion kWh to Gigajoule: 1kWh = 0,0036 GJ.



PENGURANGAN EMISI

Emission Reduction [103-1, 103-2, 103-3, 305, 6.e.4.a, 6.e.4.b]

Kegiatan operasional Jamkrindo ikut berkontribusi melepaskan Gas Rumah Kaca (GRK) ke udara, antara lain dari emisi gas buang kendaraan operasional, genset, dan listrik yang digunakan. Dalam memonitor dan mengurangi emisi gas buang, Perusahaan melakukan kegiatan seperti uji emisi untuk kendaraan operasional secara berkala, melakukan servis kendaraan operasional secara berkala agar mesinnya tetap bekerja dengan pembakaran sempurna, melakukan penghematan bahan bakar untuk kendaraan operasional, dan penggunaan listrik yang berdampak pada emisi cakupan 2 yang dihasilkan. [103-1, 6.e.4.b]

Jamkrindo's operational activities contribute to releasing Greenhouse Gases (GHG) into the air, including from exhaust emissions from operational vehicles, generators, and electricity used. In monitoring and reducing exhaust emissions, the Company carries out activities such as periodic emission tests for operational vehicles, periodic servicing of operational vehicles so that the engine continues to work with complete combustion, saving fuel for operational vehicles, and using electricity which impacts on emission coverage 2 is generated. [103-1, 6.e.4.b]

Dalam pengendalian emisi, perlu diketahui terlebih dahulu terkait jenis emisinya. Emisi dapat dikategorikan menjadi emisi langsung (cakupan 1) dan emisi tidak langsung (cakupan 2). Emisi langsung adalah emisi yang keluar langsung dari aktifitas atau sumber dalam ruang batas yang ditetapkan. Contohnya adalah emisi CO₂ dari kendaraan bermotor. Sedangkan, emisi tidak langsung merupakan hasil dari aktifitas di dalam ruang batas yang ditetapkan. Contohnya adalah konsumsi energi listrik di rumah tangga. [103-2]

In controlling emissions, it is necessary to know in advance the types of emissions omitted. Emissions can be categorized into direct emissions (coverage 1) and indirect emissions (coverage 2). Direct emissions are emissions that come directly from activities or sources within a defined boundary space. An example is CO₂ emissions from motorized vehicles. Meanwhile, indirect emissions are the result of activities within the defined boundary space. An example is the consumption of electrical energy in households.

[103-2]

Emisi Langsung

Direct Emissions

Emisi GRK paling utama di perusahaan bersumber dari pembakaran bahan bakar yang dikelompokkan ke dalam 2 (dua) kategori, yaitu kendaraan operasional dan genset. Hasil pembakaran ini menghasilkan karbon dioksida (CO₂), Metana (CH₄), dan N₂O.

The main GHG emission in the company comes from fuel combustion which is grouped into 2 (two) categories, namely operational vehicles and generator operations. The results of this combustion produce carbon dioxide (CO₂), methane (CH₄), and N₂O.

Emisi ini dihitung dengan menggunakan metode paling sederhana, yaitu perkalian total konsumsi bahan bakar (dalam GJ) dengan faktor emisi (FE). FE adalah koefisien yang menunjukkan banyaknya emisi per unit bahan bakar dikonsumsi dalam satuan Ton/GJ. Faktor emisi yang digunakan adalah faktor emisi default (IPCC 2006 GL). Berikut ini adalah tabel FE dari BBM bensin (sumber bergerak) untuk perhitungan emisi GRK Perusahaan dan solar (sumber tak bergerak). [103-1, 103-2]

These emissions are calculated using the simplest method, namely multiplying the total fuel consumption (in GJ) by the emission factor (faktor emisi or FE). FE is a coefficient that shows the number of emissions per unit of fuel consumed in tonnes/GJ. The emission factor used is the default emission factor (IPCC 2006 GL). The following is the FE table of gasoline fuel (mobile source) for the calculation of the Company's GHG emissions and diesel (immovable source). [103-1, 103-2]

Tingkat Konversi Emisi Langsung (Cakupan 1)

Conversion rate of Direct Emission (Scope 1) [305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 6.e.4a]

Bahan Bakar Fuel	FE Default IPC 2006 Sumber Tak Bergerak FE Default IPC 2006 Fixed Source			FE Default IPCC 2006 Sumber Bergerak FE Default IPCC 2006 Mobile Source		
	CO ₂	CH ₄	N ₂ O	CO ₂	CH ₄	N ₂ O
Bensin Gasoline	-	-	-	69,300	33	3,2
Solar Diesel Fuel	74,100	3	0,6	-	-	-

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2020 dapat dihitung bahwa emisi GRK Langsung (cakupan 1) adalah seperti yang dideskripsikan pada tabel berikut:

Based on the table above, in 2020, it can be seen that direct GHG emissions (coverage 1) from company activities is as described in the following table:

Emisi Langsung (Cakupan 1)

Direct Emission (Scope 1) [305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 6.e.4a]

Bahan Bakar Fuel	Konsumsi BBM 2020 2020 Fuel Consumption	Emisi GRK GHG Emissions			Jumlah (Ton/tahun) Total (tonnes/year)
		CO2	CH4	N2O	
Bensin Gasoline	3.143	217.809.900	103.719	10.058	217.923.677
Solar Diesel Fuel	67,03	4.966.923	201	40	4.967.164
Jumlah Total	3.210,03	222.776.823	103.920	10.098	222.890.841

Catatan:

- Bensin termasuk Pertamina Dan Premium
- Pedoman Penyelenggaraan Inventarisasi Gas Rumah Kaca Nasional – Buku II – Volume 1 Metodologi Penghitungan Tingkat Emisi Gas Rumah Kaca Kegiatan Pengadaan Dan Penggunaan Energi – Kementerian Lingkungan Hidup 2012

Note:

- Gasoline including Pertamina and Premium
- Guidelines for the Implementation of National Greenhouse Gas Inventory - Book II - Volume 1 Methodology for Calculating Greenhouse Gas Emission Levels for Energy Procurement and Use Activities - Ministry of Environment 2012

Emisi Tidak Langsung

Selanjutnya emisi gas rumah kaca tidak langsung (cakupan 2) yang bersumber dari penggunaan energi listrik. Metode perhitungan emisi tidak langsung ini mengacu pada Surat Menteri ESDM No.3783/21/600.5/2008 dengan faktor pengali konversi 0,891 kg/kWh. Selama tahun 2020, jumlah emisi tidak langsung mencapai 1,43 ton. Perbandingan jumlah emisi tidak langsung 3 (tiga) tahun terakhir ditunjukkan pada tabel di bawah ini:

[103-1, 103-2]

Indirect Emissions

Indirect greenhouse gas emissions (coverage 2) originate from the use of electrical energy. This indirect emission calculation method refers to the Letter of the Minister of Energy and Mineral Resources No.3783/21/600.5/2008 with a conversion multiplier factor of 0.891 kg/kWh. During 2020, the total indirect emissions reached 1,4 tonnes. The comparison of the total indirect emissions for the last 3 (three) years is shown in the table below:

[103-1, 103-2]

Konsumsi Listrik dan Jumlah Emisi

Electricity Consumption and Emission Amount [305-1, 305-2, 305-4, 305-5, 6.e.4a]

Tahun Year	Konsumsi Listrik Electricity Consumption	Jumlah Emisi Emission Amount
2020	1604,95	1,43
2019	2608,38	2,32
2018	1663,27	1,48



AIR DAN LIMBAH AIR

Water and Effluents [103-1, 103-2, 103-3, 303]

Perusahaan juga menggunakan sumber daya alam lainnya, seperti air. Sumber air yang digunakan Jamkrindo berasal dari PDAM. Air digunakan untuk keperluan kamar kecil, masjid, penyiraman tanaman, dan lain-lain. Jamkrindo menyadari bahwa sumber air ini kian terbatas dan membutuhkan biaya besar dalam mengolah air baku menjadi air PDAM, maka Jamkrindo menerapkan kebijakan efisiensi penggunaan air. [103-1, 103-2]

The company also uses other natural resources, such as water. The water source used by Jamkrindo comes from the PDAM. Water is used for toilet, mosque, plant watering, and others. Jamkrindo realizes that this water source is increasingly limited and requires large costs in processing raw water into PDAM water, so Jamkrindo implements an efficient water use policy.

[103-1, 103-2]

Pada tahun 2020, volume penggunaan air tercatat sebesar 10.448,20 meter kubik, turun dibanding tahun 2019 dengan penggunaan sebesar 14.059,70 meter kubik. Penurunan penggunaan air tersebut terjadi karena adanya perubahan sistem kerja karyawan di kondisi pandemi COVID-19 yaitu menjadi *Work From Home (WFH)/Work Form Office (WFO)*.

In 2020, the volume of water use was recorded at 10,448.20 cubic meters, down from 2019 with usage of 14,059.70 cubic meters. Decrease the use of water occurs due to changes in the system employee work in conditions of the COVID-19 pandemic, namely being Work From Home (WFH) / Work Form Office (WFO).

[103-3, 303-1]

[103-3, 303-1]

Upaya Jamkrindo untuk menghemat penggunaan air adalah melakukan efisiensi jam kerja dengan mengurangi lembur, serta secara rutin melakukan pengecekan instalasi air dan melakukan perbaikan apabila ditemukan kerusakan yang menyebabkan kebocoran. Adapun rasio penggunaan air per karyawan pada tahun 2020 adalah 23,42 meter kubik per karyawan, turun dibanding rasio tahun 2019, yang tercatat sebesar 29,60 meter kubik per karyawan. [103-3, 303-1]

Jamkrindo efforts to save water use are improve working hours efficiency by reducing overtime, and routinely check water installations and carry out repair if found damage that causes leakage. The ratio of water use per employee at in 2020 is 23.42 cubic meters per employee, down compared to the ratio in 2019, which was recorded at 29.60 meters cubic per employee.

[103-3, 303-1]

Jumlah penggunaan air PDAM akan dirinci pada tabel di bawah ini.

The amount of PDAM water usage will be detailed in the table below.

Konsumsi Air

Water Consumption [303-2, 303-3, 303-4]

Konsumsi Air Water Consumption	2020	2019	Kenaikan/Penurunan Increase/Decrease	
			Jumlah/Total	Persentase/ Percentage(%)
Volume (m3) Volume (m3)	10.448,20	14.059,70	(3611,50)	(25,68%)
Rasio penggunaan air per karyawan (m3/karyawan) Water usage ratio per employee (m3/employee)	23,42 m3/karyawan 23,42 m3/employee	29,60 m3/karyawan 29,60 m3/employee	6,18 m3/karyawan 6,18 m3/employee	(20,87%)

Penggunaan Volume Air dalam Kegiatan Operasional dan Usaha 2016-2020(m3)

Use of Water Volume in Operations and Business Activities
2016-2020(m3)



Berdasarkan tabel di atas, volume penggunaan air tercatat sebesar 10.448,20 m3. Terdapat penurunan dibandingkan tahun 2019. Penurunan ini terjadi dikarenakan adanya pembatasan system kerja *work in office* dan *work from home*. Hal ini berdampak pada rasio penggunaan air per karyawan pada tahun 2020 senilai 3.611,50. **[103-3, 303-1]**

*Based on the table above, the volume of water use is recorded at 10,448.20 m3. This decrease occurred due to restrictions on work in office and work from home systems. This has an impact on the water use ratio per employee in 2020 of 3,611.50. **[103-3, 303-1]***

Dalam penggunaan air yang dipasok dari PDAM, perusahaan secara konsisten memeriksa kondisi jaringan pipa dan keran air. Tidak ada sumber air di sekitar kantor Jamkrindo yang terpengaruh akibat pengambilan air tersebut. **[103-2, 103-3, 303-2]**

*In the use of water supplied by the PDAM, the company consistently checks the condition of the pipeline and water taps. No water sources around the Jamkrindo office were affected by the water withdrawal. **[103-2, 103-3, 303-2]***

Jamkrindo telah berkomitmen ingin menggunakan air secara bijaksana, maka dari itu kebijakan efisiensi penggunaan air diterapkan. Salah satu langkahnya adalah keran distribusi air akan ditutup setelah jam kerja.

Jamkrindo has committed to use water wisely, therefore the water use efficiency policy is implemented. One of the steps is that the water distribution taps will be closed after working hours.

Jamkrindo tidak menghasilkan limbah cair dalam proses bisnisnya. Tidak terdapat limbah cair yang dapat mengganggu lingkungan sekitar Jamkrindo beroperasi.

Jamkrindo does not produce liquid waste in its business processes. There is no liquid waste that can disturb the environment around Jamkrindo operation.



PENGELOLAAN LIMBAH

Waste Management [103-1, 103-2, 103-3, 306]

Masalah limbah merupakan masalah limbah bagi lingkungan yang sangat berdampak signifikan. Limbah ini muncul beriringan dengan meningkatnya populasi dan kegiatan manusia, apalagi ketika manusia melakukan kegiatan yang tidak bertanggung jawab dan berdampak negatif terhadap lingkungan. Persoalan yang kemudian muncul adalah pengelolaan limbah yang tidak baik. [103-1, 103-2]

The waste problem is a waste problem for the environment that has a very significant impact. This waste comes together with increasing population and human activities, especially when humans carry out activities that are irresponsible and have a negative impact on the environment. The problem that then arises is poor waste management.

[103-1, 103-2]

Operasional perusahaan menghasilkan limbah padat berupa sampah dan limbah dari WC. Jamkrindo berkomitmen dalam pelestarian lingkungan, sehingga penanganan limbah ini dilakukan seoptimal mungkin. Perusahaan menyediakan cukup tempat sampah dan bekerja sama dengan dinas kebersihan untuk pembuangan sampah. Selanjutnya, dilakukan penyedotan limbah dari WC yang bekerja sama dengan pihak ketiga atau dinas kebersihan. Tidak terdapat dampak negatif yang signifikan baik secara aktual maupun potensial dari limbah yang dihasilkan oleh Perusahaan. [103-1, 103-2, 306-1, 306-2, 6.e.5a, 6.e.5b, 6.e.5c]

The company's operations produce solid waste in the form of garbage and waste from toilets. Jamkrindo is committed to environmental conservation, so that the handling of this waste is carried out as optimally as possible. The company provides sufficient trash cans and cooperates with the sanitation department for waste disposal. Next, waste is siphoned off from the toilet in collaboration with a third party or the cleaning service. There are no significant negative impacts, both actual and potential, from the waste generated by the Company. [103-1, 103-2, 306-1, 306-2, 6.e.5a, 6.e.5b, 6.e.5c]

Program Pengelolaan Limbah

Waste Management Program

Program Program	Nilai (Rp) Value (IDR)
Biaya Pengelolaan Limbah, Emisi dan Remediasi <i>Waste Management, Emission and Remediation Costs</i>	22.440.000,-
Pengelolaan Limbah Cair <i>Liquid Waste Management</i>	105.600.000,-
Jumlah <i>Total</i>	128.040.000,-

KEPATUHAN LINGKUNGAN

Environmental Compliance [103-1,103-2,103-3, 307]



Selama tahun 2020, tidak terdapat insiden maupun sanksi akibat ketidakpatuhan terhadap undang-undang atau peraturan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak lepas dari kepatuhan perusahaan yang merupakan wujud dari upaya dan kesungguhan Jamkrindo terkait masalah kepedulian lingkungan. [103-1,103-2,103-3, 307]

During 2020, there were no incidents or sanctions due to non-compliance with environmental laws or regulations. This shows that the company is inseparable from company compliance which is a manifestation of Jamkrindo efforts and seriousness regarding environmental concerns. [103-1,103-2,103-3, 307]



KINERJA SOSIAL

Social Performance





PEMENUHAN KEBUTUHAN PEMANGKU KEPENTINGAN DALAM MENINGKATKAN KINERJA SOSIAL JAMKRINDO

Fulfilling the Needs of Stakeholders in improving Jamkrindo Social Performance

[103-1,103-2,103-3, 401]

Jamkrindo memiliki komitmen untuk memenuhi dan bersinergi dengan para pemangku kepentingannya. Bagi Jamkrindo, berdasarkan identifikasi pemangku kepentingan, mitra, karyawan, dan masyarakat merupakan pemangku kepentingan yang sangat signifikan. Dalam menjalankan bisnisnya, Jamkrindo selalu memperhatikan kebutuhan dari para mitra, karyawan, maupun masyarakat.

Untuk mitra, Jamkrindo berupaya untuk terus meningkatkan kepuasan nasabah yang antara lain dilakukan melalui penyediaan produk dan layanan yang sesuai dengan kebutuhan mitra. Jamkrindo juga terus meningkatkan pelayanan kepada mitra melalui penerapan pelayanan prima, termasuk dengan menyediakan produk-produk digital.

Sedangkan untuk karyawan, Jamkrindo berkomitmen untuk memenuhi hak-hak normatif karyawan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sejalan dengan itu, Jamkrindo juga melakukan program pengembangan kompetensi dan kapasitas karyawan melalui program pendidikan dan pelatihan. Selain itu, Jamkrindo juga memperhatikan aspek Kesehatan dan Keselamatan Kerja untuk menjadikan Jamkrindo sebagai tempat kerja pilihan bagi karyawan.

Sementara bagi masyarakat, Jamkrindo menjalankan kegiatan CSR secara berkesinambungan dengan menyediakan anggaran yang cukup. Kegiatan CSR Jamkrindo juga menjadi bagian dari upaya tanggung jawab perusahaan mengenai pembangunan berkelanjutan.

Lebih lanjut, komitmen Jamkrindo dalam menjalankan bisnisnya dengan memperhatikan kepentingan para pemangku kepentingan juga didasari pada ketaatan perusahaan terhadap peraturan. Jamkrindo memperhatikan ketaatan Jamkrindo terhadap regulasi baik dalam memenuhi kebutuhan dan pengembangan SDM yang dimiliki, memberikan pelayanan prima bagi para mitra, dan juga berkontribusi terhadap masyarakat.

Jamkrindo has a commitment to fulfill and synergize with its stakeholders. For Jamkrindo, based on the identification of stakeholders, significant stakeholders include customers, employees and the community. In running its business, Jamkrindo always pays attention to the needs of its customers, employees and the community.

For customers, Jamkrindo strives to continue to improve customer satisfaction, among others, by providing products and services that are in accordance with customer needs. Jamkrindo also continues to improve services to customers through the implementation of excellent service, including by providing digital products.

As for employees, Jamkrindo is committed to fulfilling the normative rights of employees in accordance with applicable laws and regulations. In line with that, Jamkrindo also carries out employee competency and capacity development programs through education and training programs. In addition, Jamkrindo also pays attention to occupational health and safety aspects to make Jamkrindo the preferred work place for residents to the employees

Meanwhile, for the community, Jamkrindo carries out CSR activities on an ongoing basis by providing an adequate budget. Jamkrindo CSR activities are also part of the corporate responsibility efforts regarding sustainable development.

Furthermore, Jamkrindo commitment to running its business with attention to the interests of stakeholders is also based on the company's compliance with applicable regulations. Jamkrindo pays attention to Jamkrindo compliance with regulations both in meeting the needs and developing its human resources, providing excellent service to partner, and also contributing to society.

MANAJEMEN KEPEGAWAIAN

Personnel Management

Komitmen Perusahaan terhadap Pengembangan SDM

Sumber daya manusia merupakan aset penting bagi perusahaan dalam rangka meraih keunggulan kompetitif. Karyawan berkemampuan menjadi pemikir, perencana, dan pengawas di perusahaan untuk dapat mengelola sumber daya perusahaan lainnya, seperti uang, teknologi dan lainnya. Pengelolaan ini nantinya akan menghasilkan ide-ide bernilai tambah yang menjadi produk perusahaan. Karyawan juga menjadi pemangku kepentingan internal yang perlu diperhatikan kepentingannya. Maka dari itu, Jamkrindo berupaya melaksanakan sistem pengelolaan SDM yang mampu menjaga keseimbangan antara kebutuhan perusahaan dengan harapan karyawan. Kebutuhan perusahaan itu berbentuk pencapaian kinerja yang optimal. Sedangkan, harapan karyawan adalah memperoleh remunerasi yang baik dan jenjang karir yang jelas. [103-1, 103-2]

Atas pencapaian dan kinerja karyawan di tahun 2020, Jamkrindo menjamin terpenuhi hak-hak normatif karyawan. Hak-hak ini terwujud dengan dilaksanakannya review kinerja yang adil, tidak ada diskriminasi seperti perbedaan gender, ada kesetaraan kesempatan dalam bekerja, menerima remunerasi yang kompetitif, tidak ada kerja paksa, dan sebagainya. Dengan demikian, keberagaman karyawan selalu terwujud sebagaimana dapat dilihat dalam demografi karyawan. Selain itu, perusahaan juga tidak mempekerjakan karyawan anak karena bertentangan dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan dan tidak terdapat pekerja paksa. Selama tahun 2020, tidak terdapat insiden yang muncul akibat adanya diskriminasi terhadap karyawan. [103-2, 405, 406, 6.c.2a]

Dengan adanya karyawan yang berkualitas, diharapkan memberikan kepuasan dalam pelayanan pelanggan.

Rekrutmen [401-1]

Jamkrindo memiliki komitmen dalam memberikan kepuasan pelayanan kepada para pelanggan. Salah satu upayanya adalah dengan cara memiliki karyawan yang berkualitas unggul. Hal ini ditempuh dengan melakukan rekrutmen secara ketat dan transparan. Selama tahun 2020, perusahaan melakukan rekrutmen karyawan baru sebanyak 54 orang, yang terdiri dari 38 orang berstatus karyawan tetap dan 16 orang karyawan berstatus tidak tetap (tenaga kontrak). Terkait rekrutmen karyawan profesional, perusahaan melakukan rekrutmen. Pada akhirnya per 31 Desember 2020, Jamkrindo memiliki total karyawan sebanyak 965 orang. Hal ini berarti Jamkrindo tidak mengalami perubahan jumlah karyawan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. [103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 6.c.3b]

The Company Commitment to Human Resource Development

Human resources are an important asset for a company in order to gain a competitive advantage. Employees have the ability to be thinkers, planners, and supervisors in the company to be able to manage company resources, such as money, technology and others. This management will later produce value-adding ideas that become the company's products. Employees also become internal stakeholders whose interests need to be considered. Therefore, Jamkrindo seeks to implement an HR management system that is able to maintain a balance between company needs and employee expectations. The company's needs are in the form of achieving optimal performance. Meanwhile, the employee's hope is to get good remuneration and a clear career path. [103-1, 103-2]

For the achievements and performance of employees in 2020, Jamkrindo guarantees that the normative rights of employees are fulfilled. These rights are realized by the implementation of fair performance reviews, no discrimination such as gender differences, there is equality of opportunity in work, receiving competitive remuneration, no forced labor, and so on. Thus, employee diversity is always realized as can be seen in employee demographics. In addition, the company also does not employ child employees because it is against the Manpower Act and there is no forced labor. During 2020, there were no incidents that arose as a result of discrimination against employees. [103-2, 405, 406, 6.c.2a]

With the existence of qualified employees, it is expected to provide satisfaction in customer service.

Recruitment [401-1]

Jamkrindo is committed to providing service satisfaction to its customers. One of the efforts is to have superior quality employees. This is done by conducting strict and transparent recruitment. During 2020, the company recruited 54 new employees, consisting of 38 employees with permanent status and 16 employees with non-permanent status (contract workers). Regarding the recruitment of professional employees, the company does recruitment. In the end as of December 31, 2020, Jamkrindo had a total of 965 employees. This means that Jamkrindo has not changed number of employees compared to the previous year. [103-1, 103-2, 103-3, 401-1, 6.c.3b]



Jumlah Rekrutmen Pegawai

Number of Employee Recruitment [401-1]

Rekrutmen Recruitment	2020	2019
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Sekretaris Perusahaan <i>Fixed Time Contract on Corporate Secretary</i>	4	4
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Divisi Penunjang Bisnis <i>Fixed Time Contract on Business Support Division</i>	1	-
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Divisi Umum <i>Fixed Time Contract on General Affair Division</i>	1	-
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Divisi Hukum & Kepatuhan <i>Fixed Time Contract on</i>	1	-
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Kantor Cabang Denpasar <i>Fixed Time Contract on Denpasar Branch Office</i>	1	-
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Kantor Cabang Jayapura <i>Fixed Time Contract on Jayapura Branch Office</i>	2	-
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Kantor Cabang Manokwari <i>Fixed Time Contract on Manokwari Branch Office</i>	3	-
Tenaga Kontrak Waktu Tertentu (TKWT) Kantor Cabang Sorong <i>Fixed Time Contract on Sorong Branch Office</i>	3	-

Jumlah Rekrutmen Pegawai Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin Tahun 2019-2020

Number of Employee Recruitment Based on Age and Gender in 2019-2020 [401-1]

Rekrutmen Recruitment	2020				2019			
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Persentase Percentage	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Persentase Percentage
<25 Tahun <i><25 years old</i>	12	22	34	89,47%	3	9	12	70,59%
26-35 Tahun <i>26-35 years old</i>	3	0	3	7,89%	3	2	5	29,41%
36-45 Tahun <i>36-45 years old</i>	1	0	1	2,63%	0	0	0	0%
46-55 Tahun <i>46-55 years old</i>	0	0	0	0%	0	0	0	0%
>56 Tahun <i>>56 years old</i>	0	0	0	0%	0	0	0	0%
Jumlah <i>Total</i>	16	22	38	100,00%	6	11	17	100,00%

Perputaran Karyawan [401-1]

Perusahaan juga mengalami pengurangan karyawan dikarenakan terdapat karyawan yang memutuskan untuk keluar atau berhenti bekerja. Tingkat *turn over* merupakan cerminan dari budaya dan sistem kerja perusahaan sebagai indikator perusahaan dalam penciptaan lingkungan kerja yang kondusif. Pada akhirnya, didapatkan *employee turnover* rasio yang menunjukkan produktivitas dari kinerja perusahaan.

Employee Turnover [401-1]

The company also experienced a reduction in employees because there were employees who decided to leave or stop working. The turnover rate is a reflection of the company's culture and work system, as an indicator of the company in creating a conducive work environment. In the end, the employee turnover ratio is obtained which shows the productivity of the company performance.

Selama tahun pelaporan, terdapat 38 orang karyawan yang meninggalkan perusahaan dikarenakan 3 orang pensiun normal, 34 orang mengundurkan diri, dan 1 orang meninggal dunia. Berdasarkan data tersebut, tingkat turnover sebesar 3,94% lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya. **(103-3, 401-1)**

*During the reporting year, there were 3 employees who left the company due to normal retirement, 34 people resigned, and 1 people pass away. Based on these data, the turnover rate is 3,94% lower Compared to the previous year. **(103-3, 401-1)***

Penyebab Karyawan Meninggalkan Perusahaan

Causes of Employees Leaving the Company [401-1]

Penyebab Causes	2020	2019	2018
Pensiun Normal <i>Normal Retirement</i>	3	3	7
Pensiun Dini/Dipercepat <i>Early / Accelerated Retirement</i>	0	0	1
Meninggal Dunia <i>Passed Away</i>	1	2	3
Mengundurkan Diri <i>Resign</i>	34	44	35
Diberhentikan karena Melakukan Pelanggaran <i>Dismissed for Committing Offenses</i>	0	2	0
Jumlah Karyawan Tetap yang Keluar <i>Number of Permanent Employees Who Leave</i>	38	51	46
Jumlah Karyawan <i>Total Employee</i>	965	965	1002
Turnover Karyawan <i>Employee Turnover</i>	3,94%	5,28%	4,59%

Untuk menurunkan turnover karyawan, Jamkrindo telah melakukan kajian dan analisis internal sehingga dirasa perlu melakukan 3 (tiga) upaya, yaitu perbaikan sistem remunerasi karyawan, ketika melakukan promosi dan mutasi hendaknya memperhatikan kondisi dan umur karyawan, serta memberikan kesetaraan kesempatan bagi semua karyawan untuk mengembangkan *hard skill* dan *soft skill*. Hal ini merupakan upaya Jamkrindo untuk memberikan kenyamanan bekerja bagi karyawan.

To reduce employee turnover, Jamkrindo has conducted an internal study and analysis so that it is deemed necessary to make 3 (three) efforts, namely improving the employee remuneration system, when promoting and transferring employees should pay attention to the condition and age of employees, and provide equal opportunities for all employees to develop hard work. skills and soft skills. This is Jamkrindo's effort to provide work comfort for employees.

Adapun di tahun 2020, telah dilakukan promosi karyawan. Promosi adalah kenaikan posisi karyawan ke tingkat yang lebih tinggi. Dengan adanya promosi maka mendorong karyawan untuk meningkatkan kemampuan dan semangatnya untuk bekerja lebih produktif bagi perusahaan. Terjadi penurunan jumlah karyawan yang memperoleh promosi. Penurunan ini disebabkan adanya penurunan kebutuhan pada jenjang jabatan tertentu dan penyesuaian terhadap kebutuhan Perusahaan. **[401-1]**

*Meanwhile, in 2020, employee promotions have been carried out. Promotion is the promotion of an employee's position to a higher level. With the promotion, it encourages employees to improve their abilities and enthusiasm to work more productively for the company. There was a decrease in the number of employees who received promotions. This decrease was due to a decrease in the need for certain positions and adjustments to the needs of the Company. **[401-1]***



Promosi Karyawan

Employee Promotion

Jabatan Position	2020	2020
Kepala Divisi/Setingkat Head of Division/Level	2	3
Pemimpin Wilayah/Wakil Pemimpin Wilayah Regional Leader/Deputy Regional Leader	-	3
Pemimpin Cabang Tipe A/B/C/D Branch Manager Type A/B/C/D	4	16
KaBag Kanpus/Wil/KCK/Cab Tipe A/B Head of Kanpus/Wil/KCK/Cab Type A/B	17	20
KaBag Kanca Tipe C/D Head of Kanca Type C/D	28	20
Kepala KUP Head of KUP	5	4
Kasie Pusat/Wil/Cab A/B Head of Head Office/Wil/Cab A/B	-	-
Kasubsie Kanca Tipe C Kasubsie Kanca Type C	-	-
Kasubsie KUP Kasubsie KUP	-	-
Pranata Utama Main Institution	-	-
Pranata Muda Young Institutions	-	-
Jumlah Total	56	66

Remunerasi [401-2]

Berdasarkan statusnya, karyawan Jamkrindo terbagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu karyawan tetap, karyawan kontrak, dan karyawan *outsourc*e. Perbedaan status mempengaruhi tunjangan yang diterima oleh karyawan. Rincian tunjangan yang diterima karyawan berdasarkan statusnya ditunjukkan dalam tabel berikut: [103-2, 103-3, 401-2]

Remuneration [401-2]

Based on their status, Jamkrindo employees are divided into 3 (three) groups, namely permanent employees, contract employees, and *outsourc*ed employees. The difference in status affects the benefits received by employees. The details of the benefits received by employees based on their status are shown in the following table: [103-2, 103-3, 401-2]

Tabel Tunjangan Karyawan

Employee Allowance Table [401-2]

Jenis Tunjangan Type of Allowance	Karyawan Tetap Permanent Employees		Karyawan Kontrak Contract Employees		Karyawan Outsourc Outsourced Employees	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Tunjangan Jabatan Tetap Permanent Position Allowance	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Tunjangan Jabatan Tidak Tetap Non-Permanent Position Allowance	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Tunjangan Kesejahteraan Welfare Benefits	✗	✓	✗	✓	✗	✓

Jenis Tunjangan Type of Allowance	Karyawan Tetap Permanent Employees		Karyawan Kontrak Contract Employees		Karyawan Outsource Outsourced Employees	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Tunjangan Wilayah Regional Allowance	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Tunjangan Komunikasi Communication Allowance	✗	✓	✗	✓	✗	✓
Tunjangan Transportasi Pelatihan Training Transportation Allowance	✓	✗	✗	✓	✗	✓
Tunjangan Kesehatan Health benefits	✓	✗	✗	✓	✗	✓

Cuti Melahirkan [401-3]

Adapun hak normatif yang diberikan kepada karyawan perempuan adalah cuti melahirkan. Cuti melahirkan ini diberikan selama 3 (tiga) bulan, yakni 1,5 (Satu setengah) bulan sebelum melahirkan dan 1,5 (Satu setengah) bulan setelah melahirkan. Ketentuan ini mengacu pada Undang-Undang Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003 Pasal 82. Adapun bagi karyawan pria yang istrinya melahirkan, Jamkrindo memberikan cuti selama 2 (dua) hari. [103-1, 103-2]

Selama tahun 2020, terdapat 20 orang yang mengambil cuti melahirkan. Sebanyak 20 orang kembali bekerja. Selanjutnya, 29 orang karyawan pria mengambil cuti karena istrinya melahirkan. [103-3, 401-3]

Dari angka di atas, dapat terlihat bahwa karyawan yang cuti telah memutuskan untuk kembali bekerja ke perusahaan. Hal ini menandakan bahwa Jamkrindo adalah tempat kerja yang nyaman

Penilaian Kinerja [401-3]

Jamkrindo menempatkan karyawan di posisi penting dalam perusahaan. Maka dari itu, perusahaan memperlakukan karyawan secara adil yang diwujudkan dengan berbagai cara, seperti memberikan penilaian kepada seluruh karyawan. Penilaian ini dilakukan setiap tahun guna dapat menentukan jenjang karir karyawan, promosi, mutasi, rotasi, atau demosi. Perusahaan memiliki KPI individu dan proses penilaian kinerja karyawan tersebut mengacu pada KPI tersebut. [103-2, 103-3, 404-3]

Maternity leave [401-3]

The normative right granted to female employees is maternity leave. Maternity leave is given for 3 (three) months, namely 1.5 (one and a half) months before giving birth and 1.5 (one and a half) months after giving birth. This provision refers to the Manpower Act No.13 of 2003 Article 82. As for male employees whose wives give birth, Jamkrindo provides leave for 2 (two) days.

[103-1, 103-2]

During 2020, there were 20 people who took maternity leave. A total of 20 people returned to work. Furthermore, 29 male employees took leave because his wife gave birth.

[103-3, 401-3]

From the figures above, it can be seen that the employees who are on leave have decided to return to work for the company. This indicates that Jamkrindo is a comfortable place to work

Performance assessment [401-3]

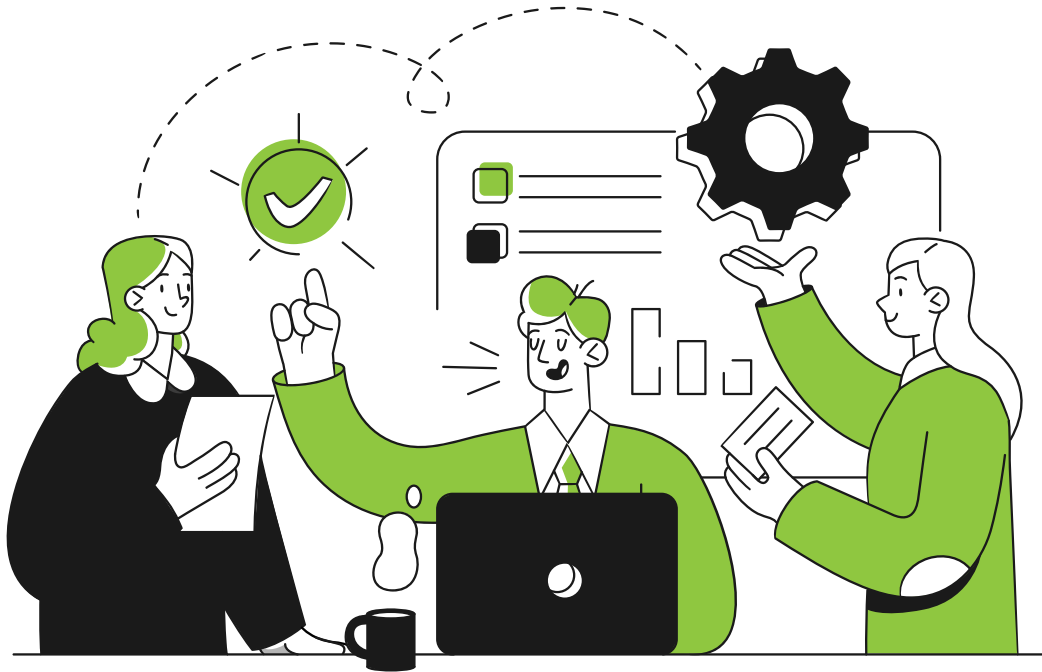
Jamkrindo places employees in important positions in the company. Therefore, the company treats employees fairly which is manifested in various ways, such as providing appraisals to all employees. This assessment is carried out annually in order to determine the employee's career path, promotion, transfer, rotation, or demotion. The company has individual KPIs and the employee performance appraisal process refers to these KPIs.

[103-2, 103-3, 404-3]



HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN

Employment Relations [103-1, 103-2, 103-3, 402-1]



Perusahaan mengumumkan semua perubahan yang signifikan atas struktur organisasi dan operasional kepada karyawan dengan beberapa cara di antaranya melalui surat elektronik, surat edaran, papan pengumuman atau sosialisasi secara langsung. Perjanjian Kerja Bersama (PKB) telah mengatur penyampaian informasi yang berdampak bagi karyawan. Pada tahun 2020, tidak terjadi perubahan kegiatan proses bisnis yang signifikan sehingga tidak memberikan dampak perubahan pada pola pekerjaan di lapangan.

The Company announces all significant changes to the organizational structure and operations to employees in several ways including through electronic mail, circulars, bulletin boards or direct socialization. The Collective Labor Agreement (PKB) has regulated the delivery of information that has an impact on employees. In 2020, there were no significant changes in business process activities so that they did not have an impact on changes in work patterns in the field.

PENGEMBANGAN KOMPETENSI PEGAWAI

Employee Competency Development [404-2]

Seperti komitmen perusahaan dalam menciptakan SDM yang unggul, perusahaan berupaya mengelola SDM dengan cara mengembangkan potensi secara optimal. Perusahaan memberikan kesetaraan kesempatan karyawan dalam mengembangkan kompetensinya, baik *hard skill* maupun *soft skill*. Pada tahun 2020, Jamkrindo telah melaksanakan kegiatan pengembangan kompetensi karyawan dengan total biaya Rp18.405.000.000. turun 31,30% atau sebesar Rp8,386 juta dibandingkan tahun 2019, atau mencatat pencapaian 90,5% dibandingkan anggaran tahun 2020. [103-3, 404-2]

In efforts of the Company's commitment towards creating excellent human resources, the Company strives to manage human resources by developing its potential in an optimal way. The Company provides equal opportunities for its employees in developing their competencies, including hard skills and soft skills. In 2020, Jamkrindo has conducted employee competency development activities with a total expense of IDR18,405,000,000., decreasing by 31.30% or amounting to IDR8.386 million compared to 2019, or accounted an accomplishment of 90.5% when compared to the 2020 Budget. [103-3, 404-2]

Biaya Pengembangan Kompetensi Competency Development Fee	Realisasi 2020 (Rp-juta) Realization 2020 (IDR-million)	Anggaran 2020 (Rp-juta) Budget 2020 (IDR-million)	Realisasi 2019 (Rp-juta) Realization 2019 (IDR-million)	Realisasi 2020 Terhadap Anggaran 2020 (%)	Realisasi 2020 Terhadap Realisasi 2019 (%)
	(1)	(2)	(3)	(1:2)	((1-3)/3)
	18.405	20.333	26.792	90,52%	(31,30%)

Biaya Pengembangan Kompetensi dalam 5 (Lima) Tahun Terakhir 2016-2020 (Rp-juta)

Competency Development Expenses in the Last 5 (Five) Years 2016–2020 (IDR-million)





Tabel Pengembangan Karyawan

Table of Employee Development [404-2]

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
1	Penggunaan ERP Modul Financial Management Aplikasi Odoo <i>Utilization of ERP Financial Management Module in Odoo App</i>	L1, L3, L4	91	28 - 29 Desember 2020 <i>December, 28 - 29 2020</i>	Online Training	9
2	Aspek Hukum Dalam Pengelolaan Korporasi BUMN <i>Legal Aspects in the Management of State-Owned Enterprise (BUMN) Corporations</i>	Dekom, L1	2	15 - 18 Desember 2020 <i>December, 15 - 18 2020</i>	Online Training	1,5
3	Directorship Program "High Performance Boards"	L1, L2	5	15 - 18 Desember 2020 <i>December, 15 - 18 2020</i>	Online Training	2
4	Jamkrindo Executive Development Program Batch 2 Virtual Class Phase 4	L1	10	14 - 15 Desember 2020 <i>December, 14 - 15 2020</i>	Online Training	4
5	Jamkrindo Executive Development Program Batch 1 Virtual Class Phase 4	L1	6	10 - 11 Desember 2020 <i>December, 10 - 11 2020</i>	Online Training	4
6	Integrated Risk-Based Internal Auditing	L1, L3, L4	19	10-11 Desember 2020 <i>December, 10 - 11 2020</i>	Online Training	6,5
7	Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tingkat Manajerial <i>Managerial Level Qualified Internal Auditor Certification</i>	L1	1	7 - 16 Desember 2020 <i>December, 7 - 16 2020</i>	Online Training	6,5
8	Sales Mastery Batch 3 Modul 5 : Sales Negotiation	L4	26	5 Desember 2020 <i>December, 5 2020</i>	Online Training	4
9	Sales Mastery Batch 2 Modul 5 : Sales Negotiation	L4	25	5 Desember 2020 <i>December, 5 2020</i>	Online Training	4
10	Study Case Analisa Penjaminan ToT 2 Pertemuan 4 <i>Case Study on Insurance Analysis, ToT 2, Meeting 4</i>	L3	18	4 Desember 2020 <i>December, 4 2020</i>	Online Training	4
11	In House E-Training tentang "Practical Microsoft Excel For Data Analyst and Effective Data Report" <i>In House E-Training about "Practical Microsoft Excel For Data Analyst and Effective Data Report"</i>	L4	9	3-4 Desember 2020 <i>December, 3 - 4 2020</i>	Online Training	6
12	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa <i>Training on Procurement of Goods and Services</i>	L2, L4	3	2 - 5 Desember 2020 <i>December, 2 - 5 2020</i>	Online Training	9
13	Sales Mastery Batch 1 Modul 5 : Sales Negotiation	L4	29	28 November 2020 <i>November, 28 2020</i>	Online Training	4
14	Study Case Analisa Penjaminan ToT 2 Pertemuan 3 <i>Case Study on Insurance Analysis, ToT 2, Meeting 3</i>	L3	22	27 November 2020 <i>November, 27 2020</i>	Online Training	4,5

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
15	Pelatihan dan Uji Serfikasi Kompetensi Pendamping UMKM <i>SME Assistant Training and Competency Certification Test</i>	L4	2	27 November 2020 <i>November, 27 2020</i>	Online Training	9
16	Pelatihan dan Serfikasi Kompetensi Pendamping UMKM <i>SME Assistant Training and Competency Certification</i>	L4	30	23 - 26 November 2020 <i>November, 23 - 26 2020</i>	Online Training	9
17	Certified Corporate Forensic Auditor	Komite Audit <i>Audit Committee</i>	1	25 November - 1 & 4 Desember 2020 <i>November, 25 - December, 1 & 4 2020</i>	Online Training	3
18	Soft Skills for secretary	L4	2	24 - 26 November 2020 <i>November, 24 - 26 2020</i>	Online Training	2
19	Sertifikasi Qualified Internal Auditor Tingkat Lanjutan <i>Advanced Level Qualified Internal Auditor Certification</i>	L1	1	7 - 16 Desember 2020 <i>December, 7 - 16 2020</i>	Online Training	6,5
20	Webinar Maintaining Physical Distancing Governing Digital Mainstreaming	L3 - L4	2	24 - 26 November 2020 <i>November, 24 - 26 2020</i>	Online Training	7
21	Sales Mastery Batch 3 Modul 4: story selling	L4	31	21 November 2020 <i>November, 21 2020</i>	Online Training	4
22	Business Judgment Rule versus Tindak Pidana Korupsi <i>Business Judgement Rule Versus Corruption Criminal Offence</i>	L4	1	20 November 2020 <i>November, 20 2020</i>	Online Training	6
23	Study Case Analisa Penjaminan ToT 2 Pertemuan 2 <i>Case Study on Insurance Analysis, ToT 2, Meeting 2</i>	L3	21	20 November 2020 <i>November, 20 2020</i>	Online Training	4,5
24	Sales Mastery Batch 2 Modul 4: story selling	L4	27	14 November 2020 <i>November, 14 2020</i>	Online Training	4,5
25	Study Case Analisa Penjaminan ToT 2 Pertemuan 1 <i>Case Study on Insurance Analysis, ToT 2, Meeting 1</i>	L3	24	13 November 2020 <i>November, 13 2020</i>	Online Training	4,5
26	Implementasi Penerapan PSAK 73 Untuk Antisipasi Audit Tahunan & Dampaknya Terhadap Pelaporan Ke Regulator dan Pajak <i>Implementation of PSAK 73 to Anticipate Annual Audit & Its Impact on Reporting to Regulators and Tax Officials</i>	L4	2	12 November 2020 <i>November, 12 2020</i>	Online Training	6



No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
27	Update Implementasi & Evaluasi Perhitungan PSAK 72 : Implikasi Terhadap Pendapatan Perusahaan, Laporan Keuangan dan Pelaporan Pajak <i>Updates on the Implementation & Evaluation of PSAK 72 Calculation: Its Implications for Corporate Income, Financial Statements, and Tax Reporting</i>	L4	4	11 November 2020 <i>November, 11 2020</i>	Online Training	4
28	Sales mastery batch I Modul 4: story telling in business	L4	31	7 November 2020 <i>November, 7 2020</i>	Online Training	4
29	Studi Kasus Pengikatan dan Eksekusi Agunan <i>Case Study on Collateral Binding and Execution</i>	L1 - L4	27	7 November 2020 <i>November, 7 2020</i>	Ruang Serbaguna Lt 10 <i>Multipurpose Room, 10th floor</i>	4
30	Workshop Lelang Agunan dan Eksekusi Agunan <i>Collateral Auction and Execution Workshop</i>	L1 - L4	43	6 November 2020 <i>November, 6 2020</i>	Online Training	4
31	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 8 <i>Financial Statement Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 8</i>	L4	20	3 - 4 November 2020 <i>November, 3 - 4 2020</i>	Online Training	4
32	Online Learning Class Internasional Certified Wealth Manager (CWM) Executive Program 2020 Public Class — Batch 45	L3	1	5 November 2020 - 28 Januari 2021 <i>November, 5 2020 - January, 28 2021</i>	Online Training	6
33	12th Global Peter Drucker Forum 2020	BOD, L1, L3	8	28 - 31 Oktober 2020 <i>October, 28 - 31 2020</i>	Online Training	27,25
34	Investigasi Forensik <i>Forensic Investigation</i>	Dekom, L3, L4	4	26 - 27 Oktober 2020 <i>October, 26 - 27 2020</i>	Online Training	12
35	Digital Public Training Interpretasi dan Asesor KPKU BUMN <i>Digital Public Training: Interpretation and Assessor of State-Owned Enterprise Criteria for Superior Performance (KPKU BUMN)</i>	L3, L4	2	21 - 23 Oktober 2020 <i>October, 21 - 23 2020</i>	Online Training	13
36	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 8 <i>Financial Statement Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 8</i>	L4	19	3 - 4 November 2020 <i>November, 3 - 4 2020</i>	Online Training	19
37	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 7 <i>Financial Statement Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 7</i>	L4	20	22 - 23 Oktober 2020 <i>October, 22-23 2020</i>	Online Training	8

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
38	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 6 <i>Financial Statement Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 6</i>	L4	20	20 - 21 Oktober 2020 <i>October, 20 - 21 2020</i>	Online Training	8
39	BMDP - Governance Aspect Series 3: Pengikatan Jaminan dan Eksekusinya <i>BMDP - Governance Aspect Series 3: Insurance Binding and Its Execution</i>	L2	56	16 Oktober 2020 <i>October, 16 2020</i>	Online Training	3
40	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 5 <i>Financial Statement Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 5</i>	L4	20	15 - 16 Oktober 2020 <i>October 15 - 16 2020</i>	Online Training	8
41	Penyusunan Perjanjian Utang Piutang & Pengikatan Jaminan Yang Aman Dari Segi Hukum <i>Arrangement of Debt Agreement & Legally Secure Insurance Binding</i>	L4	5	14 - 15 Oktober 2020 <i>October, 14 - 15 2020</i>	Online Training	4
42	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 4 <i>Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 4</i>	L4	19	13 - 14 Oktober 2020 <i>October, 13 - 14 2020</i>	Online Training	8
43	Revolutionized Learning in Indsutry 5.0 <i>Revolutionized Learning in Industry 5.0</i>	L3, L4	6	13 Oktober 2020 <i>October, 13 2020</i>	Online Training	2
44	Sales mastery batch III Modul 3: Winning Conversations	L4	31	10 Oktober 2020	Online Training	4
45	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 3 <i>Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 3</i>	L4	20	8 - 9 Oktober 2020 <i>October, 8 - 9 2020</i>	Online Training	8
46	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 2 <i>Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 2</i>	L4	20	6 - 7 Oktober 2020 <i>October 6 - 7 2020</i>	Online Training	8
47	Membangun Budaya Risiko dan Kepatuhan di BUMN <i>Developing Risk and Compliance Culture in State-Owned Enterprises</i>	L1, L3	3	7 Oktober 2020 <i>October, 7 2020</i>	Online Training	2
48	Sales mastery batch II Modul 3: Winning Conversations	L4	26	3 Oktober 2020 <i>October, 3 2020</i>	Online Training	4
49	ToT 1 Managing People - Modul 5 Leaders an mentor and Becoming a supermentee (tools : Business Model You, Calling Cards)	L3	23	2 Oktober 2020 <i>October, 2 2020</i>	Online Training	3,5
50	Analisa Laporan Keuangan dan Analisa Kredit Khusus Penjaminan PEN Batch 1 <i>Analysis and National Economic Recovery (PEN) Special Credit Insurance Analysis Batch 1</i>	L4	19	1 - 2 Oktober 2020 <i>October, 1 - 2 2020</i>	Online Training	8



No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
51	Sales Mastery Batch 1 Modul 3 - Winning Conversations	L4	32	25 September 2020 September, 25 2020	Online Training	4
52	ToT 1 Managing People - Modul 4 Coaching for Performance (Tools : Grow & Care)	L3	21	25 September 2020 September, 25 2020	Online Training	3,5
53	Ansipasi Resesi Ekonomi "New Business Model Perbankan dan Dunia Usaha di Tengah Pemulihan Ekonomi Nasional" <i>Anticipating an Economic Recession "New Business Model for Banking and Business World Amidst the National Economic Recovery"</i>	L1	6	24 September 2020 September, 24 2020	Online Training	2,5
54	ToT 1 Managing People - Modul 3 Situational Leadership II	L3	22	18 September 2020 September, 18 2020	Online Training	3,5
55	Digital Public Training Interpretasi dan Asesor KPKU BUMN <i>Digital Public Training: Interpretation and Assessor of State-Owned Enterprise Criteria for Superior Performance (KPKU BUMN)</i>	L3, L4	6	16 - 18 September 2020 September, 16 - 18 2020	Online Training	18
56	In-Depth Understanding of ASEAN Corporate Governance Scorecard and Sustainability Report	Dekom	2	16 - 17 September 2020 September, 16 - 17 2020	Online Training	12
57	Sales Mastery Batch 3 Modul 2 - High Impact Consultative Selling 1	L4	30	16 September 2020 September, 16 2020	Online Training	4
58	Sales Mastery Batch 2 Modul 2 - High Impact Consultative Selling 1	L4	30	16 September 2020 September, 16 2020	Online Training	4
59	ToT 1 Managing People - Modul 2 part 1 Creativity : Problem Solving & Decision Making (Tools : Blue Ocean, New 7 Management Tools, Six Thinking Hats, Scamper)	L3	23	4 & 11 September 2020 September, 4 & 11 2020	Online Training	3,5
60	Akselerasi Internalisasi Budaya Akhlak <i>Acceleration of the Moral Culture Internalization</i>	L3	2	3 September 2020 September, 3 2020	Online Training	1,5
61	Sales Mastery Batch 3 Modul 1 - Mastering the Sales Mindset	L4	32	3 September 2020 September, 3 2020	Online Training	4
62	Sales Mastery Batch 2 Modul 1 - Mastering the Sales Mindset	L4	28	3 September 2020 September, 3 2020	Online Training	4
63	Manajemen Talenta Makro : Kerangka Konseptual dan Perspektif Aplikasi <i>Macro Talent Management: Conceptual Framework and Application Perspective</i>	L3, L4	2	31 Agustus 2020 August, 31 2020	Online Training	1
64	Global Business and Politics				Online Training	32
65	Strategi Menyusun Formula Gugatan yang Jitu <i>Strategies for Developing Accurate Lawsuit Formula</i>	L1, L3, L4	10	28 Agustus 2020 August, 28 2020	Online Training	2
66	BMDP - Governance Aspect Series 2	L2	56	28 Agustus 2020 August, 28 2020	Online Training	3

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
67	ToT 1 Managing People - Modul 1 Invention Cycle & Imagination : Business Modeling (Tools : Business Model Canvas)	L3	22	28 Agustus 2020 August, 28 2020	Online Training	3,5
68	Risk Management Refreshment Program	BOD, L1	4	26 Agustus 2020 August, 26 2020	Online Training	4
69	BMDP - Governance Aspect Series 2	L2	56	26 Agustus 2020 August, 26 2020	Online Training	3
70	Implementasi Intensif Pajak dalam Rangka COVID-19 <i>Intensive Tax Implementation in the Context of COVID-19</i>	L1, L3, L4	3	26 Agustus 2020 August, 26 2020	Online Training	3,5
71	Strategis Cerdas Pengendalian Manajemen Risiko di Era Pandemi COVID-19 <i>Smart Strategies for Risk Management Control in COVID-19 Pandemic Era</i>	BOD, L1	4	26 Agustus 2020 August, 26 2020	Online Training	4
72	Digital Public Training APC (Asesor Preparation Course) KPKU BUMN <i>Digital Public Training: APC (Assessor Preparation Course) on State-Owned Enterprise Criteria for Superior Performance (KPKU BUMN)</i>	L3	2	25 - 27 Agustus 2020 August, 25 - 27 2020	Online Training	18
73	Strategic Marketing Plan That Works	L1	1	24 - 28 Agustus 2020	Online Training	40
74	Pendidikan Khusus Profesi Advokat <i>Advocate Professional Special Education</i>	L4	2	25 Agustus - 6 September 2020 August 25 - September 6 2020	Online Training	144
75	How To Become a Data Scientist	L3, L4	3	23 Agustus 2020 August, 23 2020	Online Training	2
76	BLDP - Coaching	L1, L2	7	19 Agustus 2020 August, 19 2020	Online Training	2,5
77	Workshop pengadaan TI bersertifikasi <i>Certified IT Procurement Workshop</i>	L3, L4	4	18 - 28 Agustus 2020 August, 18 - 28 2020	Online Training	22
78	Jamkrindo Executive Development Program (DDI) Batch 2 Virtual Class Phase 3: Leading with Global Perspective dan Cultivating Nertwork and Partnership	L1	9	15 - 16 Agustus 2020 August, 15 - 16 2020	Online Training	8
79	BMDP - Governance Aspect Series 1	L1	56	14 Agustus 2020 August, 14 2020	Online Training	3
80	BLDP - Coaching	L1, L2	8	14 Agustus 2020 August, 14 2020	Online Training	2,5
81	Employee Engagement Through	L1, L3	2	13 Agustus 2020 August, 13 2020	Online Training	3
82	Jamkrindo Executive Development Program (DDI) Batch 1 Virtual Class Phase 3: Leading with Global Perspective dan Cultivating Nertwork and Partnership	L1	9	8 - 9 Agustus 2020 August, 8 - 9 2020	Online Training	8



No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
83	Restrukturisasi Kredit UMKM di Era Pandemi COVID-19 <i>SME Credit Restructurization in COVID-19 Pandemic Era</i>	L4	59	7 - 8 Agustus 2020 <i>August, 7 - 8 2020</i>	Online Training	15
84	BLDP - Coaching	L2, L3	5	6 Agustus 2020 <i>August, 6 2020</i>	Online Training	2,5
85	Machine Learning Modul 5 : Justifying an Organizational ML Approach ToT 2 dan ODP	L3, L4	38	6 Agustus 2020 <i>August, 6 2020</i>	Online Training	4
86	Pelatihan dan Ujian Serfikasi Kurator dan Pengurus Angkatan VI Tahun 2020 <i>Curator and 6th Batch Committee 2020 Training and Certification Test</i>	L4	1	3 - 15 Agustus 2020 <i>August, 3 - 15 2020</i>	Online Training	9,5
87	Business Presentasion Divisi MSDM <i>HRM Division Business Presentation</i>	L3, L4	8	2 - 3 Agustus 2020 <i>August, 2 - 3 2020</i>	Online Training	15
88	Machine Learning Modul 4 Model Productionalization TOT 2 dan ODP	L3	38	30 Juli 2020 <i>July, 30 2020</i>	Online Training	4
89	Asesor Kompetensi <i>Competency Assessor</i>	L1	6	24 Juli 2020 <i>July, 24 2020</i>	Hotel swissbell in kemayoran	14
90	Induction for New Manager to Face New Challenges	L4	21	23 Juli 2020 <i>July, 23 2020</i>	Online Training	2
91	Machine Learning Modul 3 : Deep Learning for Business TOT 2 dan ODP	L3	38	23 Juli 2020 <i>July, 23 2020</i>	Online Training	4
92	Asesor Kompetensi <i>Competency Assessor</i>	L1	6	20 - 23 Juli 2020 <i>July, 20 - 23 2020</i>	Hotel swissbell in kemayoran	56
93	BUSINESS PRESENTATION (ODP)	L4	13	20 - 21 Juli 2020 <i>July, 20 - 21 2020</i>	Ruang Pelatihan Lt 8	15
94	Youtube Conversion Formula	L4	3	19 Juli 2020 <i>July, 19 2020</i>	Online Training	2
95	New Normal Selling	L1, L3, L4	36	18 Juli 2020 <i>July, 18 2020</i>	Online Training	9
96	Machine Learning Modul 2 : Measuring and Formulating Model Performance TOT 2 dan ODP	L3	38	16 Juli 2020 <i>July, 16 2020</i>	Online Training	4
97	Understanding How to Prevent Corruption in New Reality	Dekom	1	15 Juli 2020 <i>July, 15 2020</i>	Online Training	2
98	New Normal Selling	L1, L3, L4	74	10 Juli 2020 <i>July, 10 2020</i>	Online Training	4
99	BMDP - Finance for Manager Sesi I: Pengenalan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan <i>BMDP - Finance for Manager Session I: Introduction to the Basics of Financial Statement Arrangement</i>	L2	56	10 Juli 2020 <i>July, 10 2020</i>	Online Training	4
100	Machine Learning Modul 1 : Solving Problem with Machine Learning TOT 2 dan ODP	L3	38	9 Juli 2020 <i>July, 9 2020</i>	Online Training	4
101	Sales Mastery Batch 1 Modul 2 - High Impact Consultative Selling 1	L4	34	4 Juli 2020 <i>July, 4 2020</i>	Online Training	4

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
102	Machine Learning Modul : Digital Mindset Transformation TOT 2 dan ODP	L3	38	3 Juli 2020 July, 3 2020	Online Training	4
103	BMDP - Finance for Manager Sesi I: Pengenalan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan <i>BMDP - Finance for Manager Session I: Introduction to the Basics of Financial Statement Arrangement</i>	L2	56	3 Juli 2020 July, 3 2020	Online Training	4
104	Pembekalan Sertifikasi Kompetensi Human Capital <i>Training for Human Capital Competency Certification</i>	L1, L3, L4	6	2 Juli 2020 July, 2 2020	Online Training	5
105	Machine Learning Kadiv-Pinwil-Pinca Modul 5 : Justifying an Organizational ML Approach <i>Machine Learning Head of Division-Regional Manager-Branch Manager Module 5: Justifying an Organizational ML Approach</i>	L1, L2	29	26 Juni 2020 June, 26 2020	Online Training	4
106	BMDP - Finance for Manager Sesi I : Pengenalan Dasar Penyusunan Laporan Keuangan <i>BMDP - Finance for Manager Session I: Introduction to the Basics of Financial Statement Arrangement</i>	L2	56	26 Juni 2020 June, 26 2020	Online Training	2
107	ToT 1 : Program Machine Learning Modul 5 Justifying an Organizational ML Approach	L3	23	26 Juni 2020 June, 26 2020	Online Training	4
108	UMKM Gearing-up Into New-Normal "Solusi Pembiayaan Pemasaran dan Digitalisasi" <i>SMEs Gearing-up Into New Normal "Solution to Marketing Financing and Digitalization"</i>	L1, L2	72	25 Juni 2020 June, 25 2020	Online Training	3,5
109	New Financial Strategy for The New Normal World	L4	184	20 Juni 2020 June, 20 2020	Online Training	1,5
110	ToT 1 Program Machine Learning Modul 4 Model Productionalization	L3	23	19 Juni 2020 June, 19 2020	Online Training	4
111	Machine Learning Kadiv-Pinwil-Pinca Modul 4 : Model Productionalization <i>Machine Learning Head of Division-Regional Manager-Branch Manager Module 4: Model Productionalization</i>	L1, L2	29	19 Juni 2020 June, 19 2020	Online Training	4
112	Mitigasi Risiko Kredit Dan Restrukturisasi Melalui Penjaminan <i>Credit Risk Mitigation and Restructuring Through Insurance</i>	L1, L3, L4	38	16 Juni 2020 June, 19 2020	Online Training	2
113	Managing Time Effectively In The New Normal	L3	156	13 Juni 2020 June, 13 2020	Online Training	2
114	Machine Learning Kadiv-Pinwil-Pinca Modul 3 : Deep Learning for Business <i>Machine Learning Head of Division-Regional Manager-Branch Manager Module 3: Deep Learning for Business</i>	L1, L2	29	12 Juni 2020 June, 13 2020	Online Training	4



No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
115	ToT 1 Program Machine Learning Modul 3 Deep Learning for Business	L3, L4	23	12 Juni 2020 June, 12 2020	Online Training	4
116	Developing Habist in Communication as a Leader	L3, L4	23	11 Juni 2020 June, 11 2020	Online Training	2,5
117	ToT 1 "feedback assignment dan EQ for leaders"	L3, L4	23	10 Juni 2020 June, 10 2020	Online Training	1,5
118	cara cepat baca laporan keuangan komprehensif Kanwil VI Surabaya	L3, L4	36	10 Juni 2020 June, 10 2020	Online Training	7
119	How to Automate Risk Decisioning : Getting Real with Artificial Intelligence	L3, L4	3	9 Juni 2020 June, 9 2020	Online Training	1
120	Design Thinking for Bankers : Strategy to Face The New Normal	L1, L4	3	9 Juni 2020 June, 9 2020	Online Training	4
121	Digital Awareness IT Devices Batch II	L4	86	8 Juni 2020 June, 8 2020	Online Training	2
122	Digital Awareness IT Devices	L4	84	5 Juni 2020 June, 5 2020	Online Training	2
123	Evaluasi ToT 1 Training Machine Learning <i>ToT Evaluation 1 Machine Learning Training</i>	L3, L4	23	5 Juni 2020 June, 5 2020	Online Training	3,5
124	Modul 2 Measuring and Formating Model Performance	L1, L2	29	3 Juni 2020 June, 3 2020	Online Training	4
125	Program Machine Learning Lanjutan Modul Digital Mindset Leadership <i>Advanced Machine Learning Program Module: Digital Mindset Leadership</i>	L3	23	2 Juni 2020 June, 3 2020	Online Training	4
126	Jurus Closing Dengan Whatsapp Marketing <i>Closing Move with Whatsapp Marketing</i>	L3, L4	44	31 Mei 2020 May, 31 2020	Online Training	1,5
127	Training Machine Learning ToT 1 Modul Digital Mindset Transformation	L3, L4	23	29 Mei 2020 May, 29 2020	Online Training	4
128	Sales Mastery	L4	34	28 Mei 2020 May, 28 2020	Online Training	4
129	Machine Learning Kadiv-Pinwil-Pinca Digital Mindset Transformation Modul 1 : Solving Problem With Machine Learning <i>Machine Learning Head of Division-Regional Manager-Branch Manager Digital Mindset Transformation Module 1: Solving Problem with Machine Learning</i>	L1, L3	29	27 Mei 2020 May, 27 2020	Online Training	4
130	BUSINESS PRESENTATION MENTORING	L1, L2	8	26 Mei 2020 May, 26 2020	Online Training	4
131	Sengketa Asuransi di Masa Pandemi COVID-19 "Potensi Sengketa, Antisipasi dan Penyelesaiannya Melalui Arbitrase <i>Insurance Conflict in COVID-19 Pandemic Era "Conflict Potency, Anticipation, and Solution Through Arbitration"</i>	L3, L4	4	20 Mei 2020 May, 20 2020	Online Training	1,5

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
132	Digital Transformation	L1, L2	29	20 Mei 2020 May, 20 2020	Online Training	4
133	BUSINESS PRESENTATION MENTORING	L1, L2	8	20 Mei 2020 May, 20 2020	Online Training	4
134	BUSINESS PRESENTATION MENTORING	L1	5	19 Mei 2020 May, 19 2020	Online Training	4
135	ToT 2 Program Basic Finon Part 2	L3	25	19 Mei 2020 May, 19 2020	Online Training	2
136	BUSINESS PRESENTATION MENTORING	L1	7	18 Mei 2020 May, 18 2020	Online Training	4
137	ToT 2 Program Basic Finon Part 1	L3	25	18 Mei 2020 May, 18 2020	Online Training	6
138	People Analytics: Mindblowing Concept Poor Practices	L1, L3, L4	3	16 Mei 2020 May, 16 2020	Online Training	2
139	ToT 1 Program Machine Learning	L3, L4	23	15 Mei 2020 May, 15 2020	Online Training	4
140	Webinar PERADI "Keadaan Kahar Akibat COVID-19 dan Penerapannya dalam Perjanjian Kredit/Pembiayaan" PERADI Webinar "Force Majeure Due to COVID-19 and Its Implementation in Credit/Financing Agreements"	L4	8	15 Mei 2020 May, 15 2020	Online Training	2
141	Webinar Force Majeure dalam Kepailitan & PKPU Force Majeure in Bankruptcy & Suspension of Debt Payment Webinar	Dekom	1	13 Mei 2020 May, 13 2020	Online Training	2
142	"Cara Cepat Baca Laporan Keuangan" Batch III "Quick Way to Read Financial Statements" Batch III	L3, L4	36	13 Mei 2020 May, 13 2020	Online Training	7
143	Dapatkah COVID-19 Dianggap Peristiwa Force Majeure Dalam Kontrak? Can COVID-19 be Considered as Force Majeure Event on Contracts?	L1, L3, L4	20	13 Mei 2020 May, 13 2020	Online Training	2
144	Forensic Accounng vs Invesgave Auding	L4	1	11 - 13 Mei 2020 May, 11 - 13 2020	Online Training	12
145	Financial Distress Assets : Menguji Daya Tahan Industri Di Tengah Badai Pandemi Financial Distress Assets: Testing the Industrial Durability Amidst the Pandemic Storm	L1	2	6 Mei 2020 May, 6 2020	Online Training	7
146	OKR : Breaking the rules of traditional PM	L3, L4	3	1 Mei 2020 May, 1 2020	Online Training	2
147	Webinar Perlindungan Hak Normatif Pekerja / Buruh Terkait Dengan Pandemi COVID-19 Webinar on Labor Normative Rights Protection Related to the COVID-19 Pandemic	L1, L3, L4	6	29 April 2020 April, 29 2020	Online Training	3



No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
148	Webinar Digital Leadership Adapting to the New Normal	L1	18	25 April 2020 April, 25 2020	Online Training	1
149	"Cara Cepat Baca Laporan Keuangan" Batch II "Quick Way to Read Financial Statements" Batch II	L3, L4	43	24 April 2020 April, 24 2020	Online Training	7
150	"Cara Cepat Baca Laporan Keuangan" Batch I "Quick Way to Read Financial Statements" Batch I	L3, L4	44	23 April 2020 April, 23 2020	Online Training	7
151	Internet of Things	L4	54	23 April 2020 April, 23 2020	Online Training	2
152	Restrukturisasi Kredit sebagai Dampak COVID-19 Credit Restructurization as a Result of COVID-19	L1, L3, L4	17	21 April 2020 April, 21 2020	Online Training	6
153	Corporate Law for Executive, Aspek Hukum dalam Pengelolaan Korporasi BUMN Corporate Law for Executive, Legal Aspects in State-Owned Enterprise Corporation Management	Dekom	5	26 - 27 Maret 2020 March, 26 - 27 2020	Online Training	18
154	Ujian Sertifikasi MR level 2 Level 2 Risk Management Certification Exam	L2, L3	34	14 Maret 2020 March, 14 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
155	HR Management and Analytics : Unlock The Value of Human Capital	L3, L4	2	12 Maret - 6 Mei 2020 March, 12 - May 6 2020		112
156	Hari Mutu Sharing Knowledge "Investasi Reksadana" Knowledge Sharing Quality Day "Mutual Funds Investment"	L3, L4	18	13 Maret 2020 March, 13 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
157	Pembekalan & Sertifikasi MR Level 2 Level 2 Risk Management Certification & Training	L2, L3	32	12 - 13 Maret 2020 March, 12 - 13 2020	Ruang Serbaguna Lt 10 Multipurpose Room, 10 th floor	18
158	Java Programming Full Package	L4	2	9 - 13 Maret 2020 March, 9 - 13 2020		30
159	Bimbingan Teknis Ketenagakerjaan Employment Technical Guidance	L4	1	4 - 5 Maret 2020 March, 4 - 5 2020	Hotel Oasis Amir	18
160	Ujian Sertifikasi MR level 2 Level 2 Risk Management Certification Exam	L2, L3	25	7 Maret 2020 March, 7 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
161	Pembekalan & Sertifikasi MR Level 2 Level 2 Risk Management Training & Certification	L2, L3	25	5 - 6 Maret 2020 March, 5 - 6 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	18
162	IELTS PREPARATION CLASS	L4	9	4 Maret 2020 March, 4 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	0,67

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
163	Jamkrindo Executive Development Program In Class Phase 2 Batch 2	L1	11	2 - 4 Maret 2020 March, 2 - 4 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	0,67
164	Jamkrindo Executive Development Program In Class Phase 2 Batch 1	L1	9	24 - 26 Februari 2020 February, 24 - 26 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	0,67
165	Ujian Sertifikasi MR level 2 (Batch V) Level 2 Risk Management Certification Exam (Batch V)	L3	24	22 Februari 2020 February, 22 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	0,67
166	Machine Learning	BOD, L3	3	19 Februari - 25 Maret 2020 February, 19 - March, 25 2020		72
167	Business Leaders Development Program Pengembangan L1 - Prasetiya Mulya Business Leaders Development Program on L1 Development- Prasetiya Mulya	L1, L2, L3		19 - 21 Februari 2020 February, 19 - 21 2020	Prasetiya Mulya	21
168	Pembekalan & Sertifikasi MR level 2 untuk Kepala Bagian (Batch V) Level 2 Risk Management Training & Certification for Head of Divisions (Batch V)	L3	22	20 - 21 Februari 2020 February, 20 - 21 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
169	IELTS PREPARATION CLASS	L4	15	19 Februari 2020 February, 19 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	3
170	Training Penggunaan Aplikasi Elektronik Pengolahan Pajak Terpadu (e-PPT) Training on Elektronik Pengolahan Pajak Terpadu (Electronic Integrated Tax Processing/e-PPT) App Usage	L3, L4	51	18 Februari 2020 February, 18 2020	Ruang Serbaguna Lt 10 Multipurpose Room, 10 th floor	20
171	Training Penggunaan Aplikasi Elektronik Pengolahan Pajak Terpadu (e-PPT) Training on Elektronik Pengolahan Pajak Terpadu (Electronic Integrated Tax Processing/e-PPT) App Usage	L3, L4	54	17 Februari 2020 February, 17 2020	Ruang Serbaguna Lt 10 Multipurpose Room, 10 th floor	20
172	Management Information System For Non-IT Background	L3, L4	51	13 - 14 Februari 2020 February, 13 - 14 2020	Ruang Serbaguna Lt 10 Multipurpose Room, 10 th floor	36
173	IELTS PREPARATION CLASS	L3, L4	21	12 Februari 2020 February, 12 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	3



No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
174	IELTS PREPARATION CLASS	L4	21	5 Februari 2020 February, 5 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	3
175	Ujian Sertifikasi MR Level 1 (Batch V) Level 1 Risk Management Certification Exam (Batch V)	L3, L4	19	8 Februari 2020 February, 8 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
176	Ujian Sertifikasi MR Level 2 (Batch IV) Level 2 Risk Management Certification Exam (Batch IV)	L3, L4	24	8 Februari 2020 February, 8 2020	Ruang Serbaguna Lt 10 Multipurpose Room, 10 th floor	2
177	Pembekalan & Sertifikasi MR Level 1 untuk Kepala Bagian (Batch V) Level 1 Risk Management Training & Certification for Head of Divisions (Batch V)	L3, L4	15	6 - 7 Februari 2020 February, 6 - 7 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	16
178	Pembekalan & Sertifikasi MR Level 2 untuk Kepala Bagian (Batch IV) Level 2 Risk Management Training & Certification for Head of Divisions (Batch IV)	L3, L4	24	6 - 7 Februari 2020 February, 6 - 7 2020	Ruang Serbaguna Lt 10 Multipurpose Room, 10 th floor	16
179	"Permasalahan Dan Resiko Penjamin" "Insurer Problems and Risks"	L3, L4	14	31 Januari 2020 January, 31 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
180	English Club (Fun Class) "Banking and insurance industries in the world expectations"	L4	10	30 Januari 2020 January, 30 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
181	Boot Camp Training of The Trainers Modul 1 (Angkatan 2) - analisa kredit Boot Camp Training of The Trainers Module 1 (Batch 2) – Credit Analysis	L3	25	29 Januari - 2 Februari 2020 January, 29 - February, 2 2020	Hotel Padjadjaran	55
182	Boot Camp Training of The Trainers Modul 2 (Angkatan 1) Boot Camp Training of The Trainers Module 2 (Batch 1)	L3	25	29 Januari - 2 Februari 2020 January, 29 - February, 2 2020	Hotel Padjadjaran	55
183	IELTS PREPARATION CLASS	L4	25	29 Januari 2020 January, 29 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	3
184	English Club (Fun Class) " The importance of reading for our careers"	L3, L4	13	23 Januari 2020 January, 23 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
185	Business Leader Development Program - PRASMUL	L1, L2, L3	21	23 - 24 Januari 2020 January, 23 - 24 2020	Jakarta	14

No.	Nama Pelatihan Name of Training	Golongan Peserta Pelatihan Group of Training Participants	Jumlah Peserta Number of Participants	Waktu dan Tempat Time and Place	Durasi Pelatihan Training Duration	Biaya Costs
186	IELTS PREPARATION CLASS	L4	27	22 Januari 2020 January, 22 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	3
187	Jamkrindo Executive Development Program Phase 1 Batch 2	L1	9	20 - 27 Januari 2020 January, 20 - 27 2020	Jakarta	48
188	English Club (Fun Class) "Is time more valuable than money"	L3, L4	37	16 Januari 2020 January, 16 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
189	IELTS PREPARATION CLASS	L3, L4	21	15 Januari 2020 January, 15 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	3
190	Jamkrindo Executive Development Program Phase 1 Batch 1	L1	9	13 - 17 Januari 2020 January, 13-17 2020	Jakarta	40
191	In House Training Dynamic Business Presentation utk L1	L1	24	9 - 10 Januari 2020 January, 9-10 2020	Jakarta	16
192	English Club (Fun Class) "Getting to Know the World More"	L3, L4	11	9 Januari 2020 January, 9 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	2
193	IELTS PREPARATION CLASS	L3, L4	32	8 Januari 2020 January, 8 2020	Ruang Pelatihan Lt 8 Training Room, 8 th floor	3

Jumlah Karyawan yang mengikuti dan Realisasi Biaya Pelatihan dan Pendidikan

Number of Employees Participating and Realization of Training and Education Costs [404-2, 6.c.2d]

Indikator Indicators	2020	2019	(Peningkatan/ Penurunan) (Increase/Decrease)	Keterangan Description
Jumlah Karyawan Yang Menjadi Peserta Diklat Number of Employees Who Participated in Training and Education	28.359	13.124	116%	Meningkat Increase
Realisasi Biaya Kegiatan Realization of Activity Costs	18.405.366.880	26.791.796.827	45,6%	Menurun Decrease



LINGKUNGAN YANG LAYAK DALAM BEKERJA DAN KEPUASAN PEGAWAI

Decent Work Environment and Employee Satisfaction [6.c.2.c]

Jamkrindo berkomitmen menyediakan lingkungan yang layak untuk seluruh pegawai yang bekerja di Perusahaan. Lingkungan yang layak mencakup berbagai fasilitas yang disediakan oleh Perusahaan.

Jamkrindo is committed to providing a decent work environment for all employees who work at the Company. A proper work environment includes various facilities provided by the Company.

Untuk memastikan apakah karyawan puas dengan komitmen Perusahaan dan memiliki keterikatan yang baik dengan Perusahaan, maka secara regular perusahaan mengimplementasi dan melakukan survei kepuasan dan keterikatan karyawan. Survei ini dilakukan guna melihat persepsi karyawan dalam aspek kepuasan dan keterikatan mereka terhadap perusahaan dan kebijakan serta program pengelolaan SDM yang telah dijalankan di tahun 2020. Output dari survei ini pada tahun 2020 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan karyawan terhadap perusahaan adalah sebesar 80,94 dan termasuk dalam kategori baik. Sedangkan survei keterikatan karyawan menunjukkan bahwa keterikatan karyawan Jamkrindo adalah sebesar 88,90 yang berarti tergolong sebagai kategori terikat. [6.c.2.c]

To ensure whether employees are satisfied with the Company's commitments, the company regularly implements and conducts employee engagement surveys. This survey was conducted to see the perceptions of employees in terms of their attachment to the company and the HR management policies and programs that have been implemented in 2020. The output of the employee engagement survey in 2020 shows that the level of employee engagement to the company is 80.94% and included in the category good. While the employee engagement survey shows that Jamkrindo employee engagement is 88.90 which means it is classified as a bound category. [6.c.2.c]

Indikator dan Hasil Survei Kepuasan dan Keterikatan Karyawan

Employee Satisfaction and Engagement Survey Indicators and Results

Indikator Skor Kepuasan Karyawan <i>Score Indicator of Employee Satisfaction</i>	Kategori Keterikatan <i>Attachment Category</i>
Setuju (Skor 3) <i>Agree (Score 3)</i>	Terikat <i>Bound</i>
Ragu-ragu (Skor 2) <i>In Doubt (Score 2)</i>	Tidak Terikat <i>Not bound</i>
Tidak Setuju (Skor 1) <i>Disagree (Score 1)</i>	Tidak Terikat Sama Sekali <i>Not Bound at all</i>
Skor kepuasan Karyawan: 80,94 <i>Kategori Baik</i>	Skor Keterikatan Karyawan 88,90 <i>Kategori Terikat</i>

KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3)

Occupational Safety and Health (OSH) [103-1, 103-2, 103-3, 403]

Perusahaan telah memiliki kebijakan K3 yang merupakan acuan dalam mencapai tujuan *zero accident* atau nihil angka kecelakaan dalam operasional perusahaan. Kebijakan tersebut adalah sebagai berikut: [103-1, 103-2]

1. Surat Edaran Nomor 132/SE/4/XII/2020 tanggal 30 Januari 2021 tentang Pengelolaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja PT Jaminan Kredit Indonesia
2. Perdir No.13/Per-Dir/4/VIII/2018 tentang Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perum Jaminan Kredit Indonesia
3. Surat Edaran No.24/SE/4/VIII/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3)
4. Per-Dir No.45/Per-Dir/XII/2012 tentang Kebijakan Umum Penanganan Kondisi Darurat di Lingkungan Kerja Perum Jaminan Kredit Indonesia

Hal ini sejalan dengan komitmen perusahaan yang menciptakan lingkungan kerja aman, nyaman dan kondusif. Terdapat beberapa langkah yang telah ditempuh oleh perusahaan, seperti menyediakan alat keselamatan kerja, jalur evakuasi bahaya, *sprinkle, hydrant*, alat pemadam kebakaran, kotak P3K di setiap lantai gedung kantor. Selain itu, sejak tahun 2019 perusahaan juga telah mengikutsertakan karyawan dalam program asuransi kesehatan BPJS dan BRI Life. [103-1, 103-2]

Sejalan dengan upaya yang telah dilakukan, Jamkrindo berhasil meneruskan pencapaian tahun 2020 dengan mencapai angka kecelakaan kerja nol.

Organisasi Pelaksana K3

[103-1, 103-2, 403-1, 403-3, 403-4]

Berdasarkan Peraturan Menteri Kerja No.PER-04/MEN/1987 tentang Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja serta Tata Cara Penunjukan Ahli Keselamatan Kerja, PTSI membentuk Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (P2K3) guna melaksanakan K3 yang efektif. Fungsi dari P2K3 ini adalah mendorong dan memantau implementasi K3 secara berkelanjutan.

P2K3 ini merupakan badan pembantu di tempat kerja yang merupakan wadah kerja sama antara pengusaha dan pekerja guna saling berpartisipasi aktif dalam penerapan K3. Tugas P2K3 adalah memberikan saran dan pertimbangan (baik diminta maupun tidak) kepada pengusaha mengenai masalah K3. Pada tahun 2020, Jamkrindo telah merencanakan pembentukan badan P2K3 tersebut

The company has an OSH policy which is a reference in achieving the goal of zero accidents in the company's operations. The policies are as follows:

[103-1, 103-2]

1. Circular Number 132/SE/4/XII/2020 dated January 30,2021 on Safety Management System Management and Occupational Health PT Jaminan Kredit Indonesia
2. Director Regulations No.13/Per-Dir/4/ VIII/2018 on the Occupational Safety and Health Management System of the Perum Jaminan Kredit Indonesia
3. Circular No.24/SE/4/VIII/2018 on the Guidelines for Implementation of Occupational Safety and Health Management Systems
4. Director Regulations No.45/Per-Dir/XII/ 2012 on the General Policies for Handling Emergency Conditions in the Work Environment of Perum Jaminan Kredit Indonesia

This is in line with the company's commitment to create a safe, comfortable and conducive work environment. There are several steps that have been taken by the company, such as providing work safety equipment, hazard evacuation routes, sprinklers, hydrants, fire extinguishers, as well as first aid kits on each floor of the office building. In addition, since 2019 the company has also enrolled employees in the BPJS and BRI Life health insurance programs. [103-1, 103-2]

In line with the efforts that have been made, Jamkrindo has succeeded in continuing its 2018 achievements by achieving a zero work accident rate.

OSH Implementing Organization

[103-1, 103-2, 403-1, 403-3, 403-4]

Based on the Minister of Work Regulation No.PER-04/MEN/1987 on the Committee for the Guidance of Occupational Safety and Health and Procedures for the Appointment of Work Safety Experts, PTSI has formed a Committee for Occupational Safety and Health (Panitia Pembina Keselamatan Dan Kesehatan Kerja or P2K3) to implement effective OSH. The function of P2K3 is to encourage and monitor the implementation of OSH on an ongoing basis.

P2K3 is an auxiliary body in the workplace which is a forum for cooperation between employers and workers to actively participate in the implementation of K3. The task of P2K3 is to provide advice and considerations (whether requested or not) to entrepreneurs regarding K3 issues. In 2020, Jamkrindo has planned to establish the P2K3 body under the name of the Occupational Safety and Health



dengan nama Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3). Tim Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P2K3) PT Jamkrindo dibentuk pada 12 Maret 2021 dengan Penanggung jawab adalah Direktur MSDM dan dikoordinatori oleh Kepala Bagian Administrasi dan Umum Divisi Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) dengan tim anggota P2K3 sebanyak 60 (enam puluh) orang yang terdiri dari regu evaluasi, regu penyelamat dokumen, dan regu pemadam lantai/zona. Kemudian dalam P2K3 juga terdapat koordinator badan pengelola, koordinator regu keamanan, koordinator engineer dan tim tanggap darurat yang terdiri dari 11 (sebelas) pihak dengan total 21 (dua puluh satu) anggota. Pada tahun 2020 belum dilakukan sosialisasi karena masih dalam tahap persiapan. Sosialisasi direncanakan dilaksanakan pada tahun 2021. **[403-4, 403-5]**

Melalui berbagai upaya tersebut, tingkat kecelakaan kerja sama dengan tahun sebelumnya, yaitu NOL (zero accident). Tentunya pencapaian ini dihasilkan dari kerja keras semua pihak untuk tetap disiplin mengikuti prosedur serta konsistensi berbagai pihak untuk tetap menjunjung tinggi prinsip-prinsip K3. Berikut ini tabel yang menggambarkan tingkat kecelakaan kerja selama tahun 2020 dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya.

Jumlah Kecelakaan Kerja dan Hilang Hari Kerja

Number of Work Accidents and Missing Work Days **[403-9, 403-10]**

Keterangan Information	2020	2019	2019
Korban Kecelakaan Kerja Work Accident Victims	0	0	0
Kecelakaan yang mengakibatkan kehilangan hari kerja Accidents that resulted in lost work days	0	0	0
Kecelakaan yang tidak mengakibatkan kehilangan hari kerja Accidents that did not result in lost work days	0	0	0
Jumlah Jam Kerja Kumulatif Total Cumulative Working Hours	7,505,809	5,054,270	3,489,535
Jumlah Hilang Hari Kerja Total Lost Time	0	0	0

Statistik K3 (orang)

OHS Statistics (people) **[403-9, 403-10]**

Tingkat Kecelakaan Kerja Occupational Accident Level	2020	2019	2019
Ringan Minor	0	0	0
Berat Major	0	0	0
Fatal Fatal	0	0	0
Jumlah Total	0	0	0

Committee (P2K3). The formation of the team is expected to be carried out in early 2021. The Ape Safety and Health Committee (P2K3) PT Jamkrindo was formed on March 12, 2021 with the person in charge is the Director of HR and coordinated by the Head of Administration and General Affairs of the Human Resources Management (MSDM) Division with a team of 60 (sixty) P2K3 members consisting of an evaluation team, document rescue team, and floor/floor firefighters. zone. Then in P2K3 there are also coordinators of the management body, coordinator of the security team, coordinator of engineers and an emergency response team consisting of 11 (eleven) parties with a total of 21 (twenty one) members. In 2020, socialization has not been carried out because it is still in the preparation stage. The socialization is planned to be held in 2021. **[403-4, 403-5]**

Through these various measures, the occupational accident rate has decreased by xx% compared to the previous year. Of course, this achievement resulted from the hard work of all parties to remain disciplined in following procedures and consistency of various parties to uphold the principles of OSH. The following table depicts the rate of work accidents during 2020 compared to the two previous years.

MASYARAKAT LOKAL

Local Communities [103-1, 103-2, 103-3, 413]

Sebagai bentuk komitmen Jamkrindo dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera di wilayah sekitar operasional Perusahaan, Jamkrindo mengimplementasikan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan. Program tersebut kemudian diturunkan melalui penerapan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL). Program Kemitraan bertujuan untuk memberikan kemudahan akses permodalan bagi usaha kecil dengan skema dana bergulir sekaligus melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan pertumbuhan dan pengembangan usaha masing-masing mitra binaan.

Sementara itu Program Bina Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat bagi komunitas setempat dan masyarakat umum dalam bentuk bantuan bagi korban bencana alam dan upaya revitalisasinya, non bencana alam seperti wabah, bantuan di bidang pendidikan dan pelatihan, dan bantuan sosial dalam rangka pementasan kemiskinan. Diharapkan melalui kegiatan ini akan tercipta sinergi antara Perusahaan dengan masyarakat sekitar sehingga secara tidak langsung akan menumbuhkan rasa percaya serta dukungan positif dari masyarakat terhadap proses bisnis Perusahaan. Dengan adanya sinergi tersebut diharapkan terjadi pemberdayaan masyarakat yang dapat meningkatkan nilai sosial. [103-1, 103-2]

PT Jamkrindo telah menyalurkan dana program kemitraan sebesar Rp4.372.000.000 melalui 23 cabang di seluruh Kantor Cabang Perusahaan di Indonesia. Hal ini berarti penyaluran dana mengalami penurunan senilai 14.80% dibanding tahun 2019, yaitu sebesar Rp5.413.000.000. Dibandingkan dengan RKA Tahun 2020 sebesar Rp4.208.000.000 maka realisasi Program Kemitraan tahun 2020 tercatat sebesar 104%. Dana disalurkan kepada Mitra Binaan untuk berbagai sektor usaha. Dalam pelaksanaan penyaluran dana Program Kemitraan. Dana Program Kemitraan disalurkan ke tujuh sektor usaha mitra binaan sebagai berikut:

1. Sektor Industri
2. Sektor Perdagangan
3. Sektor Pertanian
4. Sektor Peternakan
5. Sektor Perkebunan
6. Sektor Perikanan
7. Sektor Jasa

[413-1, 413-2]

As Jamkrindo's commitment for a prosperous community around the Company's operations region, Jamkrindo has implemented Social and Environmental Responsibility Program. The program is then channeled through the implementation of Partnerships and Community Development Program (PKBL). The Partnership Program aims to bring ease of access for the funding of small businesses using a revolving fund scheme while also giving education to increase the growth and development of each and every business partners.

Meanwhile, the Community Development Program is conducted to increase the quality of life and environment which brings benefits for the local community and general public in the form of relief for natural disaster victims and the revitalization process, non-natural disasters such as epidemics, aid for education and training, and social aid in order to eradicate poverty. From these activities, we hope for a synergy between the Company and local community which then would indirectly build trust and positive support from the community to the business process of the Company. With this synergy, we hope for empowerment in the community which then increases the social value. [103-1, 103-2]

PT Jamkrindo has distributed partnership program funds of IDR4,372,000,000 through the 23 branches in all Company Branch Offices in Indonesia. This indicates a decrease in fund distribution by 14.80% compared to 2019 with IDR5,413,000,000. When compared to the 2020 Company Work Plan and Budget of IDR4,208,000,000, this suggests that the realization of Partnership Programs in the year 2020 amounted to 104%. The funds were distributed to Development Partners of different business sectors. In the event of Partnership Program funds distribution, the funds were distributed to seven business sectors of the development partners as follows:

1. Industrial Sector
2. Trade Sector
3. Agricultural Sector
4. Animal Husbandry Sector
5. Plantation Sector
6. Fishery Sector
7. Service Sector

[413-1, 413-2]



Realisasi Penyaluran Dana Program Kemitraan

Realization of The Partnership Program Fund [413-1, 413-2]

Uraian Description	2020		2019		Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)	
	Mitra Binaan (MB) Foster Partner (FP)	Jumlah (Rp) Total (IDR)	Mitra Binaan (MB) Foster Partner (FP)	Jumlah (Rp) Total (IDR)	Mitra Binaan (MB) Foster Partner (FP)	Jumlah (Rp) Total (IDR)
Sektor Industri Industrial Sector	12	380.000.000	57	2.287.500.000	(78,95%)	(83,39%)
Sektor Perdagangan Trade Sector	62	1.912.000.000	17	639.000.000	264,7%	199,2%
Sektor Pertanian Agricultural Sector	22	395.000.000	1	15.000.000	2100%	2533%
Sektor Peternakan Livestock Sector	25	770.000.000	15	750.000.000	66,67%	2,67%
Sektor Perkebunan Plantation Sector	-	-	22	1.100.000.000	(100%)	(100%)
Sektor Perikanan Fisheries Sector	1	30.000.000	2	80.000.000	(50%)	(62,5%)
Sektor Jasa Service Sector	30	885.000.000	7	260.000.000	328,6%	240,38%
Sektor Lainnya Other Sector	-	-	-	-	-	-
Sub Jumlah Sub Total	152	4.372.000.000	121	5.131.500.000	25,62%	(14,80%)
Dana Pembinaan Kemitraan Partnership Coaching Fund	-	-	-	-	-	-
Jumlah Total	152	4.372.000	121	5.131.500.000	25,62%	(14,80%)

Komitmen PT Jamkrindo untuk mendukung pembangunan berkelanjutan nasional diwujudkan dengan fokus perusahaan pada aktivitas bina lingkungan. Program Bina Lingkungan adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat di sekitar wilayah Kantor PT Jamkrindo, yang diselenggarakan melalui pemanfaatan dana dari bagian laba Perusahaan. Hal ini dilatarbelakangi oleh kesadaran perusahaan atas keberadaan masyarakat di sekitar perusahaan dan Permen BUMN No.02/MBU/04/2020.

PT Jamkrindo commitment to support national sustainable development is manifested by the company's focus on environmental development activities. The Community Development Program is a program to empower the social conditions of the community around the PT Jamkrindo office area, which is organized through the use of funds from the Company's profit share. This is motivated by the company's awareness of the existence of the community around the company and the BUMN Regulation No.02/MBU/04/2020.

Adapun Program Bina Lingkungan yang direncanakan PT Jamkrindo meliputi 7 (tujuh) jenis bantuan sebagai berikut:

1. Bantuan korban bencana alam
2. Bantuan pendidikan, dapat berupa pelatihan, prasarana dan sarana Pendidikan
3. Bantuan peningkatan kesehatan
4. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum
5. Bantuan sarana ibadah

The Community Development Program planned by PT Jamkrindo includes 7 (seven) types of assistance as follows:

1. Assistance for victims of natural disasters
2. Educational assistance, can be in the form of training, educational infrastructure and facilities
3. Health improvement assistance
4. Assistance for the development of public infrastructure and/or facilities
5. Religious facilities assistance

6. Bantuan pelestarian alam; dan/atau
7. Bantuan sosial masyarakat dalam rangka pengentasan kemiskinan, termasuk untuk:
 - a. Elektrifikasi di daerah yang belum teraliri listrik;
 - b. Penyediaan sarana air bersih;
 - c. Penyediaan sarana mandi cuci kakus (MCK);
 - d. Bantuan pendidikan, pelatihan, pemagangan, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kemandirian ekonomi usaha kecil selain Mitra Binaan Program Kemitraan;
 - e. Perbaikan rumah untuk masyarakat tidak mampu;
 - f. Bantuan pembibitan untuk pertanian, peternakan dan perikanan; atau
 - g. Bantuan peralatan usaha.

6. Nature conservation assistance; and/or
7. Community social assistance in the context of poverty alleviation, including for:
 - a. Electrification in areas that are not yet electrified;
 - b. Provision of clean water facilities;
 - c. Provision of bathing and washing toilet facilities (MCK);
 - d. Education assistance, training, apprenticeship, promotion, and other forms of assistance related to efforts to increase the economic independence of small businesses other than Partnership Program Foster Partners;
 - e. Home improvements for the poor;
 - f. Nursery assistance for agriculture, livestock and fisheries; or
 - g. Business equipment assistance.

Selama tahun 2020, Jamkrindo telah menyalurkan ana Program Bina Lingkungan PT Jamkrindo tahun 2020 tercatat sebesar Rp11.787.877.391. Apabila dibandingkan dengan RKA tahun 2020 sebesar Rp11.760.500.000, maka realisasi dana Program Bina Lingkungan tercatat sebesar 100,23%.

During 2020, Jamkrindo has distributed PT Jamkrindo's 2020 Community Development Program, which was recorded at IDR11,787,877,391. When compared with the 2020 RKA of IDR11,760,500,000, the realization of the Community Development Program funds was recorded at 100.23%.

Realisasi Program Bina Lingkungan

Realization of Community Development Program [413-1, 413-2, 6.d.1]

No.	Uraian Description	2020	2019	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)
1	Bantuan Korban Bencana Alam Aid for Victims of Natural Disasters	2.967.326.379	237.032.782	1.151,86%
2	Bantuan Pendidikan dan/atau Pelatihan Educational and/or Training Assistance	2.029.064.103	1.001.117.503	102,68%
3	Bantuan Peningkatan Kesehatan Health Improvement Assistance	589.155.332	233.414.000	152,41%
4	Bantuan Pengembangan Prasarana dan Sarana Umum Public Infrastructure & Facilities Development Assistance	198.933.826	201.539.566	(1,29%)
5	Bantuan Sarana Ibadah Worship Facilities Assistance	1.443.994.364	517.951.600	178,79%
6	Bantuan Pelestarian Alam Nature Preservation Assistance	231.261.536	137.793.333	67,83%
7	Bantuan Sosial Masyarakat dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan Social Community Assistance for Poverty Alleviation	3.887.469.898	2.973.553.093	30,73%
8	Bantuan Korban Bencana Alam dan Non Alam karena Wabah Assistance for Victims of Natural and Non-Natural Disasters due to Epidemic	710.671.954	-	100%
Jumlah/Total		11.787.877.391	5.302.401.877	122%



TANGGUNG JAWAB PRODUK

Tanggung Jawab Produk [103-1, 103-2, 103-3, 417]

Tahun 2020 merupakan tahun penuh tantangan dan optimisme Jamkrindo dalam berkompetisi bisnis. Status perusahaan yang diubah menjadi Perseroan menjadikan Jamkrindo berupaya untuk meningkatkan kinerja dan melakukan optimalisasi pelayanan dari program yang dimiliki. Jamkrindo juga berupaya dalam mengembangkan produk baru pada penjaminan kredit non konvensional. Dalam menjalankan upaya-upaya tersebut, Jamkrindo secara konsisten menggaungkan tagline *LET'S CHANGE AND GROW*. Hal ini menunjukkan bahwa kini Jamkrindo berfokus pada perubahan sistem operasional, cara pandang bisnis, pola bisnis, sikap kerja, dan perubahan lainnya yang diharapkan dapat menghasilkan pertumbuhan bisnis yang bergerak positif. [103-1, 103-2, 6.f.1]

Operasional Jamkrindo tidak lepas dari peran pemangku kepentingan eksternal, yaitu pelanggan. Kepuasan pelanggan menjadi aspek penting bagi perusahaan. Seluruh produk dan jasa yang ditawarkan oleh Jamkrindo telah dievaluasi keamanannya bagi mitra Jamkrindo dan telah disetujui oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk memberikan layanan terbaik, Jamkrindo memberikan informasi produk dan layanan secara transparan. Perusahaan telah memanfaatkan secara optimal penggunaan situs perusahaan, brosur, banner dan mobil keliling untuk mengkomunikasikan informasi produk atau layanan kepada pelanggan. Hal ini memberikan pengaruh positif kepada perusahaan, karena tidak pernah terjadi insiden ketidakpatuhan terkait informasi produk dan layanan, dan tidak terdapat dampak negatif dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh Jamkrindo. Pada tahun 2020 juga tidak terdapat produk yang ditarik kembali. [103-2, 103, 417-1, 6.f.2, 6.f.3, 6.f.4]

Survei Kepuasan dan Keterikatan Pelanggan [103-3, 6.f.5]

Kepuasan pelanggan menjadi salah satu indikator pencapaian yang mampu diraih oleh perusahaan terkait pemenuhan upaya-upaya perusahaan yang diberikan perusahaan kepada pelanggan. Aspek ini telah diukur dengan mengacu pada Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 75/SPK/UMU/XI/2020 tentang Pengadaan Konsultan untuk Survei Kepuasan Pelanggan dan Survei Keterikatan pelanggan. Pelaksanaannya pun mengacu pada kaidah implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN yang ditetapkan oleh Kementerian BUMN melalui surat No. S-445/D7.MBU/10/2016. Survei kepuasan pelanggan ini melibatkan 3 (tiga) responden yang terdiri dari: Mitra kerja saat ini, calon mitra kerja, dan pesaing mitra kerja. Pelanggan juga dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu jenis produk dan jenis instansinya.

*2020 is a year full of challenges and Jamkrindo's optimism in business competition. The change in company status into a Company (Perseroan) has motivated Jamkrindo to increase its performance and conduct service optimization from its current programs. Jamkrindo is also putting in efforts to develop new products in non-conventional credit guarantee. In operating the above efforts, Jamkrindo consistently echoes the tagline of *LET'S CHANGE AND GROW*. This shows that Jamkrindo is now focusing on change in operational systems, business outlook, business pattern, work ethics, and other changes which are hoped to bring a positive business growth. [103-1, 103-2, 6.f.1]*

Jamkrindo's operations cannot be separated from the role of external stakeholders, namely customers. Customer satisfaction is an important aspect for the company. All products and services offered by Jamkrindo have been evaluated for safety for Jamkrindo partners and have been approved by the Financial Services Authority (OJK). To provide the best service, Jamkrindo provides product and service information transparently. The company has made optimal use of the company's website, brochures, banners and mobile cars to communicate product or service information to customers. This has a positive impact on the company, because there have never been incidents of non-compliance related to product and service information, and there has been no negative impact from the products and services offered by Jamkrindo. In 2020 there were also no recalled products. [103-2, 103, 417-1, 6.f.2, 6.f.3, 6.f.4]

Customer Satisfaction and Engagement Survey [103-3, 6.f.5]

Customer satisfaction has become one of the achievement indicators that the company managed to fulfill regarding the fulfillment of the company's efforts for the customers. This aspect has been measured using the reference of Work Order (SPK) No:75/SPK/UMU/XI/2020 regarding The Provision of Consultants for Customer Satisfaction Survey and Customer Engagement Survey. The implementation is also done with reference to the implementation principles of State-Owned Enterprise Criteria for Superior Performance (KPKU BUMN) which was set by the Ministry of State-Owned Enterprise through the letter No.S-445/D7.MBU/10/2016. This customer satisfaction survey involves 3 (three) respondents consisting of: current work partners, future work partner candidates, and work partner competitors. The customers are also divided into 2 (two) groups, depending on the type of products and type of institutions.

Survei kepuasan dan keterikatan pelanggan pada tahun 2020 ini dilakukan di 31 (tiga puluh satu) Unit Kerja kota di Indonesia, yaitu: **[417-1, 417-2, 481-1]**

This survey of customer satisfaction and engagement in 2020 was conducted in 31 (thirty one) urban work units in Indonesia, namely: **[417-1, 417-2, 481-1]**

No.	Unit Kerja Work Unit
1	Kantor Cabang Medan <i>Medan Branch Office</i>
2	Kantor Cabang Padang <i>Padang Branch Office</i>
3	Kantor Cabang Tanjung Pinang <i>Tanjung Pinang Branch Office</i>
4	Kantor Cabang Batam <i>Batam Branch Office</i>
5	Kantor Cabang Palembang <i>Palembang Branch Office</i>
6	Kantor Cabang Jambi <i>Jambi Branch Office</i>
7	Kantor Cabang Pangkalpinang <i>Pangkalpinang Branch Office</i>
8	Kantor Cabang Jakarta <i>Jakarta Branch Office</i>
9	Kantor Cabang Serang <i>Serang Branch Office</i>
10	Kantor Cabang Tangerang <i>Tangerang Branch Office</i>
11	Kantor Cabang Bandung <i>Bandung Branch Office</i>
12	Kantor Cabang Cirebon <i>Cirebon Branch Office</i>
13	Kantor Cabang Sukabumi <i>Sukabumi Branch Office</i>
14	Kantor Cabang Yogyakarta <i>Yogyakarta Branch Office</i>
15	KUP Magelang <i>Magelang KUP</i>
16	Kantor Cabang Pekalongan <i>Pekalongan Branch Office</i>

No.	Unit Kerja Work Unit
17	Kantor Cabang Purwokerto <i>Purwokerto Branch Office</i>
18	Kantor Cabang Solo <i>Solo Branch Office</i>
19	Kantor Cabang Surabaya <i>Surabaya Branch Office</i>
20	Kantor Cabang Malang <i>Malang Branch Office</i>
21	Kantor Cabang Banyuwangi <i>Banyuwangi Branch Office</i>
22	Kantor Cabang Mataram <i>Mataram Branch Office</i>
23	Kantor Cabang Kupang <i>Kupang Branch Office</i>
24	Kantor Cabang Sumbawa Besar <i>Sumbawa Besar Branch Office</i>
25	Kantor Cabang Samarinda <i>Samarinda Branch Office</i>
26	Kantor Cabang Tarakan <i>Tarakan Branch Office</i>
27	Kantor Cabang Balikpapan <i>Balikpapan Branch Office</i>
28	Kantor Cabang Makassar <i>Makassar Branch Office</i>
29	Kantor Cabang Jayapura <i>Jayapura Branch Office</i>
30	Kantor Cabang Ternate <i>Ternate Branch Office</i>
31	Kantor Cabang Khusus Jakarta <i>Jakarta Special Branch Office</i>



Hasil dari survei ini didapatkan bahwa nilai *Customer Satisfaction Indeks* (CSI) Jamkrindo 2020 adalah 85.02 yang masuk dalam kategori BAIK. Sedangkan, skor keterikatan pelanggan adalah sebesar 86.03.

The results of this survey found that the value of Customer SatisfactionThe Jamkrindo 2020 index (CSI) is 85.02 which is included in GOOD category. Meanwhile, the customer engagement score is amounted to 86.03.

Keterikatan Pelanggan

Customer Engagement

Tahun Year	CSI	Kenaikan (Penurunan) Increase (Decrease)		
		Mitra Eksisting Existing Work Partner	Mantan Mitra Ex-Mitra	Calon Mitra Prospective Work Partners
2020	85.02	84.43	84.39	84.75

Selain itu, selama tahun 2020 Jamkrindo tidak mendapatkan keluhan dari para pemangku kepentingan mengenai reputasi perusahaan.

In addition, during 2020 Jamkrindo didn't get complaints from stakeholders regarding reputation company.

KEPATUHAN SOSIAL EKONOMI

Socio-economic Compliance **[103-1, 103-2, 103-3, 419]**

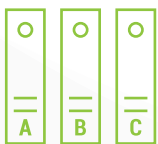


Kepatuhan sosial ekonomi merupakan suatu tindakan yang menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan tindakan etis kepada vendor, lembaga pemerintah, karyawan, konsumen, serta masyarakat lokal. Sebagai perusahaan BUMN, Jamkrindo berkewajiban untuk menjalankan kepatuhan sosial ekonomi tersebut yakni dengan menjunjung tinggi hukum mematuhi segala peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan kepercayaan dan menjaga eksistensi Jamkrindo agar kegiatan bisnis dapat berjalan dengan lancar tanpa ada sandungan hukum. **[103-1, 103-2]**

Pada tahun 2020, terdapat 1 (satu) sanksi administrasi tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dengan Surat OJK Nomor S-85/NB.222/2020 tanggal 13 Juli 2020 perihal sanksi peringatan tertulis pertama yang berakhir dengan sendirinya atas Pelanggaran Pasal 61 ayat (2) POJK Nomor 2/POJK.05/2017. Disebabkan karena keterlambatan melaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), bahwa Perusahaan telah melakukan pengumuman hasil neraca dan perhitungan laba rugi singkat pada surat kabar harian di Indonesia yang memiliki peredaran luas di lingkup wilayah operasional Lembaga Penjamin. **[103-3, 419-1]**

*Socioeconomic compliance is a measure that shows the Company's ethical actions to its vendors, government agencies, employees, consumers, and local communities. As a state-owned enterprise, Jamkrindo is obligated to follow said socioeconomic compliance by upholding the law, abiding the rules and regulations. This is done with the purpose of earning trust and maintaining the existence of Jamkrindo so that business activities may be performed smoothly without any legal missteps. **[103-1, 103-2]***

*In 2020, there was 1 (one) written administrative sanction given by Financial Services Authority (OJK) through OJK Letter No. S-85/NB.222/2020 dated July 13 2020 regarding the first written warning sanction which ends by itself for the Violation of Article 61 paragraph (2) POJK No. 2/POJK.05/2017. This was given due to delay in reporting to Financial Services Authority (OJK) that the Company has given an announcement of its balance sheet results and short income statement in a daily Indonesian newspaper which was widely distributed in the operational vicinity of the Guarantor Institution. **[103-3, 419-1]***



INDEX REFERENSI SILANG

Cross Reference Index





INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP GRI STANDARDS – OPSI INTI [102-55]

Cross Reference Index to GRI Standards - Core Options [102-55]

Aspek Material atau Pengungkapan Umum <i>Material Aspects or General Disclosure</i>	GRI Standar <i>GRI Standards</i>	Indeks yang dilaporkan <i>Reported Index</i>	Pengungkapan <i>Disclosure</i>	Halaman <i>Page</i>
PENGUNGKAPAN UMUM GENERAL DISCLOSURE				
PROFIL ORGANISASI PROFILE ORGANIZATION	GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 102: General Disclosure	102-1	Nama perusahaan <i>Company name</i>	64
		102-2	Kegiatan, Merek, produk, dan jasa <i>Activities, brands, products, and services</i>	77
		102-3	Lokasi kantor pusat <i>Headquarters location</i>	85
		102-4	Lokasi operasi <i>operating location</i>	86
		102-5	Kepemilikan dan bentuk hukum <i>Ownership and legal form</i>	93
		102-6	Pasar yang dilayani <i>Market served</i>	84
		102-7	Skala organisasi <i>Scale organizations</i>	92
		102-8	Informasi mengenai karyawan <i>Employees information</i>	96
		102-9	Rantai pasokan <i>Supply chain</i>	105
		102-10	Perubahan signifikan pada organisasi dan rantai pasokannya <i>Significant changes in the organization and its supply chain</i>	107
STRATEGI STRATEGY	GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 102: General Disclosure	102-11	Pendekatan atau prinsip pencegahan <i>Principle of prevention or approach</i>	189
		102-12	Inisiatif eksternal <i>External initiatives</i>	108
ETIKA DAN INTEGRITAS ETHICS AND INTEGRITY	GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 102: General Disclosure	102-13	Keanggotaan asosiasi <i>Associate membership</i>	108
		102-14	Pernyataan dari pembuat keputusan senior <i>Statement from senior decision makers</i>	26
		102-15	Dampak utama, risiko, dan peluang <i>Key impacts, risks, and opportunities</i>	33
		102-16	Nilai, prinsip, standar, dan norma perilaku <i>Values, principles, standards, and norms of behavior</i>	70
		102-17	Mekanisme untuk saran dan kekhawatiran tentang etika <i>Mechanisms for advice and concerns about ethics</i>	157

Aspek Material atau Pengungkapan Umum <i>Material Aspects or General Disclosure</i>	GRI Standar <i>GRI Standards</i>	Indeks yang dilaporkan <i>Reported Index</i>	Pengungkapan <i>Disclosure</i>	Halaman <i>Page</i>
TATA KELOLA GOVERNANCE	GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 102: General Disclosure	102-18	Struktur tata kelola <i>Governance structure</i>	120
		102-22	Komposisi badan tata kelola tertinggi dan komitennya <i>Composition of the highest governance body and its committees</i>	125
		102-25	Konflik kepentingan <i>Conflicts of interest</i>	166
		102-30	Keefektifan proses manajemen risiko <i>Effectiveness of risk management processes</i>	150
KETERLIBATAN PEMANGKU KEPENTINGAN INVOLVEMENT OF STAKEHOLDERS	GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 102: General Disclosure	102-40	Daftar kelompok pemangku kepentingan <i>List of stakeholder groups</i>	43
		102-41	Perjanjian perundingan kolektif <i>Collective bargaining agreement</i>	43
		102-42	Mengidentifikasi dan memilih pemangku kepentingan <i>Identify and select stakeholders</i>	43
		102-43	Pendekatan terhadap keterlibatan pemangku kepentingan <i>Approach to stakeholder involvement</i>	43
		102-44	Topik utama dan masalah yang dikemukakan <i>The main topics and issues raised</i>	43



Aspek Material atau Pengungkapan Umum <i>Material Aspects or General Disclosure</i>	GRI Standar <i>GRI Standards</i>	Indeks yang dilaporkan <i>Reported Index</i>	Pengungkapan <i>Disclosure</i>	Halaman <i>Page</i>
PRAKTIK PELAPORAN REPORTING PRACTICE	GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 102: General Disclosure	102-45	Entitas yang termasuk dalam laporan keuangan dikonsolidasi <i>Entity included in consolidated financial statements</i>	51
		102-46	Menetapkan isi laporan dan batasan topik <i>Determine contents of report and topic restriction</i>	54
		102-47	Daftar topik material <i>List of material topics</i>	58
		102-48	Penyajian kembali informasi <i>Restatement of information</i>	58
		102-49	Perubahan dalam pelaporan <i>Changes in reporting</i>	58
		102-50	Periode pelaporan <i>The reporting period</i>	53
		102-51	Tanggal laporan terbaru <i>Date of latest report</i>	53
		102-52	Siklus pelaporan <i>Reporting cycles</i>	53
		102-53	Titik kontak untuk pertanyaan mengenai laporan <i>Contact points for questioning reports</i>	61
		102-54	Klaim bahwa pelaporan sesuai dengan Standar GRI <i>Claims that report complies with GRI Standards</i>	52
		102-55	Indeks isi GRI <i>Index of GRI contents</i>	246
		102-56	Assurance oleh pihak eksternal <i>Assurance by external parties</i>	60

Aspek Material atau Pengungkapan Umum <i>Material Aspects or General Disclosure</i>	GRI Standar <i>GRI Standards</i>	Indeks yang dilaporkan <i>Reported Index</i>	Pengungkapan <i>Disclosure</i>	Halaman <i>Page</i>
TOPIK EKONOMI ECONOMIC TOPICS				
KINERJA EKONOMI ECONOMIC PERFORMANCE	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	175
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	175
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	175
	GRI 201: Kinerja Ekonomi GRI 201: Economic Performance	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan <i>Direct economic value that was produced and distributed</i>	175
		201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya <i>Obligation of defined benefit retirement plan and other retirement plans</i>	180
		201-4	Bantuan finansial yang diterima dari pemerintah <i>Financial assistance received from the government</i>	178
DAMPAK EKONOMI TIDAK LANGSUNG ECONOMIC IMPACT OF INDIRECT	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	180
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	180
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	181
	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung GRI 203: Indirect Economic Impacts	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan <i>Infrastructure investment and service support</i>	183
		203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan <i>Significant indirect economic impacts</i>	184



Aspek Material atau Pengungkapan Umum <i>Material Aspects or General Disclosure</i>	GRI Standar <i>GRI Standards</i>	Indeks yang dilaporkan <i>Reported Index</i>	Pengungkapan <i>Disclosure</i>	Halaman <i>Page</i>
PRAKTIK PENGADAAN PROCUREMENT PRACTICES	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	185
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	185
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	185
	GRI 204: Praktik Pengadaan GRI 204: Procurement Practices	204-1	Proporsi pengeluaran untuk pemasok lokal <i>Proportion of expenditure for local suppliers</i>	185
ANTIKORUPSI ANTI CORRUPTION	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	190
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	190
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	190
	GRI 205: Anti Korupsi GRI 205: Anti Corruption	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil <i>Proven corruption incidents and actions taken</i>	190
TOPIK LINGKUNGAN SUBJECT ENVIRONMENT				
MATERIAL MATERIALS	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	196
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	196
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	196
	GRI 301: Material GRI 301: Materials	301-1	Material yang digunakan berdasarkan berat dan volume <i>Materials used by weight and volume</i>	196

Aspek Material atau Pengungkapan Umum <i>Material Aspects or General Disclosure</i>	GRI Standar <i>GRI Standards</i>	Indeks yang dilaporkan <i>Reported Index</i>	Pengungkapan <i>Disclosure</i>	Halaman <i>Page</i>
ENERGI ENERGY	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	200
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	200
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	200
	GRI 302: Energi GRI 302: Energy	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi <i>Energy consumption in organizations</i>	200
		302-3	Intensitas energi <i>Energy intensity</i>	201
		302-4	Pengurangan konsumsi energi <i>Reduction in energy consumption</i>	201
AIR DAN AIR LIMBAH WATER AND EFFLUENTS	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	204
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	204
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	205
	GRI 303: Air dan Air Limbah GRI 303: Water and Effluents	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama <i>Interactions with water as a shared resource</i>	204, 205
		303-2	Pengelolaan dampak terkait pembuangan air <i>Management of water discharge-related impacts</i>	204
		303-3	Pelepasan Air <i>Water discharge</i>	204
		303-4	Konsumsi Air <i>Water consumption</i>	204



Aspek Material atau Pengungkapan Umum <i>Material Aspects or General Disclosure</i>	GRI Standar <i>GRI Standards</i>	Indeks yang dilaporkan <i>Reported Index</i>	Pengungkapan <i>Disclosure</i>	Halaman <i>Page</i>
EMISI EMISSION	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	203
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	203
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	203
	GRI 305: Emisi GRI 305: emissions	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung <i>Direct GHG emissions (Scope 1)</i>	203
		305-2	Emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung <i>Indirect GHG emissions (Scope 2)</i>	203
		305-4	Intensitas emisi GRK <i>Intensity of GHG emissions</i>	203
		305-5	Pengurangan emisi GRK <i>GHG emission reduction</i>	203
	LIMBAH WASTE	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>
103-2			Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	206
103-3			Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	206
GRI 306: Limbah GRI 306: Waste		306-1	Produksi limbah dan dampak signifikan terkait limbah <i>Waste generation and significant waste-related impacts</i>	206
		306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah <i>Management of significant waste-related impacts</i>	206

Aspek Material atau Pengungkapan Umum <i>Material Aspects or General Disclosure</i>	GRI Standar <i>GRI Standards</i>	Indeks yang dilaporkan <i>Reported Index</i>	Pengungkapan <i>Disclosure</i>	Halaman <i>Page</i>
TOPIK SOSIAL SOCIAL TOPIC				
	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	211
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	211
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	211
KEPEGAWAIAN EMPLOYMENT	GRI 401: Kepegawaian GRI 401: Employment	401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan <i>Recruitment of new employees and employee turnover</i>	211,212,213
		401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu <i>Benefits provided to full-time employees that are not given to temporary or part-time employees</i>	214
		401-3	Cuti melahirkan <i>Maternity leave</i>	215
HUBUNGAN KETENAGAKERJAAN LABOR/MANAGEMENT RELATIONS	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	216
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	216
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	216
	GRI 402: Hubungan Ketenagakerjaan GRI 402: Labor/Management Relations	402-1	Periode pemberitahuan minimum terkait perubahan operasional <i>Minimum notice periods regarding operational changes</i>	216



Aspek Material atau Pengungkapan Umum <i>Material Aspects or General Disclosure</i>	GRI Standar <i>GRI Standards</i>	Indeks yang dilaporkan <i>Reported Index</i>	Pengungkapan <i>Disclosure</i>	Halaman <i>Page</i>
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	233
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	233
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	233
KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja GRI 403: Occupational Health and Safety	403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja <i>Occupational health and safety management system</i>	233
		403-3	Pelayanan kesehatan kerja <i>Occupational health services</i>	233
		403-4	Partisipasi pekerja, konsultasi, dan komunikasi tentang kesehatan dan keselamatan kerja <i>Worker participation, consultation, and communication on occupational health and safety</i>	233
		403-5	Pelatihan pekerja tentang kesehatan dan keselamatan <i>Worker training on occupational health and safety kerja</i>	234
		403-9	Cedera terkait pekerjaan <i>Work-related injuries</i>	234
		403-10	Kesehatan yang buruk terkait pekerjaan <i>Work-related ill health</i>	234
		PELATIHAN DAN PENDIDIKAN TRAINING AND EDUCATION	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1
103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>			217
103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>			217
GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan GRI 404: Training and Education	404-2		Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan <i>Programs to improve employee skills and transition assistance programs</i>	217-231
	404-3		Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier <i>Percentage of employees who receive regular reviews towards performance and career development</i>	215

Aspek Material atau Pengungkapan Umum <i>Material Aspects or General Disclosure</i>	GRI Standar <i>GRI Standards</i>	Indeks yang dilaporkan <i>Reported Index</i>	Pengungkapan <i>Disclosure</i>	Halaman <i>Page</i>
MASYARAKAT LOKAL LOCAL COMMUNITY	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	235
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	235
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	235
	GRI 413: Masyarakat Lokal GRI 413: Local Communities in	413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal <i>Operations with the involvement of local communities</i>	235
		413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal <i>Actual operations that potentially have significant negative impact on the local community</i>	235
PEMASARAN DAN PELABELAN MARKETING AND LABELING	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	238
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	238
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	238
	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan GRI 417: Marketing and Labeling	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa <i>Requirements for labeling and product information and service</i>	238
KEPATUHAN SOSIAL EKONOMI COMPLIANCE SOCIOECONOMIC	GRI 103: Pendekatan Manajemen GRI 103: Management Approach	103-1	Penjelasan topik material dan batasannya <i>Explanation of Material Topics and Its Limitations</i>	241
		103-2	Pendekatan manajemen dan komponennya <i>Management approach and its components</i>	241
		103-3	Evaluasi pendekatan manajemen <i>Management approach evaluation</i>	241
	GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi GRI 419: Economic Social Compliance	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi <i>Non-compliance with laws and regulations in the social and economic fields</i>	241



INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP POJK NO.51/POJK.03/2017

Cross Reference Index to POJK NO. 51/POJK.03/2017

No	Deskripsi Description	Indikator Indicator	Halaman Page
1	Penjelasan Strategi Keberlanjutan <i>Explanation Sustainability Strategy</i>	[1]	36
2	Ikhtisar Kinerja Aspek Keberlanjutan <i>Performance Overview of Sustainability Aspects</i>		
a.	Aspek Ekonomi/Economic aspects:	[2.a]	13
1	kuantitas produksi atau jasa yang dijual; <i>the quantity of production or services sold;</i>	[2.a.1]	13
2	pendapatan atau penjualan; <i>the income or sales;</i>	[2.a.2]	13
3	laba atau rugi bersih; <i>net income or loss;</i>	[2.a.3]	13
4	produk ramah lingkungan; dan <i>environmentally friendly products; and</i>	[2.a.4]	13
5	pelibatan pihak lokal yang berkaitan dengan proses bisnis Keuangan Berkelanjutan. <i>involvement of local stakeholders related to Sustainable Finance business processes.</i>	[2.a.5]	13
b.	Aspek Lingkungan Hidup/Environmental aspects:		
1	penggunaan energi (antara lain listrik dan air); <i>the use of energy (including electricity and water);</i>	[2.b.1]	13
2	pengurangan emisi yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup); <i>the reduction of emissions produced (for LJK, Issuers and Public Companies business processes directly related to the Environment);</i>	[2.b.2]	13
3	pengurangan limbah dan effluen (limbah yang telah memasuki lingkungan) yang dihasilkan (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup); atau <i>reduction of waste and effluent (waste has entered the environment) is generated (for LJK, Issuers and Public Companies business processes directly related to the Environment); or</i>	[2.b.3]	13
4	pelestarian keanekaragaman hayati (bagi LJK, Emiten, dan Perusahaan Publik yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan Lingkungan Hidup). <i>preservation of biodiversity (for LJK, Issuers and Public Companies business processes directly related to the Environment).</i>	[2.b.4]	13
c.	Aspek Sosial: Uraian mengenai dampak positif dan negatif penerapan Keuangan Berkelanjutan bagi masyarakat dan lingkungan (termasuk orang, daerah, dan dana). <i>Social Aspects:</i> <i>The descriptions of the positive and negative impacts of the implementation of Sustainable Finance for the community and the environment (including people, regions, and funds).</i>		
3	Profil Singkat Perusahaan: <i>Brief Profile Company:</i>		
a.	visi, misi, dan nilai keberlanjutan <i>vision, mission, and values of sustainability</i>	[3.a]	70

No	Deskripsi Description	Indikator Indicator	Halaman Page
b.	nama, alamat, nomor telepon, nomor faksimil, alamat surat elektronik (e-mail), dan situs/web, serta kantor cabang dan/atau kantor perwakilan <i>name, address, telephone number, fax number, electronic mail address (e-mail), and site/web, as well as branch offices and/or representative offices</i>	[3.b]	64
c.	skala usaha/scale enterprises:		
1	total aset atau kapitalisasi aset, dan total kewajiban (dalam jutaan rupiah) <i>total assets or capitalization of assets, and total liabilities (in millions of rupiah)</i>	[3.c.1]	92
2	jumlah karyawan yang dibagi menurut jenis kelamin, jabatan, usia, pendidikan, dan status ketenagakerjaan <i>the number of employees broken down by gender, occupation, age, education, and employment status</i>	[3.c.2]	92
3	persentase kepemilikan saham (publik dan pemerintah) <i>the percentage of share ownership (public and government)</i>	[3.c.3]	92, 93
4	wilayah operasional <i>operational areas</i>	[3.c.4]	92
d.	penjelasan singkat mengenai produk, layanan, dan kegiatan usaha yang dijalankan <i>a brief description of products, services and business activities conducted</i>	[3.d]	72
e.	keanggotaan pada asosiasi <i>Membership in the association</i>	[3.e]	110, 111
f.	perubahan yang bersifat signifikan, antara lain terkait dengan penutupan atau pembukaan cabang, dan struktur kepemilikan <i>the changes are significant, partly linked to the closure or opening of the branch, and ownership structure</i>	[3.f]	69
4	Penjelasan Direksi memuat: <i>Explanation of Directors includes:</i>		
a.	Kebijakan untuk merespons tantangan dalam pemenuhan strategi keberlanjutan, paling sedikit meliputi: <i>Policy to respond to challenges in the fulfillment of its sustainability strategy, at least include:</i>		
1	penjelasan nilai keberlanjutan Perusahaan <i>a description of the Company's sustainability value</i>	[4.a.1]	29
2	penjelasan respons Perusahaan terhadap isu terkait penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>a description of the Company's response to the issues related to the implementation of Sustainable Finance</i>	[4.a.2]	29
3	penjelasan komitmen pimpinan Perusahaan dalam pencapaian penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>a description of the Company management commitment in achieving the implementation of Sustainable Finance</i>	[4.a.3]	29
4	pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>the achievement of the performance of the implementation of Sustainable Finance</i>	[4.a.4]	31
5	tantangan pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>the challenges of application performance achievement Sustainable Finance</i>	[4.a.5]	27
b.	Penerapan Keuangan Berkelanjutan/Implementation of Sustainable Finance:		
1	pencapaian kinerja penerapan Keuangan Berkelanjutan (ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup) dibandingkan dengan target <i>achievement of performance implementation of Sustainable Finance (economic, social, and environmental) compared with the target</i>	[4.b.1]	30, 31



No	Deskripsi Description	Indikator Indicator	Halaman Page
2	penjelasan prestasi dan tantangan termasuk peristiwa penting selama periode pelaporan (bagi LJK yang diwajibkan membuat Rencana Aksi Keuangan Berkelanjutan) <i>a description of the achievements and challenges including significant events during the reporting period (for LJK are required to create a Plan of Action for Sustainable Finance)</i>	[4.b.2]	29
c. Strategi pencapaian target/Strategies for achieving targets :			
1	pengelolaan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup <i>risk management for the implementation of Sustainable Finance related aspects of economic, social, and environmental</i>	[4.c.1]	36
2	pemanfaatan peluang dan prospek usaha <i>use of the opportunities and prospects</i>	[4.c.2]	36
3	penjelasan situasi eksternal ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup yang berpotensi mempengaruhi keberlanjutan Perusahaan <i>a description of the external situation of economic, social and environmental potential to affect the sustainability of the Company</i>	[4.c.3]	170
5	Tata kelola keberlanjutan memuat <i>Sustainability governance has including</i>		
a.	Uraian tugas Direksi dan Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan <i>Description of duties of Directors and Board of Commissioners, officers, employees and/or work unit be responsible for the implementation of Sustainable Finance</i>	[5.a]	120
b.	Pengembangan kompetensi Direksi, anggota Dewan Komisaris, pegawai, pejabat dan/atau unit kerja yang menjadi penanggung jawab penerapan Keuangan Berkelanjutan. <i>Directors competency development, members of the Board of Commissioners, officers, employees and/or work unit be responsible for the implementation of Sustainable Finance.</i>	[5.b]	148
c.	Penjelasan mengenai prosedur Perusahaan dalam mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko atas penerapan Keuangan Berkelanjutan terkait aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup, termasuk peran Direksi dan Dewan Komisaris dalam mengelola, melakukan telaah berkala, dan meninjau efektivitas proses manajemen risiko Perusahaan. <i>A description of the Company's procedures to identify, measure, monitor, and control the risks for the implementation of Sustainable Finance related aspects of economic, social, and environment, including the role of the Board of Directors and the Board in managing, conducting periodic study and review the effectiveness of the Company's risk management process.</i>	[5.c]	150
d.	Penjelasan mengenai pemangku kepentingan yang meliputi/ <i>A description of the stakeholders include:</i>		
1	keterlibatan pemangku kepentingan berdasarkan hasil penilaian (assessment) manajemen. <i>involvement of stakeholders based on the assessment (assessment) management.</i>	[5.d.1]	42
2	pendekatan yang digunakan Perusahaan dalam melibatkan pemangku kepentingan dalam penerapan Keuangan Berkelanjutan. <i>the approach used by the Company in involving stakeholders in the implementation of Sustainable Finance.</i>	[5.d.2]	45
e.	Permasalahan yang dihadapi, perkembangan, dan pengaruh terhadap penerapan Keuangan Berkelanjutan. <i>Problems, development, and impact on the implementation of Sustainable Finance.</i>	[5.e]	33

No	Deskripsi Description	Indikator Indicator	Halaman Page
6	Kinerja keberlanjutan: Sustainability performance:		
a.	Penjelasan mengenai kegiatan membangun budaya keberlanjutan di Perusahaan <i>A description of the activities of building a culture of sustainability in the Company</i>	[6.a]	37
b.	Uraian mengenai kinerja ekonomi: <i>A description of the economic performance:</i>		
1	perbandingan target dan kinerja produksi, portofolio, target pembiayaan, atau investasi, pendapatan dan laba rugi <i>comparison of performance targets and production, portfolios, financial targets, or investment, revenue and profit and loss</i>	[6.b.1]	175
2	perbandingan target dan kinerja portofolio, target pembiayaan, atau investasi pada instrumen keuangan atau proyek yang sejalan dengan penerapan Keuangan Berkelanjutan. <i>a comparison of the target and the performance of the portfolio, the target financing, or investing in financial instruments or projects in line with the implementation of Sustainable Finance.</i>	[6.b.2]	175
c.	Kinerja sosial/Social Performance		
1	Komitmen Perusahaan untuk memberikan layanan atas produk dan/atau jasa yang setara kepada konsumen. <i>The Company's commitment to deliver products and/or services equivalent to the consumer.</i>	[6.c.1]	191
2	Ketenagakerjaan/Employment:		
a.	Kesetaraan kesempatan bekerja dan ada atau tidaknya tenaga kerja paksa dan tenaga kerja anak <i>Equality of employment opportunities and the presence or absence of forced labor and child labor</i>	[6.c.2a)]	211
b.	Persentase remunerasi pegawai tetap di tingkat terendah terhadap upah minimum regional <i>The percentage of employee remuneration remained at its lowest level against the minimum wage</i>	[6.c.2b)]	182
c.	Pelatihan dan pengembangan kemampuan pegawai. <i>Training and development of employees</i>	[6.c.2d)]	231
2	Masyarakat/Public:		
a.	informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap masyarakat, sekitar termasuk literasi dan inklusi keuangan <i>information on the activities or operational areas that produce positive impacts and negative impacts on society, about including literacy and financial inclusion</i>	[6.c.3a)]	184
b.	mekanisme pengaduan masyarakat serta jumlah pengaduan masyarakat yang diterima dan ditindaklanjuti <i>public complaints mechanisms as well as the number of public complaints received and acted upon</i>	[6.c.3b)]	211





No	Deskripsi <i>Description</i>	Indikator <i>Indicator</i>	Halaman <i>Page</i>
	<p>c. TJSL yang dapat dikaitkan dengan dukungan pada tujuan pembangunan berkelanjutan meliputi jenis dan capaian kegiatan program pemberdayaan masyarakat</p> <p><i>TJSL which can be attributed to the support of the sustainable development goals include the type and achievements of community empowerment program activities</i></p>	[6.c.3)c]	196
	d. Kinerja Lingkungan Hidup/ <i>Environmental Performance:</i>		
1	biaya lingkungan hidup yang dikeluarkan <i>environmental costs incurred</i>	[6.d.1]	237
2	uraian mengenai penggunaan material yang ramah lingkungan, misalnya penggunaan jenis material daur ulang <i>a description of the use of environmentally friendly materials, such as the use of recycled material type</i>	[6.d.2]	194
3	uraian mengenai penggunaan energi, paling sedikit memuat: <i>a description of the use of energy, at least contain:</i>		
a.	jumlah dan intensitas energi yang digunakan <i>the number and the intensity of energy use</i>	[6.d.3)a]	199
b.	upaya dan pencapaian efisiensi energi yang dilakukan termasuk penggunaan sumber energi terbarukan <i>the efforts and achievements made energy efficiency including the use of renewable energy sources</i>	[6.d.3)b]	199
	Kinerja Lingkungan Hidup bagi Perusahaan yang proses bisnisnya berkaitan langsung dengan lingkungan hidup <i>Environmental Performance for Company that its business processes are directly related to the environment:</i>		
	e. <i>Environmental Performance for Company that its business processes are directly related to the environment:</i>		
1	kinerja sebagaimana dimaksud dalam huruf d <i>performance as referred to in paragraph d</i>	[6.e.1]	N/A
2	informasi kegiatan atau wilayah operasional yang menghasilkan dampak positif dan dampak negatif terhadap lingkungan hidup sekitar, terutama upaya peningkatan daya dukung ekosistem <i>information on the activities or operational areas that produce positive impacts and negative impacts on the surrounding environment, particularly efforts to increase the carrying capacity of ecosystems</i>	[6.e.2]	N/A
3	keanekaragaman hayati, paling sedikit memuat: <i>biodiversity least contain:</i>		
a.	dampak dari wilayah operasional yang dekat atau berada di daerah konservasi atau memiliki keanekaragaman hayati <i>the impact of operational areas near or in the area of conservation or biodiversity</i>	[6.e.3)a]	N/A
b.	usaha konservasi keanekaragaman hayati yang dilakukan, mencakup perlindungan spesies flora atau fauna <i>biodiversity conservation efforts undertaken, including the protection of endangered species of flora or fauna</i>	[6.e.3)b]	N/A
4	emisi, paling sedikit memuat: <i>emissions at least contain:</i>		
a.	jumlah dan intensitas emisi yang dihasilkan berdasarkan jenisnya <i>the number and intensity of emissions produced by type</i>	[6.e.4)a]	202


No	Deskripsi Description	Indikator Indicator	Halaman Page
5	limbah dan efluen, paling sedikit memuat: <i>sewage and effluent least contain:</i>		
a.	jumlah limbah dan efluen yang dihasilkan berdasarkan jenis <i>the amount of waste and effluent generated by type</i>	[6.e.5a)]	206
b.	mekanisme pengelolaan limbah dan efluen <i>waste and effluent management mechanism</i>	[6.e.5b)]	206
c.	tumpahan yang terjadi (jika ada) <i>spill that occurred (if any)</i>	[6.e.5c)]	206
6	jumlah dan materi pengaduan lingkungan hidup yang diterima dan diselesaikan. <i>the number and material environmental complaints received and resolved.</i>	[6.e.6)]	N/A
f.	Tanggung jawab pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan: <i>The responsibility of the development of products and/or services Sustainable Finance:</i>		
1	inovasi dan pengembangan produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan <i>innovation and development of products and/or services Sustainable Finance</i>	[6.f.1)]	238
2	jumlah dan persentase produk dan jasa yang sudah dievaluasi keamanannya bagi pelanggan <i>the number and percentage of products and services that have evaluated its safety for customers</i>	[6.f.2)]	238
3	dampak positif dan dampak negatif yang ditimbulkan dari produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan dan proses distribusi, serta mitigasi yang dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif <i>the impact of the positive and negative impacts of the products and/or services of Sustainable Finance and distribution processes, as well as mitigation undertaken to overcome the negative impact</i>	[6.f.3)]	238
4	jumlah produk yang ditarik kembali dan alasannya <i>the number of products recalled and why</i>	[6.f.4)]	238
5	survei kepuasan pelanggan terhadap produk dan/atau jasa Keuangan Berkelanjutan <i>survey of customer satisfaction with the products and/or services Sustainable Finance</i>	[6.f.5)]	238
7	Verifikasi tertulis dari pihak independen, jika ada... <i>Written verification from independent parties, if they are...</i>	[7]	60





INDEKS REFERENSI SILANG TERHADAP TUJUAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Cross Reference Index to Sustainable Development Goals

SDG's	Tema Bisnis Business Theme	Relevansi GRI Standard Relevance to GRI Standard	GRI Index	Topik Topic	Halaman Page
TANPA KEMISKINAN NO POVERTY Tidak ada kemiskinan dalam bentuk apapun di seluruh penjuru dunia <i>There is no poverty of any kind in all parts of the world</i> 	Penghasilan, upah, dan tunjangan	GRI 201: Kinerja Ekonomi <i>GRI 201: Economic Performance</i>	201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya <i>Obligation of defined benefit retirement plan and other retirement plans</i>	31
		GRI 401: Kepegawaian <i>GRI 401: Employment</i>	401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu <i>Benefits provided to full-time employees that are not given to temporary or part-time employees</i>	214
	Pembangunan ekonomi di wilayah kemiskinan tertinggi	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>GRI 203: Indirect Economic Impacts</i>	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan <i>Infrastructure investment and service support</i>	183
		GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>GRI 203: Indirect Economic Impacts</i>	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan <i>Significant indirect economic impacts</i>	184
TANPA KELAPARAN ZERO HUNGER Tidak ada lagi kelaparan, mencapai ketahanan pangan, perbaikan nutrisi, serta mendorong budidaya pertanian yang berkelanjutan. <i>No more hunger, achieve food security, improve nutrition, and encourage sustainable agricultural cultivation.</i> 	Perbaikan kesehatan di wilayah kemiskinan tertinggi	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>GRI 203: Indirect Economic Impacts</i>	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan <i>Infrastructure investment and service support</i>	183
	Kinerja Ekonomi	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>GRI 203: Indirect Economic Impacts</i>	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan <i>Significant indirect economic impacts</i>	184
		GRI 201: Kinerja Ekonomi <i>GRI 201: Economic Performance</i>	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan <i>Direct economic value that was produced and distributed</i>	177
Komunitas Lokal	GRI 413: Masyarakat Lokal <i>GRI 413: Local Communities in</i>	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal <i>Actual operations that potentially have significant negative impact on the local community</i>	235	

SDG's	Tema Bisnis Business Theme	Relevansi GRI Standard Relevance to GRI Standard	GRI Index	Topik Topic	Halaman Page
<p>KEHIDUPAN SEHAT DAN SEJAHTERA GOOD HEALTH AND WELL BEING</p> <p>Menjamin kehidupan yang sehat serta mendorong kesejahteraan hidup untuk seluruh masyarakat di segala umur. <i>Ensure a healthy life and promote the welfare of life for all people at all ages.</i></p> 	Akses terhadap Obat-obatan	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>GRI 203: Indirect Economic Impacts</i>	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan <i>Significant indirect economic impacts</i>	184
	Kualitas Air	GRI 303: Air dan Air Limbah <i>GRI 303: Water and Effluents</i>	303-2	Pengambilan Air <i>Water withdrawal</i>	204
			303-3	Pelepasan Air <i>Water discharge</i>	204
			303-4	Konsumsi Air <i>Water consumption</i>	204
	Kualitas udara	GRI 305: Emisi <i>GRI 305: emissions</i>	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung <i>Direct GHG emissions (Scope 1)</i>	201-202
			305-2	Emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung <i>Indirect GHG emissions (Scope 2)</i>	201-202
			305-5	Pengurangan emisi GRK <i>GHG emission reduction</i>	201-202
	Kesehatan dan Keselamatan Kerja	GRI 403: Kesehatan dan Keselamatan Kerja <i>GRI 403: Occupational Health and Safety</i>	403-9	Cedera terkait pekerjaan <i>Work-related injuries</i>	234
			403-10	Kesehatan yang buruk terkait pekerjaan <i>Work-related ill health</i>	234
	Kepatuhan terhadap undang-undang	GRI 307: Kepatuhan Lingkungan <i>GRI 307: Environmental Compliance</i>	307-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan tentang lingkungan hidup <i>Non-compliance with environmental laws and regulations</i>	211
419-1			Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi <i>Non-compliance with laws and regulations in the social and economic fields</i>	241	





SDG's	Tema Bisnis Business Theme	Relevansi GRI Standard Relevance to GRI Standard	GRI Index	Topik Topic	Halaman Page
PENDIDIKAN BERKUALITAS QUALITY EDUCATION Menjamin pemerataan pendidikan yang berkualitas dan meningkatkan kesempatan belajar untuk semua orang. <i>Ensure equitable quality education and increase learning opportunities for all</i>	Pelatihan dan Pendidikan	GRI 404: Pelatihan dan Pendidikan GRI 404: <i>Training and Education</i>	404-2	Program untuk meningkatkan keterampilan karyawan dan program bantuan peralihan <i>Programs to improve employee skills and transition assistance programs</i>	217
			404-3	Persentase karyawan yang menerima tinjauan rutin terhadap kinerja dan pengembangan karier <i>Percentage of employees who receive regular reviews towards performance and career development</i>	215
	Komunitas Lokal	GRI 413: Masyarakat Lokal GRI 413: <i>Local Communities in</i>	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal <i>Actual operations that potentially have significant negative impact on the local community</i>	235
KESETARAAN GENDER GENDER EQUALITY Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan kaum ibu dan perempuan. <i>Achieve gender equality and empower mothers and women</i>	Kesetaraan Pria dan	GRI 401: Kepegawaian GRI 401: <i>Employment</i>	401-3	Cuti melahirkan <i>Maternity leave</i>	215
			401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan <i>Recruitment of new employees and employee turnover</i>	211
					

SDG's	Tema Bisnis Business Theme	Relevansi GRI Standard Relevance to GRI Standard	GRI Index	Topik Topic	Halaman Page
<p>AIR BERSIH DAN SANITASI LAYAK <i>CLEAN WATER AND SANITATION</i></p> <p>Menjamin ketersediaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua orang <i>Ensuring the availability of clean water and sustainable sanitation for everyone.</i></p> 	Air dan Limbah	<p>GRI 303: Air dan Air Limbah <i>GRI 303: Water and Effluents</i></p>	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama <i>Interactions with water as a shared resource</i>	204
			303-2	Pengelolaan dampak terkait pembuangan air <i>Management of water discharge-related impacts</i>	204
			303-3	Peepasan Air <i>Water discharge</i>	204
			303-4	Konsumsi Air <i>Water consumption</i>	204
<p>ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU <i>AFFORDABLE AND CLEAN ENERGY</i></p> <p>Menjamin akses terhadap sumber energi yang terjangkau, terpercaya, berkelanjutan dan modern untuk semua orang. <i>Ensure access to affordable, reliable, sustainable and modern energy sources for everyone.</i></p> 	Efisiensi energy dan energy terbarukan	<p>GRI 302: Energi <i>GRI 302: Energy</i></p>	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi <i>Energy consumption in organizations</i>	200,201
			302-3	Intensitas energi <i>Energy intensity</i>	200,201
			302-4	Pengurangan konsumsi energi <i>Reduction in energy consumption</i>	200,201
		<p>GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>GRI 203: Indirect Economic Impacts</i></p>	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan <i>Infrastructure investment and service support</i>	183



SDG's	Tema Bisnis Business Theme	Relevansi GRI Standard Relevance to GRI Standard	GRI Index	Topik Topic	Halaman Page	
PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DECENT WORK AND ECONOMIC GROWTH Mendukung perkembangan ekonomi yang berkelanjutan, lapangan kerja yang produktif serta pekerjaan yang layak untuk semua orang. <i>Support sustainable economic development, productive employment and decent work for all.</i>	Penghasilan, upah, dan tunjangan	GRI 202: <i>Keberadaan Pasar</i>	202-1	Rasio standar upah karyawan entry-level berdasarkan jenis kelamin terhadap upah minimum regional <i>Ratios of standard entry level wage by gender compared to local minimum wage</i>	182	
			401-1	Perekrutan karyawan baru dan pergantian karyawan <i>Recruitment of new employees and employee turnover</i>	215	
			401-2	Tunjangan yang diberikan kepada karyawan purnawaktu yang tidak diberikan kepada karyawan sementara atau paruh waktu <i>Benefits provided to full-time employees that are not given to temporary or part-time employees</i>	214	
	Kepegawaian		GRI 401: Kepegawaian <i>GRI 401: Employment</i>	401-3	Cuti melahirkan <i>Maternity leave</i>	215
				403-1	Sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja <i>Occupational health and safety management system</i>	233
				403-3	Pelayanan kesehatan kerja <i>Occupational health services</i>	233
				403-8	Pekerja yang dilindungi oleh sistem manajemen kesehatan dan keselamatan kerja <i>Workers covered by an occupational health and safety management system</i>	235
				403-9	Cedera terkait pekerjaan <i>Work-related injuries</i>	234
				403-10	Kesehatan yang buruk terkait pekerjaan <i>Work-related ill health</i>	234
				Pertumbuhan Ekonomi		GRI 201: Kinerja Ekonomi <i>GRI 201: Economic Performance</i>
201-3	Kewajiban program pensiun manfaat pasti dan program pensiun lainnya <i>Obligation of defined benefit retirement plan and other retirement plans</i>	31				
	Indirect impact on job creation	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>GRI 203: Indirect Economic Impacts</i>	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan <i>Significant indirect economic impacts</i>	184	





SDG's	Tema Bisnis Business Theme	Relevansi GRI Standard Relevance to GRI Standard	GRI Index	Topik Topic	Halaman Page
INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR <i>INDUSTRY, INNOVATION AND INFRASTRUCTURE</i> Membangun infrastruktur yang berkualitas, mendorong peningkatan industry yang berkelanjutan serta mendorong inovasi. <i>Build quality infrastructure, encourage sustainable industrial improvement and encourage innovation.</i>	Pembangunan Infrastruktur di wilayah kemiskinan tertinggi	GRI 201: Kinerja Ekonomi <i>GRI 201: Economic Performance</i>	201-1	Nilai ekonomi langsung yang dihasilkan dan didistribusikan <i>Direct economic value that was produced and distributed</i>	198-199
			203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan <i>Infrastructure investment and service support</i>	183
			9 INDUSTRI, INOVASI DAN INFRASTRUKTUR 	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>GRI 203: Indirect Economic Impacts</i>	203-2
203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan <i>Infrastructure investment and service support</i>	186			
BERKURANGNYA KESENJANGAN <i>REDUCED INEQUALITIES</i> Mengurangi kesenjangan di dalam dan antar Negara. <i>Reducing disparities within and between countries.</i>	Pengembangan ekonomi di daerah miskin	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>GRI 203: Indirect Economic Impacts</i>	203-2	Dampak ekonomi tidak langsung yang signifikan <i>Significant indirect economic impacts</i>	186
			10 BERKURANGNYA KESENJANGAN 	GRI 405: Keberagaman dan Kesempatan yang Setara <i>GRI 405: Diversity and Equal Opportunity</i>	405-2



SDG's	Tema Bisnis Business Theme	Relevansi GRI Standard Relevance to GRI Standard	GRI Index	Topik Topic	Halaman Page	
KOTA DAN PEMUKIMAN YANG BERKELANJUTAN <i>SUSTAINABLE CITIES AND COMMUNITIES</i> Membangun kota-kota serta pemukiman yang berkualitas, aman dan berkelanjutan. <i>Build quality, safe and sustainable cities and communities.</i>	Investasi Infrastruktur	GRI 203: Dampak Ekonomi Tidak Langsung <i>GRI 203: Indirect Economic Impacts</i>	203-1	Investasi infrastruktur dan dukungan layanan <i>Infrastructure investment and service support</i>	183	
					KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB <i>RESPONSIBLE CONSUMPTION AND PRODUCTION</i> Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan <i>Ensure sustainable production and consumption patterns</i>	GRI 204: Praktik Pengadaan <i>GRI 204: Procurement Practices</i>
12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNG JAWAB 	Efisiensi energi	GRI 302: Energi <i>GRI 302: Energy</i>	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi <i>Energy consumption in organizations</i>	200-201	
				302-3	Intensitas energi <i>Energy intensity</i>	200-201
				302-4	Pengurangan konsumsi energi <i>Reduction in energy consumption</i>	200-201


SDG's	Tema Bisnis Business Theme	Relevansi GRI Standard Relevance to GRI Standard	GRI Index	Topik Topic	Halaman Page
	Efisiensi Air	GRI 303: Air dan Air Limbah GRI 303: Water and Effluents	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama <i>Interactions with water as a shared resource</i>	204
			303-2	Pengelolaan dampak terkait pembuangan air <i>Management of water discharge-related impacts</i>	204
			303-3	Pelepasan Air <i>Water discharge</i>	204
			303-4	Konsumsi Air <i>Water consumption</i>	204
	Kualitas Udara	GRI 305: Emisi GRI 305: emissions	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung <i>Direct GHG emissions (Scope 1)</i>	202-203
			305-2	Emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung <i>Indirect GHG emissions (Scope 2)</i>	202-203
			305-4	Intensitas emisi GRK <i>Intensity of GHG emissions</i>	202-203
			305-5	Pengurangan emisi GRK <i>GHG emission reduction</i>	202-203
	Limbah	GRI 306: Limbah GRI 306: Waste	306-1	Produksi limbah dan dampak signifikan terkait limbah <i>Waste generation and significant waste-related impacts</i>	206
			306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah <i>Management of significant waste-related impacts</i>	206
	Pemasaran dan Pelabelan	GRI 417: Pemasaran dan Pelabelan GRI 417: Marketing and Labeling	417-1	Persyaratan untuk pelabelan dan informasi produk dan jasa <i>Requirements for labeling and product information and service</i>	238



SDG's	Tema Bisnis Business Theme	Relevansi GRI Standard Relevance to GRI Standard	GRI Index	Topik Topic	Halaman Page		
<p>PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM <i>CLIMATE ACTION</i></p> <p>Bertindak cepat untuk memerangi perubahan iklim dan dampaknya. <i>Acting swiftly to combat climate change and its impacts.</i></p> 	Efisiensi Energi	<p>GRI 302: Energi <i>GRI 302: Energy</i></p>	302-1	Konsumsi energi dalam organisasi <i>Energy consumption in organizations</i>	200		
			302-3	Intensitas energi <i>Energy intensity</i>	200		
			302-4	Pengurangan konsumsi energi <i>Reduction in energy consumption</i>	200		
			305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung <i>Direct GHG emissions (Scope 1)</i>	202-203		
			305-2	Emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung <i>Indirect GHG emissions (Scope 2)</i>	202-203		
	Kualitas Udara	<p>GRI 305: Emisi <i>GRI 305: emissions</i></p>	305-4	Intensitas emisi GRK <i>Intensity of GHG emissions</i>	202-203		
			305-5	Pengurangan emisi GRK <i>GHG emission reduction</i>	202-203		
			Air dan Limbah Air	<p>GRI 303: Air dan Air Limbah <i>GRI 303: Water and Effluents</i></p>	303-1	Interaksi dengan air sebagai sumber daya bersama <i>Interactions with water as a shared resource</i>	204-205
					303-2	Pengelolaan dampak terkait pembuangan air <i>Management of water discharge-related impacts</i>	204-205
					303-2	Pengambilan Air <i>Water withdrawal</i>	204-205
<p>14 EKOSISTEM LAUTAN <i>LIVE ON WATER</i></p> <p>Melestarikan dan menggunakan samudera, lautan serta sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pembangunan berkelanjutan. <i>Conserve and sustainably use oceans, oceans and marine resources for sustainable development.</i></p> 			303-3	Pelepasan Air <i>Water discharge</i>	204-205		
			303-4	Konsumsi Air <i>Water consumption</i>	204-205		

SDG's	Tema Bisnis Business Theme	Relevansi GRI Standard Relevance to GRI Standard	GRI Index	Topik Topic	Halaman Page
EKOSISTEM DARATAN LIFE ON LAND Melindungi, mengembalikan, dan meningkatkan keberlangsungan pemakaian ekosistem darat, mengelola hutan secara berkelanjutan, mengurangi tanah tandus serta tukar guling tanah. <i>Protect, restore and increase the sustainable use of terrestrial ecosystems, manage forests sustainably, reduce</i>	Emisi	GRI 305: Emisi GRI 305: Emissions	305-1	Emisi GRK (Cakupan 1) langsung <i>Direct GHG emissions (Scope 1)</i>	202-203
			305-2	Emisi GRK (Cakupan 2) tidak langsung <i>Indirect GHG emissions (Scope 2)</i>	202-203
			305-4	Intensitas emisi GRK <i>Intensity of GHG emissions</i>	202-203
			305-5	Pengurangan emisi GRK <i>GHG emission reduction</i>	202-203
			306-1	Produksi limbah dan dampak signifikan terkait limbah <i>Waste generation and significant waste-related impacts</i>	206
 15 EKOSISTEM DARATAN	Limbah	GRI 306: Limbah GRI 306: Waste	306-2	Pengelolaan dampak signifikan terkait limbah <i>Management of significant waste-related impacts</i>	206
			205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil <i>Proven corruption incidents and actions taken</i>	190
PERDAMAIAN, Keadilan, Kelembagaan yang Tangguh PEACE, JUSTICE AND STRONG INSTITUTIONS Mendorong masyarakat yang damai dan inklusif untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses keadilan bagi semua orang, serta membangun institusi yang efektif, akuntabel, dan inklusif di seluruh tingkatan. <i>Promote peaceful and inclusive societies for sustainable development, provide access to justice for all, and build effective, accountable and inclusive institutions at all levels.</i>	Anti Korupsi	GRI 205: Anti Korupsi GRI 205: Anti Corruption	205-3	Insiden korupsi yang terbukti dan tindakan yang diambil <i>Proven corruption incidents and actions taken</i>	190
	Kesetaraan	GRI 405: Keberagaman dan Kesempatan yang Setara GRI 405: Diversity and Equal Opportunity	405-2	Rasio gaji pokok dan remunerasi perempuan terhadap laki-laki <i>Ratio of basic salary and remuneration of women to men</i>	184
			GRI 419: Kepatuhan Sosial Ekonomi GRI 419: Economic Social Compliance	419-1	Ketidakpatuhan terhadap undang-undang dan peraturan di bidang sosial dan ekonomi <i>Non-compliance with laws and regulations in the social and economic fields</i>
 16 PERDAMAIAN, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh					



SDG's	Tema Bisnis Business Theme	Relevansi GRI Standard Relevance to GRI Standard	GRI Index	Topik Topic	Halaman Page
KEMITRAAN UNTUK TUJUAN PARTNERSHIP FOR THE GOALS Memperkuat perangkat-perangkat Implementasi (means of implementation) dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan. <i>Strengthen means of implementation and revitalize global partnerships for sustainable development</i>	Inisiatif eksternal	GRI 102: Pengungkapan Umum GRI 102: <i>General Disclosure</i>	102-12	Inisiatif Eksternal	108
			413-1	Operasi dengan keterlibatan masyarakat lokal <i>Operations with the involvement of local communities</i>	235
17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN 	Masyarakat Lokal	GRI 413: Masyarakat Lokal GRI 413: <i>Local Communities in</i>	413-2	Operasi yang secara aktual dan yang berpotensi memiliki dampak negatif signifikan terhadap masyarakat lokal <i>Actual operations that potentially have significant negative impact on the local community</i>	235

Halaman ini sengaja dikosongkan
This page is intentionally left blank.



LEMBAR UMPAN BALIK

Profil

Nama :
.....

Institusi/Perusahaan :
.....

Telp/HP :
.....

Kategori Pemangku Kepentingan

- Pelanggan
- Pemegang saham
- Pegawai
- Pemerintah dan pembuat kebijakan
- Mitra kerja, supplier
- Media massa
- Masyarakat, komunitas lokal
- Lain-lain, sebutkan.....

Mohon pilih jawaban yang paling sesuai dengan memberikan tanda ✓ pada lingkaran jawaban:

1. Apakah laporan ini sudah menggambarkan kinerja JAMKRINDO dalam berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan?
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Tidak Tahu
2. Apakah laporan ini bermanfaat bagi Anda?
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Tidak Tahu
3. Apakah laporan ini mudah dimengerti?
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Tidak Tahu
4. Apakah laporan ini menarik?
 - Setuju
 - Tidak Setuju
 - Tidak Tahu

Mohon menuliskan jawaban sesuai dengan pendapat Anda:

1. Bagian informasi mana yang paling berguna dan menarik?
.....
.....
.....
2. Bagian informasi mana yang kurang berguna sehingga perlu dilakukan perbaikan?
.....
.....
.....
3. Apakah data yang disajikan telah transparan, dapat dipercaya, dan berimbang?
.....
.....
.....
4. Saran/usul/komentar untuk perbaikan laporan ke depan:
.....
.....
.....

Kami sangat menghargai umpan balik yang Anda berikan. Untuk itu, mohon mengirimkan lembar umpan balik ini ke:
 Divisi Sekretaris Perusahaan
 PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)
 Gedung Jamkrindo
 Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran
 Jakarta Pusat 10610, Indonesia
 Telepon : +62 21 6540335
 Faksimile : +62 21 6540344, 6540348
 E-mail : sekper@jamkrindo.co.id
 Website : <https://jamkrindo.co.id/>

Terima kasih telah membaca Laporan Keberlanjutan PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) 2020. Untuk mewujudkan kualitas pelaporan yang lebih baik pada tahun mendatang, kami mengharapkan usulan, kritik dan saran dari pembaca dan pengguna laporan ini. Perusahaan berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kinerja keberlanjutan dan memberikan yang terbaik untuk pemangku kepentingan.

FEEDBACK SHEETS

Profil

Name :
.....

Institution/Company :
.....

Phone/HP :
.....

Stakeholders Category

- Customers
- Shareholders
- Employees
- Government and policymakers
- Business partners, suppliers
- Mass media
- Community, local community
- Others, please specify.....

Please choose the best suitable answer by giving a checklist (✓) in the answer circle:

1. Does this report have described the performance of JAMKRINDO in contributing to the sustainable development?
 - Agree
 - Disagree
 - Don't Know
2. Is this report useful to you?
 - Agree
 - Disagree
 - Don't Know
3. Is this report easy to understand?
 - Agree
 - Disagree
 - Don't Know
4. Is this report interesting?
 - Agree
 - Disagree
 - Don't Know

Please write the answers based on your opinion

1. Which part of information that is the most useful and interesting?
.....
.....
.....
.....
2. Which part of information that is less useful and needs improvements?
.....
.....
.....
.....
3. Is the data presented in a transparent, trustworthy, and fair manner?
.....
.....
.....
.....
4. Kindly provide your advice/suggestion/comment for the improvement of report in the future:
.....
.....
.....
.....

We really appreciate your feedback. Therefore, please send this feedback sheets to:

Corporate Secretay Division
PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero)
Gedung Jamkrindo
Jl. Angkasa Blok B-9 Kav.6 Kota Baru, Bandar Kemayoran
Jakarta Pusat 10610, Indonesia
Telepon : +62 21 6540335
Faksimile : +62 21 6540344, 6540348
E-mail : sekper@jamkrindo.co.id
Website : <https://jamkrindo.co.id/>

We would like to express our gratitude for reading PT Jaminan Kredit Indonesia (Persero) Sustainability Report 2020. To realize a better quality of reporting in the coming years, we expect suggestions, criticisms and advices from readers and users of this report. JAMKRINDO is committed to continuously improve the sustainability performance and provide the best for the stakeholders.

2020


LAPORAN KEBERLANJUTAN SUSTAINABILITY REPORT




A member of **IFG**


Gedung Jamkrindo

Jl. Angkasa B-9 Kavling 6
Kota Baru Bandar - Kemayoran
Jakarta Pusat, 10610

 (021) 6540335

 (021) 6540335

 contact@jamkrindo.co.id

 www.jamkrindo.co.id

